SALINAN

BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
MASTERPLAN SMART CITY TAHUN 2026-2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang :
a. bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di era digital diperlukan inovasi pembangunan daerah yang responsif, efektif, efisien dan transparan melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang terintegrasi teknologi informasi dalam bentuk *smart city*;
b. bahwa untuk mewujudkan *smart city* yang selaras dengan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional serta agenda transformasi digital diperlukan pedoman dalam bentuk *masterplan smart city* sebagai dasar pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkelanjutan;
c. bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 100 Tahun 2018 tentang *Masterplan Smart City* Tahun 2018-2023 sudah tidak memiliki daya laku sehingga perlu diatur baru;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Masterplan Smart City* Tahun 2026-2034;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *MASTERPLAN SMART CITY* TAHUN 2026-2034.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. *Masterplan Smart City* adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang memuat arah kebijakan, strategi, program, dan tahapan implementasi secara menyeluruh, sistematis, dan terintegrasi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengembangan *Smart City*.
2. *Smart City* adalah konsep pengelolaan kota yang memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan dalam memberikan pelayanan publik yang dapat meningkatkan kualitas hidup warga.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penggunaan dan pengembangan teknologi informasi sesuai dengan kondisi sumber daya, kebutuhan pelayanan publik, serta sesuai dengan karakteristik dan potensi pengembangan Daerah.
(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan:
    a. perencanaan penyelenggaraan e-Government yang terintegrasi di seluruh Perangkat Daerah;
    b. peta jalan peningkatan dan implementasi *Smart City* baik dari sisi infrastruktur, aplikasi, keamanan informasi dengan tahapan yang jelas dan terarah; dan
    c. distribusi pembagian tugas penyelenggaraan *Smart City* antara Perangkat Daerah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat.

Pasal 3

(1) *Masterplan Smart City* Tahun 2026-2034 disusun dengan sistematika:

Buku I	:	Analisis Strategis *Smart City* Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026-2034;
Buku II	:	*Masterplan Smart City* Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026-2034;
Buku III	:	*Executive Summary Masterplan Smart City* Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026-2034;
Buku IV	:	*Quickwin Smart City* Kabupaten Kulon Progo Tahun 2026-2034.

(2) *Masterplan Smart City* Tahun 2026-2034 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) *Masterplan Smart City* berlaku selama 9 (sembilan) tahun dan dapat dilakukan peninjauan.
(2) Peninjauan Masterplan Smart City sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu dibutuhkan.
(3) Peninjauan Masterplan Smart City sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan *Masterplan Smart City* bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 4 Februari 2026

BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal 4 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

Cap/ttd

TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026 NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
MASTERPLAN SMART CITY TAHUN 2026-2034

MASTERPLAN SMART CITY TAHUN 2026-2034

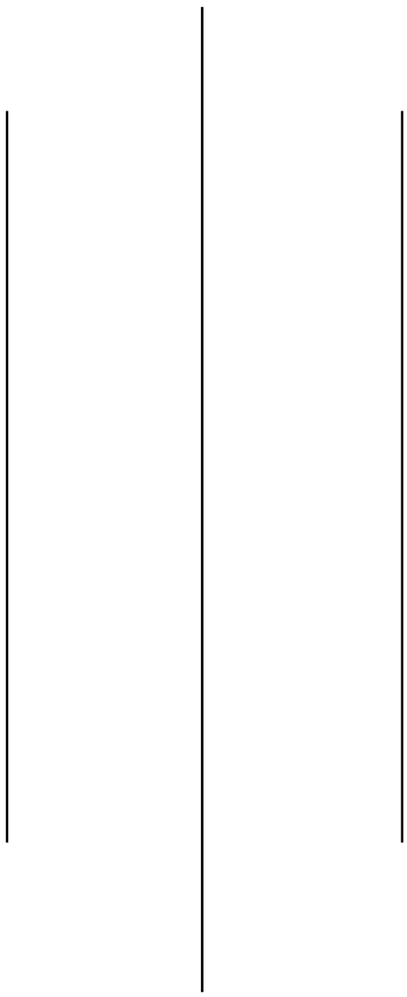

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BUKU I

ANALISIS STRATEGIS SMART CITY DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2026 - 2034

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga proses penyusunan Buku *Masterplan Smart City* Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2034 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, komunitas, dan sektor swasta yang memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih cerdas, inklusif, dan berkelanjutan.

Transformasi menuju *Smart City* bukan sekadar tren global, melainkan sebuah keniscayaan dalam menghadapi tantangan zaman. Kota-kota besar seperti Tokyo, Seoul, Amsterdam, dan Singapura telah membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi dengan partisipasi masyarakat mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas hidup warganya. Kabupaten Kulon Progo pun mengambil langkah strategis untuk tidak hanya mengikuti arus perubahan, tetapi menjadi pelopor inovasi daerah yang berakar pada kearifan lokal dan berorientasi pada masa depan.

Melalui *Masterplan* ini, Kabupaten Kulon Progo menetapkan arah pembangunan berbasis enam dimensi *Smart City*: *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan *Smart Environment*. Visi yang ingin diwujudkan adalah: " **Terwujudnya Kulon Progo yang makmur, mandiri, religius, berbudaya, dan berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi cerdas, inovasi, dan kolaborasi yang inklusif**." Visi ini menjadi landasan dalam merancang program, kebijakan, dan infrastruktur digital yang selaras dengan RPJMD, SNI ISO 37122, dan agenda pembangunan nasional.

Akhir kata, semoga Buku *Masterplan Smart City* ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi sumber inspirasi, rujukan strategis, dan pemantik kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan Kulon Progo yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing melalui pendekatan *Smart City*.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Kabupaten Kulon Progo, September 2025

Bupati Kulon Progo

Dr. H. R. Agung Setyawan, S.T., M.Sc., MM

SAMBUTAN DEWAN *SMART CITY*

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) *Smart City* hingga penyusunan Buku *Masterplan Smart City* Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2034 dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Smart City merupakan wujud nyata dari inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi, data, dan kolaborasi lintas sektor. Konsep ini hadir sebagai jawaban atas berbagai tantangan pembangunan daerah, mulai dari efisiensi layanan, peningkatan partisipasi masyarakat, hingga penguatan daya saing daerah di era digital. Oleh karena itu, seluruh jajaran perangkat daerah, camat, dan pemangku kepentingan di Kabupaten Kulon Progo telah menyatakan komitmen bersama untuk mendukung transformasi menuju Kabupaten Cerdas yang inklusif dan berkelanjutan.

Dewan *Smart City* Kabupaten Kulon Progo berperan sebagai pengarah dan pengawal strategi, memastikan bahwa setiap langkah pembangunan *Smart City* senantiasa selaras dengan visi daerah, RPJMD, dan standar nasional maupun internasional. Kami percaya bahwa sinergi antara perencanaan, pengembangan, dan implementasi akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan ekosistem digital yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Harapan kami, melalui *Masterplan* ini, Kabupaten Kulon Progo dapat membangun fondasi yang kuat untuk menghadirkan layanan publik yang lebih cerdas, meningkatkan produktivitas sumber daya, serta memperkuat identitas dan daya saing daerah di tingkat nasional maupun global.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Kabupaten Kulon Progo, September 2025
Sekretaris Dewan *Smart City*

.....

TABLE OF CONTENTS

KATA PENGANTAR ..... *ii*

SAMBUTAN DEWAN SMART CITY ..... *iii*

DAFTAR GAMBAR ..... *vi*

DAFTAR TABEL ..... *vii*

BAB I *1*

PENDAHULUAN *1*

1.1 Latar Belakang **1**

1.2 Tentang Kabupaten Kulon Progo **2**

1.3 Tujuan Masterplan **3**

BAB II ANALISIS MASA DEPAN *4*

2.1 Analisis Pembangunan Daerah **4**

2.1.1 Visi Kabupaten Kulon Progo 4

2.2 Analisis Kondisi Eksternal **18**

2.2.1 Analisis Politik Kabupaten Kulon Progo 18

2.2.2 Analisis Ekonomi Kabupaten Kulon Progo 19

2.2.3 Analisis Sosial Kabupaten Kulon Progo 20

2.2.4 Analisis Teknologi Kabupaten Kulon Progo 21

2.2.5 Analisis Lingkungan Kabupaten Kulon Progo 22

2.2.6 Analisis Legal Kabupaten Kulon Progo 23

BAB III ANALISIS KESIAPAN DAERAH *25*

3.1 Nature **25**

3.2 Structure **28**

3.2.1 Kualitas Sumber Daya Manusia (People) 28

3.2.2 Kualitas Sumber Daya Pemerintahan (Managerial) 35

3.2.3 Kapasitas Keuangan Daerah (Capital) 41

3.3 Infrastructure **45**

3.3.1 Analisis Kesiapan Infrastruktur Fisik Daerah 45

3.3.2 Analisis Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah 52

3.3.3 Analisis Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah 53

3.4 Suprastructure **54**

BAB IV ANALISIS STRATEGIS PEMBANGUNAN SMART CITY *58*

4.1 Analisis Kesenjangan **58**

4.1.1 Smart Governance 60

4.1.2 Smart Branding 61

4.1.3 Smart Economy 64

4.1.4 Smart Living 66

4.1.5 Smart Society 69

4.1.6 Smart Environment 71

4.2 Analisis SWOT TOWS 72
4.2.1 Smart Governance 72
4.2.2 Smart Branding 73
4.2.3 Smart Economy 76
4.2.4 Smart Living 79
4.2.5 Smart Society 81
4.2.6 Smart Environment 85
BAB V ANALISIS VISI PEMBANGUNAN SMART CITY 87
5.1 Visi dan Misi Smart City Kab. Kulon Progo 87
5.2 Sasaran Smart City Kab Kulon Progo 87
5.2.1 Smart Governance (G) 87
5.2.2 Smart Branding (B) 88
5.2.3 Smart Economy (Ec) 89
5.2.4 Smart Living (Lv) 89
5.2.5 Smart Society (S) 90
5.2.6 Smart Environment (En) 90
BAB VI 92
PENUTUP 92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kabupaten Kulon Progo 2
Gambar 1. 2 Enam Dimensi Smart City 7

Gambar 3. 1 Lokasi Geografis Kabupaten Kulon Progo 26
Gambar 3. 2 Kawasan Pesisir Kabupaten Kulon Progo 26
Gambar 3. 3 Kawasan Pegunungan Kabupaten Kulon Progo 27
Gambar 3. 4 Piramida Penduduk Kabupaten Kulon Progo 32
Gambar 3. 5 Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Kulon Progo 32
Gambar 3. 6 Indeks Pembangunan Gender Kulon Progo 33
Gambar 3. 7 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Semester I 2025 34
Gambar 3. 8 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab. Kulon Progo 35
Gambar 3. 9 Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kulon Progo 38
Gambar 3. 10 Proporsi Pendapatan Daerah Kulon Progo 2024 44
Gambar 3. 11 Realisasi Dana Perimbangan Kab. Kulon Progo Tahun 2021 - 2024 (Miliar Rp) 44
Gambar 3. 12 Analisis Kesiapan Infrastruktur Fisik Daerah 45
Gambar 3. 13 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Kulon Progo (km) Tahun 2022 - 2024 48
Gambar 3. 14 Persentase Akses Air Bersih dan Air Minum 50
Gambar 3. 15 Infrastruktur Penahan Ombak di Kulon Progo 51

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pemetaan Misi dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo Terhadap Dimensi Smart City 16

Tabel 3. 1 Luas Daerah Kabupaten Kulon Progo menurut Kapanewon 25
Tabel 3. 2 Analisis Kualitas SDM Kabupaten Kulon Progo 28
Tabel 3. 3 Distribusi Persentase dan Kepadatan Penduduk Menurut Kapanewon Kabupaten Kulon Progo 31
Tabel 3. 4 Kualitas Sumber Daya Pemerintahan (Managerial) 35
Tabel 3. 5 Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan 38
Tabel 3. 6 Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin dan Golongan 39
Tabel 3. 7 Jumlah PNS per OPD / Instansi 40
Tabel 3. 8 Kapasitas Keuangan Daerah (Capital) 41
Tabel 3. 9 Kondisi Jalan di Kabupaten Kulon Progo, 2023 46
Tabel 3. 10 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan 2022 - 2024 47
Tabel 3. 11 Banyaknya Jembatan Dirinci Menurut Status per Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo, 2024 49
Tabel 3. 12 Jumlah Produksi Air dan Air Disalurkan 2024 51
Tabel 3. 13 Analisis Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah 52
Tabel 3. 14 Analisis Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah 53
Tabel 3. 15 Kesiapan Kebijakan Daerah 54
Tabel 3. 16 Kesiapan Kelembagaan Daerah 55
Tabel 3. 17 Dasar Kebijakan Smart City 56
Tabel 3. 18 Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah 56

Tabel 4. 1 Aspek dan Indikator Analisa Kesenjangan di Kabupaten Kulon Progo 58
Tabel 4. 2 Analisa Kesenjangan di Kabupaten Kulon Progo Pada Dimensi Smart Governance 61
Tabel 4. 3 Analisa Kesenjangan di Kabupaten Kulon Progo Pada Dimensi Smart Branding 61
Tabel 4. 4 Analisa Kesenjangan di Kabupaten Kulon Progo Pada Dimensi Smart Economy 64
Tabel 4. 5 Analisa Kesenjangan di Kabupaten Kulon Progo Pada Dimensi Smart Living 66
Tabel 4. 6 Analisa Kesenjangan di Kabupaten Kulon Progo Pada Dimensi Smart Society 69
Tabel 4. 7 Analisa Kesenjangan di Kabupaten Kulon Progo Pada Dimensi Smart Environment 71
Tabel 4. 8 Analisis SWOT Smart Governance 72
Tabel 4. 9 Analisis SWOT Smart Branding 74
Tabel 4. 10 Analisis SWOT Smart Economy 76
Tabel 4. 11 Analisis SWOT Smart Living 79
Tabel 4. 12 Analisis SWOT Smart Society 81
Tabel 4. 13 Analisis SWOT Smart Environment 85

Tabel 5. 1 Sasaran Smart Governance 88
Tabel 5. 2 Sasaran Smart Branding 88
Tabel 5. 3 Sasaran Smart Economy 89
Tabel 5. 4 Sasaran Smart Living 89
Tabel 5. 5 Sasaran Smart Society 90
Tabel 5. 6 Sasaran Smart Environment 90

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi global saat ini menggarisbawahi peran dominan *Artificial Intelligence* (AI), *Cloud Computing*, *Internet of Things* (IoT), *Blockchain*, dan *big data analytics* sebagai fondasi utama transformasi digital lintas sektor. Berdasarkan proyeksi internasional, nilai pasar AI diperkirakan meningkat dari USD 86,9 miliar pada 2022 menjadi lebih dari USD 407 miliar pada 2027 dengan rata-rata pertumbuhan tahunan (CAGR) mencapai 36%. Belanja global untuk layanan *cloud computing* pun diproyeksikan menembus USD 679 miliar pada 2024, tumbuh sekitar 20,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah perangkat IoT terkoneksi diperkirakan mencapai 29 miliar unit pada 2030, naik signifikan dari 15 miliar unit pada 2020, yang secara kolektif mengakselerasi pembentukan ekosistem digital yang semakin cerdas, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam konteksnya di Indonesia, dinamika transformasi digital menunjukkan capaian yang strategis sekaligus relevan dengan arah pembangunan S*mart City.* Tingkat penetrasi internet nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun. Tingkat penetrasi internet nasional pada tahun 2018 tercatat sekitar 64.8% kemudian meningkat menjadi 73.7% pada 2019-2020. Pertumbuhan ini berlanjut pada 2022 dengan penetrasi 77.01% atau sekitar 210 juta pengguna, kemudian menjadi 78,19% pada 2023 dengan 215 juta pengguna, dan pada 2024 mencapai 79,5% atau 221 juta pengguna. Terbaru, pada 2025, penetrasi internet telah menembus 80,66% dengan lebih dari 229 juta pengguna dari total populasi 284 juta jiwa. Tren ini mencerminkan percepatan transformasi digital yang semakin inklusif dan meluas ke berbagai lapisan masyarakat (APJI, 2024).

Peningkatan akses digital tersebut juga berdampak langsung pada perkembangan ekonomi digital nasional. Pada tahun 2022, nilai ekonomi digital Indonesia mencapai sekitar USD 77 miliar, kemudian naik menjadi USD 82 miliar pada 2023, dan diproyeksikan mencapai USD 124 miliar pada 2025, didorong oleh ekspansi sektor e-commerce, fintech, serta layanan berbasis cloud. Dinamika ini diperkuat oleh kebijakan strategis pemerintah, antara lain Gerakan 100 Smart City, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta integrasi layanan digital melalui GovTech Nusantara.

Dari sisi regulasi, lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan menjadi tonggak penting yang menekankan pengelolaan perkotaan berbasis keberlanjutan dan kota cerdas. Hal ini sejalan dengan kerangka Asta Cita yang menempatkan transformasi digital, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan infrastruktur cerdas sebagai agenda prioritas nasional. Dengan demikian, perkembangan transformasi digital Indonesia tidak hanya tampak dalam data kuantitatif dari tahun ke tahun, tetapi juga dalam penguatan kerangka hukum, tata kelola, dan program strategis menuju terwujudnya kota berdaya saing, tangguh, dan berkelanjutan sesuai visi Indonesia Emas 2045.

Transformasi digital di tingkat daerah turut terimplementasi di Kabupaten Kulon Progo melalui ketersediaan dokumen Masterplan Smart City di dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 100 Tahun 2018 tentang Masterplan Smart City. Beberapa inisiatif quick wins yang

berkembang di Kulon Progo berhubungan dengan layanan digital publik, peningkatan tata kelola pemerintahan, serta pengembangan sektor pariwisata dan infrastruktur, misalnya pemanfaatan aplikasi layanan kesehatan dan pendidikan, hingga integrasi pembangunan fisik seperti program Bedah Menoreh yang mendukung konektivitas dan pariwisata daerah. Walaupun quick wins Kulon Progo belum seluruhnya dikenal secara luas di tingkat nasional, sejumlah evaluasi Kominfo pada 2019 menempatkan Kulon Progo dalam kategori “baik” dalam penerapan masterplan Smart City, menandakan adanya pengakuan atas konsistensi implementasi.

Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia digital, keterhubungan data lintas perangkat daerah, serta kesenjangan literasi digital masyarakat yang masih memerlukan penguatan. Namun, peluang besar hadir melalui meningkatnya penetrasi internet, dukungan program nasional GovTech Nusantara, serta posisi Kulon Progo yang strategis di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kawasan penyangga Ibu Kota Yogyakarta dan bagian dari destinasi pariwisata super prioritas Borobudur. Oleh karena itu, pembaruan masterplan Smart City Kulon Progo diarahkan untuk mensinergikan strategi digital daerah dengan RPJPD 2025-2045 dan RPJMD 2025–2029, sehingga pengembangan teknologi tidak hanya memperkuat layanan publik, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan, berdaya saing, dan sesuai visi pembangunan daerah ke depan.

1.2 TENTANG KABUPATEN KULON PROGO

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo secara geografis terletak antara 110° 1’37” – 110° 16’26” Bujur Timur dan 7° 38’42” – 7° 59’3” Lintang Selatan. Kabupaten ini merupakan salah satu dari lima kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pusat pemerintahan berada di Kota Wates. Luas wilayah Kabupaten Kulon Progo adalah 586,28 km².

Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah dengan potensi alam yang sangat cocok untuk pengembangan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan. Hal ini ditunjukkan sebesar 86.937 orang penduduk usia kerja di Kabupaten Kulon Progo bekerja di sektor tersebut pada tahun

2024. Di sisi lain, terdapat sebanyak 113.797 orang penduduk usia kerja di Kabupaten Kulon Progo yang bekerja di sektor lapangan usaha utama Perdagangan Besar dan Eceran, menjadikannya salah satu sektor penyerap tenaga kerja terbesar di wilayah tersebut. Di tahun yang sama, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) dengan nilai sebesar Rp2.566,07 miliar atau sekitar 15,17% dari total PDRB. Sementara itu, pada PDRB atas dasar harga konstan 2010 (ADHK), sektor Konstruksi justru menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp1.669,96 miliar atau 6,68% dari total PDRB.

Pada tahun 2024, Komoditas unggulan pertanian yang dihasilkan Kabupaten Kulon Progo adalah Bawang Merah, dengan kenaikan sebesar 10% dari tahun 2023. Dari sektor perkebunan, Kelapa dan Kopi merupakan komoditas dengan produksi terbesar masing-masing sebesar 27.67 ton dan 3.378 ton (BPS Kabupaten Kulon Progo). Hal ini menunjukkan sektor pertanian dan perkebunan merupakan aktivitas ekonomi yang sangat berkembang.

Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakatnya, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mendorong pengembangan sektor-sektor unggulan daerah yang disesuaikan dengan potensi wilayah dan karakteristik geospasial yang dimiliki. Contohnya, posisi Kulon Progo yang berdekatan dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur menjadi peluang strategis dalam pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan perdagangan. Selain itu, keberadaan Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) di Kapanewon Temon serta pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) turut memperkuat konektivitas wilayah dan membuka koridor distribusi baru, baik dalam skala nasional maupun internasional. Dengan demikian, pengembangan komoditas unggulan daerah tidak hanya diarahkan pada keunggulan produksi dan kualitas produk, tetapi juga didukung oleh posisi wilayah yang strategis dan infrastruktur konektivitas yang memadai (RPJMD Kabupaten Kulon Progo, 2025-2029). Potensi geografis seperti kawasan pesisir, daratan, dan pegunungan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung sektor kelautan dan perikanan, pertanian dan perkebunan, hingga ekowisata dan konservasi lingkungan, sehingga memperkuat daya saing daerah secara berkelanjutan.

Dengan adanya potensi sumberdaya daerah, masyarakat dan hasil produksi pertanian, harapannya dapat menjadi penunjang dalam penerapan *Smart City* di Kabupaten Kulon Progo.

1.3 TUJUAN MASTERPLAN

Tujuan dari penyusunan *Masterplan Smart City* Kabupaten Kulon Progo adalah berikut di bawah:

1. Meningkatkan kesadaran dan ketertarikan kerangka berpikir *Smart City* kepada seluruh *stakeholder* di Kabupaten Kulon Progo.
2. Memetakan kondisi eksisting dan rencana implementasi Kulon Progo *Smart City.*
3. Melakukan analisis permasalahan, solusi, dan keunikan potensi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kulon Progo lewat pengembangan *Smart City*.
4. Pengembangan Rencana Induk atau *Masterplan Smart City* Kabupaten Kulon Progo

BAB II
ANALISIS MASA DEPAN

2.1 Analisis Pembangunan Daerah

Pada sub-bab ini, akan dilakukan analisis terhadap visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo. Analisis dilakukan pada visi pembangunan daerah yang telah dituliskan oleh Pemerintah Kab. Kulon Progo di dokumen-dokumen pembangunan daerah. Dokumen-dokumen tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029.

2.1.1 Visi Kabupaten Kulon Progo

Pada dokumen RPJPD Kab. Kulon Progo tahun 2025-2045, visi Kabupaten Kulon Progo adalah: **"Kulon Progo yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya & Berkelanjutan (SEMARAK)".** Visi tersebut memiliki akronim SEMARAK yang dipilih untuk menggambarkan kondisi Kabupaten Kulon Progo di masa depan. Kata "Semarak" memiliki arti kemuliaan, kemegahan, keelokan. Kata ini mengandung harapan bahwa pada 2045 nanti Kabupaten Kulon Progo telah menjadi kabupaten yang maju penuh dengan kemegahan dan kemuliaan dan tetap elok. Visi pada RPJPD kemudian diturunkan menjadi 4 misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan manusia Kulon Progo berbudaya, maju, dan sejahtera
2. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif serta masyarakat yang aman dan demokratis
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta lingkungan yang lestari dan tangguh bencana

Pada tahun 2024, Kabupaten Kulon Progo telah memilih Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2024-2029. Periode ini juga akan menjadi periode pertama dalam pelaksanaan RPJPD 2025-2045. Fokus utama pembangunan daerah pada periode ini adalah penguatan fondasi pembangunan melalui respon kebijakan yang tepat sesuai isu strategis atau tantangan yang mengemuka pada periode 2025-2029 untuk memastikan keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan di masa mendatang. Perencanaan pembangunan daerah Kab. Kulon Progo pada periode ini telah dituliskan melalui Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kab. Kulon Progo 2025-2029. Berdasarkan rancangan akhir tersebut, dalam menjalankan pemerintahan, Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 mengusung visi pembangunan daerah sebagai berikut:

"Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya, yang Berkelanjutan"

Lebih lanjut, kata dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- **Makmur:** Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu mewujudkan kondisi masyarakat yang makmur, di mana kesejahteraan ekonomi dapat dirasakan

oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, serta memiliki akses yang layak terhadap pendidikan dan kesehatan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan memiliki pendapatan yang memadai untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, disertai dengan terciptanya peluang kerja yang luas dan lingkungan ekonomi yang stabil.

- **Mandiri:** Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang mandiri, yaitu masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bergantung sepenuhnya pada pihak lain. Hal ini diwujudkan melalui pengembangan potensi lokal, pemberdayaan sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi yang relevan. Dengan semangat kemandirian, masyarakat diharapkan mampu beradaptasi dengan perubahan global dan menjaga keberlanjutan pembangunan melalui inovasi, kreativitas, dan kerjasama komunitas.

- **Religius:** Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai religius yang kuat dalam kehidupan masyarakat dan aparatur pemerintah. Masyarakat yang religius diharapkan memiliki keyakinan yang kokoh terhadap ajaran agama yang dianut, yang tercermin dalam sikap, perilaku, dan tindakan sehari-hari. Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi landasan moral dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga tercipta harmoni sosial yang dilandasi oleh toleransi, rasa hormat, dan solidaritas antar umat beragama.

- **Berbudaya:** Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu melestarikan budaya lokal sebagai bagian dari identitas masyarakat yang berkelanjutan. Nilai-nilai luhur budaya dijunjung tinggi dan ditanamkan dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari pemikiran, sikap, hingga aktivitas sehari-hari. Aspek pendidikan dalam budaya akan menentukan terwujudnya profil pelajar Pancasila, yaitu: Beriman, Bertakwa kepada Tuhan YME, dan Berakhlak Mulia, Berkebinekaan Global, Gotong Royong, Mandiri, Bernalar Kritis, Kreatif.

- **Berkelanjutan:** Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Dengan cara ini, budaya lokal yang kaya dapat diwariskan kepada generasi mendatang tanpa mengorbankan ekosistem dan lingkungan hidup, menciptakan harmoni antara tradisi dan modernisasi.

Visi Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 tersebut kemudian diturunkan menjadi 4 (empat) misi pembangunan. Penjelasan komprehensif terkait misi-misi tersebut sebagai berikut:

1. **Misi Pertama:** Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya, dan Religius.

   Pembangunan lima tahun mendatang diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang makmur, di mana setiap individu dapat menikmati kesejahteraan lahir dan batin. Upaya ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan pendapatan yang layak. Selain itu, masyarakat Kulon Progo diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari,

seperti kesantunan, kesopanan, dan penghormatan terhadap adat istiadat. Di sisi lain, penguatan nilai-nilai religius yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa juga menjadi prioritas, guna menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan harmonis dalam kehidupan beragama.

2. **Misi Kedua:** Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi.

   Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kemandirian daerah dengan memanfaatkan potensi lokal secara maksimal dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan pengembangan sektor-sektor unggulan, seperti pertanian, industri, dan pariwisata, yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Pembangunan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat agar memiliki keterampilan dan kapasitas untuk berkontribusi dalam perekonomian lokal. Dengan peningkatan daya saing produk daerah yang bernilai tambah tinggi, diharapkan ekonomi daerah dapat berkembang secara merata, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang masih tertinggal.

3. **Misi Ketiga:** Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang *Good Governance*, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis.

   Pembangunan lima tahun mendatang menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang prima dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Dalam lingkungan yang aman dan demokratis, masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan tenang dan damai. Stabilitas sosial akan dijaga melalui penegakan hukum yang adil, konsisten, dan non diskriminatif, dengan menumbuhkan rasa percaya antar-stakeholder pembangunan. Demokrasi yang sehat akan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

4. **Misi Keempat**: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana.

   Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung pemerataan antarwilayah, dengan fokus pada peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar-pusat pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang berkualitas akan mempercepat distribusi barang dan jasa, menurunkan biaya produksi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan dilakukan dengan prinsip keberlanjutan, memperhatikan pelestarian lingkungan, serta mitigasi risiko bencana alam. Sebagai daerah yang rentan terhadap kerusakan lingkungan dan bencana, pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara hati-hati untuk mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem dan menjamin keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang. Infrastruktur tangguh yang dirancang sesuai dengan potensi dan risiko daerah akan menjadi dasar bagi terciptanya lingkungan yang aman dan produktif.

Seperti sebagaimana penjelasan pada awal sub-bab, visi dan misi yang tertuang pada RPJMD dan RPJPD terbaru Kabupaten Kulon Progo akan sangat mempengaruhi penyusunan *Review Masterplan Smart City* Kab. Kulon Progo. Dokumen *Master Plan Smart City* Kab.

Kulon Progo ini akan berlaku dalam jangka waktu 10 tahun sehingga visi dan misi pada RPJMD akan lebih digunakan pada dokumen ini. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah menganalisis keterkaitan visi misi RPJMD Kab. Kulon Progo dengan Enam Dimensi Smart City. Sebelum itu, penjelasan terkait kerangka pikir *Smart City* akan dijelaskan terlebih dahulu.

Kerangka pikir *Smart City* yang akan digunakan pada dokumen ini adalah kerangka pikir yang digunakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada program Gerakan Menuju Smart City. Berdasarkan kerangka pikir tersebut, S*mart City* terdiri dari enam (6) dimensi: *Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment.*

Gambar 1. 2 Enam Dimensi Smart City

Secara singkat, penjelasan masing-masing dimensi *Smart City* adalah sebagai berikut:

1. ***Smart Governance***

   Smart Governance adalah konsep tata kelola kota yang memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk mengelola kota dengan lebih cerdas. Pemerintah daerah memainkan peran penting sebagai pengendali utama berbagai aspek kehidupan kota, termasuk layanan publik, pengelolaan infrastruktur, hingga kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat. Dalam konteks *Smart City, Smart Governance* bertujuan untuk mengubah pola-pola lama dalam birokrasi yang cenderung lamban dan berbelit-belit menjadi lebih modern, cepat, dan fleksibel. Melalui pendekatan yang adaptif, pemerintahan yang cerdas ini mampu menciptakan proses yang lebih efisien, efektif, dan komunikatif, serta terus meningkatkan kualitas layanan publik secara berkelanjutan.

   Penerapan *Smart Governance* terdiri dari tiga elemen utama yang harus diutamakan: pelayanan *(service),* birokrasi *(bureaucracy),* dan kebijakan *(policy).* **Pelayanan** di sini mengacu pada bagaimana pemerintah dapat memberikan layanan publik yang lebih

baik, lebih mudah diakses, dan lebih cepat bagi warganya. Dengan memanfaatkan teknologi digital, masyarakat tidak perlu lagi mengantri lama di kantor pemerintahan hanya untuk mengurus dokumen atau perizinan. Proses administrasi yang sebelumnya rumit bisa disederhanakan melalui *platform online* yang memungkinkan masyarakat mengurus berbagai keperluan hanya dengan beberapa klik. Layanan yang lebih cepat dan mudah diakses ini akan meningkatkan kepuasan publik sekaligus efisiensi dalam tata kelola.

Selain itu, **birokrasi** dalam *Smart Governance* juga perlu mengalami transformasi. Birokrasi yang responsif dan efisien adalah kunci untuk memastikan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Dengan mengurangi tumpang tindih dalam proses administrasi dan memanfaatkan teknologi untuk memotong jalur birokrasi yang berlapis-lapis, pemerintah dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat dan akurat. Sistem *e-government*, misalnya, memungkinkan berbagai sektor pemerintahan terintegrasi sehingga data yang dibutuhkan bisa diakses dengan cepat dan tanpa hambatan. Penyederhanaan birokrasi ini juga mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi, karena setiap proses bisa diawasi dan dilacak dengan transparan.

Sementara itu, **kebijakan** yang diambil pemerintah dalam *Smart Governance* harus selalu berlandaskan pada data yang relevan dan terkini. Teknologi memungkinkan pengumpulan data secara real-time melalui berbagai sensor dan sistem manajemen informasi, yang kemudian bisa dianalisis untuk membantu pengambilan keputusan. Misalnya, data mengenai lalu lintas dapat digunakan untuk menyusun kebijakan transportasi yang lebih efektif, sementara data lingkungan membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang mendukung keberlanjutan. Pengambilan keputusan berbasis data ini tidak hanya membuat kebijakan lebih tepat sasaran, tetapi juga memungkinkan pemerintah merespons perubahan dan tantangan dengan lebih cepat.

Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam mengembangkan *Smart Governance* adalah dengan meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat. Kebutuhan pokok seperti telekomunikasi, listrik, dan internet harus tersedia secara merata, karena infrastruktur ini menjadi landasan bagi pelayanan publik berbasis teknologi. Konektivitas internet yang stabil, misalnya, memungkinkan warga mengakses layanan pemerintah dari mana saja. Selain itu, pemerintah juga perlu memantau kebutuhan dasar lainnya seperti air bersih, bahan pokok, dan transportasi untuk memastikan bahwa setiap warga mendapatkan akses yang sama dan berkualitas.

Selain itu, *Smart Governance* juga berfokus pada peningkatan dan pemantauan sarana prasarana yang menunjang kebutuhan dasar masyarakat, seperti sembilan bahan pokok, air bersih, transportasi, hiburan, dan informasi. Pemantauan ini penting agar kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur dasar tersebut terpenuhi secara merata dan berkualitas. Dengan demikian, *Smart Governance* berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan layanan dan infrastruktur yang memadai dan terkelola dengan baik.

2. ***Smart Branding***

Smart Branding adalah salah satu pilar penting dalam pengembangan *Smart City* yang fokusnya adalah pada inovasi pemasaran kota untuk meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun internasional. Di era *modern* ini, kota-kota tidak lagi bisa hanya bergantung pada potensi lokal mereka, tetapi harus mampu menarik perhatian masyarakat luas, termasuk pelaku bisnis, wisatawan, dan investor. Melalui strategi *Smart Branding* yang efektif, sebuah kota dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dengan menciptakan citra yang menarik dan mampu bersaing di kancah global.

Salah satu aspek utama dalam *Smart Branding* adalah pariwisata. Kota yang sukses dalam *branding* wisata biasanya mampu menawarkan pengalaman yang unik dan tak terlupakan bagi wisatawan. Untuk mencapai hal ini, kota perlu mengembangkan identitas visual yang khas dan mengedepankan warisan seni serta budaya lokal yang kuat, seperti kuliner khas atau seni pertunjukan daerah. Selain itu, pengembangan infrastruktur yang mendukung kenyamanan wisatawan, seperti aksesibilitas yang baik, fasilitas umum yang bersih, serta sarana transportasi yang memadai, juga menjadi bagian penting dari strategi ini. Kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan pelaku bisnis lokal juga penting untuk mempromosikan destinasi wisata kota secara terpadu.

Tidak hanya di sektor pariwisata, *Smart Branding* juga memainkan peran penting dalam menciptakan ekosistem bisnis yang kompetitif dan sehat. Kota yang cerdas dalam membangun brand bisnis biasanya memiliki platform perdagangan yang mudah diakses oleh masyarakat, baik itu berupa pasar digital atau fisik. Ini termasuk kemudahan bagi pelaku usaha lokal untuk memasarkan produk mereka melalui *marketplace* regional atau nasional. Selain itu, pemerintah kota dapat memfasilitasi para calon investor dengan menyediakan sarana seperti *Investment Lounge* atau portal investasi daring yang transparan dan ramah pengguna. Dengan cara ini, investor dari luar daerah atau bahkan luar negeri akan lebih tertarik untuk menanamkan modal di kota tersebut.

Pendorongan industri kreatif lokal juga tidak kalah pentingnya dalam *Smart Branding*. Industri kreatif seperti kuliner, kerajinan tangan, *fashion*, dan desain lokal merupakan kekayaan yang harus dipromosikan dan dikembangkan lebih lanjut. Mengedepankan keunikan produk-produk lokal dapat menjadi nilai jual yang kuat, yang tidak hanya meningkatkan daya tarik ekonomi kota, tetapi juga membangun kebanggaan masyarakat setempat terhadap identitas budaya mereka. Ini membantu membentuk karakter kota yang unik dan membedakannya dari kota lain.

Wajah kota juga merupakan elemen penting dalam *Smart Branding*. Penataan kota yang rapi, bersih, dan estetis memberikan kesan yang positif tidak hanya bagi penduduk setempat, tetapi juga bagi wisatawan dan investor. Penggunaan desain arsitektur yang memadukan nilai-nilai lokal dengan tren modernisasi dapat menciptakan landmark yang ikonik dan membuat kota lebih menarik secara visual. Hal ini juga perlu didukung dengan perencanaan tata ruang yang baik, yang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan serta kenyamanan bagi pejalan kaki dan pengguna transportasi umum. Fasilitas umum seperti signage, jalan yang terawat, dan ruang terbuka hijau menjadi komponen penting dalam mempercantik wajah kota.

Pada akhirnya, *Smart Branding* bukan hanya tentang menciptakan citra visual yang menarik, tetapi juga tentang membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkelanjutan. Kota yang berhasil dalam *branding* tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi juga menarik perhatian investor dan wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Dengan strategi yang tepat, kota dapat memperkuat identitas mereka, menciptakan lingkungan yang ramah dan produktif bagi warganya, serta menjadikan dirinya sebagai destinasi yang diakui secara global.

3. ***Smart Economy***

Smart Economy adalah dimensi ketiga dari konsep *Smart City* yang berfokus pada pengelolaan ekonomi kota dengan cara yang cerdas dan inovatif. Dalam era informasi dan digitalisasi yang berkembang sangat pesat, ekonomi perlu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan tantangan yang muncul. Tujuan utama dari *Smart Economy* adalah menciptakan ekosistem ekonomi yang dinamis, inovatif, dan tangguh dalam menghadapi disrupsi ekonomi. Ekosistem ini tidak hanya adaptif terhadap tantangan baru, tetapi juga dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu fokus pentingnya adalah mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih sadar akan literasi keuangan dan transisi menuju masyarakat yang lebih sedikit menggunakan uang tunai (*less-cash society*).

Salah satu elemen kunci dalam pengembangan *Smart Economy* adalah penciptaan ekosistem industri yang kompetitif dan terintegrasi. Industri lokal harus diarahkan untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan, seperti pertanian, perikanan, dan peternakan di sektor primer, yang kemudian diolah lebih lanjut di sektor sekunder melalui kegiatan manufaktur. Selain itu, sektor tersier, seperti pasar produk lokal dan layanan jasa, harus dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah. Dengan keterpaduan ini, kota dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya lokal, sekaligus membuka peluang untuk bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Tidak hanya fokus pada pengembangan industri, *Smart Economy* juga menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. Peningkatan kesejahteraan ini dicapai melalui program-program pemberdayaan ekonomi yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, serta memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan akses permodalan adalah beberapa contoh inisiatif yang dapat diambil untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk terlibat aktif dalam perekonomian kota. Dengan demikian, *Smart Economy* tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata.

Penting juga untuk membangun ekosistem keuangan yang modern dan berbasis digital dalam *Smart Economy*. Teknologi keuangan atau *fintech* memainkan peran penting dalam menciptakan kemudahan akses terhadap layanan keuangan. Kota

yang mengimplementasikan *Smart Economy* akan mendorong pengembangan transaksi keuangan digital, seperti pembayaran melalui dompet digital dan platform *e-payment*, yang memungkinkan masyarakat melakukan transaksi dengan lebih cepat, efisien, dan aman tanpa perlu menggunakan uang tunai. Pembangunan ekosistem ini tidak hanya memudahkan kehidupan sehari-hari, tetapi juga meningkatkan inklusi keuangan dengan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan perbankan dan modal usaha.

Sejalan dengan itu, menciptakan masyarakat yang *"bankable"* juga menjadi fokus utama dalam *Smart Economy*. Masyarakat yang memiliki akses terhadap layanan perbankan tidak hanya dapat menyimpan uang dengan aman, tetapi juga dapat memanfaatkan produk-produk keuangan yang dapat membantu mereka mengembangkan usaha atau meningkatkan taraf hidup mereka. Akses yang lebih baik terhadap modal, baik melalui pinjaman bank maupun skema pendanaan lainnya, akan memungkinkan pelaku usaha kecil dan menengah untuk berkembang lebih pesat dan menciptakan lapangan kerja baru. Ini pada gilirannya akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selain itu, *Smart Economy* juga mendukung pertumbuhan ekonomi digital melalui pengembangan platform *e-commerce* dan marketplace lokal. *Platform* ini menjadi kunci bagi produsen dan pelaku usaha lokal untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik secara regional maupun global. Dengan dukungan terhadap *e-commerce*, produsen lokal dapat memasarkan produk mereka dengan lebih efektif dan efisien, sekaligus meningkatkan daya saing mereka di pasar digital. Hal ini tidak hanya menguntungkan para pelaku usaha, tetapi juga membantu menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan adanya ekosistem ekonomi yang terintegrasi dan berbasis teknologi, *Smart Economy* dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengembangan industri yang kompetitif, peningkatan kesejahteraan melalui program pemberdayaan, dan modernisasi sistem keuangan serta transaksi digital akan menciptakan kota yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, *Smart Economy* bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga tentang bagaimana ekonomi dapat berfungsi sebagai pendorong utama untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan siap menghadapi tantangan masa depan.

4. ***Smart Living***

Smart Living adalah salah satu dimensi penting dalam konsep *Smart City* yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Konsep ini menitikberatkan pada tiga elemen utama yang saling terkait: pola hidup sehat, layanan kesehatan yang berkualitas, dan moda transportasi yang efisien untuk mendukung mobilitas. Dalam *Smart Living*, fokus utamanya adalah menciptakan lingkungan yang nyaman, layak huni, dan efisien bagi masyarakat, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik, baik dalam hal fisik, mental, maupun sosial. Keterhubungan antar elemen ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan warga kota.

Salah satu langkah utama dalam implementasi *Smart Living* adalah harmonisasi tata ruang wilayah. Tata ruang yang dirancang dengan baik tidak hanya mengatur bagaimana bangunan didirikan, tetapi juga memastikan keseimbangan antara berbagai fungsi ruang, seperti pemukiman, kawasan bisnis, dan fasilitas rekreasi. Hal ini sangat penting untuk memastikan warga kota dapat menjalani kehidupan yang seimbang antara pekerjaan, aktivitas sosial, dan rekreasi. Dengan perencanaan tata ruang yang tepat, sebuah kota dapat menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan efisien, di mana setiap kebutuhan warga, baik dalam hal pekerjaan maupun hiburan, dapat diakses dengan mudah.

Selain tata ruang, aspek kesehatan menjadi prioritas utama dalam *Smart Living*. Kesehatan adalah pilar utama yang menentukan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu, penting bagi pemerintah kota memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas. Ini mencakup penyediaan layanan kesehatan yang komprehensif, mulai dari puskesmas, rumah sakit, hingga fasilitas kesehatan swasta yang mudah dijangkau. Selain itu, akses terhadap makanan sehat dan minuman yang aman juga harus diperhatikan, karena gizi yang baik merupakan fondasi penting bagi kesehatan masyarakat.

Sarana olahraga dan aktivitas fisik juga menjadi bagian tak terpisahkan dari konsep *Smart Living*. Dalam mewujudkan gaya hidup sehat, pemerintah perlu menyediakan fasilitas umum seperti lapangan olahraga, taman, jalur sepeda, dan pusat kebugaran yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya fasilitas tersebut, masyarakat didorong untuk lebih aktif secara fisik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesehatan umum. Partisipasi masyarakat dalam olahraga dan kegiatan fisik juga dapat meningkatkan interaksi sosial, yang secara tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan mental mereka.

Moda transportasi yang efisien adalah komponen lain yang sangat penting dalam menciptakan ekosistem *Smart Living* yang ideal. Mobilitas yang lancar memungkinkan masyarakat untuk bergerak dengan mudah dari satu tempat ke tempat lainnya, baik untuk keperluan pribadi, pekerjaan, atau distribusi logistik. Untuk mencapai hal ini, pemerintah harus merancang sistem transportasi yang terintegrasi dan ramah lingkungan. Penyediaan angkutan umum yang terjangkau, aman, dan nyaman, serta infrastruktur jalan yang baik, akan membantu mengurangi kemacetan, polusi, dan mempercepat mobilitas warga. Transportasi yang efisien juga sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik di sebuah kota.

Smart Living bukan hanya tentang penyediaan fasilitas fisik dan layanan, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan lingkungan yang mendukung keseimbangan hidup yang harmonis. Dengan perencanaan tata ruang yang cermat, sistem kesehatan yang kuat, serta transportasi yang efisien, *Smart Living* berperan besar dalam menciptakan kota yang nyaman, sehat, dan berkelanjutan bagi warganya. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan taraf hidup masyarakat secara langsung, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan perkotaan yang lebih inklusif, adaptif, dan mendukung pertumbuhan jangka panjang.

5. ***Smart Society***

Inisiatif pembangunan *Smart Society* bertujuan untuk menciptakan interaksi masyarakat yang lebih efisien dan dinamis. Dalam konteks ini, interaksi sosial diharapkan berlangsung secara paralel baik secara fisik maupun digital, sehingga mencakup berbagai bentuk hubungan antara individu, kelompok sosial, dan antar kelompok. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah mendorong partisipasi aktif publik dalam pembangunan daerah. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung melalui berbagai program seperti inisiatif kepemudaan dan pelatihan keterampilan bagi UKM, *Smart Society* berupaya menciptakan keterlibatan yang lebih luas. Hal ini membuka peluang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap proses pembangunan kota, menjadikan mereka tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai kontributor utama.

Dalam inisiatif ini, pengembangan komunitas warga menjadi salah satu fokus penting. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan langkah kunci dalam menciptakan masyarakat yang adaptif dan siap menghadapi era digital. Melalui pendidikan dan pelatihan yang dirancang secara strategis, individu dan kelompok sosial didorong untuk memanfaatkan teknologi dan lingkungan digital secara positif. Program-program edukasi yang memberikan keterampilan digital dan pemahaman teknologi sangat dibutuhkan agar masyarakat bisa lebih siap menghadapi tantangan zaman. Ini juga memungkinkan mereka untuk lebih aktif berkontribusi dalam ekosistem yang lebih luas, baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun budaya.

Salah satu elemen krusial dari *Smart Society* adalah menciptakan ekosistem belajar yang efisien dan inklusif. Pendidikan, baik formal maupun *non-formal*, harus terintegrasi dengan baik untuk memastikan akses yang adil bagi semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Inisiatif ini meliputi pengembangan platform pendidikan seperti *Smart School, Smart Campus, dan Smart Pesantren,* yang tidak hanya memberikan akses lebih luas ke pendidikan, tetapi juga meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan adanya *platform-platform* ini, individu dari berbagai latar belakang diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, yang pada gilirannya dapat memperkuat daya saing mereka di pasar global.

Selain aspek pendidikan, *Smart Society* juga menaruh perhatian besar pada keamanan dan keselamatan masyarakat. Sistem keamanan yang efektif menjadi prioritas dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua warga. Dalam hal ini, teknologi memainkan peran penting. Pemanfaatan sensor digital, kamera pemantau, serta integrasi *Internet of Things* (IoT) membantu meningkatkan manajemen risiko, terutama dalam hal respon terhadap bencana atau ancaman keamanan lainnya. Dengan sistem keamanan yang cerdas, warga merasa lebih terlindungi, sementara pemerintah dan pihak berwenang dapat merespons situasi darurat dengan lebih cepat dan efisien.

Smart Society juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi ini tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat itu sendiri. Dengan bekerja bersama, setiap komponen masyarakat dapat

berkontribusi dalam membangun kota yang lebih baik. Misalnya, pemerintah dapat memfasilitasi pengembangan infrastruktur, sektor swasta dapat berinvestasi dalam teknologi dan inovasi, sementara masyarakat dapat berpartisipasi melalui program-program sosial dan edukatif yang tersedia.

Pada akhirnya, dengan mengintegrasikan berbagai aspek seperti pengembangan komunitas, peningkatan kualitas pendidikan, serta keamanan yang canggih, *Smart Society* bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sejahtera dan aman bagi semua warga. Sinergi antara berbagai elemen ini diharapkan tidak hanya mempercepat proses pembangunan daerah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan pendekatan yang holistik dan inklusif, *Smart Society* menjadi landasan bagi terciptanya kota yang berkelanjutan, cerdas, dan adaptif di masa depan.

6. ***Smart Environment***

Dimensi keenam dalam pengembangan *Smart City* adalah pengelolaan lingkungan yang pintar atau *smart environment*. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa perkembangan teknologi dan pembangunan fisik kota berjalan seiring dengan perhatian yang mendalam terhadap kelestarian lingkungan. Di era *modern* ini, pembangunan berkelanjutan menjadi keharusan, bukan pilihan. Kota pintar harus mampu mengintegrasikan aspek lingkungan dalam setiap kebijakan dan rencana pembangunannya, agar kemajuan yang diraih tidak justru mengorbankan keseimbangan ekosistem. *Smart environment* menekankan pentingnya menjaga keharmonisan antara manusia, teknologi, dan alam agar kota tetap layak huni untuk generasi sekarang dan masa depan.

Salah satu sasaran penting dari *smart environment* adalah menciptakan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah dan masyarakat perlu berkolaborasi dalam merancang program perlindungan lingkungan yang holistik. Program ini bisa mencakup pengelolaan sumber daya tanah, air, dan udara secara bijaksana. Teknologi canggih, seperti sensor pencemaran yang terhubung melalui *Internet of Things* (IoT), dapat digunakan untuk memantau kondisi lingkungan secara real-time, memastikan adanya respons cepat ketika terjadi peningkatan polusi atau ancaman kerusakan ekosistem. Selain itu, langkah-langkah konservasi, seperti pembangunan ruang terbuka hijau dan restorasi sungai yang tercemar, juga sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam dalam lingkungan perkotaan.

Pengelolaan sampah dan limbah juga menjadi komponen krusial dalam inisiatif *smart environment*. Kota-kota pintar tidak hanya perlu menyediakan sistem pengelolaan sampah yang efisien, tetapi juga memastikan bahwa limbah industri dan rumah tangga diolah dengan cara yang ramah lingkungan. Salah satu tantangan utama kota besar adalah pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah yang buruk, yang bisa menyebabkan banjir karena sampah yang menyumbat saluran air, serta mencemari udara dengan pembakaran sampah terbuka. Melalui inovasi teknologi seperti daur ulang pintar dan sistem sanitasi modern, kota dapat mencegah pencemaran sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi warganya.

Selain itu, *smart environment* juga mendorong pengelolaan energi yang bertanggung jawab dan efisien. Di tengah semakin terbatasnya sumber daya energi konvensional, kota pintar harus mulai beralih ke energi terbarukan dan ramah lingkungan, seperti energi surya, angin, biogas, dan biomassa. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, pemerintah dan masyarakat bisa bekerja sama untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mulai menggunakan energi yang lebih bersih. Penggunaan energi alternatif ini tidak hanya membantu mengurangi emisi karbon, tetapi juga menghemat biaya energi dalam jangka panjang, sehingga kota bisa menjadi lebih mandiri dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, pengelolaan lingkungan yang pintar dalam *Smart City* bukan hanya soal menjaga kebersihan atau mengurangi polusi, tetapi juga menciptakan ekosistem yang harmonis antara manusia, teknologi, dan alam. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk mendukung keberlanjutan lingkungan, kota-kota pintar dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi warganya, menjaga kualitas udara, air, dan tanah, serta memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Selanjutnya, analisis keterkaitan visi misi RPJMD Kab. Kulon Progo dengan Enam Dimensi Smart City dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. 1 Pemetaan Misi dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo Terhadap Dimensi Smart City

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Dimensi Smart City					
			S. Governance	S. Branding	S. Economy	S. Living	S. Society	S. Environment
MISI 1: Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				✓		
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat					✓	
	Meningkatnya Kemakmuran Masyarakat Kulon Progo	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat				✓		
	Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo yang Berbudaya dan Religius	Meningkatnya Peran Keberagamaan dan Kebudayaan dalam Kehidupan Bermasyarakat					✓	
MISI 2: Meningkatkan Kemandirian dan Daya saing Daerah serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi	Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Daerah	Meningkatnya Kemandirian Daerah		✓	✓			
		Meningkatnya Daya Saing Daerah		✓				
	Meningkatnya Pemerataan Ekonomi Daerah	Menurunnya Pengangguran			✓			
MISI 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance,	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang	✓					

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Dimensi Smart City					
			S. Governance	S. Branding	S. Economy	S. Living	S. Society	S. Environment
Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis		Responsif dan Akuntabel						
	Meningkatnya Kehidupan Bermasyarakat yang Aman dan Demokratis	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat					✓	
MISI 4: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Kesesuaian Peruntukan Ruang				✓		
		Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Daerah				✓		
	Meningkatnya Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana	Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup						✓
		Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana					✓	

2.2 Analisis Kondisi Eksternal

Pertumbuhan penduduk, perkembangan wilayah, serta arus urbanisasi di berbagai daerah turut memberikan dampak signifikan terhadap dinamika eksternal Kabupaten Kulon Progo. Sebagai salah satu daerah penyangga utama di kawasan Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo menghadapi berbagai tantangan eksternal yang semakin kompleks seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik, infrastruktur dasar, serta ruang hidup yang layak. Permasalahan umum perkotaan seperti keterbatasan lahan pemukiman, kepadatan lalu lintas di jalur utama, meningkatnya kebutuhan energi, penumpukan sampah, hingga potensi meningkatnya masalah sosial dan kriminalitas menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Kondisi ini diperkuat oleh adanya perubahan sosial, ekonomi, politik, serta pesatnya perkembangan teknologi yang menuntut pemerintah daerah untuk lebih adaptif dan responsif dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan.

Di sisi lain, dinamika eksternal tersebut tidak hanya menghadirkan tantangan, tetapi juga membuka peluang baru bagi Kabupaten Kulon Progo. Pembangunan infrastruktur strategis seperti bandara internasional, jaringan transportasi regional, serta meningkatnya konektivitas antar wilayah dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus memperkuat posisi Kulon Progo sebagai pintu gerbang baru kawasan Yogyakarta. Selain itu, tren global menuju pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi digital juga memberi peluang bagi daerah ini untuk bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, partisipatif, dan inovatif. Namun, tanpa adanya strategi yang jelas dan kolaborasi lintas sektor, peluang tersebut akan sulit dimanfaatkan secara optimal.

Salah satu jawaban atas tantangan ini adalah penerapan konsep S*mart City*, yaitu pembangunan kota berbasis teknologi, data, dan kolaborasi lintas sektor. Konsep ini tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga pada pembentukan ekosistem perkotaan yang adaptif, inklusif, dan partisipatif. Dengan demikian, Smart City diyakini mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat daya saing daerah.

Untuk mewujudkannya, terdapat sejumlah faktor kunci yang harus diperhatikan:

1. kepemimpinan dengan visi berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat;
2. perencanaan bertahap dan terarah melalui *roadmap* pembangunan yang jelas;
3. konsistensi regulasi dan peraturan yang selaras dengan dokumen induk perencanaan;
4. pelibatan aktif masyarakat agar pengembangan sesuai dengan kebutuhan nyata;
5. kolaborasi erat antara pemerintah, swasta, akademisi, dan komunitas sebagai fondasi keberhasilan implementasi Smart City.

2.2.1 Analisis Politik Kabupaten Kulon Progo

Kondisi politik Indonesia pada tahun 2025 pasca pelantikan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan fase konsolidasi awal pemerintahan baru yang membawa perubahan signifikan dalam struktur kelembagaan, arah kebijakan, serta penataan regulasi. Pergantian nomenklatur Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menandai penekanan pemerintah terhadap transformasi digital nasional, termasuk akselerasi digitalisasi layanan publik, integrasi data, dan penguatan keamanan

siber. Kebijakan ini beririsan erat dengan program pengembangan Smart City, yang kini tidak lagi dipandang sebatas inovasi teknologi daerah, melainkan instrumen strategis untuk mencapai sasaran jangka panjang Indonesia Emas 2045 sebagaimana dituangkan dalam RPJP Nasional 2025–2045. Pemerintahan Prabowo juga menekankan delapan arah pembangunan (Astacita) sebagai fondasi visi nasional, mulai dari kedaulatan pangan, industrialisasi, pertahanan dan keamanan, pemerataan pembangunan, hingga percepatan transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien. Konsekuensinya, daerah seperti Kulon Progo harus menyesuaikan agenda politik dan pembangunan daerah dengan arah kebijakan pusat agar tetap sinkron dalam perencanaan, pembiayaan, serta implementasi program.

Di tingkat regulasi, dinamika politik saat ini juga ditandai dengan percepatan harmonisasi peraturan turunan dari RPJP Nasional 2025–2045 yang akan menjadi acuan strategis dalam 20 tahun mendatang. Perubahan fiskal nasional, khususnya dalam arah transfer dana pusat-daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK), diproyeksikan lebih selektif serta berbasis kinerja daerah dalam mendukung target prioritas nasional. Hal ini berimplikasi pada strategi politik lokal, sebab kepala daerah perlu memastikan bahwa program-program dalam RPJMD 2025–2029 tidak hanya mencerminkan visi-misi hasil Pilkada 2024, tetapi juga kompatibel dengan kerangka pembangunan nasional dan provinsi. Di Kulon Progo, kepemimpinan baru Agung Setiawan dan Ambar Purwoko dengan legitimasi 119.643 suara sah, menghadapi tantangan untuk mengelola konsolidasi politik pasca-Pilkada, termasuk membangun harmoni dengan DPRD, menjaga stabilitas politik lokal, serta memastikan dukungan dari berbagai elemen pentahelix. Situasi ini penting karena politik daerah yang solid akan menentukan sejauh mana program prioritas nasional seperti digitalisasi birokrasi, pengembangan infrastruktur konektivitas, serta peningkatan ketahanan pangan dan energi dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan daerah.

Korelasi politik nasional dan daerah semakin erat dalam konteks Smart City. Agenda transformasi digital yang menjadi bagian dari Astacita Prabowo selaras dengan upaya Komdigi dalam menata ekosistem digital nasional, mendorong integrasi data melalui Satu Data Indonesia, serta mengembangkan platform digital untuk pelayanan publik dan partisipasi masyarakat. Hal ini memengaruhi arah kebijakan Smart City di Kulon Progo, yang sebelumnya lebih banyak berfokus pada tata kelola pemerintahan berbasis aplikasi, kini harus bergeser ke pendekatan integratif dengan menekankan interoperabilitas sistem, keamanan data, serta keselarasan dengan visi pembangunan nasional. Dengan demikian, kondisi politik saat ini bukan hanya ditentukan oleh dinamika elektoral semata, tetapi juga oleh kemampuan aktor politik di tingkat pusat dan daerah dalam menavigasi perubahan regulasi, kebijakan fiskal, arah pembangunan jangka panjang, serta tekanan global, sehingga Smart City tidak hanya menjadi simbol modernisasi, tetapi juga instrumen politik pembangunan untuk mewujudkan agenda Indonesia Emas 2045.

2.2.2 Analisis Ekonomi Kabupaten Kulon Progo

Kebijakan efisiensi fiskal nasional yang ditetapkan pemerintah pusat berimplikasi signifikan pada transfer ke daerah. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), skema dana transfer ke daerah lebih diarahkan pada kinerja dan efisiensi. Hal ini berdampak pada semakin ketatnya ruang

fiskal daerah, termasuk bagi Kabupaten Kulon Progo. Lebih jauh lagi, pada tahun 2025 terjadi penurunan Dana Keistimewaan (Danais) DIY hingga 50%, dari sebelumnya sekitar Rp1,32 triliun pada 2024 menjadi hanya sekitar 680 miliar pada 2025. Pengurangan ini otomatis mengurangi kemampuan daerah dalam mendanai program pembangunan berbasis kebudayaan, pariwisata, maupun inovasi daerah yang sebelumnya mendapat dukungan Danais.

Dalam konteks ketahanan pangan, arah kebijakan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menekankan transformasi ekonomi berbasis ketahanan pangan dan hilirisasi. Hal ini relevan bagi Kulon Progo yang memiliki basis pertanian bawang merah, cabai, padi, kelapa, dan kopi. Namun, tantangan muncul akibat gejolak harga pangan nasional dan ancaman inflasi pangan yang diakui oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas), sehingga Kulon Progo perlu mengantisipasi melalui digitalisasi pertanian, peningkatan produktivitas, dan memperkuat cadangan pangan lokal.

Selain itu, penguatan kelembagaan ekonomi kerakyatan melalui Gerakan Koperasi Merah Putih yang diluncurkan pemerintah pusat menjadi peluang penting bagi UMKM dan sektor riil di Kulon Progo. Program ini sejalan dengan visi pemerintah untuk memperkuat ekonomi gotong royong, memperluas akses pembiayaan inklusif, dan mendorong digitalisasi koperasi. Dengan dukungan Smart City, koperasi dapat diintegrasikan ke dalam platform digital lokal sebagai instrumen distribusi dan pemasaran produk. Dengan begitu, meski menghadapi tantangan berupa efisiensi anggaran dan pengurangan Danais, Kulon Progo tetap memiliki peluang untuk membangun model ekonomi yang lebih resilien, berbasis inovasi, pangan, dan koperasi.

2.2.3 Analisis Sosial Kabupaten Kulon Progo

Arah kebijakan sosial nasional pasca-ditetapkannya RPJPN 2025–2045 (UU No. 17 Tahun 2023) dan diturunkannya RPJMN 2025–2029 menekankan peningkatan kualitas SDM, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan pemerataan layanan pendidikan serta kesehatan. Hal ini relevan bagi Kulon Progo yang masih menghadapi tantangan serius dalam aspek sosial. Menurut BPS (Maret 2024), tingkat kemiskinan di Kulon Progo mencapai 15,62%, tertinggi di DIY, dengan garis kemiskinan sebesar Rp 438.007 per kapita/bulan. Meskipun terjadi sedikit penurunan persentase dibanding 2023, jumlah penduduk miskin justru meningkat akibat naiknya garis kemiskinan dan turunnya produktivitas pertanian akibat serangan hama wereng. Data ini menunjukkan bahwa dinamika sosial eksternal, seperti inflasi pangan dan kebijakan pengentasan kemiskinan nasional yang sangat mempengaruhi kondisi lokal.

Pendidikan menjadi salah satu fokus utama dalam agenda sosial nasional. Kehadiran Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 tentang kurikulum menandai arah baru pendidikan yang lebih kontekstual dan fleksibel, sementara pemerintah pusat juga meluncurkan Permensos No. 7 Tahun 2025 tentang Sekolah Rakyat sebagai program pendidikan berbasis asrama dan karakter untuk anak-anak keluarga miskin. Inisiatif Sekolah Rakyat sejalan dengan semangat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, sekaligus menjadi instrumen untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan rentan. Bagi Kulon Progo, program ini relevan karena dapat membantu menjembatani kesenjangan pendidikan,

khususnya di wilayah pedesaan, sekaligus memperkuat literasi dasar dan literasi digital jika diintegrasikan dengan platform Smart City.

Selain pendidikan, arah kebijakan sosial juga ditekankan pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025. Instruksi ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam menyinkronkan program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan layanan dasar. Bagi Kulon Progo, kebijakan ini berarti potensi dukungan lebih besar dari pusat untuk menurunkan angka kemiskinan yang masih tinggi, melalui intervensi berbasis keluarga miskin ekstrem, peningkatan akses layanan kesehatan, serta program pemberdayaan desa. Namun, tantangan tetap ada dalam bentuk disparitas wilayah, urbanisasi, dan migrasi tenaga kerja. Dengan mengintegrasikan program nasional seperti Sekolah Rakyat, bantuan sosial, dan peningkatan keterampilan ke dalam kerangka Smart City, Kulon Progo memiliki peluang membangun sistem sosial yang lebih inklusif, resilien, dan adaptif.

2.2.4 Analisis Teknologi Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2025 menjadi fase penting transformasi digital nasional dengan dimulainya transisi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintah Digital Indonesia (Pemdi). Proses ini dilandasi penyusunan Rancangan Perpres Pemerintah Digital yang akan menjadi payung hukum baru, serta penguatan koordinasi kelembagaan melalui pembentukan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berdasarkan Perpres No. 174 Tahun 2024. Pergeseran ini membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah, termasuk Kulon Progo, untuk menyesuaikan arsitektur digitalnya agar terhubung dengan sistem nasional. Daerah tidak lagi dituntut hanya mengembangkan aplikasi sektoral, tetapi harus mampu melakukan integrasi data dan layanan ke dalam ekosistem INA Digital dan GovTech Indonesia yang menyatukan berbagai layanan publik nasional.

Selain perkembangan kelembagaan dan regulasi, tren teknologi global juga memberi pengaruh signifikan pada arah pembangunan daerah. Potensi pemanfaatan Internet of Things (IoT) di Indonesia diperkirakan mencapai Rp1.700 triliun pada 2025, dengan fokus pada pertanian presisi, energi, transportasi, dan logistik. Namun, keterbatasan infrastruktur jaringan masih menjadi tantangan, mengingat adopsi 5G di Indonesia baru mencapai sekitar 4% pengguna mobile broadband, meskipun perluasan fiber optic dan backbone nasional terus ditingkatkan. Bagi Kulon Progo, hal ini membuka peluang besar untuk mengembangkan sektor unggulan seperti pertanian berbasis sensor, manajemen transportasi cerdas di sekitar Yogyakarta International Airport (YIA), serta pemantauan lingkungan secara real-time, dengan catatan kesiapan infrastruktur lokal perlu ditingkatkan.

Pada saat yang sama, arah kebijakan nasional juga mendorong penguatan ekosistem layanan digital terintegrasi melalui INA Digital dan super-apps prioritas yang mencakup identitas digital, layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, hingga sistem pembayaran digital nasional. Kebijakan ini menciptakan standar baru yang mendorong daerah agar menata ulang tata kelola data, memperkuat keamanan siber, serta meningkatkan literasi digital masyarakat. Menurut Survei Indeks Literasi Digital 2024, skor Indonesia baru mencapai 3,65 dari 5, yang berarti masih kategori “sedang”. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kulon Progo, literasi dan keterampilan digital masyarakat harus ditingkatkan agar integrasi layanan digital

dapat benar-benar dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, faktor eksternal berupa regulasi, teknologi global, dan kebijakan digital nasional menjadi pendorong sekaligus tantangan bagi Kulon Progo dalam mempercepat implementasi Smart City yang inklusif, efisien, dan adaptif.

2.2.5 Analisis Lingkungan Kabupaten Kulon Progo

Pemerintah pusat melalui PP No. 26 Tahun 2025 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) menegaskan bahwa seluruh pembangunan daerah harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Bagi Kulon Progo, yang memiliki topografi unik berupa pesisir selatan, dataran rendah di tengah, dan perbukitan Menoreh di utara, regulasi ini berdampak langsung pada penataan ruang, pengendalian alih fungsi lahan, serta pengelolaan sumber daya air. Implikasinya, Pemkab Kulon Progo perlu memastikan proyek pembangunan seperti bandara, jalan lingkar, dan kawasan industri tetap memperhatikan daya dukung lingkungan agar tidak menimbulkan bencana sekunder seperti banjir, kekeringan, atau longsor. Dalam konteks Smart City, hal ini mendorong integrasi sistem pemantauan lingkungan berbasis data dan pemanfaatan *geospatial technology* untuk perencanaan.

Sementara itu, PP No. 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (PPEM) menempatkan mangrove sebagai ekosistem strategis nasional. Bagi Kulon Progo, yang memiliki kawasan pesisir rawan abrasi dan rob, regulasi ini membuka peluang memperoleh dukungan program rehabilitasi mangrove dari pusat. Implikasinya, selain fungsi ekologis untuk mencegah abrasi dan mendukung perikanan tangkap, mangrove dapat dikembangkan menjadi destinasi *eco-tourism* yang mendukung branding pariwisata daerah. Dalam kerangka Smart City, pengelolaan mangrove bisa diintegrasikan dengan teknologi monitoring berbasis sensor dan *drone mapping* untuk memperkuat tata kelola pesisir.

Kondisi lingkungan tahun 2025 juga dipengaruhi oleh terbitnya regulasi baru di bidang persampahan. Pemerintah pusat melalui PP No. 28 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Persampahan Nasional memperkuat kerangka hukum untuk mendorong pengurangan sampah dari sumber, peningkatan daur ulang, serta pemanfaatan teknologi pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy). Regulasi ini mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah (RIPSD) yang selaras dengan target nasional, yakni pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah 70% pada 2030. Bagi Kulon Progo, yang menghadapi tantangan peningkatan timbulan sampah seiring perkembangan urbanisasi di kawasan perkotaan Wates, pertumbuhan pariwisata di pesisir selatan, dan kegiatan industri di sekitar Yogyakarta International Airport, regulasi ini menuntut penguatan kapasitas kelembagaan, penyediaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Dalam konteks Smart City, pengelolaan persampahan berbasis regulasi baru ini membuka ruang penerapan teknologi digital untuk pemantauan timbulan sampah, tracking armada pengangkut, hingga sistem pembayaran retribusi berbasis aplikasi. Implementasi konsep circular economy juga semakin relevan, di mana sampah tidak hanya dianggap sebagai limbah, tetapi juga sumber daya potensial melalui daur ulang plastik, komposting organik, maupun konversi energi dari limbah. Secara politis, penerapan PP No. 28/2025 akan

mengikat daerah untuk mengalokasikan anggaran khusus dan memastikan keselarasan kebijakan lokal dengan target nasional, sehingga kinerja lingkungan Kulon Progo akan sangat dipengaruhi oleh efektivitas kebijakan persampahan ini.

Selain itu, kebijakan nasional terkait perubahan iklim melalui Rencana Adaptasi Perubahan Iklim Nasional (NAP) dan Permen LHK No. 12 Tahun 2024 tentang registri nasional perubahan iklim mendorong daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana hidrometeorologis. Implikasinya bagi Kulon Progo sangat besar karena pertanian merupakan basis ekonomi utama, sementara ancaman kekeringan, banjir, serta serangan hama (misalnya wereng batang cokelat) semakin meningkat. Oleh karena itu, Kulon Progo perlu memperkuat sistem *early warning system* pertanian, memanfaatkan data iklim lokal, dan mendorong penerapan *climate smart agriculture*. Sedangkan Permen LHK No. 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum bagi Pejuang Lingkungan Hidup memberi ruang bagi komunitas lokal di Kulon Progo untuk lebih aktif dalam pengawasan lingkungan, misalnya kelompok tani hutan, komunitas pesisir, dan organisasi pemuda lingkungan. Dengan perlindungan hukum ini, Kulon Progo berpeluang membangun *community-based smart environment* di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor aktif dalam pengelolaan lingkungan daerah.

2.2.6 Analisis Legal Kabupaten Kulon Progo

Kerangka hukum di Kabupaten Kulon Progo berfungsi sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik. Sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), aspek legal di Kulon Progo memiliki dua dimensi penting: pertama, mengikuti ketentuan umum peraturan perundang-undangan nasional, dan kedua, menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yang memberikan kewenangan khusus dalam tata ruang, kelembagaan, kebudayaan, dan pertanahan. Hal ini menjadikan dinamika hukum di Kulon Progo tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan lokal, tetapi juga harus selaras dengan regulasi keistimewaan provinsi.

Pada tahun 2024, kerangka hukum pemerintahan desa mengalami perubahan signifikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ini memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dengan maksimal dua periode, serta menambahkan klausul baru terkait akses desa di kawasan konservasi dan hutan produksi terhadap dana konservasi dan/atau rehabilitasi. Perubahan ini membawa implikasi hukum penting bagi Kabupaten Kulon Progo, di mana banyak desa memiliki wilayah yang bersinggungan dengan kawasan perbukitan Menoreh dan zona lindung. Secara legal, Pemkab harus segera menyesuaikan regulasi turunan, termasuk Peraturan Daerah tentang Desa dan peraturan teknis tentang tata kelola RPJM Desa, yang kini harus selaras dengan siklus masa jabatan delapan tahun. Jika penyesuaian tidak segera dilakukan, potensi konflik hukum, sengketa administratif, maupun pembatalan dokumen perencanaan desa dapat terjadi.

Selain itu, dinamika eksternal juga dipengaruhi oleh proses revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025. Revisi ini menimbulkan wacana penguatan kembali kewenangan

pusat dalam beberapa sektor strategis serta penajaman norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk mempersempit disparitas antar daerah. Bagi Kulon Progo, potensi perubahan ini dapat berdampak pada reposisi kewenangan, terutama di sektor infrastruktur, pendidikan, dan pengelolaan lingkungan, yang selama ini menjadi basis pembangunan daerah. Secara legal, hal ini berarti Pemkab harus menyiapkan ruang adaptasi regulasi daerah, baik melalui amandemen Perda maupun harmonisasi dengan peraturan provinsi DIY, agar tidak terjadi konflik norma hukum yang dapat melemahkan legitimasi kebijakan lokal.

Dari sisi keuangan daerah, implementasi penuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) sejak 2024, beserta aturan pelaksananya seperti PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, membawa tantangan legal tersendiri. UU ini secara fundamental mengubah desain hubungan fiskal dengan mengedepankan prinsip berbasis kinerja dan rasionalisasi instrumen pajak serta retribusi daerah. Untuk Kulon Progo, hal ini menuntut penyesuaian menyeluruh terhadap Perda pajak dan retribusi, sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan pemungutan agar sesuai dengan norma hukum nasional. Kegagalan melakukan harmonisasi regulasi fiskal dapat berimplikasi pada pembatalan perda oleh Kementerian Dalam Negeri atau bahkan penurunan signifikan penerimaan daerah yang berimbas pada kemampuan pembiayaan pembangunan.

Secara kelembagaan khusus, posisi Kulon Progo di bawah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY juga membawa dinamika hukum tersendiri. UU ini menempatkan Pemkab Kulon Progo sebagai pelaksana kewenangan istimewa DIY di bidang tata ruang, pertanahan, kebudayaan, dan kelembagaan. Pada tahun 2025, kebijakan pengurangan Dana Keistimewaan (Danais) sebesar 50% menjadi isu strategis yang mempertegas ketergantungan kabupaten pada mekanisme hukum fiskal yang dikendalikan pemerintah pusat dan provinsi. Artinya, secara legal, pemerintah kabupaten hanya berperan sebagai pelaksana program yang ditetapkan di tingkat provinsi, dan ruang inovasi regulatif dalam penggunaan Danais menjadi sangat terbatas. Kondisi ini menuntut Pemkab untuk lebih cermat menyusun regulasi turunan yang tidak hanya sesuai dengan UU Keistimewaan, tetapi juga selaras dengan prioritas pembangunan provinsi DIY agar tidak menghadapi hambatan administratif atau hukum dalam pencairan anggaran.

Lebih jauh, aspek pengawasan hukum juga menjadi faktor eksternal penting. Berdasarkan mekanisme yang diatur dalam UU Pemda dan UU SPPN, Kementerian Dalam Negeri berwenang membatalkan Perda kabupaten/kota yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Implikasinya, setiap inovasi kebijakan di Kulon Progo, termasuk dalam konteks Smart City, harus disusun dengan cermat dan melewati proses harmonisasi regulasi dengan provinsi serta pusat. Jika tidak, kebijakan tersebut dapat digugurkan secara hukum, yang tidak hanya menghambat implementasi program tetapi juga dapat melemahkan kredibilitas pemerintah daerah. Dengan demikian, pada tahun 2025, aspek legal eksternal bukan sekadar kerangka normatif, tetapi juga instrumen kontrol yang menentukan sejauh mana kebijakan daerah dapat bertahan dan memiliki legitimasi hukum di tingkat nasional.

BAB III
ANALISIS KESIAPAN DAERAH

3.1 NATURE

Kabupaten Kulon Progo terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis, Kabupaten Kulon Progo terletak di bagian barat provinsi dengan ibukota Kabupaten di Kota Wates. Menurut data dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo luas wilayah Kabupaten Kulon Progo adalah 576,88 km2. Namun berdasarkan Kepmendagri No. 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan luas keseluruhan wilayah Kulon Progo adalah 586,28 kilometer persegi.

Tabel 3. 1 Luas Daerah Kabupaten Kulon Progo menurut Kapanewon

Kapanewon	Ibukota Kapanewon	Luas (km²)
Temon	Temon Kulon	36,30
Wates	Bendungan	32,00
Panjatan	Gotakan	44,59
Galur	Brosot	32,91
Lendah	Jatirejo	35,59
Sentolo	Salamrejo	52,65
Pengasih	Pengajih	61,66
Kokap	Hargorejo	73,80
Girimulyo	Giripurwo	54,90
Nanggulan	Jatisarono	39,61
Kalibawang	Banjaroyo	52,96
Samigaluh	Gerbosari	69,29
Kabupaten Kulon Progo	**Wates**	**586,28**

Sumber: Kulon Progo dalam Angka, 2025

Gambar 3. 1 Lokasi Geografis Kabupaten Kulon Progo

Secara astronomis, Kabupaten Kulon Progo terletak antara 7°38'30" hingga 7°58'3" Lintang Selatan dan 110°1'37" hingga 110°16'26" Bujur Timur. Sementara itu, secara geografis, wilayah ini berada di bagian barat Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas-batas administratif sebagai berikut:

1. Sebelah utara: berbatasan dengan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
2. Sebelah timur: berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul;
3. Sebelah selatan: berbatasan dengan Samudera Hindia;
4. Sebelah barat: berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

Kondisi fisik Kabupaten Kulon Progo cukup beragam. Secara umum, kondisi fisik tersebut diklasifikasikan menjadi 3:

1. Kawasan Pesisir

Gambar 3. 2 Kawasan Pesisir Kabupaten Kulon Progo

Wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0—100 meter di atas permukaan air laut. Wilayah ini mencakup kapanewon: Temon, Wates, Panjatan, Galur, Lendah, sebagian Sentolo, dan sebagian Pengasih. Kawasan ini memiliki kemiringan lahan yang relatif rendah, antara 0—2 persen, terdiri dari wilayah pantai dengan panjang garis pantai 24,8 kilometer. Wilayah pesisir dengan kemiringan lahan yang landai berpotensi dalam pengembangan sektor kelautan, perikanan, serta pariwisata bahari.

2. Kawasan Dataran

Wilayah ini terdiri dari perbukitan dengan ketinggian antara 100—500 meter di atas permukaan air laut. Meliputi beberapa kapanewon: Nanggulan, sebagian Sentolo, Pengasih, dan sebagian Kalibawang. Wilayah ini memiliki kemiringan lahan antara 2—15 persen dan termasuk dalam jenis wilayah peralihan dataran rendah dan perbukitan berombak dan bergelombang.

3. Kawasan Pegunungan

Gambar 3. 3 Kawasan Pegunungan Kabupaten Kulon Progo

Wilayah dataran tinggi dengan ketinggian antara 500—1000 meter di atas permukaan air laut. Wilayah ini mencakup kapanewon: Girimulyo, Kokap, Samigaluh, dan Kalibawang. Wilayah ini merupakan kawasan tertinggi dan termasuk dalam zona dataran tinggi perbukitan Menoreh.

Ketiga kondisi fisik Kabupaten Kulon Progo membuat Kabupaten Kulon Progo kaya akan potensi alam. Kawasan Pesisir memunculkan potensi sektor perikanan dan pariwisata dengan daya tarik pemandangan pantai selatan Jawa. Kawasan Pesisir dan Kawasan Dataran juga disebut menjadi kawasan beragam budidaya dengan penggunaan lahan berupa pertanian lahan kering. Di Kawasan Pegunungan, terdapat Kawasan Perbukitan Menoreh yang membentang di wilayah barat menawarkan pesona pegunungan yang telah dioptimalkan sebagai tempat wisata menarik bagi masyarakat. Kawasan ini sekaligus membatasi provinsi DIY dengan Jawa Tengah.

3.2 STRUCTURE

Analisis Structure dalam konteks kesiapan daerah berfokus pada penelaahan aspek struktural yang membentuk pondasi pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Kulon Progo. Struktur disini mencakup tata kelembagaan pemerintahan, perangkat regulasi, infrastruktur dasar, pola pemanfaatan ruang, hingga keterkaitan antar sektor yang menjadi tulang punggung penyelenggaraan pembangunan daerah. Dengan memahami kondisi struktur yang ada, dapat diidentifikasi sejauh mana kapasitas kelembagaan, aturan main, serta infrastruktur pendukung telah selaras dengan kebutuhan transformasi menuju Smart City. Analisis ini penting untuk melihat kekuatan maupun keterbatasan struktural yang dapat mempengaruhi implementasi program, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan strategi penguatan kapasitas daerah agar penerapan Smart City di Kulon Progo berjalan efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

3.2.1. KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (PEOPLE)

Dalam konteks analisis *Structure*, aspek sumber daya manusia (SDM) menjadi elemen kunci yang menentukan kapasitas Kabupaten Kulon Progo dalam mengimplementasikan program

Smart City. SDM di sini tidak hanya mencakup aparatur pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga masyarakat sebagai pengguna sekaligus penggerak ekosistem digital. Kualitas, kompetensi, serta distribusi SDM akan sangat mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan keberhasilan transformasi menuju tata kelola yang cerdas. Oleh karena itu, analisis terhadap kondisi SDM perlu menyoroti tingkat pendidikan, literasi digital, sehingga dapat diketahui sejauh mana struktur sumber daya manusia di Kulon Progo siap mendukung implementasi Smart City yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

Tabel 3. 2 Analisis Kualitas SDM Kabupaten Kulon Progo

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Jumlah komunitas minat bakat/hobi/kreatif di daerah	Komunitas Sastra (Regas), Komunitas membaca (NarasiKU) Komunitas Seni, Desa Wisata Budaya Komunitas Fotografi (Wana Paksi Jatimulyo), Komunitas Motor Trail (ICTM), Perkumpulan Peternak Kambing PE Kulon Progo (PPKKP), Komunitas Pesepeda (KSKP), Komunitas Pencinta satwa (Exopet Kulon Progo), KIM (Komunitas Informasi Masyarakat), Forum Bisnis (ForbisKU)	✓		
2	Adanya komunitas pengembang/developer perangkat lunak TIK di daerah	Pengembangan bandwidth dan beberapa aplikasi di Kelurahan yang menjadi BUMDes		✓	
3	Adanya digital startup di daerah	Ada *software developer* <5 (delapanbit, bugel)		✓	

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
4	Adanya perguruan tinggi di daerah	Ada (UNY Wates, Field Research Center UGM, IKIP PGRI Wates, Universitas Janabadra Wates, Universitas Ahmad Dahlan, UT, STTNas)		✓	
5	Jumlah penerima beasiswa perguruan tinggi dari pemerintah daerah	117 orang (APBD & Non-APBD)		✓	
6	Jumlah tindakan pelanggaran ketertiban umum dalam satu tahun	Tindak lanjut atas aduan pelanggaran 14 Kegiatan penertiban rutin 347 (mayoritas dari reklame)	✓		
7	Jumlah angka kriminalitas dalam satu tahun	2024 : 228 2025 : 2025 (sumber polres KP) mayoritas pencurian/penggelapan			✓
8	Jumlah tindakan perusakan fasilitas umum dalam satu tahun	Nihil	✓		
9	Jumlah kegiatan tawuran antar kelompok warga dalam satu tahun	NIHIL (sumber Polres KP)	✓		

Sumber: Forum Group Discussion Kabupaten Kulon Progo,2025, diolah

Commented [1]: Ingin menulis kuantitas atau tahun?

Berdasarkan pada komponen-komponen yang tertera pada tabel diatas, didapati bahwa kesiapan Kabupaten Kulon Progo pada aspek kualitas sumber daya manusia memiliki hasil yang bervariasi. Dari sembilan komponen yang mencakup komponen komunitas, *startup*, pendidikan, dan tindak kriminalitas terdapat dua komponen yang terindikasi baik, tiga komponen terindikasi sedang, dan empat komponen yang terindikasi buruk. Indikasi buruk dari dua komponen pengembangan digital, baik dari sisi komunitas maupun *startup* dapat menjadi indikasi minimnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap teknologi. Hal ini pun diperparah dengan masih sedikitnya perguruan tinggi yang berada di Kabupaten Kulon Progo sebagai indikator pendukung pendidikan dari daerah ini yang membuat belum banyaknya masyarakat yang melek terhadap pendidikan, analisis ini pun didukung dengan belum adanya data pada komponen penerima beasiswa di daerah ini. Dan disebabkan karena masih kurang meleknya masyarakat terhadap pendidikan berakibat pada tingkat kriminalitas yang tinggi di Kabupaten Kulon Progo, tetapi perlu dicatat bahwa dari 279 kasus kriminalitas tidak terdapat kasus tindakan perusakan fasilitas umum dan tawuran dalam jangka waktu satu tahun terakhir ini.

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo tercatat sebanyak 444.994 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata hanya 0,05 persen per tahun dalam periode 2020–2024 (Kulon Progo Dalam Angka, 2024). Angka ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di Kulon Progo cenderung stagnan dan relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi maupun nasional. Dari sisi distribusi, kepadatan penduduk rata-rata mencapai 759 jiwa per kilometer persegi, yang memperlihatkan adanya tekanan pada pemanfaatan ruang di wilayah perkotaan seperti Wates, sementara kecamatan di wilayah perbukitan dan pesisir masih memiliki kepadatan lebih rendah. Dinamika kependudukan yang relatif lambat ini berimplikasi pada tantangan dan peluang pembangunan: di satu sisi dapat mengurangi tekanan pada penyediaan infrastruktur dasar, namun di sisi lain juga berpotensi menurunkan dinamika ekonomi lokal karena minimnya bonus demografi. Dengan demikian, kondisi demografi Kulon Progo perlu dikelola melalui kebijakan kependudukan, pemerataan layanan publik, serta strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu mendukung visi pembangunan daerah ke depan.

Berdasarkan data Kulon Progo dalam Angka 2025, jumlah penduduk di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan distribusi yang bervariasi antar kapanewon. Wilayah dengan proporsi penduduk terbesar adalah Kapanewon Pengasih (11,99 persen), disusul Sentolo (11,33 persen) dan Wates (11,10 persen), yang juga mencatat kepadatan tertinggi mencapai 1.543,51 jiwa/km². Sementara itu, wilayah perbukitan seperti Samigaluh dan Girimulyo memiliki kepadatan terendah, masing-masing 428,15 jiwa/km² dan 450,02 jiwa/km², sehingga distribusi penduduk Kabupaten Kulon Progo yang rata-rata 759,01 jiwa/km² cenderung tidak merata. Kondisi demografis ini berimplikasi pada kebutuhan kebijakan pembangunan yang adaptif terhadap karakter wilayah, di mana kawasan perkotaan membutuhkan penguatan infrastruktur layanan dasar, sedangkan kawasan perbukitan dan pinggiran memerlukan strategi pemerataan pelayanan.

Tabel 3. 3 Distribusi Persentase dan Kepadatan Penduduk Menurut Kapanewon Kabupaten Kulon Progo

Kapanewon	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km²
Temon	6,56%	803,63

Wates	11,10%	1.543,51
Panjatan	8,82%	879,95
Galur	7,38%	997,62
Lendah	9,30%	1.163,30
Sentolo	11,33%	957,66
Pengasih	11,99%	865,28
Kokap	8,05%	485,29
Girimulyo	5,55%	450,02
Nanggulan	7,03%	790,17
Kalibawang	6,22%	522,68
Samigaluh	6,67%	428,15
Kabupaten Kulon Progo	100,00%	759,01

Sumber: Kulon Progo dalam angka 2025

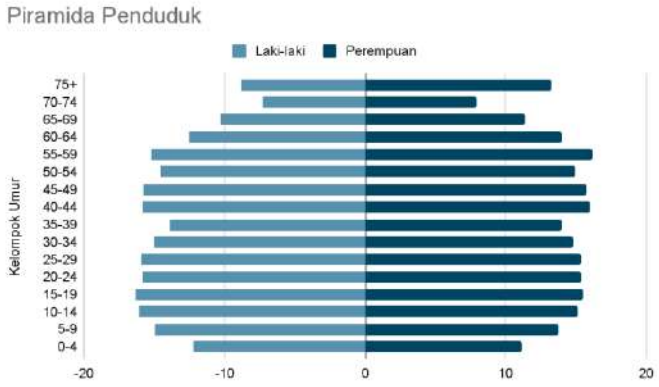

Gambar 3. 4 Piramida Penduduk Kabupaten Kulon Progo

Sumber: Kulon Progo dalam angka 2025

Dari sisi kualitas hidup, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kulon Progo mengalami tren peningkatan stabil dari 74,48 pada tahun 2020 menjadi 76,18 pada tahun 2024, mencerminkan adanya perbaikan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Sejalan dengan itu, Indeks Pembangunan Gender (IPG) juga menunjukkan perbaikan, meskipun fluktuatif, dengan capaian tertinggi 95,54 pada 2022 dan sedikit menurun ke 95,27 pada 2023. Pencapaian ini memperlihatkan bahwa kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan semakin menyempit, mendukung arah pembangunan yang lebih inklusif.

Gambar 3. 5 Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Kulon Progo

Sumber: Kulon Progo dalam angka 2025

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kulon Progo menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam tujuh tahun terakhir, meskipun dengan sedikit fluktuasi pada tahun terakhir. Berdasarkan data, nilai IPG pada 2017 tercatat sebesar 94,93 dan terus mengalami kenaikan bertahap menjadi 95,03 pada 2018, 95,05 pada 2019, 95,07 pada 2020, serta 95,09 pada 2021. Peningkatan paling signifikan terjadi pada 2022 dengan capaian 95,54, sebelum sedikit menurun ke 95,27 pada 2023. Secara umum, capaian ini mencerminkan semakin kecilnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kulon Progo, khususnya dalam akses pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup. Namun, fluktuasi pada tahun 2023 menandakan masih adanya tantangan dalam menjaga keberlanjutan pengarusutamaan gender, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih progresif untuk memperkuat peran perempuan di bidang ekonomi, politik, dan sosial agar indeks ini dapat terus meningkat secara stabil di tahun-tahun mendatang.

Gambar 3. 6 Indeks Pembangunan Gender Kulon Progo

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 - 2045

Jika dilihat dari aspek pendidikan, kondisi kependudukan masih menunjukkan tantangan struktural. Pada semester I tahun 2025, jumlah penduduk yang belum sekolah mencapai 74.745 jiwa dan yang belum tamat SD sebesar 37.881 jiwa, sementara lulusan SD tercatat 84.935 jiwa. Sebaliknya, tingkat pendidikan menengah ke atas relatif lebih baik, dengan lulusan SLTA mencapai 137.140 jiwa serta lulusan S1 sebesar 24.932 jiwa, meskipun lulusan pascasarjana (S2 dan S3) masih sangat terbatas, yakni hanya 1.415 jiwa dan 56 jiwa. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kualitas SDM melalui peningkatan akses pendidikan tinggi dan program pelatihan vokasional untuk mendukung transformasi ekonomi daerah.

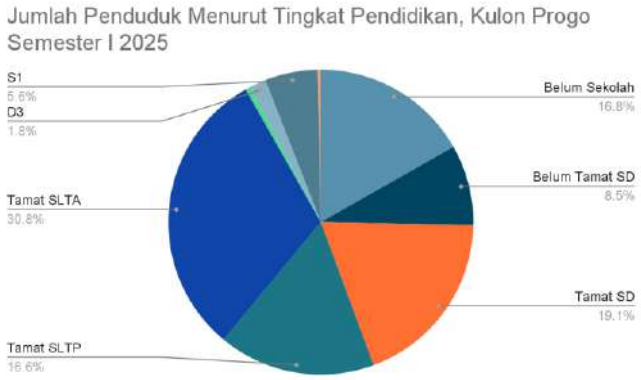

Gambar 3. 7 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Semester I 2025

Sumber: Kulon Progo dalam angka 2025

Dari sisi ketenagakerjaan, tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kulon Progo menunjukkan penurunan positif, dari 2,80 persen pada 2022 menjadi 2,01 persen pada 2024. Hal ini sejalan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang relatif tinggi, meskipun fluktuatif, yakni 78,83 persen pada 2022, turun menjadi 75,75 persen pada 2023, dan kembali naik menjadi 78,57 persen pada 2024. Data ini memperlihatkan bahwa secara legal dan struktural, angkatan kerja di Kulon Progo cukup aktif, namun masih membutuhkan penguatan keterampilan agar sejalan dengan kebutuhan lapangan kerja baru, khususnya di sektor industri, pariwisata, dan layanan digital yang menjadi tulang punggung Smart City.

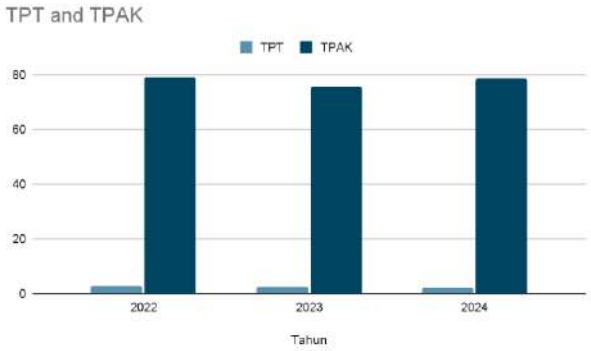

Gambar 3. 8 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab. Kulon Progo

Sumber: Kulon Progo dalam angka 2025

3.2.2. KUALITAS SUMBER DAYA PEMERINTAHAN (MANAGERIAL)

Pemerintah Daerah menjadi faktor penentu kesuksesan implementasi *Smart City* di daerah. Pada sub-bab ini, akan dilakukan analisis terkait Sumber Daya Pemerintahan. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi kesiapan Pemerintah Daerah Kulon Progo dalam mengembangkan dan mengimplementasikan *Smart City* di Kulon Progo.

Tabel 3. 4 Kualitas Sumber Daya Pemerintahan (Managerial)

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Persentase pegawai dengan jenjang pendidikan S2 ke atas	7.6 % (470 dari 6130 orang) (sumber BKPSDM)		✓	
2	Jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan Ilmu Komputer/Teknik Informatika	57 orang			✓
3	Jumlah relawan TIK di daerah	Belum ada, Ada Duta Digital/Kader Digital dari Kemendes di beberapa Kelurahan yang mengimplementasikan program Smart Village			✓
4	Persentase jumlah unit	5.697 (Sumber		✓	

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
	komputer (PC & Laptop) terhadap jumlah pegawai	Asset BKAD)			
5	Persentase pegawai berusia 50 tahun ke atas terhadap jumlah pegawai	37,67% (2276 dari 6042)		✓	
6	Persentase pegawai berusia 40 -50 tahun terhadap jumlah pegawai	25,48% (1540 dari 6042)		✓	
7	Persentase pegawai berusia 25 -40 tahun terhadap jumlah pegawai	36,34% (2196 dari 6042)		✓	
8	Jumlah sistem informasi yang digunakan di pemerintah daerah	Kulon Progo : 44 Pusat : 58			
9	Persentase ketersediaan jaringan broadband access terhadap jumlah kantor pemerintahan	100% Semua sudah terhubung	✓		
10	Persentase ketersediaan jaringan LAN/WAN di kantor pemerintahan	100%	✓		
11	Jumlah lokasi wireless internet (hotspot) di kawasan perkantoran pemerintahan	140 titik (40 OPD, 88 Kalurahan/Kelurahan (69 publik Smartcityku, dan 19 privat) +12 ruang publik)	✓		
12	Ketersediaan data center (baik yang dikelola sendiri maupun manage service) untuk kepentingan pemerintahan	Ada, Ruang Server di Dinas Kominfo	✓		
13	Ketersediaan rencana dan SOP mitigasi bencana terhadap data pemerintahan	Ada		✓	
14	Ketersediaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang interoperable	SIPD Penganggaran	✓		
15	Ketersediaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang interoperable	SIPD Penatausahaan	✓		
16	Ketersediaan sistem informasi kantor virtual pemerintah daerah yang interoperable	Ada, Persuratan elektronik pada aplikasi *suratku* SIASN (Manajemen Kepegawaian),	✓		

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
		Tanda Tangan Elektronik			
17	Ketersediaan sistem informasi monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang interoperable	Monevku, Simpel	✓		
18	Ketersediaan sistem informasi pengelolaan kepegawaian daerah yang interoperable	Simasneg	✓		
19	Ketersediaan sistem informasi pengelolaan legislasi daerah yang interoperable	JDIH Kulon Progo	✓		
20	Ketersediaan sistem informasi pelayanan publik yang interoperable	OSS, SIcantik, SIM BG, Eling Pajak	✓		

Sumber: Forum Group Discussion Kabupaten Kulon Progo,2025, diolah

Berdasarkan data isian tabel di atas, dapat dikatakan bahwa kesiapan Kabupaten Kulon Progo dalam hal Sumber Daya Pemerintahan dapat dikatakan baik. Dari 20 komponen di atas, sepuluh komponen memiliki interpretasi baik, lima komponen dengan interpretasi cukup, dan dua dengan interpretasi buruk. Sebagai contoh, ketersediaan jaringan LAN/WAN di kantor pemerintahan dan jumlah lokasi wireless internet (hotspot) di kawasan perkantoran pemerintahan telah mencapai 100%, sehingga menunjang kelancaran komunikasi dan koordinasi antar divisi kerja secara digital. Selain itu, ketersediaan sistem informasi pemerintahan yang interoperable seperti SIPD, Sismangeng, JDIH Kulon Progo, OSS, dan Slicantik, juga menunjukkan kesiapan yang baik dalam mendukung layanan publik berbasis teknologi. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan mempercepat layanan kepada masyarakat.

Sementara itu, terdapat indikator dengan kategori sedang perlu untuk ditingkatkan, seperti persentase pegawai dengan jenjang pendidikan S2 ke atas yang masih dibawah 10%. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas aparatur dalam hal kualifikasi pendidikan formal masih perlu diperkuat untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah yang lebih kompleks.

Gambar 3. 9 Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kulon Progo

Pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai penggerak utama dalam mewujudkan implementasi Smart City. Oleh karena itu, kualitas sumber daya pemerintahan, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), menjadi faktor penentu dalam keberhasilan transformasi digital dan tata kelola pemerintahan cerdas di Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan data Kulon Progo dalam Angka 2025, jumlah PNS pada tahun 2024 mencapai 4.794 orang, terdiri dari 1.863 laki-laki dan 2.931 perempuan, yang mencerminkan dominasi tenaga kerja aparatur perempuan di birokrasi daerah.

Pemerintah Daerah menjadi faktor penentu kesuksesan implementasi *Smart City* di daerah. Pada sub-bab ini, akan dilakukan analisis terkait Sumber Daya Pemerintahan. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi kesiapan Pemerintah Daerah Kulon Progo dalam mengembangkan dan mengimplementasikan *Smart City* di Kulon Progo. Tabel di bawah menunjukkan kondisi terkini Sumber Daya Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 3. 5 Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Sekolah Dasar (SD)	16	-	16
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	64	1	65
Sekolah Menengah Atas (SMA)	423	146	569
Diploma I/Akta I	3	4	7
Diploma II/Akta II	30	32	62
Diploma III/Akta III	156	511	667
Diploma IV/Akta IV	50	109	159
S1/Sarjana	876	1.907	2.783
S2/Pasca Sarjana	245	220	465
S3/Doktor/Ph.D	-	1	1
Jumlah	1.863	2.931	4.794

Sumber: Kulon Progo dalam angka, 2025

Dari segi tingkat pendidikan, sebagian besar PNS di Kulon Progo telah menempuh pendidikan tinggi. Sebanyak 2.783 orang (58,05%) berpendidikan S1, 465 orang berpendidikan S2, dan 1 orang telah menempuh jenjang S3. Meskipun demikian, masih terdapat 650 orang (13,56%) dengan pendidikan SMA atau lebih rendah, yang menunjukkan adanya disparitas kualifikasi pendidikan yang perlu diantisipasi melalui program pelatihan dan peningkatan kapasitas. Di sisi lain, distribusi PNS menurut golongan memperlihatkan dominasi pada golongan III (2.989 orang) dan IV (1.289 orang), yang menandakan mayoritas ASN berada pada jenjang menengah ke atas sehingga memiliki pengalaman dan kewenangan yang relatif lebih kuat dalam mendukung proses perumusan kebijakan maupun implementasi program Smart City.

Tabel 3. 6 Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin dan Golongan

Pangkat/Golongan/Ruang		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Golongan I				
1. I/A	Juru Muda	-	-	-
2. I/B	Juru Muda Tingkat I	-	-	-
3. I/C	Juru	-	-	-
4. I/D	Juru Tingkat I	8	-	8
Golongan II				
5. II/A	Pengatur Muda	19	1	20
6. II/B	Pengatur Muda Tingkat I	36	1	37
7. II/C	Pengatur	112	75	187
8. II/D	Pengatur Tingkat I	113	151	264
Golongan III				
9. III/A	Penata Muda	279	268	547
10. III/B	Penata Muda Tingkat I	359	705	1.064
11. III/C	Penata	143	297	440
12. III/D	Penata Tingkat I	303	635	938
Golongan IV				
13. IV/A	Pembina	283	447	730
14. IV/B	Pembina Tingkat I	142	274	416
15. IV/C	Pembina Utama Muda	63	75	138
16. IV/D	Pembina Utama Madya	2	2	4

Pangkat/Golongan/Ruang		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
17. IV/E	Pembina Utama	1	-	1
Jumlah		**1.863**	**2.931**	**4.794**

Sumber: Kulon Progo dalam angka, 2025

Tabel 3. 7 Jumlah PNS per OPD / Instansi

OPD / Instansi	Jumlah PNS
Kantor Pertanahan	67
Badan Pusat Statistik	42
Balai Besar Veteriner (BBVET) Wates	87
Kantor Kementerian Agama	714
Pengadilan Agama Wates	27
Pengadilan Negeri Wates Kelas I B	50
Kejaksaan Negeri Kulon Progo	87
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates	83
Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wates	68
KODIM 0731/Kulon Progo	271
Kanminvetcad IV-17/KLP	18
Kepolisian Resort Kulon Progo	1.145
Komando Sektor Hanudnas / Satuan Radar 215 Congot	47
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara	15
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wates	20

Sumber: Kulon Progo dalam angka 2025

Secara kelembagaan, distribusi PNS tersebar pada berbagai instansi vertikal dan perangkat daerah, dengan jumlah terbesar berada di lingkungan Kepolisian Resor Kulon Progo (1.145 orang), Kantor Kementerian Agama (714 orang), serta Kodim 0731/Kulon Progo (271 orang). Sementara itu, instansi strategis lain seperti Badan Pusat Statistik (42 orang), Kejaksaan

Negeri Kulon Progo (87 orang), dan Pengadilan Negeri Wates (50 orang) juga memainkan peran penting dalam mendukung fungsi pelayanan publik dan penegakan hukum. Namun, untuk mendukung agenda digitalisasi pemerintahan, jumlah tenaga teknis, khususnya di bidang teknologi informasi, masih relatif terbatas dengan hanya 398 orang yang berada dalam jabatan fungsional teknis (termasuk tenaga IT). Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam hal ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi digital mumpuni untuk mendukung transformasi menuju Smart City.

Secara keseluruhan, struktur sumber daya pemerintahan di Kabupaten Kulon Progo sudah memiliki basis aparatur dengan pendidikan tinggi yang cukup kuat, serta didominasi oleh ASN pada golongan menengah dan senior. Namun, masih terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat kapasitas teknis di bidang digital, mengingat digitalisasi menjadi pilar utama Smart City. Upaya peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan teknologi, rekrutmen tenaga ahli IT, dan penguatan kapasitas manajerial menjadi langkah strategis yang harus ditempuh agar pemerintah daerah dapat memainkan peran optimal dalam mengawal transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang cerdas, efisien, dan berkelanjutan.

3.2.3 Kapasitas Keuangan Daerah (Capital)

Kapasitas keuangan daerah merupakan salah satu aspek kunci dalam menilai kesiapan Kabupaten Kulon Progo menuju implementasi Smart City. Ketersediaan dan pengelolaan sumber daya fiskal menjadi faktor penentu dalam menjamin keberlanjutan program, baik melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat, maupun sumber-sumber pendanaan alternatif seperti investasi dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pada bagian ini, dilakukan analisis terhadap kondisi aktual kapasitas keuangan Kabupaten Kulon Progo, yang mencakup struktur pendapatan, belanja, efisiensi anggaran, alokasi untuk program Smart City, serta dukungan investasi dan CSR. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana kemampuan keuangan daerah dapat menjadi modal utama dalam mendukung transformasi digital dan pembangunan berkelanjutan di Kulon Progo.

Tabel 3. 8 Kapasitas Keuangan Daerah (Capital)

No.	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Persentase Nilai Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah	22,72%		✓	
2	Nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Lalu	5,28%		✓	
3	Persentase Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah	41.84%	✓		
4	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap	10.57%		✓	

No.	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
	Total Belanja Daerah				
5	Jumlah Anggaran untuk Belanja Smart City yang dapat dialokasikan di dalam APBD Tahun 2024	26,65% (Smart City 2024)		✓	
6	Jumlah Anggaran untuk Belanja Smart City yang dapat dialokasikan di dalam APBD Tahun 2025	N/A		✓	
7	Jumlah program pembangunan untuk mendukung Smart City di daerah	N/A		✓	
8	Nilai investasi masuk yang mendukung pembangunan daerah	354.783 Juta	✓		
9	Jumlah sumber-sumber pendanaan pembangunan alternatif yang dapat digunakan untuk mendukung smart city	CSR (sudah ada forum CSR di Bapperida), Pemasangan lampu hias; bedah rumah tidak layak		✓	

Sumber: Forum Group Discussion Kabupaten Kulon Progo,2025, diolah

Berdasarkan hasil analisis, dari sembilan komponen kapasitas keuangan Kabupaten Kulon Progo, terdapat tujuh komponen yang masuk kategori baik, sementara dua komponen lainnya masih dalam proses pengembangan data. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum keuangan daerah berada pada posisi yang kuat dan mendukung, dengan indikator kinerja yang stabil, efisiensi pengelolaan anggaran yang terjaga, serta adanya dukungan investasi dan sumber pembiayaan alternatif yang aktif melalui forum CSR.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Kulon Progo memiliki fondasi fiskal yang solid untuk menopang pembangunan, termasuk dalam mendorong agenda Smart City. Komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran cukup besar bagi program Smart City pada tahun 2024 juga menjadi bukti keseriusan dalam membangun tata kelola cerdas. Adapun komponen yang belum terdata di tahun 2025 justru memberikan peluang untuk perbaikan pencatatan dan penyusunan perencanaan yang lebih matang, sehingga ke depan dukungan keuangan terhadap Smart City dapat dipetakan dengan lebih jelas dan konsisten.

Dengan demikian, kapasitas keuangan Kulon Progo dapat disimpulkan sangat mendukung bagi akselerasi transformasi menuju Smart City yang inovatif dan berkelanjutan.

Dari sisi pengelolaan anggaran, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun lalu sebesar 5,28 persen menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam pelaksanaan APBD. Proporsi belanja juga memperlihatkan keseimbangan yang relatif sehat, di mana belanja pegawai sebesar 41,84 persen dari total belanja daerah masih dalam kategori baik, tidak membebani struktur anggaran secara berlebihan. Namun, alokasi belanja infrastruktur hanya sebesar 10,57 persen dari total belanja, yang menunjukkan perlunya peningkatan porsi investasi fisik untuk mendukung konektivitas dan layanan dasar sebagai fondasi Smart City.

Dukungan anggaran untuk program Smart City sendiri terbilang cukup besar, yaitu 26,65 persen dari APBD tahun 2024, meskipun untuk tahun 2025 alokasinya belum terdata. Selain dukungan fiskal internal, masuknya investasi swasta juga berperan signifikan, dengan nilai investasi pada 2024 mencapai Rp354,78 miliar, yang memperlihatkan daya tarik ekonomi Kulon Progo di mata investor. Sumber pendanaan alternatif pun mulai berkembang, antara lain melalui forum CSR di bawah koordinasi Bapperida yang telah berkontribusi pada program seperti pemasangan lampu hias dan bedah rumah tidak layak huni. Hal ini memperlihatkan adanya sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

Gambar 3. 10 Proporsi Pendapatan Daerah Kulon Progo 2024

Sumber: Kulon Progo dalam angka, 2025

Secara umum, tren dana perimbangan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, yakni dari Rp972,69 miliar pada 2021 menjadi Rp1,03 triliun pada 2024, sehingga memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk pembangunan. Dengan komposisi pendapatan dan belanja yang cukup baik, ditambah dengan adanya dukungan investasi dan CSR, kapasitas keuangan Kabupaten Kulon Progo dapat dikategorikan dalam kondisi baik untuk menopang keberlanjutan program Smart City. Namun demikian, optimalisasi belanja infrastruktur dan peningkatan diversifikasi sumber pembiayaan tetap diperlukan agar transformasi menuju Smart City tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat, tetapi juga dapat mengandalkan kemandirian fiskal dan kolaborasi multipihak.

Gambar 3. 11 Realisasi Dana Perimbangan Kab. Kulon Progo Tahun 2021 - 2024 (Miliar Rp)

Sumber: Kulon Progo dalam angka, 2025

3.3 INFRASTRUCTURE

Infrastruktur merupakan pilar utama dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus menjadi fondasi bagi terwujudnya konsep smart city. Ketersediaan jaringan jalan, transportasi, energi, telekomunikasi, air bersih, sanitasi, serta fasilitas publik lainnya tidak hanya berfungsi sebagai penunjang aktivitas masyarakat sehari-hari, tetapi juga sebagai katalis bagi pertumbuhan ekonomi, konektivitas sosial, dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah. Dalam konteks smart city, infrastruktur tidak lagi dipandang sekadar fisik, melainkan juga harus terintegrasi dengan teknologi digital agar mampu menghadirkan layanan yang efisien, responsif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis infrastruktur di Kabupaten Kulon Progo dilakukan untuk memahami kondisi eksisting, tantangan, dan peluang yang tersedia, sehingga strategi pembangunan ke depan dapat diarahkan pada penguatan sarana prasarana yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung transformasi digital daerah.

3.3.1 ANALISIS KESIAPAN INFRASTRUKTUR FISIK DAERAH

Infrastruktur fisik merupakan salah satu elemen mendasar yang menentukan keberhasilan implementasi smart city, karena kualitas dan ketersediaan sarana prasarana akan langsung mempengaruhi efektivitas layanan publik serta kenyamanan masyarakat. Infrastruktur jalan, fasilitas penerangan, kawasan perkantoran, pusat perdagangan, pendidikan, hingga kesehatan menjadi fondasi utama yang harus dipastikan kesiapan dan keberlanjutannya. Oleh karena itu, analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi terkini infrastruktur fisik Kabupaten Kulon Progo, dengan menilai aspek jalan, penerangan, rambu, kawasan penunjang aktivitas ekonomi, serta sarana layanan dasar. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesiapan infrastruktur fisik sebagai pilar penting dalam mendukung transformasi digital dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo.

Gambar 3. 12 Analisis Kesiapan Infrastruktur Fisik Daerah

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Persentase jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik	48.1%	✓		
2	Persentase panjang pedestrian (fasilitas pejalan kaki) per panjang jalan beraspal	N/A		✓	
3	Persentase lampu jalan yang berfungsi dengan baik	16.3% (2085 dari 12781)		✓	
4	Persentase rambu dan petunjuk jalan dalam kondisi baik	N/A		✓	
5	Adanya kawasan perkantoran untuk kegiatan bisnis	Masuk di Kawasan Aerotropolis	✓		
6	Adanya kawasan perbelanjaan untuk kegiatan perdagangan masyarakat	Ada	✓		
7	Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik	N/A		✓	
8	Persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan dalam kondisi baik	43,48% layanan sudah terakreditasi	✓		

Sumber: Forum Group Discussion Kabupaten Kulon Progo,2025, diolah

Kesiapan infrastruktur fisik Kabupaten Kulon Progo menunjukkan variasi capaian yang menarik untuk dicermati. Dari sembilan komponen yang dinilai, terdapat lima komponen yang masuk kategori baik, yakni persentase jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik (48,1%), persentase lampu jalan yang berfungsi dengan baik (16,3% atau 2.085 dari 12.781 titik), ketersediaan kawasan perkantoran yang mendukung kegiatan bisnis (terintegrasi dalam Kawasan Aerotropolis), ketersediaan kawasan perbelanjaan untuk perdagangan masyarakat, serta persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan dalam kondisi baik (43,48% layanan sudah terakreditasi). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian infrastruktur dasar di Kulon Progo telah tersedia dan berfungsi mendukung aktivitas masyarakat maupun perekonomian lokal.

Dengan komposisi hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesiapan infrastruktur fisik Kabupaten Kulon Progo tergolong cukup baik, dengan lima indikator utama sudah memenuhi kategori positif, tanpa adanya indikator yang masuk kategori sedang maupun buruk. Ke

depan, fokus penguatan dapat diarahkan pada peningkatan persentase infrastruktur yang berfungsi optimal serta penyediaan data yang lebih lengkap, sehingga kapasitas infrastruktur fisik dapat menjadi fondasi kuat dalam mendukung implementasi smart city yang berkelanjutan.

Tabel 3. **9** Kondisi Jalan di Kabupaten Kulon Progo, 2023

No	Status Jalan	Kondisi								Total Jalan
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
		km	%	km	%	km	%	Km	%	
1	Nasional	16,38	57,84	11,54	40,75	6,4	1,41	0	0	28,32
2	Provinsi	81,89	46,76	37,27	21,28	38,23	21,83	17,75	10,13	175,14
3	Kabupaten	557	42,58	403	30,82	166	12,68	182	13,93	1.308,65

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo, 2024

Kondisi jaringan jalan di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan data tahun 2024 menunjukkan bahwa kualitas jalan masih menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama di ruas jalan kabupaten. Dari total panjang jalan kabupaten 1.308,65 km, hanya 42,58% (557 km) yang dalam kondisi baik, sementara sisanya berada dalam kondisi sedang (30,82% atau 403 km), rusak ringan (12,68% atau 166 km), dan rusak berat (13,93% atau 182 km). Kondisi jalan provinsi relatif lebih baik dengan 46,76% (81,89 km) dalam kondisi baik, meskipun masih terdapat 21,83% (38,23 km) rusak ringan dan 10,13% (17,75 km) rusak berat dari total 175,14 km jalan provinsi. Sementara itu, jalan nasional yang melintasi Kulon Progo tercatat lebih terjaga, dengan 57,84% (16,38 km) dalam kondisi baik dan sisanya 40,75% (11,54 km) dalam kondisi sedang, serta hanya 1,41% (6,4 km) yang mengalami rusak ringan.

Data ini memperlihatkan bahwa secara umum jalan nasional relatif lebih terpelihara, sementara jalan kabupaten masih memerlukan perhatian serius, khususnya pada ruas yang masuk kategori rusak berat. Kondisi ini memiliki implikasi langsung terhadap mobilitas masyarakat, efisiensi distribusi barang dan jasa, serta dukungan terhadap sektor ekonomi lokal, termasuk akses menuju kawasan strategis seperti Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) dan kawasan Aerotropolis. Oleh karena itu, peningkatan kualitas jalan kabupaten menjadi prioritas penting dalam mendukung konektivitas wilayah, memperkuat daya saing daerah, serta mendukung implementasi smart city yang menuntut mobilitas dan aksesibilitas yang lancar.

Tabel 3. 10 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan 2022 - 2024

Kondisi Jalan	Unit/Satuan	2022	2023	2024
Baik	Km	302,642	300,886	305,986
Sedang		150,331	155,990	157,590
Rusak		100,235	98,453	96,053
Rusak Berat		82,818	80,696	76,396
Total		**636,025**	**636,025**	**636,025**

Sumber: Kab. Kulon Progo dalam angka, 2025

Data panjang jalan di Kabupaten Kulon Progo periode 2022–2024 menunjukkan adanya perbaikan kualitas infrastruktur jalan meskipun total panjang jalan tetap sama, yakni 636,03 km. Pada tahun 2022, jalan dalam kondisi baik tercatat sepanjang 302,64 km dan mengalami sedikit fluktuasi pada 2023 (300,89 km), sebelum kembali meningkat menjadi 305,99 km pada 2024. Jalan dengan kondisi sedang juga menunjukkan tren meningkat dari 150,33 km (2022) menjadi 157,59 km (2024), yang menandakan adanya peningkatan jalan yang masih layak fungsi meskipun memerlukan pemeliharaan. Sementara itu, panjang jalan dengan kondisi rusak terus menurun dari 100,24 km (2022) menjadi 96,05 km (2024), dan jalan dengan kondisi rusak berat juga mengalami perbaikan signifikan dari 82,82 km (2022) menjadi 76,40 km (2024).

Perkembangan ini mencerminkan adanya upaya berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan melalui pemeliharaan dan perbaikan rutin. Tren menurunnya jalan rusak dan rusak berat menjadi indikator positif bahwa intervensi pembangunan infrastruktur telah berjalan efektif. Kondisi ini penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta memperkuat konektivitas wilayah, khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kesiapan implementasi smart city yang mengutamakan aksesibilitas dan konektivitas yang andal.

Gambar 3. 13 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Kulon Progo (km) Tahun 2022 - 2024

Sumber: Kab. Kulon Progo dalam angka, 2025

Gambar 3.3.1 memperlihatkan perkembangan kondisi jalan di Kabupaten Kulon Progo selama periode 2022–2024 dengan tren yang cenderung positif. Jalan dalam kondisi baik meningkat dari 302,64 km pada 2022 menjadi 305,99 km pada 2024, atau naik sekitar 1,1% dalam tiga tahun setelah sempat turun sedikit pada 2023 (300,89 km). Jalan dengan kondisi sedang juga bertambah dari 150,33 km (2022) menjadi 157,59 km (2024), meningkat sekitar 4,8%. Sebaliknya, panjang jalan dengan kondisi rusak menurun dari 100,23 km (2022) menjadi

96,05 km (2024), atau berkurang sekitar 4,2%, sementara jalan rusak berat mengalami penurunan signifikan dari 82,82 km (2022) menjadi 76,40 km (2024), setara dengan penurunan 7,7%.

Tren ini menunjukkan bahwa upaya pemeliharaan dan rehabilitasi jalan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mulai memberikan hasil nyata. Penurunan panjang jalan rusak dan rusak berat menandakan adanya pergeseran kualitas infrastruktur ke kategori sedang dan baik. Kondisi ini tidak hanya mendukung peningkatan mobilitas masyarakat dan efisiensi distribusi barang, tetapi juga memperkuat konektivitas wilayah strategis seperti kawasan Aerotropolis dan jalur menuju Yogyakarta International Airport (YIA).

Tabel 3. 11 Banyaknya Jembatan Dirinci Menurut Status per Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo, 2024

Kapanewon	Jembatan			
	Negara	Provinsi	Kabupaten	Total
Temon	-	-	10	10
Wates	-	-	12	12
Panjatan	-	-	8	8
Galur	-	-	2	2
Lendah	-	-	1	1
Sentolo	-	-	5	5
Pengasih	-	-	21	21
Kokap	-	-	22	22
Girimulyo	-	-	12	12
Nanggulan	-	-	14	14
Kalibawang	-	-	27	27
Samigaluh	-	-	23	23
Total	**-**	**-**	**157**	**157**

Sumber: Kab. Kulon Progo dalam angka, 2025

Data tahun 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo memiliki 157 jembatan yang seluruhnya berstatus sebagai jembatan kabupaten, tanpa ada jembatan berstatus nasional maupun provinsi. Distribusi jembatan ini tersebar di seluruh kapanewon dengan jumlah yang bervariasi. Kapanewon dengan jumlah jembatan terbanyak adalah Kalibawang (27 jembatan) dan Samigaluh (23 jembatan), disusul oleh Kokap (22 jembatan) dan Pengasih (21 jembatan). Sebaliknya, kapanewon dengan jumlah jembatan paling sedikit adalah Lendah dengan hanya 1 jembatan, diikuti oleh Galur (2 jembatan) dan Sentolo (5 jembatan). Distribusi ini mencerminkan kebutuhan infrastruktur yang berbeda-beda di tiap wilayah, yang umumnya dipengaruhi oleh kondisi geografis dan topografi masing-masing kapanewon.

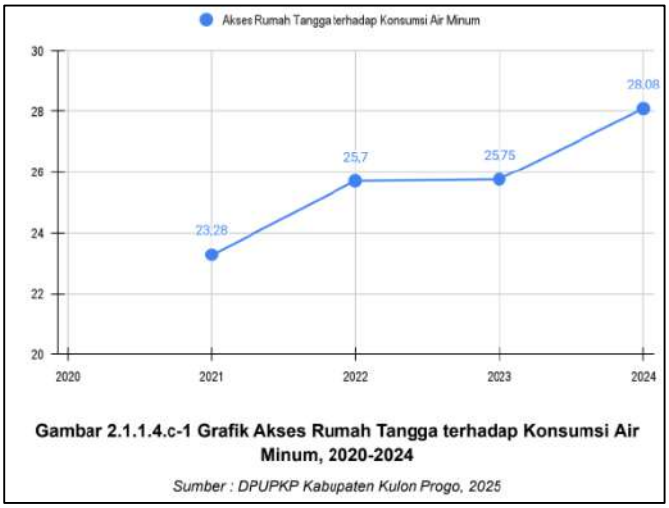

Gambar 2.1.1.4.c-1 Grafik Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum, 2020-2024

Sumber : DPUPKP Kabupaten Kulon Progo, 2025

Gambar 3. 14 Persentase Akses Air Bersih dan Air Minum

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD 2025 - 2029

Data akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum di Kabupaten Kulon Progo pada periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, meskipun masih relatif rendah dibanding target nasional. Pada tahun 2021, persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak tercatat sebesar 23,28%, kemudian meningkat cukup signifikan menjadi 25,70% pada 2022. Pertumbuhan relatif stagnan pada 2023 dengan capaian 25,75%, sebelum kembali melonjak pada 2024 hingga mencapai 28,08%. Kenaikan lebih dari 4,8 poin persentase dalam tiga tahun terakhir ini menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk memperluas cakupan layanan air bersih dan air minum layak bagi masyarakat.

Meski demikian, angka tersebut juga mengindikasikan bahwa sebagian besar rumah tangga di Kulon Progo masih belum terlayani akses air minum layak, sehingga dibutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur air bersih, baik melalui jaringan perpipaan PDAM, pengelolaan sumber mata air lokal, maupun program berbasis komunitas. Peningkatan akses air minum layak ini tidak hanya penting dari sisi kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi indikator penting dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) serta prasyarat pengembangan smart city yang menuntut kualitas hidup masyarakat lebih baik. Dengan adanya dukungan kebijakan dalam RPJMD 2025–2029, perluasan layanan air bersih dan air minum diharapkan dapat terus dipercepat sehingga target pemerataan akses dapat tercapai secara lebih inklusif.

Tabel 3. 12 Jumlah Produksi Air dan Air Disalurkan 2024

Bulan	Produksi Air (M^3)	Air Disalurkan (M^3)
Januari	958.002	698.059
Februari	868.893	620.676
Maret	776.371	567.346
April	909.089	658.628
Mei	876.725	642.786
Juni	889.088	660.419
Juli	883.442	655.467
Agustus	914.713	674.970
September	939.082	692.452
Oktober	949.052	700.317
November	962.895	705.528
Desember	876.929	643.297

Sumber: Kab. Kulon Progo dalam angka, 2025

Data tahun 2024 menunjukkan bahwa produksi air di Kabupaten Kulon Progo relatif stabil dengan rata-rata di atas 880 ribu m³ per bulan, tertinggi pada November (962.895 m³) dan terendah pada Maret (776.371 m³), sementara air yang disalurkan selalu lebih rendah, yakni berkisar antara 567.346 m³ hingga 705.528 m³. Selisih antara produksi dan penyaluran mencerminkan adanya kehilangan air (non-revenue water) yang cukup signifikan, rata-rata sekitar 25–30% setiap bulan. Tren penyaluran meningkat pada paruh kedua tahun, terutama Agustus–November, menandakan distribusi yang lebih optimal dibanding awal tahun. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ketersediaan air bersih bagi masyarakat sudah cukup terjamin, namun masih diperlukan perbaikan dalam efisiensi jaringan dan pengelolaan distribusi untuk menekan kehilangan air. Optimalisasi ini penting agar pelayanan air bersih semakin merata dan berkualitas, sekaligus memperkuat fondasi layanan dasar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan implementasi smart city di Kabupaten Kulon Progo.

Gambar 3. 15 Infrastruktur Penahan Ombak di Kulon Progo

3.3.2 Analisis Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah

Infrastruktur digital merupakan salah satu elemen vital dalam mewujudkan smart city, karena

ketersediaan jaringan telekomunikasi, akses broadband, listrik, serta layanan digital publik menjadi penopang utama transformasi layanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian berbasis teknologi. Oleh karena itu, analisis kesiapan infrastruktur digital Kabupaten Kulon Progo dilakukan untuk memetakan kondisi eksisting dan mengidentifikasi potensi pengembangan lebih lanjut. Penilaian mencakup cakupan jaringan seluler, ketersediaan broadband, akses internet publik, keandalan pasokan listrik, serta pemanfaatan teknologi digital di sekolah dan fasilitas kesehatan.

Tabel 3. 13 Analisis Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Persentase luas area dengan jaringan 5G, 4G atau 3G	90% (4G)	✓		
2	Tersedianya jaringan broadband access untuk masyarakat	Jaringan Broadband Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, XL Smart		✓	
3	Jumlah lokasi wireless untuk publik	12 Kominfo, 10 DAIS, 41 Bakti Komdigi		✓	
4	Persentase rumah tangga yang terlayani listrik	99,9% (PLN)			✓
5	Jumlah kejadian pemadaman listrik setiap bulan (dalam jam)	6,91 jam/Bln thn 2024 (PLN)		✓	
6	Jumlah sekolah yang memiliki akses internet	SD/MI : 359 SMP/MTs : 81 SMA/SMK/MA : 61 Tahun 2024	✓		
7	Jumlah rumah sakit yang menggunakan sistem layanan elektronik/online	9 rumah sakit		✓	

Sumber: Forum Group Discussion Kabupaten Kulon Progo,2025, diolah

Secara keseluruhan, infrastruktur digital Kabupaten Kulon Progo tergolong sangat baik, dengan lima indikator utama sudah memenuhi kategori baik dan hanya satu indikator yang masih berada pada kategori sedang, yaitu terkait keandalan pasokan listrik. Capaian ini memperlihatkan kesiapan digital yang kuat, mulai dari cakupan jaringan telekomunikasi, broadband, akses internet publik, hingga adopsi layanan digital di sekolah dan rumah sakit. Dengan kondisi tersebut, Kulon Progo sudah memiliki fondasi digital yang solid untuk mendukung implementasi smart city. Ke depan, fokus penguatan dapat diarahkan pada peningkatan stabilitas pasokan listrik dan pemerataan infrastruktur digital di wilayah perdesaan, sehingga manfaat transformasi digital dapat dirasakan lebih inklusif oleh seluruh masyarakat.

3.3.3 Analisis Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah

Infrastruktur sosial merupakan sarana penting yang menunjang interaksi masyarakat, penguatan modal sosial, serta peningkatan kualitas hidup warga di tingkat lokal. Keberadaan fasilitas seperti pusat kegiatan belajar, ruang terbuka publik, balai warga, fasilitas olahraga, dan perpustakaan umum menjadi penopang dalam membangun masyarakat yang inklusif, produktif, dan berdaya saing. Dalam konteks smart city, infrastruktur sosial tidak hanya berfungsi sebagai ruang fisik, tetapi juga sebagai wadah penguatan partisipasi warga, literasi digital, dan kolaborasi komunitas. Oleh karena itu, analisis ini dilakukan untuk memetakan kondisi aktual infrastruktur sosial di Kabupaten Kulon Progo dan sejauh mana kesiapan fasilitas tersebut mendukung pengembangan kota cerdas yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3. 14 Analisis Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Adanya pusat kegiatan belajar masyarakat di tingkat kelurahan/desa	Ada	✓		
2	Adanya Ruang Terbuka Publik di tingkat RW	Ada	✓		
3	Adanya aula/balai warga di tingkat kelurahan/desa	Ada	✓		
4	Jumlah fasilitas olahraga di tingkat kelurahan/desa	25% dari keseluruhan kalurahan			✓
5	Ketersediaan perpustakaan umum yang dikelola oleh pemerintah daerah	Ada	✓		

Sumber: Forum Group Discussion Kabupaten Kulon Progo,2025, diolah

Hasil analisis menunjukkan bahwa dari lima komponen infrastruktur sosial di Kabupaten Kulon Progo, terdapat empat komponen yang masuk kategori baik, yaitu keberadaan pusat kegiatan belajar masyarakat, ruang terbuka publik di tingkat RW, balai warga, dan perpustakaan umum yang dikelola pemerintah daerah. Sementara itu, terdapat satu komponen yang masuk kategori buruk, yakni jumlah fasilitas olahraga yang baru tersedia di sekitar 25% kelurahan/desa, sehingga masih belum merata. Tidak ada komponen yang masuk kategori sedang. Secara keseluruhan, kondisi ini menggambarkan bahwa infrastruktur sosial Kulon Progo sudah cukup kuat dan mendukung partisipasi masyarakat, meskipun pemerataan fasilitas olahraga masih menjadi prioritas untuk ditingkatkan. Dengan komposisi baik (4), sedang (0), buruk (1), arah pembangunan ke depan dapat difokuskan pada penguatan fasilitas yang belum merata agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh manfaat secara setara dalam mendukung implementasi smart city berbasis inklusi sosial.

3.4 Suprastructure

Suprastructure atau kerangka kebijakan menjadi elemen penting dalam memastikan arah, kesinambungan, dan keberlanjutan implementasi smart city di daerah. Regulasi, peraturan kepala daerah, masterplan, serta mekanisme evaluasi merupakan instrumen strategis yang

memberikan legitimasi sekaligus pedoman pelaksanaan pembangunan berbasis smart city. Dengan adanya regulasi formal, keselarasan visi pembangunan, dan jaminan keberlanjutan program, maka transformasi digital dan pembangunan cerdas di Kabupaten Kulon Progo dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis pada bagian ini berfokus pada kesiapan kebijakan daerah yang menjadi payung hukum sekaligus penggerak utama implementasi smart city.

Tabel 3. 15 Kesiapan Kebijakan Daerah

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Adanya Peraturan Daerah tentang Dewan Smart City	Ada, Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 244/A/2025 tentang Pembentukan Dewan Smart City Kabupaten Kulon Progo	✓		
2	Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang Tim Pelaksana Smart City Daerah	Ada	✓		
3	Adanya Masterplan Smart City daerah	Ada	✓		
4	Adanya Peraturan Daerah tentang Masterplan Smart City Daerah	Ada, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2024	✓		
5	Adanya visi pembangunan Smart City yang selaras dengan visi misi pembangunan daerah	Ada	✓		
6	Adanya kepastian terhadap keberlanjutan program smart city dalam jangka panjang	Ada	✓		
7	Adanya mekanisme evaluasi dan apresiasi kinerja terhadap aparatur dan organisasi yang berprestasi dalam melaksanakan program smart city	Ada		✓	

Sumber: Forum Group Discussion Kabupaten Kulon Progo,2025, diolah

Berdasarkan hasil penilaian, seluruh tujuh komponen suprastruktur kebijakan smart city di Kabupaten Kulon Progo berada pada kategori baik (7), sedang (0), buruk (0). Hal ini ditunjukkan dengan adanya Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 244/A/2025 tentang Pembentukan Dewan Smart City, Peraturan Kepala Daerah terkait Tim Pelaksana Smart City, Masterplan Smart City daerah, serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 yang menjadi dasar hukum implementasi smart city di tingkat daerah. Selain itu, visi smart city juga telah diselaraskan dengan visi misi pembangunan daerah, dengan kepastian keberlanjutan program dalam jangka panjang, serta mekanisme evaluasi dan apresiasi kinerja bagi aparatur yang terlibat. Kondisi ini menggambarkan bahwa secara suprastruktur, Kabupaten Kulon Progo memiliki kerangka regulasi dan kebijakan yang sangat kuat dan komprehensif untuk mendukung keberhasilan smart city. Dengan fondasi kebijakan yang solid, implementasi smart city di Kulon Progo berpeluang besar berjalan konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Tabel 3. 16 Kesiapan Kelembagaan Daerah

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Adanya Dewan Smart City Daerah	Ada	✓		
2	Adanya Tim Pelaksana Smart City Daerah	Ada	✓		
3	Adanya SOP smart city daerah	Ada	✓		
4	Adanya tata pamong yang bertugas sebaga anggota Tim Pelaksana Smart City di setiap OPD	Ada	✓		

Sumber: Forum Group Discussion Kabupaten Kulon Progo,2025, diolah

Hasil penilaian menunjukkan bahwa seluruh empat komponen kesiapan kelembagaan smart city di Kabupaten Kulon Progo berada dalam kategori baik (4), sedang (0), buruk (0). Hal ini ditunjukkan dengan telah terbentuknya Dewan Smart City Daerah, adanya Tim Pelaksana Smart City, penyusunan SOP smart city daerah, serta keberadaan tata pamong di setiap OPD yang ditugaskan sebagai anggota tim pelaksana. Kondisi ini mencerminkan bahwa kelembagaan smart city di Kulon Progo telah memiliki fondasi yang kuat, tidak hanya dari sisi regulasi, tetapi juga dalam praktik operasional. Dengan kesiapan kelembagaan yang komprehensif ini, implementasi smart city di Kulon Progo berpotensi berjalan lebih terarah, terkoordinasi, dan berkesinambungan, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inovatif, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel 3. 17 Dasar Kebijakan Smart City

No	Nomor Referensi Kebijakan	Tentang/Ruang Lingkup	Sudah diterapkan/belum	Jenis Kebijakan
1	Adanya lembaga pengabdian masyarakat dari		✓	

	perguruan tinggi di daerah			
2	Adanya forum-forum swadaya masyarakat pendukung Smart City,		✓	

Sumber: Forum Group Discussion Kabupaten Kulon Progo,2025, diolah

Hasil penilaian menunjukkan bahwa terdapat beberapa dasar kebijakan yang mendukung kesiapan kelembagaan Smart City di Kabupaten Kulon Progo. Dari tabel di atas terlihat bahwa telah ada lembaga pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi serta forum-forum swadaya masyarakat yang berperan sebagai mitra pendukung Smart City. Kedua aspek ini telah diimplementasikan secara nyata, sehingga memperkuat peran kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam pengembangan Smart City. Kondisi ini mencerminkan bahwa kelembagaan Smart City di Kulon Progo tidak hanya bertumpu pada regulasi formal, tetapi juga mendapat dukungan dari partisipasi masyarakat dan dunia pendidikan. Dengan adanya sinergi kelembagaan tersebut, pengembangan Smart City di Kulon Progo berpotensi lebih partisipatif, inklusif, serta berkelanjutan dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Tabel 3. 18 Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Adanya lembaga pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi di daerah	Ada	✓		
2	Adanya forum-forum swadaya masyarakat pendukung Smart City,	Ada	✓		
3	Jumlah forum swadaya masyarakat pendukung smart city	N/A			
4	Jumlah forum pendukung smart city yang memiliki sekretariat definitif	N/A			
5	Dukungan operasional pemerintah terhadap forum pendukung smart city	Ada	✓		
6	Adanya partisipasi pakar dari	Ada	✓		

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
	perguruan tinggi lokal dalam Dewan Smart City Daerah				

Sumber: Forum Group Discussion Kabupaten Kulon Progo,2025, diolah

Analisis terhadap kesiapan kelembagaan smart city di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan hasil yang sangat positif, di mana seluruh komponen telah terpenuhi dengan baik. Keberadaan Dewan Smart City Daerah memberikan arah strategis dalam perumusan kebijakan, sementara Tim Pelaksana Smart City Daerah berperan sebagai motor penggerak implementasi di lapangan. Selain itu, tersedianya SOP smart city menjadi instrumen penting untuk memastikan keseragaman standar kerja, koordinasi lintas sektor, serta efektivitas pelaksanaan program. Tidak kalah penting, adanya tata pamong di setiap OPD yang ditugaskan sebagai anggota tim pelaksana smart city memperkuat sinergi antar perangkat daerah sehingga setiap program dapat berjalan lebih terintegrasi. Dengan capaian baik (4), sedang (0), buruk (0), dapat disimpulkan bahwa kelembagaan smart city Kulon Progo telah memiliki struktur yang lengkap dan fungsional, yang menjadi modal utama dalam mempercepat realisasi transformasi digital serta mendukung tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, responsif, dan berkelanjutan.

BAB IV
ANALISIS STRATEGIS PEMBANGUNAN SMART CITY

4.1 ANALISIS KESENJANGAN

Tabel 4. 1 Aspek dan Indikator Analisa Kesenjangan di Kabupaten Kulon Progo

Dimensi *Smart City*	Sub Dimensi *Smart City*	Indikator RPJM
Smart Governance	Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik
		Indeks SPBE & Pemerintah Digital
		Indeks Kepuasan Masyarakat
	Manajemen Birokrasi yang Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)
		Indeks Maturitas SPIP
	Efisiensi Kebijakan Publik	Indeks Reformasi Hukum

Dimensi *Smart City*	Sub Dimensi *Smart City*	Indikator RPJM
Smart Branding	Pariwisata	Laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman
		Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan
		Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang tersertifikasi
	Ekosistem Bisnis	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita
		Indeks Daya Saing Daerah
		Persentase Pertambahan Industri Kecil dan Menengah
	Tata Wajah Kota	Jumlah lampu hias pedestrian kota
Smart Economy	Ekosistem Industri	Rasio Kewirausahaan
		Nilai PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
		Pembentukan Modal Tetap Bruto
		Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan
	Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
		Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
		Tingkat Kemiskinan (%)
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)
		Tingkat Kemiskinan
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
		Laju Pertumbuhan Ekonomi
	Ekosistem Transaksi Keuangan	Total Kredit per PDRB
Smart Living	Harmonisasi Tata Ruang	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum
		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)

Dimensi *Smart City*	Sub Dimensi *Smart City*	Indikator RPJM
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan
	Kesehatan	Usia Harapan Hidup
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)
		Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)
		Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
	Transportasi	Rasio Konektivitas Antar Wilayah
		Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota *)
Smart Society	Interaksi Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
		Persentase Desa Mandiri
	Ekosistem Belajar/ Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca
		Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi

Dimensi *Smart City*	Sub Dimensi *Smart City*	Indikator RPJM
		Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia di atas 15 Tahun
		Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Keamanan Masyarakat	Indeks Resiko Bencana (IRB)
Smart Environment	Proteksi Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
	Tata Kelola Sampah dan Limbah	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
	Tata Kelola Energi	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)

4.1.1 SMART GOVERNANCE

Tabel 4. 2 Analisa Kesenjangan di Kabupaten Kulon Progo Pada Dimensi Smart Governance

Dimensi *Smart City*	Sub Dimensi *Smart City*	Indikator RPD	Satuan	Kondisi Eksisting	Target 2029	Gap
Smart Governance	Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	angka	4,55	4,65	0,10
		Indeks SPBE & Pemerintah Digital	angka	3,91 (SPBE)	1,61 - 1,70	2,3 - 2,21
		Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	86,797	87,047	0,250
	Manajemen Birokrasi yang Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	angka	86,30	86,55	0,25
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	angka	83,75	88,1	4,35

Dimensi *Smart City*	Sub Dimensi *Smart City*	Indikator RPD	Satuan	Kondisi Eksisting	Target 2029	Gap
		Daerah (AKIP)				
		Indeks Maturitas SPIP	angka	3,211	3,261	0,05
	Efisiensi Kebijakan Publik	Indeks Reformasi Hukum	angka	N/A	N/A	N/A

Berdasarkan hasil analisis dimensi Smart Governance, kesenjangan pada dimensi pemerintahan dapat dikatakan kecil. Seluruh indikator RPD menunjukkan hasil ketimpangan yang relatif kecil terhadap target 2029. Besarnya komitmen pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mengadopsi teknologi dalam pelayanan publik terlihat pada indikator Indeks SPBE dan Pemerintah Digital yang telah melampaui target. Akan tetapi, pemerintah Kabupaten Kulon Progo perlu meningkatkan akuntabilitas kinerja, hal ini disebabkan karena kesenjangan yang relatif tinggi pada indikator AKIP dibandingkan indikator lainnya dalam Smart Governance.

4.1.2 Smart Branding

Tabel 4. 3 Analisa Kesenjangan di Kabupaten Kulon Progo Pada Dimensi Smart Branding

Dimensi *Smart City*	Sub Dimensi *Smart City*	Indikator RPD	Satuan	Kondisi Eksisting	Target 2029	Gap
Smart Branding	Pariwisata	Laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman	angka	655,55	2.020,43	1.364,88
		Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan	orang	1.926.051	2.232.821	306.770

Dimensi *Smart City*	Sub Dimensi *Smart City*	Indikator RPD	Satuan	Kondisi Eksisting	Target 2029	Gap
		Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang tersertifikasi	orang	166	216	50
	Ekosistem Bisnis	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	angka (Rp)	37.976,26	54.036	16.059,74
		Indeks Daya Saing Daerah	angka	3,73	3,98	0,25
		Persentase Pertambahan Industri Kecil dan Menengah	persentase	16.092	16.847	755
	Tata Wajah Kota	Jumlah lampu hias pedestrian kota	angka	N/A	N/A	N/A

Berdasarkan hasil analisis dimensi Smart Branding, terlihat bahwa Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya tarik wisata sekaligus kontribusi untuk perekonomian daerah. Tantangan terbesar terdapat dalam indikator PDRB sektor penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman yang memerlukan peningkatan secara signifikan untuk dapat mencapai target 2029. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan langkah-langkah strategis dalam memperkuat kualitas layanan, memperbanyak pilihan, serta optimalisasi promosi destinasi secara luas.

Dimensi *Smart Branding* di Kabupaten Kulon Progo terdiri atas sub-dimensi pariwisata, ekosistem bisnis, dan tata wajah kota. Secara umum, dimensi ini memiliki peran strategis untuk meningkatkan citra daerah, menarik kunjungan wisatawan, memperkuat daya saing ekonomi, dan membentuk identitas daerah yang khas.

Pada sub-dimensi pariwisata, laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman berada pada 655,55 sedangkan target tahun 2029 adalah 2.020,43. Hal ini menyisakan gap yang cukup besar yakni 1.364,88. Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan tercatat 1.926.051 orang, sementara target 2029 berada di 2.232.821 orang, dengan gap 306.770 kunjungan. Sementara itu, jumlah sumber daya pariwisata yang tersertifikasi telah mencapai 166 orang, namun masih perlu peningkatan untuk mencapai target 216 orang di tahun 2029.

Pada aspek ekosistem bisnis, PDRB per kapita saat ini berada di angka Rp 37.976,26 sedangkan target 2029 sebesar Rp 54.036 menyisakan gap Rp 16.059,74. Indeks daya saing daerah berada pada 3,73 dari target 3,98 sehingga diperlukan peningkatan sebesar 0,25 poin. Persentase pertambahan industri kecil dan menengah (IKM) berada di angka 16.092% hampir mendekati target 16,847% dengan gap yang relatif kecil yaitu 0,755.

Untuk sub-dimensi tata wajah kota, indikator jumlah lampu hias pedestrian kota belum memiliki data eksisting maupun target, sehingga belum dapat dilakukan analisis kesenjangan. Akan tetapi, hal ini menunjukkan perlu adanya pengadaan data dan penetapan target agar indikator ini dapat terukur dan menjadi bagian strategi penguatan identitas kota.

Secara keseluruhan, dimensi *Smart Branding* Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi besar untuk dikembangkan, terutama melalui peningkatan pertumbuhan sektor pariwisata, sertifikasi sumber daya pariwisata, penguatan daya saing daerah, serta penambahan fasilitas kota yang mendukung citra daerah. Saat ini, fokus pada percepatan indikator dengan yang gap besar seperti PDRB sektor pariwisata dan jumlah kunjungan wisatawan menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai keberhasilan target di tahun 2029.

4.1.3 SMART ECONOMY

Tabel 4. 4 Analisa Kesenjangan di Kabupaten Kulon Progo Pada Dimensi Smart Economy

Dimensi *Smart City*	Sub Dimensi *Smart City*	Indikator RPJM	Satuan	Kondisi Eksisting	Target 2029	Gap
Smart Economy	Ekosistem Industri	Rasio Kewirausahaan	angka	2,11	2,95-3,95	0,84-1,84
		Nilai PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Miliar Rupiah	655,55	1.063,43-1.831,90	1.176,35

Dimensi *Smart City*	Sub Dimensi *Smart City*	Indikator RPJM	Satuan	Kondisi Eksisting	Target 2029	Gap
		Pembentukan Modal Tetap Bruto	angka	41,98	41,06 - 42,2	0,22
		Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Miliar Rupiah	1.709,15	2.778,58	1069 ,43
	Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	angka	2,01	1,90-2,30	0,11
		Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan	Ribu Rupiah	10.990	12.253	2.663
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persentase	78,57	76,56 - 79,06	0,49
		Tingkat Kemiskinan (%)	angka	15,62	12,40 - 13,40	2,22
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	persentase	5,82	13,59-15,59	9,77
		Tingkat Kemiskinan	persentase	15,62	12,40	3,22
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	persentase	32,31	49,72-54,72	22.41
		Laju Pertumbuhan Ekonomi	persentase	4,77	5,46	0,69
	Ekosistem Transaksi Keuangan	Total Kredit per PDRB	persentase	23,87	27,76-30,70	6,83

Dimensi *Smart Economy* Kabupaten Kulon Progo terbagi menjadi sub-dimensi ekosistem industri, kesejahteraan masyarakat, dan ekosistem transaksi keuangan. Dimensi ini menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing daerah.

Pada sub-dimensi ekosistem industri, rasio kewirausahaan berada pada 2,11 sedangkan target 2029 adalah 2,95 - 3,95 dengan gap antara 0,84 hingga 1,84. Nilai PDRB penyediaan akomodasi makanan dan minuman tercatat Rp 655,55 miliar, jauh dari target di Rp 1.063,43 - 1.831,90 miliar, dengan hap Rp 1.176,35 miliar pada batas atas. Pembentukan modal tetap bruto berada pada 41,98 mendekati target 41,06-42,20 dengan gap yang relatif kecil yaitu 0,22 poin. Sementara itu, nilai PDRB sektor industri pengolahan mencapai Rp 1.709,15 miliar masih di bawah target Rp 2.778,58 miliar dengan gap Rp 1.069,43 miliar.

Pada sub-dimensi kesejahteraan masyarakat, tingkat pengangguran terbuka (TPT) berada di 2,01%, sedikit di bawah target 1,90-2,30%, dengan gap yaitu 0,11%. Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan saat ini Rp 10.990, masih dibawah target Rp 12.253 dengan gap Rp 2.663. Tingkat kemiskinan berada pada 15,62% sedangkan target di 2029 adalah 12,40-13,40% yang masih terdapat gap 2,22 sehingga perlu diatasi dengan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja.

Pada sub-dimensi ekosistem transaksi keuangan dengan indikator total kredit per PDRB, data eksisting berada pada 23,87% dengan target tahun 2029 sekitar 27,76-30,70% dengan gap 6,83. Hal ini menunjukkan perlu meningkatkan daya serap kredit dan akses pembiayaan produktif bagi pelaku usaha melalui optimalisasi program kredit berbunga rendah.

Secara keseluruhan, dimensi *Smart Economy* Kabupaten Kulon Progo menunjukkan kekuatan pada tingkat pengangguran yang rendah, partisipasi angkatan kerja yang tinggi. Namun, terdapat kesenjangan besar pada nilai PDRB sektor pariwisata dan industri pengolahan. Fokus strategi perlu untuk diarahkan pada peningkatan sektor unggulan, pengembangan kewirausahaan, dan menguatkan daya saing industri lokal untuk dapat mencapai target tahun 2029.

4.1.4 SMART LIVING

Tabel 4. 5 Analisa Kesenjangan di Kabupaten Kulon Progo Pada Dimensi Smart Living

Dimensi *Smart City*	Sub Dimensi *Smart City*	Indikator RPJM	Satuan	Kondisi Eksisting	Target 2029	Gap
Smart Living	Harmonisasi Tata Ruang	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	angka	48,40	52,79	4,39
		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak,	angka	N/A	60,36	

Dimensi *Smart City*	Sub Dimensi *Smart City*	Indikator RPJM	Satuan	Kondisi Eksisting	Target 2029	Gap
		Terjangkau dan Berkelanjutan (%)				
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	angka	8,15	9,10	0,95
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	persentase	97,75	99,63	1,88
	Kesehatan	Usia Harapan Hidup	angka	75,49	75,80 - 80,05	4,46
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	angka	86,88	94,12	7,24
		Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	angka	10,24	10,07	0,17
		Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	angka	58,53	67,14	8.61
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)	persentase	99,25	99,26-99,95	0,70
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	angka	8,15	9,10	0,95

Dimensi *Smart City*	Sub Dimensi *Smart City*	Indikator RPJM	Satuan	Kondisi Eksisting	Target 2029	Gap
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	angka	20,1	14,2	5,9
	Transportasi	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	angka	0,817	0,817	-
		Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota *)				

Dimensi *Smart Living* pada Kabupaten Kulon Progo meliputi sub-dimensi transportasi, kesehatan, dan harmonisasi tata ruang. Secara umum, capaian indikator menunjukkan kemajuan positif pada beberapa aspek, namun terdapat kesenjangan yang perlu ditangani agar target tahun 2029 dapat tercapai. Pada sub-dimensi transportasi, rasio konektivitas antar wilayah telah mencapai 0,817 yang menunjukkan bahwa jaringan jalan antarwilayah sudah cukup terhubung. Pada sub-dimensi kesehatan, sejumlah indikator telah menunjukkan performa yang baik. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 99,25% dengan kesenjangan relatif kecil terhadap target pada 2029 yaitu 99,95%. Angka kematian bayi juga sudah rendah berada pada 10,24 per 1.000 kelahiran hidup mendekati target yakni 10,07. Usia Harapan Hidup berada pada 75,49 tahun dengan target 80,05 tahun yang masih menyisakan gap 4,46 tahun dan perlu diupayakan dengan penguatan layanan kesehatan.

Pada sub-dimensi harmonisasi tata ruang, indeks infrastruktur pekerjaan umum berada pada 48,40 dengan target 52,79 menyisakan gap 4,39. Indikator rumah tangga depan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan belum memiliki data eksisting tetapi target 2029 ditetapkan sebesar 60,36% sehingga memerlukan penyusunan strategi pemenuhannya. Secara keseluruhan, dimensi *Smart Living* Kabupaten Kulon Progo menunjukkan kekuatan pada cakupan layanan kesehatan dasar dan konektivitas wilayah.

4.1.5 SMART SOCIETY

Tabel 4. 6 Analisa Kesenjangan di Kabupaten Kulon Progo Pada Dimensi Smart Society

Dimensi *Smart City*	Sub Dimensi *Smart City*	Indikator RPJM	Satuan	Kondisi Eksisting	Target 2029	Gap
Smart Society	Interaksi Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	angka	N/A	69,01 - 70,02	
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	angka	0,145	0,088-0,136	0,057
		Persentase Desa Mandiri	angka	82,76	94,25	11,49
	Ekosistem Belajar/ Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca	angka	N/A	83,16-85,13	
		Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	angka	N/A	49,60-51,60	
		Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia di atas 15 Tahun	angka	9,2	9,74	0,54
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	angka	14,49	14,93 - 16,01	1,52

Dimensi *Smart City*	Sub Dimensi *Smart City*	Indikator RPJM	Satuan	Kondisi Eksisting	Target 2029	Gap
	Keamanan Masyarakat	Indeks Resiko Bencana (IRB)	angka	152,65	130,17 - 135,17	22.48
		Indeks Ketahanan Daerah	angka	0,64	0,69	0,05

Dimensi *Smart Society* mencakup interaksi masyarakat, pendidikan, dan keamanan masyarakat. Telah dilakukan analisis terhadap kondisi eksisting dan target ke depan yang diidentifikasi masuk ke dalam dimensi *Smart Society* di Kabupaten Kulon Progo, temuan-temuan tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan sub-dimensi sebagai berikut:

a. Interaksi Masyarakat
    a. Belum tersedianya data Indeks Pembangunan Kebudayaan, sehingga belum dapat diperoleh kesimpulan.
    b. Indikator IKG kondisi eksisting masih memiliki kesenjangan dan perlu ditingkatkan untuk mencapai target 2029.
    c. Indikator Persentase Desa Mandiri menjadi hal yang perlu diperhatikan lebih, mengingat kesenjangan antara kondisi eksisting dan target 2029 sebesar 11,49.

b. Ekosistem Belajar/Pendidikan
    a. Belum tersedianya data untuk kedua indikator Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi, sehingga belum dapat diperoleh kesimpulan.
    b. Pada indikator Rata-rata lama sekolah, terdapat kesenjangan antara kondisi eksisting dengan target 2029 sebesar 0,54.
    c. Kesenjangan juga masih ditemukan pada indikator Harapan Lama Sekolah, dimana sebesar 0,44 menuju interval bawah dan 1,52 menuju interval atas dari kondisi eksisting ke target 2029.

c. Keamanan Masyarakat
    a. Indikator IRB menunjukkan kesenjangan yang tergolong besar, yaitu sebesar 22,48. Dalam mengatasi hal ini, peningkatan kapasitas diperlukan melalui kesiapan sistem peringatan dan infrastruktur tahan bencana.
    b. Dalam konteks yang lebih umum, kapasitas daerah menghadapi berbagai guncangan eksternal yang tercermin melalui IKD juga masih menunjukkan kesenjangan. Harapannya target IKD sebesar 0,69 pada 2029 dapat terpenuhi, melihat nilai gap yang relatif kecil pada kondisi eksisting.

4.1.6 Smart Environment

Tabel 4. 7 Analisa Kesenjangan di Kabupaten Kulon Progo Pada Dimensi Smart Environment

Dimensi *Smart City*	Sub Dimensi *Smart City*	Indikator RPJM	Satuan	Kondisi Eksisting	Target 2029	Gap
Smart Environment	Proteksi Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	angka	65,46	70,12	4,66
	Tata Kelola Sampah dan Limbah	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Persentase	14,01	27,07	13,06
	Tata Kelola Energi	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	angka	N/A	N/A	N/A

Dimensi *Smart Environment* mencakup proteksi lingkungan, tata kelola sampah dan limbah, serta tata kelola energi. Dimensi ini memiliki peran penting dalam menjaga kualitas lingkungan dan mengurangi dampak negatif pembangunan terhadap ekosistem daerah.

Pada sub-dimensi proteksi lingkungan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah berada pada angka 65,46 sedangkan target tahun 2029 adalah 70,12 menyisakan gap 4,66 poin. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan secara umum sudah cukup baik, namun peningkatan diperlukan melalui pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya alam, dan penguatan kebijakan perlindungan lingkungan.

Pada sub-dimensi tata kelola sampah dan limbah, persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah masih berada pada 14,01% jauh di bawah target 27,07% sehingga menyisakan gap 13,06. Kondisi ini mengindikasi bahwa masih rendahnya kapasitas pengolahan sampah, baik dari segi infrastruktur, teknologi, maupun warga yang memilah dan mengelola sampah.

4.2 Analisis SWOT TOWS

4.2.1 Smart Governance

Tabel 4. 8 Analisis SWOT Smart Governance

Analisis *TOWS – Strength, Weakness, Opportunities and Threats*		
Faktor Internal	**Kekuatan**	**Kelemahan**
Faktor Eksternal	- Adanya Peraturan Bupati No. 100 Tahun 2018 tentang Masterplan Smart City Kabupaten Kulon Progo - Kolaborasi antar dewan, tim pelaksana, OPD, dan forum smart city sudah berjalan secara efektif dan harmonis - Seluruh OPD telah terhubung dengan layanan *wireless* - Adanya upaya pemerintah daerah untuk mengakses dana dari sumber lain seperti (DAK, CSR) - Kinerja dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (Perda/Perkada) juga menunjukkan capaian optimal, yakni 100% sepanjang lima tahun terakhir. - Beberapa OPD telah tersertifikasi ISO 27001	- Kemampuan keuangan daerah terbatas, terutama setelah covid dan adanya efisiensi sehingga menghambat belanja infrastruktur - Masyarakat belum memahami program-program smart city - Kurangnya infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia yang terampil dalam teknologi informasi. - Indeks Pelayanan Publik masih fluktuatif, salah satu penyebabnya adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan implementasi regulasi

Analisis *TOWS – Strength, Weakness, Opportunities and Threats*		
Ancaman	**Strategi Ancaman dan Kekuatan**	**Strategi Kelemahan dan Ancaman**
- Tingkat literasi digital masyarakat masih rendah - Adanya perubahan kebijakan SPBE menjadi pemerintah digital, menyebabkan pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian - Berkembangnya kejahatan keamanan informasi yang dapat mempengaruhi sistem di Kab. Kulon Progo	- Membangun sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data pemerintah dan masyarakat. - Mengadakan sosialisasi untuk peningkatan literasi digital masyarakat	- Menerapkan sistem keamanan yang berlapis, melakukan audit keamanan secara berkala, dan melatih petugas untuk mengelola keamanan sistem. - Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang pemanfaatan teknologi digital, serta memastikan ketersediaan akses internet yang terjangkau.

4.2.2 SMART BRANDING

Tabel 4. 9 Analisis SWOT Smart Branding

Analisis *TOWS – Strength, Weakness, Opportunities and Threats*		
Faktor Internal	**Kekuatan** - Adanya bandara internasional YIA - Letak geografis Kabupaten Kulon Progo membuat Kulon Progo memiliki berbagai kekayaan alam yang dapat dioptimalkan sebagai daya tarik wisata - Tumbuhnya kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap perekonomian daerah, yang dapat dikaitkan dengan meningkatnya aktivitas pariwisata dan pelayanan pendukungnya. - Adanya upacara adat dan budaya Kulon Progo yang berpotensi menjadi daya tarik wisata - Kulon Progo memiliki motif batik baru Songsong Agung Ngambararum dan Binangun Kertoharjo menggantikan motif lama Geblek Renteng.	**Kelemahan** - Perkembangan investasi masih kurang - Belum ada pendanaan alternatif lain selain dari sumber APBD untuk pengembangan smart city - Branding daerah Kulon Progo The Jewel of Java belum cukup kuat untuk menggambarkan dan mempromosikan Kulon Progo - Pada tahun 2024, tingkat hunian akomodasi dan peningkatan perjalanan wisatawan nusantara di Kulon Progo cenderung menurun
Faktor Eksternal		

Analisis *TOWS – Strength, Weakness, Opportunities and Threats*		
Peluang - Terdapat perencanaan yang strategis untuk memperindah lampu jalan di Wates - Adanya perencanaan Smart Tourism dalam pengembangan Kawasan Aerotropolis Kulon Progo yang meliputi 3 Kapanewon: Temon, Wates, Kokap	**Strategi Peluang dan Kekuatan** - Membangun fasilitas pendukung pariwisata - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kawasan pariwisata - Membuat paket wisata dan dipromosikan melalui berbagai media publikasi termasuk kerjasama dengan Angkasa Pura - - Bekerjasama dengan hotel restoran dalam penyelenggaran event dan promosi paket wisata - Launching kalender of event (gabungan event di KP yang diselenggarakan oleh OPD di KP) - Melaksanakan even rutin skala internasional, dan nasional - Membangun/menata kota wates sehingga menarik bagi masyarakat di luar Kulon Progo untuk dapat mampir ke Kota Wates	**Strategi Kelemahan dan Peluang** - Memperbarui *branding* daerah untuk meningkatkan peluang investasi - Menyusun kajian potensi investasi yang ready offer di kawasan aerotropolis - Rebranding baru dengan melihat perkembangan di Kulon Progo. - Menggandeng pihak Perguruan Tinggi dan swasta dalam pengembangan smart city - Membangun terminal ekspor sehingga bisa ekspor mandiri

Analisis *TOWS – Strength, Weakness, Opportunities and Threats*		
Ancaman - Transportasi umum yang mumpuni membuat wisatawan hanya datang ke YIA tanpa ada aktivitas yang dapat mendukung perekonomian Kulon Progo - Digitalisasi dan tren terkini berpotensi menggerus budaya lokal	**Strategi Ancaman dan Kekuatan** - Memanfaatkan teknologi informasi untuk mempromosikan budaya lokal Kulon Progo - Melakukan banyak promosi potensi unggulan baik wisata dan produk unggulan Kulon Progo - Merespons secara cepat dan efektif melalui saluran digital untuk menjaga citra positif daerah	**Strategi Kelemahan dan Ancaman** - Meningkatkan pendampingan para pelaku usaha sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk dari luar daerah - Meningkatkan sasaran kurasi produk UKM - Meningkatkan legalitas usaha pelaku UKM - Mempromosikan dan menjual produk-produk di gerai UMKM di Bandara YIA - Kolaborasi stakeholder dalam upaya menyediakan ruang-ruang promosi

4.2.3 SMART ECONOMY

Tabel 4. 10 Analisis SWOT Smart Economy

Analisis *TOWS – Strength, Weakness, Opportunities and Threats*		
Faktor Internal **Faktor Eksternal**	**Kekuatan** - Adanya peraturan daerah terkait kawasan industri, mengatur penyerapan tenaga kerja lokal dalam perusahaan-perusahaan asing yang berinvestasi - Terdapat berbagai potensi produk lokal yang sudah berhasil ekspor - Pengembangan *aerotropolis city* memunculkan	**Kelemahan** - Ketimpangan perkembangan ekonomi antara kawasan selatan (Temon, Wates, Kokap, Sentolo) dengan kawasan utara (Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo) yang masih belum banyak dijadikan sebagai strategi pembangunan menggunakan konsep smart city

Analisis *TOWS – Strength, Weakness, Opportunities and Threats*		
	beragam potensi baru untuk mendorong perekonomian Kulon Progo - Memiliki hasil bumi dan laut yang bagus karena punya waduk dan sungai dan laut selatan - Implementasi smart farming yang sudah berjalan dan berdampak bagi masyarakat	- Rasio Kewirausahaan di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan pola fluktuatif sepanjang periode 2020–2024 - Anggaran promosi daerah minim - Literasi teknologi di pedesaan, terutama di sektor pertanian, masih rendah. - Kurangnya infrastruktur penunjang usaha juga turut mempengaruhi tingginya angka kemiskinan di Kulon Progo
Peluang - Terjalinnya kerja sama dengan JAICA - Perkembangan teknologi yang terus berkembang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi - Adanya peluang pengembangan smart farming di bidang lain seperti perikanan - Adanya KOperasi Desa Merah Putih yang sudah terbentuk di 88 kelurahan di Kulon Progo	**Strategi Peluang dan Kekuatan** - Memaksimalkan produksi komoditas unggulan di pertanian dan perkebunan - Pengembangan *smart farming* di sektor selain pertanian - Pengembangan kawasan di 5 (lima) program prioritas aerotropolis - Memanfaatkan PSN Jalan TOL untuk promosi produk UKM maupun tempat destinasi wisata (rest area) - Kemudahan berinvestasi yang didukung sistem perizinan online	**Strategi Kelemahan dan Peluang** - Mengadakan Pelatihan marketing e-commerce utk pelaku UMKM - Menguatkan kemitraan dengan perusahaan swasta - Pemerintah dalam pendanaan pengembangan *smart city* - Memanfaatkan sarana perdagangan yang ada khususnya pasar tradisional agar bisa menjadi tempat pemasaran hasil produk masyarakat Kulon Progo. Contoh: Hasil bumi, daging, telur, dan produk kerajinan. - Upaya pemerintah memiliki bank tanah

Analisis *TOWS – Strength, Weakness, Opportunities and Threats*		
Ancaman - Adanya proses bisnis yang dimiliki oleh warga kabupaten lain, sehingga *credit* didapat oleh kabupaten lain - Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB ADHK, Kabupaten Kulon Progo menunjukkan dinamika pertumbuhan ekonomi yang cukup fluktuatif selama periode 2021–2024	**Strategi Ancaman dan Kekuatan** - Mengarahkan belanja pemerintah ke sektor-sektor produktif dan prioritas yang memiliki efek pengganda (multiplier effect) tinggi, seperti infrastruktur digital dan fisik, pendidikan, kesehatan, serta riset dan pengembangan. - Penyederhanaan Regulasi dan Perizinan - Memastikan efektivitas penyaluran bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi. - Mendorong pertumbuhan sektor baru seperti industri teknologi, ekonomi kreatif, dan pariwisata yang berkelanjutan.	**Strategi Kelemahan dan Ancaman** - Fasilitasi Akses KUR dan Pembiayaan Mikro - Optimalisasi Koperasi Desa Merah Putih - Memfasilitasi penggunaan platform digital (e-commerce, media sosial) untuk pemasaran dan penjualan produk - Mendorong inovasi produk dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang melimpah, seperti hasil pertanian, kerajinan tangan, atau kuliner tradisional, dan mengemasnya secara modern agar memiliki nilai tambah dan daya saing - Kolaborasi Multistakeholder: Membangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah (Dinas Koperasi dan UKM), akademisi, komunitas wirausaha, sektor swasta, dan lembaga keuangan. - Optimalisasi TOMIRA dan Program Pay On Pro

4.2.4 SMART LIVING

Tabel 4. 11 Analisis SWOT Smart Living

Analisis *TOWS – Strength, Weakness, Opportunities and Threats*		
Faktor Internal	**Kekuatan**	**Kelemahan**
Faktor Eksternal	- Adanya bandara Yogya International Airport (YIA), mendukung pengembangan kawasan aerotropolis - Adanya stasiun kereta yang terhubung dengan ibukota provinsi dan negara - Adanya monitoring kualitas air secara *real-time* (onlimo) di Sungai Serang yang berada di kawasan pariwisata Glagah - Mempunyai bentang alam yang beragam yaitu pantai, dataran rendah, waduk dan pegunungan beserta kekayaan alam yang melimpah - Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh - Selama lima tahun terakhir, kinerja Urusan Kesehatan di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan tren yang cukup positif dengan beberapa capaian signifikan pada berbagai indikator kunci.	- Transportasi jalur darat (bus) terbatas - Kemampuan keuangan daerah terbatas, terutama setelah covid dan adanya efisiensi sehingga menghambat belanja infrastruktur - Perlindungan terhadap kawasan permukiman rawan bencana belum dilakukan secara konsisten - Masih ada kawasan kumuh yang ditetapkan dengan SK BUPATI KULON PROGO Nomor 53/C/2025 tentang Lokasi Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 - Gap infrastruktur antar area masih tinggi

Analisis *TOWS – Strength, Weakness, Opportunities and Threats*		
Peluang - Bentang alam dapat dikembangkan sebagai wisata unggulan - Kab. Kulon Progo telah meraih penghargaan adipura, kabupaten sehat kabupaten layak anak	**Strategi Peluang dan Kekuatan** - Pengembangan aplikasi yang menyediakan informasi obyek wisata, pemesanan tiket online dan pembayaran nontunai - Menambah penggunaan sensor untuk memantau kualitas udara atau air di area wisata, serta sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien - Penerapan teknologi untuk meningkatkan hasil pertanian - Peningkatan infrastruktur - Pelatihan dan pendampingan bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) agar masyarakat dapat mengelola dan merawat kawasan yang sudah diperbaiki.	**Strategi Kelemahan dan Peluang** - Peningkatan layanan transportasi umum (misal bus sekolah)
Ancaman - Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan strategis seperti Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), ada potensi munculnya kawasan-kawasan kumuh	**Strategi Ancaman dan Kekuatan** - Edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan kawasan/lingkungan tempat tinggal	**Strategi Kelemahan dan Ancaman** - Penguatan TAGANA dan DESTANA - Anggaran untuk mitigasi bencana dikolaborasikan dengan anggaran untuk konservasi lingkungan

Analisis *TOWS – Strength, Weakness, Opportunities and Threats*		
baru, terutama di wilayah yang mengalami kepadatan populasi		

4.2.5 SMART SOCIETY

Tabel 4. 12 Analisis SWOT Smart Society

Analisis *TOWS – Strength, Weakness, Opportunities and Threats*		
Faktor Internal **Faktor Eksternal**	**Kekuatan** - Terdapat beberapa Perguruan Tinggi Negeri & Swasta - Pemerintah Daerah memiliki fasilitas untuk masyarakat seperti *co-working space* - Indikator persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan secara konsisten menunjukkan capaian 100% setiap tahun - Adanya perpustakaan daerah, perpustakaan desa, atau taman baca masyarakat (TBM) yang dapat menjadi pusat kegiatan literasi.	**Kelemahan** - Terbatasnya akses terhadap pelatihan keterampilan dan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Kulon Progo - Meskipun ada fasilitas, aksesibilitasnya mungkin belum merata, terutama di daerah pelosok atau terpencil - Keterbatasan jumlah dan kualitas koleksi buku di perpustakaan atau TBM yang ada. - Belum banyak yang memanfaatkan kulonprogo - Program literasi yang mungkin masih konvensional dan

Analisis *TOWS – Strength, Weakness, Opportunities and Threats*		
	- Potensi untuk mengintegrasikan cerita rakyat, sejarah lokal, atau nilai-nilai budaya Kulon Progo dalam materi literasi, sehingga lebih relevan dan menarik bagi masyarakat setempat - Keterlibatan Aktif Akademisi dan Sektor Pendidikan.	kurang menarik bagi berbagai kelompok usia atau segmen masyarakat. - Kurangnya variasi kegiatan literasi selain membaca buku.
Peluang - Teknologi dapat mendukung peningkatan literasi, terutama di kalangan pemuda - Adanya peluang untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, sektor swasta, atau penerbit - Adanya program-program literasi dari pemerintah pusat (Kemendikbudristek, Perpusnas) yang bisa disinergikan dengan program di daerah. - Kesempatan untuk mendapatkan hibah atau pendanaan dari pihak luar. - Kesempatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi	**Strategi Peluang dan Kekuatan** - Pengembangan platform literasi digital, e-book, atau audio book untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama generasi muda. - Penggunaan media sosial untuk kampanye literasi dan promosi kegiatan membaca.	**Strategi Kelemahan dan Peluang**

Analisis *TOWS – Strength, Weakness, Opportunities and Threats*		
melalui kampanye, seminar, atau lokakarya. - Peluang untuk berkolaborasi dengan sektor swasta (CSR perusahaan), komunitas, atau lembaga pendidikan tinggi untuk memperluas jangkauan program literasi.		
Ancaman - Kecenderungan masyarakat terhadap media digital yang lebih dominan dibandingkan dengan bahan bacaan cetak - Potensi *cyber attack* pada sistem informasi kebencanaan - Meningkatnya frekuensi kejadian bencana (hidrometeorologi) - Ketergantungan sistem digital pada infrastruktur yang rawan rusak akibat bencana - Kesenjangan Digital dan Aksesibilitas - Kurangnya literasi digital membuat masyarakat rentan menjadi korban atau penyebar hoaks.	**Strategi Ancaman dan Kekuatan** - Menggunakan teknologi untuk kewaspadaan dini bencana	**Strategi Kelemahan dan Ancaman** - Optimalisasi pengembangan sistem kebencanaan berbasis digital - Peningkatan kapasitas SDM pemerintah dan komunitas dalam *disaster digital governance*

4.2.6 SMART ENVIRONMENT

Tabel 4. 13 Analisis SWOT Smart Environment

Analisis *TOWS – Strength, Weakness, Opportunities and Threats*		
Faktor Internal **Faktor Eksternal**	**Kekuatan** - Adanya UU yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup - Adanya peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengelolaan persampahan - Adanya Peraturan Bupati 35 Tahun 2019 tentang pengendalian sampah plastik pada tempat daya tarik wisata	**Kelemahan** - Masyarakat banyak yang belum sadar terhadap pengelolaan lingkungan hidup - Pembangunan Kulon Progo masih ada yang belum mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup - Timbulan sampah dari aktivitas/kegiatan masyarakat/ industri/ pariwisata dll akan meningkat seiring pertumbuhan ekonomi Kulon Progo - Kapasitas TPA Banyuroto akan overload
Peluang - Teknologi yang berkembang dapat mendukung pelestarian lingkungan - Adanya peluang untuk kerja sama dengan perguruan tinggi di Kulon Progo dalam upaya pelestarian lingkungan	**Strategi Peluang dan Kekuatan** - Pengembangan platform literasi digital tentang lingkungan hidup, e-book, atau audio book untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama generasi muda. - Penggunaan media sosial untuk kampanye literasi dan promosi pelestarian lingkungan hidup - Peningkatan online monitoring kualitas lingkungan	**Strategi Kelemahan dan Peluang** - Optimalisasi pengembangan sistem informasi lingkungan hidup (kualitas air, udara, tanah dll) berbasis digital - Peningkatan kapasitas SDM pemerintah dan komunitas dalam *environmental empowering* melalui *digital governance* dan kolaborasi dengan perguruan tinggi - Pengembangan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan dan minim budget operasional

Analisis *TOWS – Strength, Weakness, Opportunities and Threats*		
Ancaman - Tingkat risiko bencana di Kulon Progo tergolong tinggi	**Strategi Ancaman dan Kekuatan** - Menggunakan teknologi informasi lingkungan hidup	**Strategi Kelemahan dan Ancaman** - Membuat standar ramah lingkungan pada pembangunan di Kulon Progo - Mengadakan sosialisasi terkait isu lingkungan secara masif, termasuk untuk mitigasi bencana yang mungkin terjadi

BAB V
ANALISIS VISI PEMBANGUNAN SMART CITY

5.1 VISI DAN MISI SMART CITY KAB. KULON PROGO

Mempertimbangkan kondisi kesiapan, visi, misi dan program unggulan Kabupaten Kulon Progo, maka perlu ditetapkan visi pembangunan *Smart City*. Visi Misi *Smart City* Kabupaten Kulon Progo, yaitu:

"Terwujudnya Kulon Progo yang makmur, mandiri, religius, berbudaya, dan berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi cerdas, inovasi, dan kolaborasi yang inklusif."

Sedangkan Misi *Smart City* Kabupaten Kulon Progo, yaitu :

. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang transparan, akuntabel, efisien, dan partisipatif melalui pemanfaatan data dan teknologi.
. Mengembangkan identitas dan daya saing Kulon Progo melalui integrasi ekosistem pariwisata, penguatan produk unggulan daerah, pengembangan ekosistem bisnis, serta penataan ruang kota yang indah, nyaman, dan berkarakter budaya.
. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan agribisnis, penguatan UMKM, digitalisasi ekonomi, pengembangan ekosistem industri kreatif, menuju masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing.
. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang layak, sehat, dan harmonis melalui perencanaan tata ruang yang berkelanjutan, peningkatan konektivitas dan mobilitas, serta penguatan layanan kesehatan dan sosial berbasis teknologi.
. Mendorong terciptanya masyarakat yang religius, berbudaya, inklusif, aman, dan tertib melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung interaksi sosial, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan literasi digital.
. Menjaga kelestarian lingkungan berkelanjutan melalui perlindungan dan pengelolaan sumber daya, pengelolaan limbah dan sampah, serta tata kelola energi berkelanjutan.

5.2 SASARAN SMART CITY KAB KULON PROGO

Sasaran *Smart City* Kabupaten Kulon Progo dirumuskan sebagai langkah terukur untuk menerjemahkan visi dan misi RPJMD ke dalam implementasi enam dimensi Kota Cerdas. Sasaran-sasaran ini dirancang untuk menjawab isu-isu strategis dan tantangan pembangunan yang dihadapi daerah, dengan mengedepankan pendekatan inovatif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Berikut adalah sasaran untuk setiap dimensi *Smart City*, yang juga dilengkapi dengan sistem kodifikasi yang mengacu pada panduan penyusunan *Masterplan Smart City*.

5.2.1 SMART GOVERNANCE (G)

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan berintegritas melalui reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik yang terintegrasi, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan kepuasan Masyarakat.

Tabel 5. 1 Sasaran Smart Governance

Sub Dimensi 1: G.1. Pelayanan Publik (*Public Service*)
G.1.1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan warga. Sasaran ini dirancang untuk mengatasi fluktuasi pada Indeks Pelayanan Publik dan memastikan penegakan peraturan yang konsisten.
Sub Dimensi 2: G.2. Manajemen Birokrasi (*Bureaucracy Management*)
G.2.1. Mewujudkan sistem pemerintahan digital yang terpadu dan berkelanjutan. Sasaran ini dirancang untuk mengatasi tantangan seperti rendahnya indeks SPBE/Indeks Pemdi dan kesenjangan keterampilan digital di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
Sub Dimensi 3: G.3. Kebijakan Publik (*Public Policy*)
G.3.1. Menciptakan perancangan kebijakan yang berbasis data dan partisipatif. Sasaran ini bertujuan mengintegrasikan masukan masyarakat untuk merumuskan regulasi yang relevan dan efektif.

5.2.2 Smart Branding (B)

Menguatkan identitas dan daya saing daerah melalui promosi digital yang efektif, dengan fokus pada pengembangan pariwisata berkelanjutan dan produk-produk unggulan berbasis kearifan lokal.

Tabel 5. 2 Sasaran Smart Branding

Sub Dimensi 1: B1. Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata (*Tourism Branding*)
B.1.1. Meningkatkan daya tarik dan citra daerah di tingkat nasional dan internasional melalui strategi pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Sub Dimensi 2: B2. Membangun platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah (*Business Branding*)
B.2.1. Menciptakan ekosistem pariwisata yang inovatif dan terintegrasi, didukung oleh pemasaran digital yang massif. Sasaran ini bertujuan untuk mengatasi masalah promosi yang masih terbatas pada destinasi prioritas.
Sub Dimensi 3: B3. Membangun dan Memasarkan Wajah Kota (*City Appearance Branding*)
B.3.1. Meningkatkan pengembangan wajah kota yang mencerminkan identitas budaya lokal dan mendukung potensi pariwisata serta bisnis.

5.2.3 Smart Economy (Ec)

Menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang tangguh, mandiri, dan inklusif, dengan mendorong hilirisasi produk pertanian dan perikanan, pemberdayaan UMKM berbasis digital, serta optimalisasi investasi di kawasan-kawasan strategis.

Tabel 5. 3 Sasaran Smart Economy

Sub Dimensi 1: Ec1. Membangun ekosistem industri yang berdaya saing (*Industry*)
Ec.1.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah. Sasaran ini bertujuan mengatasi tingkat kemiskinan dan rasio kewirausahaan yang masih fluktuatif.
Sub Dimensi 2: Ec2. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat (*Welfare*)
Ec.2.1. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui peningkatan nilai tambah produk lokal dan daya saing UMKM. Sasaran ini memanfaatkan peluang dari infrastruktur strategis seperti YIA dan JJLS.
Sub Dimensi 3: Ec3. Membangun Ekosistem Transaksi Keuangan (*Transaction*)
Ec.3.1. Menciptakan ekosistem industri yang adaptif dan inovatif. Sasaran ini direncanakan dengan memprioritaskan industri pengolahan (seperti agroindustri kopi, kelapa, dan teh) serta ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal.

5.2.4 Smart Living (Lv)

Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan infrastruktur dasar yang merata, layanan kesehatan yang terintegrasi, serta penanggulangan kemiskinan dan stunting berbasis data.

Tabel 5. 4 Sasaran Smart Living

Sub Dimensi 1: Lv1. Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (*Harmony*)
Lv.1.1. Memberikan akses masyarakat terhadap layanan dasar (air bersih dan sanitasi aman) secara merata.
Sub Dimensi 2: Lv2. Mewujudkan Prasarana Kesehatan (*Health*)
Lv.2.1. Meningkatkan kualitas kesehatan dan ketahanan sosial masyarakat, termasuk melalui penurunan prevalensi stunting yang meningkat.
Sub Dimensi 3: Lv3. Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi (*Mobility*)
Lv.3.1. Meningkatkan harmonisasi tata ruang dan transportasi yang mendukung mobilitas efisien dan kualitas hunian yang layak di seluruh wilayah.

5.2.5 Smart Society (S)

Membangun masyarakat yang kreatif, inovatif, dan berbudaya, dengan fokus pada peningkatan literasi digital, penguatan pendidikan karakter, dan pelestarian nilai-nilai lokal untuk menciptakan kohesi sosial yang kuat.

Tabel 5. 5 Sasaran Smart Society

Sub Dimensi 1: S1. Mewujudkan Interaksi Masyarakat yang Efisien (*Community*)
S.1.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terampil, berdaya saing, dan berliterasi digital. Sasaran ini untuk mengatasi rata-rata lama sekolah yang masih rendah.
Sub Dimensi 2: S2. Membangun Ekosistem Belajar yang Efisien *(Learning)* dan Komprehensif
S.2.1. Mewujudkan masyarakat yang adaptif, inovatif, dan partisipatif dalam pembangunan daerah, termasuk dukungan terhadap kelompok rentan dan difabel.
Sub Dimensi 3: S3. Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat (*Security*)
S.3.1. Menciptakan sistem keamanan masyarakat yang terintegrasi dengan teknologi untuk mendukung rasa aman dan nyaman bagi warga.

5.2.6 Smart Environment (En)

Mewujudkan lingkungan hidup yang lestari dan tangguh terhadap bencana, dengan strategi pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, penanganan sampah terpadu, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Tabel 5. 6 Sasaran Smart Environment

Sub Dimensi 1: En1. Mengembangkan Program Perlindungan Lingkungan Hidup (*Protection*)
En.1.1. Mengembangkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Sasaran ini termasuk penanganan sampah dan konservasi lahan, untuk mengatasi penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan meningkatnya volume sampah.
Sub Dimensi 2: En2. Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah (*Waste*)
En.2.1. Mengembangkan sistem terintegrasi untuk tata kelola limbah dan sampah.
Sub Dimensi 3: En3. Mengembangkan Tata Kelola Energi Yang Bertanggung-jawab (*Energy*)
En.3.1. Mengoptimalkan pengelolaan energi dan sumber daya alam. Sasaran ini termasuk pemanfaatan potensi perdagangan karbon dari kawasan hutan dan mangrove.

BAB VI
KERJA SAMA DAN KOLABORASI ANTAR DAERAH

6.1 Latar Belakang

Pengembangan Smart City tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu daerah saja, melainkan membutuhkan sinergi antar pemangku kepentingan. Salah satu prinsip utama Smart City adalah kolaborasi, baik antar perangkat daerah, pemerintah daerah lain, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dunia usaha, maupun akademisi.

Kabupaten Kulon Progo memiliki posisi strategis di Daerah Istimewa Yogyakarta yang membuka peluang besar untuk membangun ekosistem layanan digital yang terintegrasi lintas wilayah. Oleh karena itu, diperlukan kerangka kerja sama yang terencana guna meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi pemerintahan, serta daya saing daerah.

6.2 Tujuan Kerja Sama

Kerja sama dan kolaborasi bertujuan untuk :

a. Meningkatkan keterpaduan layanan publik berbasis digital;
b. Mengoptimalkan pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan kebijakan;
c. Mendorong efisiensi pembangunan melalui berbagi sumber daya;
d. Mempercepat transformasi digital daerah;
e. Memperkuat daya saing kawasan melalui promosi dan inovasi bersama.

6.3 Potensi Mitra Kerja Sama

Beberapa pihak yang berpotensi menjadi mitra strategis antara lain :

1. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
    - Sinkronisasi kebijakan Smart Province dengan Smart City;
    - Integrasi platform layanan digital;
    - Penguatan infrastruktur dan jaringan data regional.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY dan wilayah sekitar
    - Pengembangan layanan lintas wilayah;
    - Pertukaran praktik terbaik (best practices);
    - Kolaborasi dalam pengembangan inovasi daerah.
3. Instansi Pemerintah Pusat
    - Dukungan kebijakan, standar nasional, dan interoperabilitas sistem;
    - Integrasi dengan platform nasional seperti SPBE dan Satu Data Indonesia.
4. Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset
    - Kajian berbasis data;
    - Pengembangan teknologi;
    - Pendampingan inovasi Smart City.
5. Sektor Swasta dan Penyedia Teknologi
    - Kemitraan dalam penyediaan solusi digital;
    - Skema pembiayaan inovatif;
    - Transfer teknologi.

6.4 Ruang Lingkup Kerja Sama

Kerja sama Smart City dapat difokuskan pada beberapa area strategis berikut :

a. Konektivitas Data dan Layanan Lintas Wilayah

   Integrasi data antar daerah memungkinkan pertukaran informasi secara real-time, mendukung perencanaan pembangunan, manajemen transportasi, mitigasi bencana, serta pelayanan masyarakat yang lebih cepat dan akurat.

b. Standar Integrasi dan Interoperabilitas Sistem

   Penyusunan standar bersama diperlukan agar aplikasi dan platform digital dapat saling terhubung. Hal ini sejalan dengan kebijakan SPBE dan prinsip arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik.

c. Promosi Terpadu Potensi Daerah

   Kolaborasi promosi pariwisata, investasi, dan produk unggulan dapat meningkatkan daya tarik kawasan secara regional. Strategi promosi digital bersama juga mampu memperluas jangkauan pasar.

d. Berbagi Infrastruktur dan Sumber Daya

   Pemanfaatan pusat data, jaringan komunikasi, maupun platform layanan secara bersama dapat mengurangi duplikasi anggaran dan meningkatkan efisiensi.

e. Pengembangan Inovasi Bersama

   Pelaksanaan forum inovasi, laboratorium digital (innovation lab), maupun program percontohan lintas daerah dapat mempercepat implementasi solusi Smart City.

6.5 Strategi Implementasi Kolaborasi

Agar kerja sama berjalan efektif, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

a. Penyusunan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama;
b. Pembentukan tim koordinasi lintas daerah;
c. Penetapan arsitektur dan standar data bersama;
d. Penguatan tata kelola dan keamanan informasi;
e. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kerja sama.

6.6 Dampak yang Diharapkan

Melalui kerja sama yang terstruktur, diharapkan terwujud :

a. Ekosistem Smart City yang terintegrasi secara regional;
b. Peningkatan kualitas layanan publik;
c. Tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan berbasis data;
d. Efisiensi pembangunan;
e. Pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih kompetitif.

BAB VI
PENUTUP

Masterplan Smart City Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2034 merupakan instrumen strategis yang dirancang untuk mengintegrasikan visi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dengan enam dimensi pengembangan kota cerdas, yaitu Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment. Dokumen ini menekankan pemanfaatan teknologi digital, inovasi, serta tata kelola kolaboratif sebagai landasan transformasi daerah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, pelayanan publik yang lebih efisien, dan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, Kabupaten Kulon Progo diarahkan untuk mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat daya saing daerah dalam konteks regional, nasional, maupun global.

Penerapan masterplan ini didukung oleh komitmen politik, kerangka regulasi, dan kelembagaan daerah yang telah terbentuk, serta selaras dengan kebijakan nasional seperti GovTech Nusantara dan transformasi digital pemerintahan. Kendati demikian, terdapat sejumlah tantangan yang harus diantisipasi, antara lain keterbatasan sumber daya manusia digital, keterhubungan data antarperangkat daerah, serta kesenjangan literasi digital masyarakat. Melalui strategi berbasis data, kolaborasi pentaheliks, dan penguatan kapasitas sumber daya, tantangan tersebut dapat diubah menjadi peluang yang mendorong percepatan inovasi dan penguatan ketahanan daerah dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.

Dengan visi “Terwujudnya Kulon Progo yang makmur, mandiri, religius, berbudaya, dan berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi cerdas, inovasi, dan kolaborasi yang inklusif”, Masterplan ini diharapkan menjadi pedoman teknokratis dalam mengarahkan pembangunan daerah secara terukur, konsisten, dan berkesinambungan. Dokumen ini sekaligus menjadi kerangka acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem digital yang integratif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berakar pada kearifan lokal, sehingga mampu menjadikan Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu model implementasi kota cerdas yang progresif di Indonesia.

KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

BUKU II
MASTERPLAN SMART CITY
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2026 - 2034

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dapat menyusun Dokumen *Smart City* Kabupaten Kulon Progo sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.

Penerapan konsep *Smart City* di Kabupaten Kulon Progo merupakan langkah strategis dalam mendukung visi pembangunan daerah, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor. Program ini diharapkan mampu mempercepat transformasi digital, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.

Dokumen ini disusun sebagai pedoman bersama bagi seluruh perangkat daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam melaksanakan program *Smart City*. Di dalamnya termuat arah kebijakan, strategi, serta program prioritas yang selaras dengan potensi dan kebutuhan lokal Kabupaten Kulon Progo.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik dari jajaran perangkat daerah, akademisi, dunia usaha, maupun masyarakat. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dan mampu mendukung terwujudnya Kabupaten Kulon Progo sebagai daerah yang cerdas, inovatif, dan berdaya saing.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan ridha-Nya dalam setiap langkah pembangunan Kabupaten Kulon Progo.

Kulon Progo, September 2025
Bupati Kulon Progo,

DR. H. R. Agung Setyawan, S.T., M.Sc., MM

SAMBUTAN DEWAN *SMART CITY*

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena telah memberi kemudahan dan kelancaran, sehingga buku II *Smart City* Kabupaten Kulon Progo ini berhasil terselesaikan dengan baik. Buku ini disusun untuk menjadi panduan bagi jajaran Pemkab Kulon Progo dan berbagai pihak terkait lainnya dalam menjalankan program-program *Smart City*.

Smart City merupakan program yang diinisiasi oleh Kementerian Kominfo (sekarang Komdigi) untuk membantu Pemda di seluruh Indonesia dalam menjalankan Pemerintahan, khususnya dalam memberikan layanan kepada masyarakat luas. Tanpa adanya pedoman *Smart City*, Pemda akan mengalami kesulitan, bahkan mungkin akan menyusun program kerja sesuai dengan kreatifitas masing-masing Kepala Daerah. Namun dengan adanya Program *Smart City*, Kepala Daerah akan lebih mudah menentukan arah pembangunan.

Smart City sudah banyak diterapkan di berbagai negara di seluruh dunia. Di dalamnya banyak dimensi, namun yang digunakan di Indonesia ada enam, yaitu *Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Environment* dan *Smart Society*. Di negara-negara lain, ada yang menjalankan *Smart Education, Smart Tourism, Smart Transportation, Smart Mobility,* dan sebagainya.

Setiap tahun, sesuai pedoman dari Kemkomdigi, Pemda harus menjalankan setidak-tidaknya satu program kerja untuk setiap dimensi, sebagai *quick win*. Pada tahun 2026 ini, Pemkab Kulon Progo telah menetapkan berbagai *quick win*, yaitu sebagai berikut:

1. *Smart Governance* : Eling Pajak (BKAD)
2. *Smart Branding* : *Land Pocket* (DPMTSP)
3. *Smart Economy* : *Smart Agriculture/green house* (Dinas Pertanian)
4. *Smart Environment* : 1 bank sampah induk di tiap kalurahan (DLH)
5. *Smart Society* : Layanan Bus Sekolah Inklusif (Dinas Perhubungan)
6. *Smart Living* : Ranting Kuat (RSUD Wates)

Dengan diselesaikannya buku ini, diharapkan program-program *quick win* yang telah disusun, dapat dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua pihak terkait, sehingga dapat mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang sejahtera.
Selamat kepada seluruh tim yang bertugas menyelesaikan buku ini dengan baik.

Kulon Progo, September 2025

Dr. Wing Wahyu Winarno, MAFIS
Ketua Tim Eksternal Dewan Smart City
Kabupaten Kulon Progo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... ***i***

SAMBUTAN DEWAN SMART CITY ..... ***ii***

DAFTAR ISI ..... ***iii***

DAFTAR GAMBAR ..... ***iv***

DAFTAR TABEL ..... ***v***

BAB I PENDAHULUAN ***1***

1.1. 6

1.2. 8

1.3. 9

1.4. 10

1.5. 13

BAB II ARAH PEMBANGUNAN SMART CITY KABUPATEN KULON PROGO ***11***

2.1 Visi, Misi, dan Sasaran *Smart City* Kabupaten Kulon Progo 12

2.1.1 Visi Kabupaten Kulon Progo 12

2.1.2 Misi Kabupaten Kulon Progo 12

2.1.3 Visi dan Misi *Smart City* Kabupaten Kulon Progo 13

2.1.4 Sasaran *Smart City* Kabupaten Kulon Progo 14

2.2 Indikator Utama *Smart City* Daerah 16

BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY KABUPATEN KULON PROGO ***23***

3.1 Smart Governance 25

3.2 Smart Branding 26

3.3 Smart Economy 27

3.4 Smart Living 29

3.5 Smart Society 30

3.6 Smart Environment 31

BAB IV RENCANA AKSI SMART CITY KABUPATEN KULON PROGO ***33***

4.1 Rencana Aksi *Smart Governance* 34

4.2 Rencana Aksi *Smart Branding* 47

4.3 Rencana Aksi *Smart Economy* 54

4.4 Rencana Aksi *Smart Living* 65
4.5 Rencana Aksi *Smart Society* 79
4.6 Rencana Aksi *Smart Environment* 86
BAB V PETA JALAN PEMBANGUNAN SMART CITY KABUPATEN KULON PROGO..... 90
5.1 Peta Jalan *Smart Governance* 91
5.2 Peta Jalan *Smart Branding* 102
5.3 Peta Jalan *Smart Economy* 110
5.4 Peta Jalan *Smart Living* 119
5.5 Peta Jalan *Smart Society* 140
5.6 Peta Jalan *Smart Environment* 148
BAB VI PENUTUP..... 153
LAMPIRAN..... 154

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Asta Cita Presiden Prabowo dan Wapres Gibran 1
Gambar 1.2 Penerapan Teknologi AWD di Kabupaten Kulon Progo 2
Gambar 1.3 Elemen Smart City Readiness 5

Gambar 1.4 Dimensi Smart City 7
Gambar 1.5 Smart City Maturity Model 8
Gambar 1.6 Kerangka Kodifikasi Program Smart City 9
Gambar 2.1 Ilustrasi SNI ISO 37122:2019 20
Gambar 3.1 Bupati Kulon Progo di podium saat pemaparan forum konsultasi publik RPJMD 2025-2030 30

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Kulon Progo dengan Enam Dimensi Smart City 10

Tabel 2.1 Sasaran *Smart Governance* 16
Tabel 2.2 Sasaran *Smart Branding* 17
Tabel 2.3 Sasaran *Smart Economy* 17
Tabel 2.4 Sasaran *Smart Living* 18
Tabel 2.5 Sasaran *Smart Society* 18
Tabel 2.6 Sasaran *Smart Environment* 19
Tabel 2.7 Indikator Utama *Smart City* 21
Tabel 3.1 Strategi *Smart Governance* 32
Tabel 3.2 Strategi *Smart Branding* 34
Tabel 3.3 Strategi *Smart Economy* 37
Tabel 3.4 Strategi *Smart Living* 39
Tabel 3.5 Strategi *Smart Society* 42
Tabel 3.6 Strategi *Smart Environment* 44
Tabel 4.1 Rencana Aksi *Smart Governance* (Jangka Pendek - Menengah) 48
Tabel 4.2 Rencana Aksi *Smart Governance* (Jangka Panjang) 64
Tabel 4.3 Rencana Aksi *Smart Branding* (Jangka Pendek - Menengah) 71
Tabel 4.4 Rencana Aksi *Smart Branding* (Jangka Panjang) 78
Tabel 4.5 Rencana Aksi *Smart Economy* (Jangka Pendek - Menengah) 81
Tabel 4.6 Rencana Aksi *Smart Economy* (Jangka Panjang) 96
Tabel 4.7 Rencana Aksi *Smart Living* (Jangka Pendek - Menengah) 99
Tabel 4.8 Rencana Aksi *Smart Living* (Jangka Panjang) 111
Tabel 4.9 Rencana Aksi *Smart Society* (Jangka Pendek - Menengah) 121
Tabel 4.10 Rencana Aksi *Smart Society* (Jangka Panjang) 124
Tabel 4.11 Rencana Aksi *Smart Environment* (Jangka Pendek - Menengah) 131
Tabel 4.12 Rencana Aksi *Smart Environment* (Jangka Panjang) 133
Tabel 5.1 Peta Jalan *Smart Governance* Jangka Pendek - Menengah (2025 – 2029) 136
Tabel 5.2 Peta Jalan *Smart Governance* Jangka Panjang (2030-2034) 144
Tabel 5.3 Peta Jalan *Smart Branding* Jangka Pendek - Menengah (2025 – 2029) 145
Tabel 5.4 Peta Jalan *Smart Branding* Jangka Panjang (2030-2034) 149
Tabel 5.5 Peta Jalan *Smart Economy* Jangka Pendek - Menengah (2025 – 2029) 152
Tabel 5.6 Peta Jalan *Smart Economy* Jangka Panjang (2030-2034) 158
Tabel 5.7 Peta Jalan *Smart Living* Jangka Pendek - Menengah (2025 – 2029) 160
Tabel 5.8 Peta Jalan *Smart Living* Jangka Panjang (2030-2034) 170
Tabel 5.9 Peta Jalan *Smart Society* Jangka Pendek - Menengah (2025 – 2029) 175
Tabel 5.10 Peta Jalan *Smart Society* Jangka Panjang (2030-2034) 177
Tabel 5.11 Peta Jalan *Smart Environment* Jangka Pendek - Menengah (2025 – 2029) 181
Tabel 5.12 Peta Jalan *Smart Environment* Jangka Panjang (2030-2034) 183

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Kulon Progo menyusun *Masterplan Smart City* tidak hanya untuk mengikuti tren pembangunan kota global, tetapi sebagai jawaban strategis atas tantangan lokal yang nyata. Rangkaian program dalam masterplan ini mengintegrasikan visi “Makmur, Mandiri, Religius,

Berbudaya, dan Berkelanjutan” dengan delapan misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, seperti kemandirian pangan dan pengembangan ekonomi hijau-biru untuk memperkokoh ketahanan daerah serta meningkatkan kualitas hidup warga.

Gambar 1.1 Asta Cita Presiden Prabowo dan Wapres Gibran
Sumber Gambar : www.setneg.go.id

Globalisasi menuntut setiap kota bersaing setara dengan pusat-pusat ekonomi internasional. Oleh karena itu, Kabupaten Kulon Progo berfokus pada layanan publik cepat, tepat sasaran, dan terjangkau, sejalan dengan semangat Asta Cita untuk mencapai nol kelaparan dan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat, dua indikator utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDGs) yang diadopsi oleh agenda pemerintahan saat ini.

Revolusi digital telah mempercepat urbanisasi dan meredefinisi interaksi masyarakat. Masterplan ini memanfaatkan teknologi sebagai enabler inovasi dan kolaborasi, selaras dengan misi Asta Cita yang mendorong transformasi ekonomi kreatif dan digitalisasi layanan publik, langkah penting untuk menyongsong percepatan perubahan kombinatorial yang diprediksi akan melampaui tiga ratus tahun perkembangan sebelumnya.

Gambar 1.2 Penerapan Teknologi AWD di Kabupaten Kulon Progo
Sumber Gambar : Jogja Benih (link :
https://jogjabenih.jogjaprov.go.id/read/7dc24d00ccef2511490bf94783e7e1625f730c16fb8c616758c6bcd3c1d22a553179)

Konsep *Smart City* di Kabupaten Kulon Progo dijalankan secara komprehensif dan inklusif. Pendekatan ini sejalan dengan Asta Cita yang menekankan *good governance* serta hak atas keadilan dan partisipasi publik (SDG 16). Melalui partisipasi warga, teknologi informasi tidak hanya memangkas birokrasi, tapi juga memfasilitasi keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

Masterplan ini juga memperdalam fondasi filosofis dengan mengintegrasikan prinsip *Green Constitution* dan *Right to the City*. Langkah ini paralel dengan Asta Cita, khususnya misi penguatan hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan, sehingga pembangunan tidak hanya pintar secara teknologi, tetapi juga adil dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Secara nasional, Gerakan Menuju *Smart City* Kementerian Kominfo mendukung 100 kota/kabupaten menyusun *masterplan* dan *quickwins* dalam 5–10 tahun ke depan. Inisiatif tersebut mengantarkan Kulon Progo untuk menerjemahkan Asta Cita, terutama kemandirian pangan dan ekonomi hijau, ke dalam program prioritas lokal, sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045 yang menjadi pijakan makro negara.

Masterplan ini mengadopsi pendekatan **T-H-I-S (Tematik, Holistik, Integratif, Spasial)** untuk memastikan keterpaduan dimensi digital, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Fokus spasial pada Aerotropolis Wates, Kawasan Industri Kreatif, dan Pariwisata Berkelanjutan dirancang untuk mengoptimalkan potensi lokal sesuai karakteristik wilayah dan misi Asta Cita dalam memperkokoh daya saing daerah.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN MASTERPLAN *SMART CITY*

Masterplan Smart City Kabupaten Kulon Progo disusun dengan maksud dan tujuan yang selaras dengan dokumen RPJMD dan panduan Penyusunan *Masterplan Smart City*.

a. **Maksud** dari penyusunan *Masterplan* ini adalah untuk menetapkan sebuah dokumen perencanaan terintegrasi yang berfungsi sebagai panduan strategis dan operasional

bagi pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam mengimplementasikan konsep *Smart City* di Kabupaten Kulon Progo.

b. **Tujuan** dari disusunnya dokumen ini adalah:
    a) Menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan *Smart City* dengan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah, termasuk RPJMD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
    b) Menyediakan landasan materi dan panduan praktis untuk implementasi program-program pembangunan berbasis konsep *Smart City* yang sesuai dengan karakteristik dan potensi spesifik Kabupaten Kulon Progo.
    c) Menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan nasional dan daerah dalam setiap program dan kegiatan *Smart City*.
    d) Mendorong proses pengembangan *Smart City* yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

1.3. LANDASAN HUKUM

Penyusunan *Masterplan Smart City* Kabupaten Kulon Progo didasarkan pada landasan hukum yang kuat, mencakup peraturan perundang-undangan di tingkat nasional maupun daerah, antara lain:

a. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. **Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007** tentang Penataan Ruang;
c. **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008** tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
d. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah;
e. **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022** tentang Pelindungan Data Pribadi;
f. **Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022** tentang Perkotaan;
g. **Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020** tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
h. **Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023** tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;
i. **Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025** tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
j. **Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009** tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
k. **Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023** Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
l. **Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022** tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026;
m. **Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2025** Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
n. **Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012** tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
o. **Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 100 Tahun 2018** tentang *Masterplan Smart City* Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2018-2023**.**;

p. **Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2024** tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 118 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
q. **Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 120/A/2025** tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
r. **Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 244/A/2025** tentang Pembentukan Dewan Smart City Kabupaten Kulon Progo.

1.4. KERANGKA PIKIR *MASTERPLAN SMART CITY*

Konsep *Smart City* adalah unik dan dinamis. Solusi yang berhasil di satu kota tidak dapat serta merta diaplikasikan di kota lain karena setiap daerah memiliki permasalahan dan potensi yang berbeda. Pembangunan *Smart City* menekankan pentingnya inovasi untuk menyelesaikan persoalan spesifik tersebut, dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sensor, dan analisis data sebagai faktor pendukung atau *enabler*, bukan sebagai tujuan akhir pembangunan itu sendiri. Intinya adalah bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk mendorong setiap elemen kota, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, untuk berpikir kreatif dan aktif dalam melahirkan inovasi yang terintegrasi demi mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera, sehat, nyaman, dan aman.

Sebelum sebuah daerah dapat menyusun program-program *Smart City* yang efektif, langkah fundamental yang harus dilakukan adalah menilai tingkat kesiapannya. Kesiapan ini dikenal sebagai *Smart City Readiness*. Model ini mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang harus dimiliki oleh sebuah daerah untuk dapat memulai dan melaksanakan inisiatif kota cerdas secara berkelanjutan. Terdapat lima elemen utama dalam kesiapan ini, yaitu:

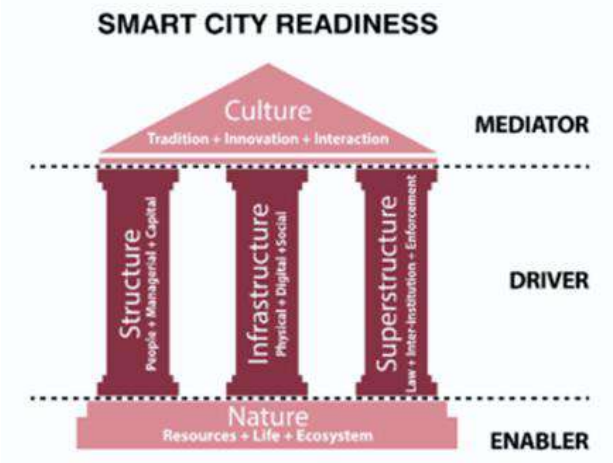

Gambar 1.3 Elemen *Smart City Readiness*
Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

a. *Nature* (Alam), yaitu potensi alam dan lingkungan hidup.
b. *Structure* (Struktur), yaitu kesiapan sumber daya manusia (SDM) pelaksana dan penerima manfaat, anggaran, serta tata kelola.
c. *Infrastructure* (Infrastruktur), yaitu kesiapan infrastruktur fisik, infrastruktur digital (TIK), dan infrastruktur sosial.

d. *Suprastructure* (Suprastruktur), yaitu penyiapan kebijakan atau peraturan daerah, kelembagaan, dan tata laksana.
e. *Culture* (Budaya), yaitu nilai-nilai, perilaku, dan kebiasaan masyarakat.

Untuk keperluan penyusunan masterplan, kajian difokuskan pada tiga elemen inti: *Structure, Infrastructure,* dan *Suprastructure.* Keterhubungan antarelemen ini adalah prasyarat yang harus dibangun.

Structure memastikan adanya SDM yang kompeten dan pendanaan yang memadai. *Infrastructure* menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang diperlukan. Sementara itu, *Suprastructure* memastikan adanya landasan hukum dan kelembagaan yang kuat untuk menjamin keberlanjutan program. Model ini menunjukkan bahwa Komdigi mempromosikan pendekatan yang holistik, di mana fondasi manajerial, teknis, dan regulasi harus kokoh sebelum meluncurkan program teknologi yang canggih.

Ilustrasi dari Gambar 1.1 diatas, merujuk pada dokumen panduan penyusunan *Masterplan Smart City*, secara konseptual menggambarkan elemen-elemen *Smart City Readiness* sebagai fondasi yang menopang seluruh inisiatif *Smart City*. Fondasi ini merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi.

Setelah fondasi kesiapan daerah terbangun, pembangunan *Smart City* diarahkan pada enam dimensi yang saling terintegrasi. Keenam dimensi ini mewakili area-area utama di mana inovasi dan teknologi diterapkan untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

a. ***Smart Governance* (Tata Kelola Cerdas)**. Dimensi ini berfokus pada perwujudan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK dan partisipasi masyarakat. Cakupannya meliputi aspek birokrasi, kebijakan, dan layanan.
b. ***Smart Branding* (Pencitraan Cerdas)**. Dimensi ini bertujuan untuk membangun citra daerah yang menarik di tingkat nasional dan internasional. Pencitraan dilakukan melalui strategi pariwisata, promosi bisnis, dan pengembangan kota yang menonjolkan keunikan lokal.
c. ***Smart Economy* (Ekonomi Cerdas)**. Fokusnya adalah menciptakan ekosistem ekonomi yang produktif, inovatif, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, dan menciptakan lapangan kerja melalui pengembangan industri, kewirausahaan, dan ekonomi kreatif.
d. ***Smart Living* (Hidup Cerdas)**. Dimensi ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan kenyamanan hidup masyarakat. Aspek yang dicakup meliputi layanan kesehatan, perumahan, mobilitas, dan perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan.
e. ***Smart Society* (Masyarakat Cerdas)**. Dimensi ini berfokus pada pembangunan masyarakat yang inklusif, kreatif, dan berliterasi digital. Tujuannya adalah meningkatkan interaksi sosial budaya, pembelajaran seumur hidup, dan keamanan komunitas.
f. ***Smart Environment* (Lingkungan Cerdas).** Dimensi ini mengarahkan pembangunan pada pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Tujuannya adalah mewujudkan kota yang tangguh terhadap perubahan iklim, efisien dalam

pengelolaan sumber daya (seperti energi dan air), dan memiliki tata kelola limbah yang baik.

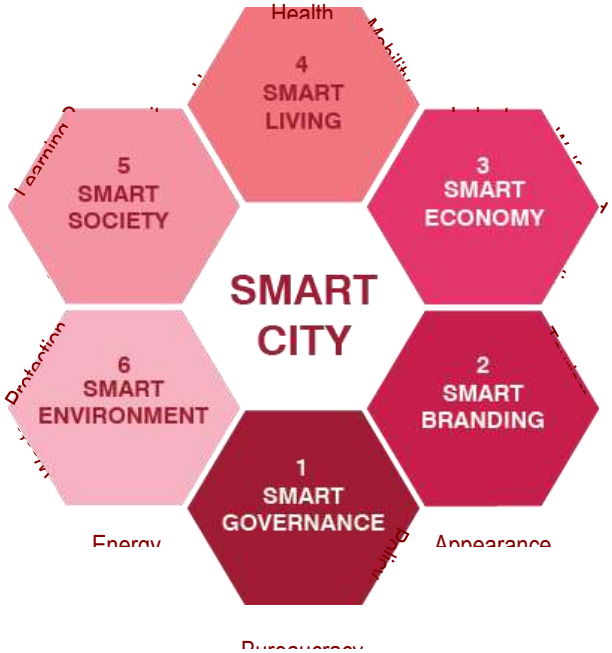

Gambar 1.4 Dimensi *Smart City*

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Gambar diatas secara konseptual menggambarkan keenam dimensi ini sebagai pilar-pilar yang saling berinteraksi dan mengelilingi inti kota, menunjukkan bahwa pembangunan *Smart City* bersifat terpadu dan multidimensi.

Selanjutnya, untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi *Smart City*, digunakan sebuah model kematangan. Model ini mengombinasikan kemampuan daerah (*readiness)* dengan kinerja aktual (*performance*) *Smart City*. Tingkat kematangan ini dibagi menjadi empat level, yaitu:

a. ***Initial***. Tahap awal di mana daerah baru memulai pembangunan *Smart City*. Kesiapan dan kinerja masih berada di level rendah.
b. ***Developing***. Daerah sudah mulai mengembangkan berbagai program dengan dukungan kesiapan yang cukup baik.
c. ***Managed.*** Daerah telah menjalankan *Smart City* pada berbagai aspek dengan dukungan kesiapan yang sangat baik.
d. ***Optimized***. Tahap penyempurnaan di mana daerah telah mengoptimalkan pembangunan *Smart City* di seluruh elemen, dimensi, dan aspek.

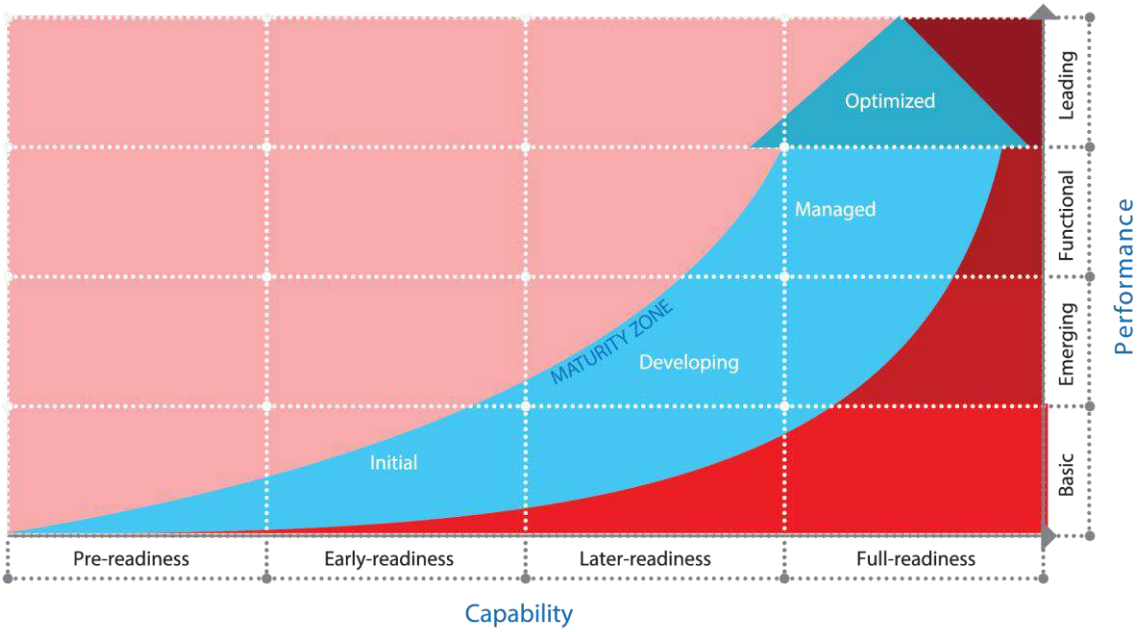

Gambar 1.5 *Smart City Maturity Model*

Sumber : Citiasia Center for Smart Nation (CCSN)

Model ini, sebagaimana gambar di atas, berfungsi sebagai alat untuk memetakan posisi daerah dan menentukan langkah strategis selanjutnya. Keberadaan model ini menunjukkan bahwa program *Smart City* dirancang untuk transformasi jangka panjang dan berkelanjutan, bukan sekadar proyek sesaat. Proses ini menekankan bahwa pembangunan kota cerdas merupakan sebuah perjalanan yang membutuhkan evaluasi dan perbaikan terus-menerus.

1.5. KETERHUBUNGAN *MASTERPLAN SMART CITY* DENGAN DOKUMEN LAIN

Masterplan Smart City tidak dimaksudkan sebagai dokumen yang berdiri sendiri, melainkan sebagai dokumen strategis yang harus terintegrasi, tersinkronisasi, dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan yang sudah ada di tingkat daerah. Keterkaitan ini sangat penting untuk memastikan program *Smart City* mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Di dalam dokumen panduan penyusunan *Masterplan Smart City* menjelaskan bahwa dokumen *masterplan* memiliki keterkaitan erat dengan RPJMD, yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan kepala daerah. Keterkaitan ini dapat terjadi pada tingkat sasaran pembangunan. Sasaran-sasaran S*mart City* yang terbagi ke dalam enam dimensinya harus sejalan dengan sasaran RPJMD.

Untuk memudahkan pemetaan dan penyelarasan, dokumen panduan memperkenalkan sistem kodifikasi program kerja. Sistem ini berfungsi sebagai alat praktis untuk melacak dan mengintegrasikan program *Smart City* ke dalam kerangka RPJMD. Kodifikasi ini menggunakan kode huruf untuk setiap dimensi S*mart City*, yaitu:

a. G untuk *Smart Governance,*

b. B untuk *Smart Branding*,
c. Ec untuk *Smart Economy*,
d. Lv untuk *Smart Living*,
e. S untuk *Smart Society*, dan
f. En untuk *Smart Environment.*

Selanjutnya, sub-dimensi dan level program serta rencana aksi dapat diberi nomor untuk menciptakan kode yang sangat spesifik. Sebagai contoh, kode program **G.1.2.3.P.4.A.1** merepresentasikan "Rencana Aksi (Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan)" **(A.1**) untuk "Program ke-4" (**P.4**) yang merealisasikan "Strategi ke-3" (**3**) dari "Sasaran ke-2" (**2**) pada "Sub-Dimensi ke-1 (Pelayanan Publik)" (**1**) di dimensi "Smart Governance" (**G**). Sistem ini menunjukkan pendekatan yang sangat terstruktur dan detail dalam mengelola inisiatif *Smart City*.

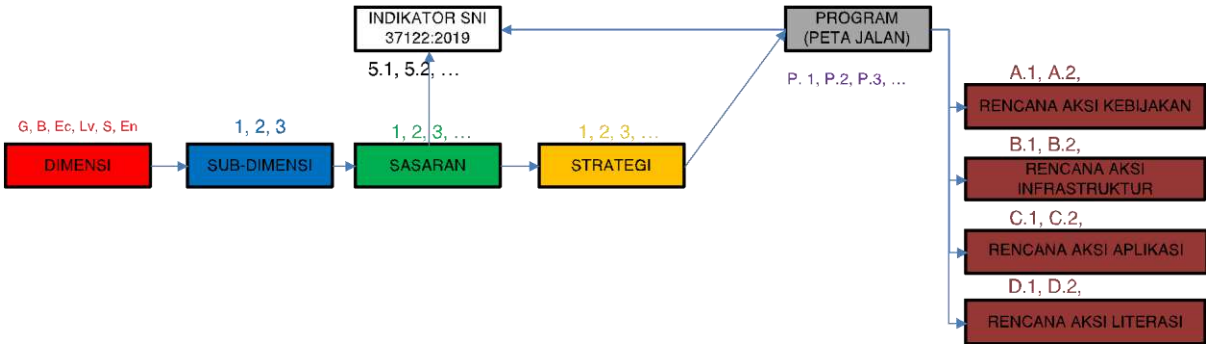

Gambar 1.6 Kerangka Kodifikasi Program *Smart City*

Sumber : Buku Panduan Penyusunan Masterplan Smart City Kominfo Tahun 2022

Dalam dokumen panduan, gambar di atas secara konseptual menunjukkan kerangka keterkaitan antara sasaran *Smart City* dengan RPJMD dan kerangka kodifikasi program. Gambar ini mengilustrasikan bagaimana RPJMD, Renstra OPD, dan Rencana Aksi *Smart City* saling berhubungan dalam satu alur logis.

Analisis terhadap **Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025-2029** menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip *Smart City* secara substansial telah diadopsi dan diintegrasikan ke dalam kerangka perencanaan daerah, meskipun terminologi "*Smart City*" tidak secara eksplisit digunakan di seluruh dokumen. Keterkaitan RPJMD ini dengan berbagai dokumen perencanaan lain menunjukkan adanya konsistensi perencanaan yang kuat dan berjenjang. Berikut Adalah gambaran keterkaitan misi RPJMD Kabupaten Kulon Progo dengan enam dimensi *Smart City*.

Tabel 1.1 Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Kulon Progo dengan Enam Dimensi *Smart City*

Misi RPJMD Kulon Progo Tahun 2025-2029	Dimensi *Smart City*	Keterangan
Misi 1: Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya, dan Religius.	*Smart Society* dan *Smart Living*	Misi ini berfokus pada pembangunan manusia, sosial, dan budaya. Hal ini selaras dengan tujuan *Smart Society* (masyarakat

Misi RPJMD Kulon Progo Tahun 2025-2029	Dimensi *Smart City*	Keterangan
		berbudaya dan harmonis) dan *Smart Living* (kesejahteraan dan kualitas hidup).
Misi 2: Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi.	*Smart Economy* dan *Smart Branding*	Misi ini secara langsung mencerminkan inti dari *Smart Economy* (produktivitas, daya saing ekonomi) *dan Smart Branding* (pencitraan daerah untuk promosi pariwisata dan bisnis).
Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang *Good Governance*, Aspiratif, serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis.	*Smart Governance* dan *Smart Society*	Misi ini adalah perwujudan langsung dari *Smart Governance* (tata kelola pemerintahan yang transparan dan efisien) dan sebagian dari *Smart Society* (penciptaan masyarakat yang aman dan berpartisipasi aktif).
Misi 4: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana.	*Smart Environment* dan *Smart Living*	Misi ini sangat selaras dengan *Smart Environment* (lingkungan lestari dan berkelanjutan) dan *Smart Living* (ketahanan terhadap bencana dan perbaikan infrastruktur).

Analisis di atas menunjukkan bahwa RPJMD Kulon Progo secara fundamental telah mengadopsi kerangka pembangunan yang sejalan dengan filosofi *Smart City*. RPJMD ini berfungsi sebagai kerangka kebijakan makro yang memberikan payung hukum bagi inisiatif-inisiatif *Smart City* yang lebih spesifik.

Dengan demikian, *Masterplan Smart City* dapat dipandang sebagai alat yang memperkaya dan mengoperasionalkan RPJMD, bukan sebagai dokumen yang terpisah. Fungsi utama *Masterplan Smart City* antara lain adalah:

a. Menerjemahkan visi dan misi RPJMD ke dalam inisiatif-inisiatif yang berbasis data, inovasi, dan TIK;
b. Menjadi panduan teknis yang lebih terperinci bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
c. Mendorong kolaborasi lintas sektor dan partisipasi publik yang lebih terfokus;
d. Menyediakan alat monitoring dan evaluasi yang menggunakan indikator kinerja spesifik, seperti yang terdapat dalam SNI ISO 37122:2019, untuk mengukur kemajuan inisiatif *Smart City*.

Bagi pembuat kebijakan di daerah, analisis ini menyoroti beberapa implikasi penting. **Pertama**, pentingnya melakukan analisis kesiapan (*Readiness*) sebelum memulai implementasi. **Kedua**, krusialnya legalisasi *Masterplan Smart City* melalui Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Daerah untuk menjamin keberlanjutan program dan alokasi anggaran

yang konsisten. **Ketiga**, pemanfaatan sistem kodifikasi yang diusulkan Kominfo dapat mempermudah perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program yang bersifat multidimensi dan lintas OPD.

BAB II
ARAH PEMBANGUNAN *SMART CITY* KABUPATEN KULON PROGO

Konsep Kota Cerdas, sebagai model pembangunan daerah yang dinamis, telah mengalami evolusi dari pendekatan yang semata-mata berfokus pada teknologi menjadi kerangka kerja yang lebih komprehensif, inklusif, dan berorientasi pada manusia. Dalam paradigma ini, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bukan lagi tujuan akhir, melainkan sebuah faktor pendukung (*enabler*) yang memfasilitasi inovasi dan kolaborasi untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi kota.

Untuk mengimplementasikan konsep ini, sebuah daerah harus memiliki fondasi yang kuat, yang dikenal sebagai **Kesiapan Kota Cerdas** (***Smart City Readiness***). Menurut kerangka kerja yang ada, ada tiga elemen utama yang harus disiapkan:

a. **Struktur.** Kesiapan ini mencakup sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, ketersediaan anggaran yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
b. **Infrastruktur**. Meliputi pembangunan infrastruktur fisik, infrastruktur digital (TIK), dan infrastruktur sosial untuk mendukung kehidupan masyarakat.
c. **Suprastruktur**. Merujuk pada penyiapan kebijakan, regulasi daerah, dan kelembagaan yang kuat untuk menjamin keberlanjutan program.

Setelah fondasi tersebut terpenuhi, pembangunan Kota Cerdas diarahkan melalui enam dimensi yang saling terintegrasi, yaitu:

a. **Tata Kelola Cerdas (*Smart Governance*)**. Berfokus pada birokrasi, kebijakan, dan layanan yang transparan, akuntabel, dan efisien dengan memanfaatkan TIK. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan perbaikan kinerja birokrasi secara berkelanjutan.
b. **Masyarakat Cerdas (*Smart Society*)**. Menekankan peran manusia sebagai inti dari kota. Dimensi ini bertujuan menciptakan masyarakat yang inovatif, kreatif, dan memiliki literasi digital yang tinggi, serta membangun interaksi sosial yang humanis dan dinamis.
c. **Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*)**. Bertujuan membangun ekosistem ekonomi yang produktif dan adaptif terhadap perubahan. Ini mencakup pengembangan industri, transaksi, dan kesejahteraan masyarakat.
d. **Hidup Cerdas (*Smart Living*)**. Berfokus pada peningkatan kualitas dan kenyamanan hidup warga, meliputi layanan kesehatan, perumahan, dan mobilitas.
e. **Lingkungan Cerdas (*Smart Environment*)**. Mengedepankan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Tujuannya adalah mewujudkan kota yang tangguh terhadap perubahan iklim dan efisien dalam pengelolaan sumber daya seperti energi, air, dan limbah.
f. **Pencitraan Cerdas (*Smart Branding*)**. Berupaya membangun citra daerah yang menarik untuk meningkatkan daya saing melalui pariwisata, bisnis, dan penataan wajah kota.

Masterplan Kota Cerdas (*Smart City*) ini disusun sebagai dokumen perencanaan yang terintegrasi untuk membantu pemerintah daerah menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan yang sesuai dengan karakter spesifik daerah.

2.1 VISI, MISI, DAN SASARAN *SMART CITY* KABUPATEN KULON PROGO

Visi, Misi, dan Sasaran *Smart City* Kabupaten Kulon Progo didapatkan berdasarkan acuan dan analisis Visi dan Misi RPJMD, kondisi saat ini, serta tujuan dan harapan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo.

2.1.1 VISI KABUPATEN KULON PROGO

Berdasarkan dokumen Rankhir RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2025-2029, visi dari Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029, yaitu:

Terwujudnya "Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religious, Berbudaya yang Berkelanjutan"

Visi tersebut merupakan landasan yang kuat dan terarah, yang menjadi tahap awal dalam mewujudkan visi jangka panjang Kabupaten Kulon Progo 2025-2045, yaitu "*Kulon Progo yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya, & Berkelanjutan (SEMARAK)*". Visi ini memiliki lima makna utama yang saling berkaitan, yaitu:

a. **Makmur**. Tujuannya adalah menciptakan kondisi di mana seluruh masyarakat Kulon Progo dapat merasakan kesejahteraan ekonomi secara merata. Ini berarti setiap keluarga memiliki pendapatan yang memadai, bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, serta mendapatkan akses yang baik terhadap pendidikan dan kesehatan.
b. **Mandiri**. Kata ini mencerminkan semangat untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa terlalu bergantung pada pihak lain. Kemandirian ini didorong melalui pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi yang sesuai.
c. **Religius**. Pembangunan ini tidak hanya berfokus pada hal-hal fisik, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat dan pemerintah diharapkan menjunjung tinggi keimanan dan ketaqwaan, yang tercermin dalam sikap saling menghormati, toleransi, dan solidaritas antarumat beragama.
d. **Berbudaya**. Aspek ini menekankan pentingnya melestarikan dan menanamkan nilai-nilai luhur budaya lokal sebagai identitas daerah. Budaya menjadi landasan moral dan etika dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Dengan cara ini, kebudayaan lokal dapat menjadi pondasi untuk menciptakan masyarakat yang berkarakter, berdaya saing, dan adaptif terhadap perubahan.
e. **Berkelanjutan**. Pembangunan yang dilakukan harus selalu mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam. Hal ini memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan tidak merusak ekosistem, sehingga warisan budaya dan alam dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

2.1.2 MISI KABUPATEN KULON PROGO

Untuk mencapai visi di atas, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo merumuskan empat misi utama yang akan menjadi panduan strategis pembangunan selama lima tahun, yaitu:

a. **Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius**. Misi ini bertujuan menciptakan kesejahteraan lahir dan batin bagi masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Fokusnya adalah pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang layak, sambil terus menguatkan nilai-nilai budaya dan keagamaan.
b. **Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi**. Misi ini mendorong pemanfaatan potensi lokal, terutama di sektor pertanian, industri, dan pariwisata. Tujuannya adalah memberdayakan masyarakat agar mampu berkontribusi dalam perekonomian, menciptakan produk bernilai tambah, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah.
c. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang *Good Governance*, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis**. Misi ini menekankan pentingnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Pelayanan publik akan ditingkatkan agar responsif terhadap aspirasi masyarakat. Selain itu, misi ini juga bertujuan menjaga stabilitas sosial melalui penegakan hukum yang adil, konsisten, dan non diskriminatif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua.
d. **Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana**. Misi ini berfokus pada pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Pembangunan ini juga harus memperhatikan pelestarian lingkungan dan mitigasi risiko bencana, memastikan bahwa pertumbuhan fisik tidak mengorbankan kelestarian alam dan keselamatan Masyarakat.

2.1.3 VISI DAN MISI *SMART CITY* KABUPATEN KULON PROGO

Mempertimbangkan kondisi kesiapan, visi, misi dan program unggulan Kabupaten Kulon Progo, maka perlu ditetapkan visi pembangunan *Smart City*. Visi Misi *Smart City* Kabupaten Kulon Progo, yaitu:

"**Terwujudnya Kulon Progo yang makmur, mandiri, religius, berbudaya, dan berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi cerdas, inovasi, dan kolaborasi yang inklusif**."

Sedangkan Misi *Smart City* Kabupaten Kulon Progo, yaitu :

a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang transparan, akuntabel, efisien, dan partisipatif melalui pemanfaatan data dan teknologi.
b. Mengembangkan identitas dan daya saing Kulon Progo melalui integrasi ekosistem pariwisata, penguatan produk unggulan daerah, pengembangan ekosistem bisnis, serta penataan ruang kota yang indah, nyaman, dan berkarakter budaya.
c. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan agribisnis, penguatan UMKM, digitalisasi ekonomi, pengembangan ekosistem industri kreatif, menuju masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing.

d. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang layak, sehat, dan harmonis melalui perencanaan tata ruang yang berkelanjutan, peningkatan konektivitas dan mobilitas, serta penguatan layanan kesehatan dan sosial berbasis teknologi.
e. Mendorong terciptanya masyarakat yang religius, berbudaya, inklusif, aman, dan tertib melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung interaksi sosial, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan literasi digital.
f. Menjaga kelestarian lingkungan berkelanjutan melalui perlindungan dan pengelolaan sumber daya, pengelolaan limbah dan sampajh, serta tata kelola energi berkelanjutan.

2.1.4 SASARAN *SMART CITY* KABUPATEN KULON PROGO

Sasaran *Smart City* Kabupaten Kulon Progo dirumuskan sebagai langkah terukur untuk menerjemahkan visi dan misi RPJMD ke dalam implementasi enam dimensi Kota Cerdas. Sasaran-sasaran ini dirancang untuk menjawab isu-isu strategis dan tantangan pembangunan yang dihadapi daerah, dengan mengedepankan pendekatan inovatif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Berikut adalah sasaran untuk setiap dimensi *Smart City*, yang juga dilengkapi dengan sistem kodifikasi yang mengacu pada panduan penyusunan *Masterplan Smart City*.

a. ***Smart Governance* (G)**

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan berintegritas melalui reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik yang terintegrasi, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan kepuasan Masyarakat.

Tabel 2.1 Sasaran *Smart Governance*

Sub Dimensi 1: G.1. Pelayanan Publik (*Public Service*)
G.1.1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan warga. Sasaran ini dirancang untuk mengatasi fluktuasi pada Indeks Pelayanan Publik dan memastikan penegakan peraturan yang konsisten.
Sub Dimensi 2: G.2. Manajemen Birokrasi (*Bureaucracy Management*)
G.2.1. Mewujudkan sistem pemerintahan digital yang terpadu dan berkelanjutan. Sasaran ini dirancang untuk mengatasi tantangan seperti rendahnya indeks SPBE/Indeks Pemdi dan kesenjangan keterampilan digital di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
Sub Dimensi 3: G.3. Kebijakan Publik (*Public Policy*)
G.3.1. Menciptakan perancangan kebijakan yang berbasis data dan partisipatif. Sasaran ini bertujuan mengintegrasikan masukan masyarakat untuk merumuskan regulasi yang relevan dan efektif.

b. *Smart Branding* (B)

Menguatkan identitas dan daya saing daerah melalui promosi digital yang efektif, dengan fokus pada pengembangan pariwisata berkelanjutan dan produk-produk unggulan berbasis kearifan lokal.

Tabel 2.2 Sasaran *Smart Branding*

Sub Dimensi 1: B1. Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata (*Tourism Branding*)
B.1.1. Meningkatkan daya tarik dan citra daerah di tingkat nasional dan internasional melalui strategi pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Sub Dimensi 2: B2. Membangun platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah (*Business Branding*)
B.2.1. Menciptakan ekosistem pariwisata yang inovatif dan terintegrasi, didukung oleh pemasaran digital yang massif. Sasaran ini bertujuan untuk mengatasi masalah promosi yang masih terbatas pada destinasi prioritas.
Sub Dimensi 3: B3. Membangun dan Memasarkan Wajah Kota (*City Appearance Branding*)
B.3.1. Meningkatkan pengembangan wajah kota yang mencerminkan identitas budaya lokal dan mendukung potensi pariwisata serta bisnis.

c. *Smart Economy* (Ec)

Menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang tangguh, mandiri, dan inklusif, dengan mendorong hilirisasi produk pertanian dan perikanan, pemberdayaan UMKM berbasis digital, serta optimalisasi investasi di kawasan-kawasan strategis.

Tabel 2.3 Sasaran *Smart Economy*

Sub Dimensi 1: Ec1. Membangun ekosistem industri yang berdaya saing (*Industry*)
Ec.1.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah. Sasaran ini bertujuan mengatasi tingkat kemiskinan dan rasio kewirausahaan yang masih fluktuatif.
Sub Dimensi 2: Ec2. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat (*Welfare*)
Ec.2.1. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui peningkatan nilai tambah produk lokal dan daya saing UMKM. Sasaran ini memanfaatkan peluang dari infrastruktur strategis seperti YIA dan JJLS.
Sub Dimensi 3: Ec3. Membangun Ekosistem Transaksi Keuangan (*Transaction*)
Ec.3.1. Menciptakan ekosistem industri yang adaptif dan inovatif. Sasaran ini direncanakan dengan memprioritaskan industri pengolahan (seperti agroindustri kopi, kelapa, dan teh) serta ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal.

d. *Smart Living* (Lv)

Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan infrastruktur dasar yang merata, layanan kesehatan yang terintegrasi, serta penanggulangan kemiskinan dan stunting berbasis data.

Tabel 2.4 Sasaran *Smart Living*

Sub Dimensi 1: Lv1. Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (*Harmony*)

Lv.1.1. Memberikan akses masyarakat terhadap layanan dasar (air bersih dan sanitasi aman) secara merata.
Sub Dimensi 2: Lv2. Mewujudkan Prasarana Kesehatan (*Health*)
Lv.2.1. Meningkatkan kualitas kesehatan dan ketahanan sosial masyarakat, termasuk melalui penurunan prevalensi stunting yang meningkat.
Sub Dimensi 3: Lv3. Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi (*Mobility*)
Lv.3.1. Meningkatkan harmonisasi tata ruang dan transportasi yang mendukung mobilitas efisien dan kualitas hunian yang layak di seluruh wilayah.

e. *Smart Society* (S)

Membangun masyarakat yang kreatif, inovatif, dan berbudaya, dengan fokus pada peningkatan literasi digital, penguatan pendidikan karakter, dan pelestarian nilai-nilai lokal untuk menciptakan kohesi sosial yang kuat.

Tabel 2.5 Sasaran *Smart Society*

Sub Dimensi 1: S1. Mewujudkan Interaksi Masyarakat yang Efisien (*Community*)
S.1.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terampil, berdaya saing, dan berliterasi digital. Sasaran ini untuk mengatasi rata-rata lama sekolah yang masih rendah.
Sub Dimensi 2: S2. Membangun Ekosistem Belajar yang Efisien *(Learning*) dan Komprehensif
S.2.1. Mewujudkan masyarakat yang adaptif, inovatif, dan partisipatif dalam pembangunan daerah, termasuk dukungan terhadap kelompok rentan dan difabel.
Sub Dimensi 3: S3. Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat (*Security*)
S.3.1. Menciptakan sistem keamanan masyarakat yang terintegrasi dengan teknologi untuk mendukung rasa aman dan nyaman bagi warga.

f. *Smart Environment* (En)

Mewujudkan lingkungan hidup yang lestari dan tangguh terhadap bencana, dengan strategi pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, penanganan sampah terpadu, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Tabel 2.6 Sasaran *Smart Environment*

Sub Dimensi 1: En1. Mengembangkan Program Perlindungan Lingkungan Hidup (*Protection*)
En.1.1. Mengembangkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Sasaran ini termasuk penanganan sampah dan konservasi lahan, untuk mengatasi penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan meningkatnya volume sampah.
Sub Dimensi 2: En2. Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah (*Waste*)
En.2.1. Mengembangkan sistem terintegrasi untuk tata kelola limbah dan sampah.
Sub Dimensi 3: En3. Mengembangkan Tata Kelola Energi Yang Bertanggung-jawab (*Energy*)
En.3.1. Mengoptimalkan pengelolaan energi dan sumber daya alam.

Sasaran ini termasuk pemanfaatan potensi perdagangan karbon dari kawasan hutan dan mangrove.

2.2 INDIKATOR UTAMA *SMART CITY* DAERAH

Salah satu acuan penting dalam pengembangan kota cerdas adalah standar **ISO 37120:2018**, yang telah diadopsi secara identik oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) menjadi **SNI ISO 37120:2018** tentang Pembangunan Kota dan Masyarakat Berkelanjutan, mencakup indikator layanan perkotaan dan kualitas hidup. Selain itu, **ISO 37122:2019** juga telah diadopsi menjadi **SNI ISO 37122:2019** yang berfokus pada indikator kota cerdas. BSN memanfaatkan **SNI ISO 37122:2019** untuk mengevaluasi kualitas layanan publik di tingkat Kabupaten, Kota, maupun Provinsi, serta mengaitkannya dengan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dalam pengembangan kota cerdas, perhatian utama harus diberikan pada enam aspek utama: tata kelola yang cerdas, citra kota yang cerdas, ekonomi yang cerdas, kehidupan yang cerdas, masyarakat yang cerdas, dan interaksi sosial yang cerdas.

Gambar 2.1 Ilustrasi SNI ISO 37122:2019

Sumber : https://thequality.id/infographic/indikator-untuk-kota-cerdas/

Tabel 2.7 Indikator Utama *Smart City*

No.	Dimensi	Sub Dimensi	Sasaran	Indikator	Rujukan Indikator
1	*Smart Governance*	G1. Pelayanan Publik (*Public Service*)	G.1.1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan warga.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indikator RPJMD
2				10.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	SNI ISO 37122 : 2019
3		G.2. Manajemen Birokrasi (*Bureaucracy Management*)	G.2.1. Mewujudkan sistem pemerintahan digital yang terpadu dan berkelanjutan.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indikator RPJMD
4				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE)	Indikator RPJMD
5				Akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah (Opini BPK)	Indikator RPJMD
6				21.1. Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan.	SNI ISO 37122 : 2019
7		G.3. Kebijakan Publik (*Public Policy*)	G.3.1. Menciptakan perancangan kebijakan yang berbasis data dan partisipatif.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Indikator RPJMD
8				Indeks Maturitas SPIP	Indikator RPJMD
9				10.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	SNI ISO 37122 : 2019
10	*Smart Branding*	B1. Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata (*Tourism Branding*)	B.1.1. Meningkatkan daya tarik dan citra daerah di tingkat nasional dan internasional melalui strategi pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan.	Rata-rata Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Budaya, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, dan Ekspresi Budaya pada Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indikator RPJMD
11				Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indikator RPJMD
12				14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	SNI ISO 37122 : 2019

No.	Dimensi	Sub Dimensi	Sasaran	Indikator	Rujukan Indikator
13				17b.1. Jumlah pemesanan daring untuk fasilitas budaya per 100.000 penduduk	SNI ISO 37122 : 2019
14				17b.2. Persentase catatan budaya kota yang telah didigitalkan	SNI ISO 37122 : 2019
15		B2. Membangun Platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah (*Business Branding*)	B.2.1. Menciptakan ekosistem pariwisata yang inovatif dan terintegrasi, didukung oleh pemasaran digital yang massif.	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	SNI ISO 37122 : 2019
16				Pertumbuhan Ekonomi	Indikator RPJMD
17		B3. Membangun dan Memasarkan Wajah Kota (*City Appearance Branding*)	B.3.1. Meningkatkan pengembangan wajah kota yang mencerminkan identitas budaya lokal dan mendukung potensi pariwisata serta bisnis.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Indikator RPJMD
18				Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Indikator RPJMD
19				Persentase Kesesuaian Pola Ruang	Indikator RPJMD
20	*Smart Economy*	Ec1. Membangun ekosistem industri yang berdaya saing (*Industry*)	Ec.1.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah.	9.1. Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri	SNI ISO 37122 : 2019
21				5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	SNI ISO 37122 : 2019
22				Pertumbuhan Ekonomi	Indikator RPJMD
23		Ec2. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat *(Welfare*)	Ec.2.1. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui peningkatan nilai tambah produk lokal dan daya saing UMKM.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Indikator RPJMD
24				Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Indikator RPJMD
25				Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum	Indikator RPJMD

No.	Dimensi	Sub Dimensi	Sasaran	Indikator	Rujukan Indikator
26				5.4. Persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian dan pengembangan	SNI ISO 37122 : 2019
27		Ec3. Membangun Ekosistem Transaksi Keuangan (*Transaction*)	Ec.3.1. Menciptakan ekosistem industri yang adaptif dan inovatif.	9.1. Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri.	SNI ISO 37122 : 2019
28				9.2. Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	SNI ISO 37122 : 2019
29				Pertumbuhan Ekonomi	Indikator RPJMD
30	*Smart Living*	Lv1. Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (*Harmony*)	Lv.1.1. Memberikan akses masyarakat terhadap layanan dasar (air bersih dan sanitasi aman) secara merata.	12.2 Persentase rumah tangga dengan pengukur air pintar	SNI ISO 37122 : 2019
31				Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Indikator RPJMD
32		Lv2. Mewujudkan Prasarana Kesehatan (*Health*)	Lv.2.1. Meningkatkan kualitas kesehatan dan ketahanan sosial masyarakat, termasuk melalui penurunan prevalensi stunting yang meningkat.	11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	SNI ISO 37122 : 2019
33				11.2. Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk	SNI ISO 37122 : 2019
34				Usia Harapan Hidup	Indikator RPJMD
35		Lv3. Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi (*Mobility*)	Lv.3.1. Meningkatkan harmonisasi tata ruang dan transportasi yang mendukung mobilitas efisien dan kualitas	19.2. Jumlah pengguna transportasi ekonomi berbagi per 100.000 penduduk	SNI ISO 37122 : 2019
36				19.6. Persentase layanan transportasi umum kota yang	SNI ISO 37122 : 2019

No.	Dimensi	Sub Dimensi	Sasaran	Indikator	Rujukan Indikator
			hunian yang layak di seluruh wilayah.	dicakup oleh sistem pembayaran terpadu	
37				Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Indikator RPJMD
38				Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indikator RPJMD
39	*Smart Society*	S1. Mewujudkan Interaksi Masyarakat yang Efisien (*Community*)	S.1.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terampil, berdaya saing, dan berliterasi digital.	13.4. Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital	SNI ISO 37122 : 2019
40				Indeks Pembangunan Manusia	Indikator RPJMD
41		S2. Membangun Ekosistem Belajar yang Efisien (*Learning*) dan Komprehensif	S.2.1. Mewujudkan masyarakat yang adaptif, inovatif, dan partisipatif dalam pembangunan daerah, termasuk dukungan terhadap kelompok rentan dan difabel.	13.1. Persentase bangunan publik yang dapat diakses oleh orang-orang dengan kebutuhan khusus	SNI ISO 37122 : 2019
42				6.2. Jumlah komputer, laptop, tablet atau perangkat pembelajaran digital lainnya yang tersedia per 1.000 siswa	SNI ISO 37122 : 2019
43				17.3. Jumlah buku perpustakaan umum dan judul *e-book* per 100.000 penduduk	SNI ISO 37122 : 2019
44				Harapan Lama Sekolah	Indikator RPJMD
45				Indeks Pembangunan Manusia	Indikator RPJMD
46		S3. Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat (*Security*)	S.3.1. Menciptakan sistem keamanan masyarakat yang terintegrasi dengan teknologi untuk mendukung rasa aman dan nyaman bagi warga.	15.1. Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital	SNI ISO 37122 : 2019
47				Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)	Indikator RPJMD
48				Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM dan Pelanggaran PERDA	Indikator RPJMD
49	*Smart Environment*	En1. Mengembangkan Program Perlindungan		23.2. Jumlah stasiun pemantauan kualitas air	SNI ISO 37122 : 2019

No.	Dimensi	Sub Dimensi	Sasaran	Indikator	Rujukan Indikator
		Lingkungan Hidup (*Protection*)	En.1.1. Mengembangkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.	lingkungan langsung *(real-time)* per 100.000 populasi	
50				22.5. Persentase jaringan pipa air limbah yang dimonitor oleh system sensor data tracking *real-time*	SNI ISO 37122 : 2019
51				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indikator RPJMD
52		En2. Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah (*Waste*)	En.2.1. Mengembangkan sistem terintegrasi untuk tata kelola limbah dan sampah.	16.1. Persentase pusat pembuangan limbah (kontainer) yang dilengkapi dengan telemetering.	SNI ISO 37122 : 2019
53				16.2. Persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga.	SNI ISO 37122 : 2019
54				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indikator RPJMD
55		En3. Mengembangkan Tata Kelola Energi Yang Bertanggung-jawab (*Energy*)	En.3.1. Mengoptimalkan pengelolaan energi dan sumber daya alam.	7.1. Persentase energi listrik dan energi termal yang dihasilkan dari pengolahan air limbah, limbah padat dan pengolahan limbah cair lainnya serta sumber daya limbah panas lainnya, sebagai bagian dari total bauran energi kota untuk tahun Tertentu	SNI ISO 37122 : 2019
56				Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indikator RPJMD
57				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indikator RPJMD

BAB III
STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY* KABUPATEN KULON PROGO

Pembangunan kota dan kabupaten di Indonesia kini dihadapkan pada pergeseran paradigma yang fundamental, di mana daya saing global tidak lagi hanya ditentukan oleh negara, melainkan juga oleh kapasitas dan inovasi di tingkat lokal. Dalam konteks ini, pendekatan *smart city* telah menjadi keniscayaan yang diadopsi bukan sekadar mengikuti tren, tetapi sebagai respons strategis untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang optimal, cepat, tepat sasaran, terjangkau, dan mudah. Pembangunan *smart city* tidak hanya berfokus pada efisiensi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tetapi juga bertujuan untuk membangun masyarakat dengan menjadikan infrastruktur dan sarana TIK sebagai faktor pendukung atau *enabler*. Dengan tiga kunci utama, yaitu inovasi, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi, pendekatan ini menjadi instrumen vital dalam mewujudkan kualitas kehidupan yang sehat, berdaya saing, berketahanan, dan berkelanjutan.

Gambar 3.1 Bupati Kulon Progo di podium saat pemaparan forum konsultasi publik RPJMD 2025-2030

Sumber : https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/03/07/514/1206264/ini-10-isu-strategis-pembangunan-kulonprogo-lima-tahun-ke-depan

Strategi pembangunan *smart city* di Kabupaten Kulon Progo merupakan manifestasi operasional dari visi jangka panjang daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Visi tersebut tidak dapat dicapai tanpa sebuah kerangka kerja yang sistematis dan terintegrasi. Di sinilah peran *smart city* menjadi sangat strategis. *Smart city* berfungsi sebagai jantung yang memompa inovasi dan teknologi ke seluruh sendi pembangunan daerah, sekaligus menjadi penerjemah visi filosofis ini ke dalam program-program kerja yang konkret, terukur, dan berdampak nyata.

Pengenalan strategi *smart city* pada bagian awal bab ini akan memberikan landasan teoretis dan kontekstual yang kokoh. Penjelasan ini akan menguraikan bagaimana kerangka kerja nasional diadopsi dan diadaptasi sesuai karakteristik spesifik Kulon Progo, menganalisis kondisi kesiapan daerah, dan merumuskan arah kebijakan serta program prioritas yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Tujuannya adalah

memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam pembangunan *smart city* di Kulon Progo tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian integral dari upaya kolektif untuk mewujudkan visi SEMARAK (Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya, dan Berkelanjutan) Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2045.

3.1 SMART GOVERNANCE

Tujuan *Smart Governance* adalah memberikan akses kepada Masyarakat terhadap pelayanan publik dan birokrasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Berdasarkan hasil analisis SWOT dan TOWS dari Buku 1 *Smart City* Kulon Progo didapatkan beberapa strategi *Smart Governance* pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Strategi *Smart Governance*

No	Sasaran	Indikator (SNI ISO 37122:2019 dan RPJMD)	Strategi	Referensi Misi *Smart City*
G.1. Pelayanan Publik				
1	**G.1.1.** Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan warga.	Indeks Kepuasan Masyarakat	**G.1.1.1.** Pengembangan Ekosistem Layanan Publik Terintegrasi Berbasis Identitas Digital Tunggal (*Single Citizen Identity*)	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang transparan, akuntabel, efisien, dan partisipatif melalui pemanfaatan data dan teknologi.
2		10.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	**G.1.1.2.** Penguatan Mekanisme Umpan Balik dan Pengawasan Partisipatif Berbasis Platform Digital.	
3			**G.1.1.3.** Otomatisasi dan Digitalisasi *End to End* Layanan Perizinan Multi Sektor.	
G.2. Manajemen Birokrasi				
4	**G.2.1.** Mewujudkan sistem pemerintahan digital yang terpadu dan berkelanjutan	Indeks Reformasi Birokrasi	**G.2.1.1**. Transformasi Kapasitas SDM ASN Menuju Pola Pikir Digital dan Adaptif.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang transparan, akuntabel, efisien, dan partisipatif melalui pemanfaatan data dan teknologi.
5		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE)	**G.2.1.2.** Pembangunan dan Penguatan Ekosistem Tata Kelola Keamanan Informasi Terintegrasi	
6		Akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah (Opini BPK)	**G.2.1.3.** Penguatan Manajemen Kinerja Berbasis Data dan Akuntabilitas Multi Level	
7		21.1. Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan.		
G.3. Kebijakan Publik				

8	**G.3.1.** Menciptakan perancangan kebijakan yang berbasis data dan partisipatif.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	**G.3.1.1**. Pemanfaatan Analitik Data untuk Perumusan Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence Based Policy*)	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang transparan, akuntabel, efisien, dan partisipatif melalui pemanfaatan data dan teknologi.
9		Indeks Maturitas SPIP	**G.3.1.2**. Pelembagaan Kemitraan Pentahelix untuk Perumusan Regulasi yang Inklusif.	
10		10.1. Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk	**G.3.1.3.** Harmonisasi dan Standardisasi Regulasi Daerah dengan Kerangka Kerja Nasional.	

3.2 SMART BRANDING

Smart Branding bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Kulon Progo yang unggul dalam daya saing bisnis, memiliki kepastian dalam berusaha, mendukung pengembangan ekosistem pariwisata, serta menata tampilan kota yang mencerminkan identitas khas Kulon Progo. Melalui analisis SWOT dan TOWS yang terdapat dalam Buku 1, telah dirumuskan sejumlah strategi untuk mendukung implementasi *Smart Branding*.

Tabel 3.2 Strategi *Smart Branding*

No	Sasaran	Indikator (SNI ISO 37122:2019 dan RPJMD)	Strategi	Referensi Misi *Smart City*
B1. Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata				
1	**B.1.1.** Meningkatkan daya tarik dan citra daerah di tingkat nasional dan internasional melalui strategi pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan.	Rata-rata Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Budaya, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, dan Ekspresi Budaya pada Indeks Pembangunan Kebudayaan	**B.1.1.1.** Pengembangan "Ekonomi Kreatif & Ekowisata Berbasis Geoheritage" Terintegrasi dengan Bandara YIA.	Mengembangkan identitas dan daya saing Kulon Progo melalui integrasi ekosistem pariwisata, penguatan produk unggulan daerah, pengembangan ekosistem bisnis, serta penataan ruang kota yang indah, nyaman, dan berkarakter budaya.
2		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	**B.1.1.2**. Penguatan Brand Budaya Lokal melalui Digitalisasi dan Event Tahunan yang Konsisten.	
3		14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	**B.1.1.3**. Kolaborasi Multi Aktor untuk Pemasaran Pariwisata yang Inklusif dan Terukur.	

No	Sasaran	Indikator (SNI ISO 37122:2019 dan RPJMD)	Strategi	Referensi Misi *Smart City*
4		17b.1. Jumlah pemesanan daring untuk fasilitas budaya per 100.000 penduduk		
5		17b.2. Persentase catatan budaya kota yang telah didigitalkan		
B2. Membangun Platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah				
6	**B.2.1.** Menciptakan ekosistem pariwisata yang inovatif dan terintegrasi, didukung oleh pemasaran digital yang massif.	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	**B.2.1.1.** Peningkatan Citra Daerah sebagai "Hub Agro Industri & Ekonomi Kreatif Berbasis Digital".	Mengembangkan identitas dan daya saing Kulon Progo melalui integrasi ekosistem pariwisata, penguatan produk unggulan daerah, pengembangan ekosistem bisnis, serta penataan ruang kota yang indah, nyaman, dan berkarakter budaya.
7		Pertumbuhan Ekonomi	**B.2.1.2**. Penguatan Ekosistem Kewirausahaan dan UMKM Melalui Literasi Digital dan Akses Pendanaan.	
8			**B.2.1.3**. Pembangunan Merek Produk Lokal Kulon Progo yang Kuat dan Kohesif.	
B3. Membangun dan Memasarkan Wajah Kota				
9	**B.3.1.** Meningkatkan pengembangan wajah kota yang mencerminkan identitas budaya lokal dan mendukung potensi pariwisata serta bisnis.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	**B.3.1.1.** Penataan Ruang Berbasis Identitas Budaya dan Modern di Pusat Perkotaan.	Mengembangkan identitas dan daya saing Kulon Progo melalui integrasi ekosistem pariwisata, penguatan produk unggulan daerah, pengembangan ekosistem bisnis, serta penataan ruang kota yang indah, nyaman, dan berkarakter budaya.
10		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	**B.3.1.2**. Pembangunan Wajah Kota yang Lestari dan Tangguh Bencana.	
11		Persentase Kesesuaian Pola Ruang	**B.3.1.3.** Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Publik.	

3.3 SMART ECONOMY

Smart Economy bertujuan untuk mengembangkan sektor industri lokal guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, membentuk ekosistem keuangan yang inklusif, serta mendorong literasi keuangan agar tercipta masyarakat yang semakin terbiasa dengan transaksi non tunai. Sejumlah strategi *Smart Economy* telah dirumuskan berdasarkan hasil analisis SWOT dan TOWS yang tercantum dalam Buku 1.

Tabel 3.3 Strategi *Smart Economy*

No	Sasaran	Indikator (SNI ISO 37122:2019 dan RPJMD)	Strategi	Referensi Misi *Smart City*
Ec1. Membangun ekosistem industri yang berdaya saing				
1	**Ec.1.1**. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah.	9.1. Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri	**Ec.1.1.1**. Hilirisasi Pertanian dan Perikanan Berbasis Digital.	Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan agribisnis, penguatan UMKM, digitalisasi ekonomi, pengembangan ekosistem industri kreatif, menuju masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing.
2		5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	**Ec.1.1.2**. Pengembangan Klaster Industri Kreatif dan Budaya Terintegrasi.	
3		Pertumbuhan Ekonomi	**Ec.1.1.3**. Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM melalui Kolaborasi Sektor Swasta dan Teknologi.	
Ec2. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat				
4	**Ec.2.1.** Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui peningkatan nilai tambah produk lokal dan daya saing UMKM.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	**Ec.2.1.1.** Program Peningkatan Keterampilan Vokasional dan Kewirausahaan Inklusif.	Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan agribisnis, penguatan UMKM, digitalisasi ekonomi, pengembangan ekosistem industri kreatif, menuju masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing.
5		Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	**Ec.2.1.2.** Pemanfaatan Teknologi untuk Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan.	
6		Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum	**Ec.2.1.3.** Peningkatan Perlindungan Sosial dan Data Kemiskinan Terpadu.	
7		5.4. Persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian dan pengembangan		
Ec3. Membangun Ekosistem Transaksi Keuangan				
8	**Ec.3.1.** Menciptakan ekosistem industri yang adaptif dan inovatif.	9.1. Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi	**Ec.3.1.1.** Edukasi dan Literasi Keuangan Digital yang Inklusif.	Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui

No	Sasaran	Indikator (SNI ISO 37122:2019 dan RPJMD)	Strategi	Referensi Misi *Smart City*
		sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri.		pengembangan agribisnis, penguatan UMKM, digitalisasi ekonomi, pengembangan ekosistem industri kreatif, menuju masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing.
9		9.2. Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	**Ec.3.1.2.** Integrasi Sistem Pembayaran Digital dalam Layanan Publik dan Transaksi Lokal.	
10		Pertumbuhan Ekonomi	**Ec.3.1.3**. Pengembangan Skema Pendanaan Alternatif untuk Ekonomi Lokal.	

3.4 SMART LIVING

Smart Living bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara lingkungan hunian, layanan kesehatan, serta sistem transportasi dan logistik perkotaan. Berdasarkan hasil analisis SWOT dan TOWS yang tercantum dalam Buku 1, sejumlah strategi *Smart Living* telah dirumuskan dan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Strategi *Smart Living*

No	Sasaran	Indikator (SNI ISO 37122:2019 dan RPJMD)	Strategi	Referensi Misi *Smart City*
Lv1. Harmonisasi Tata Ruang Wilayah				
1	**Lv.1.1.** Memberikan akses masyarakat terhadap layanan dasar (air bersih dan sanitasi aman) secara merata.	12.2 Persentase rumah tangga dengan pengukur air pintar	**Lv.1.1.1**. Pengembangan SimtaruKu 2.0 sebagai Platform Kolaboratif Tata Ruang Digital.	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang layak, sehat, dan harmonis melalui perencanaan tata ruang yang berkelanjutan, peningkatan konektivitas dan mobilitas, serta penguatan layanan kesehatan dan sosial berbasis teknologi.
2		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	**Lv.1.1.2**. Pembangunan Kawasan Hunian Cerdas dan Tangguh Bencana.	
3			**Lv.1.1.3.** Optimalisasi Ruang Hijau Publik dengan Teknologi Informasi.	
Lv2. Mewujudkan Prasarana Kesehatan				
4	**Lv.2.1**. Meningkatkan kualitas kesehatan dan ketahanan sosial masyarakat, termasuk melalui	11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu	**Lv.2.1.1.** Pembangunan Ekosistem Kesehatan Digital Terpadu.	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang layak, sehat, dan harmonis melalui

No	Sasaran	Indikator (SNI ISO 37122:2019 dan RPJMD)	Strategi	Referensi Misi *Smart City*
	penurunan prevalensi stunting yang meningkat.	daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan		perencanaan tata ruang yang berkelanjutan, peningkatan konektivitas dan mobilitas, serta penguatan layanan kesehatan dan sosial berbasis teknologi.
5		11.2. Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk	**Lv.2.1.2.** Penguatan Literasi Kesehatan Cerdas melalui Edukasi Interaktif.	
6		Usia Harapan Hidup	**Lv.2.1.3.** Jaringan Layanan Kesehatan Bergerak Terjadwal.	
Lv3. Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi				
7	**Lv.3.1.** Meningkatkan harmonisasi tata ruang dan transportasi yang mendukung mobilitas efisien dan kualitas hunian yang layak di seluruh wilayah.	19.2. Jumlah pengguna transportasi ekonomi berbagi per 100.000 penduduk	**Lv.3.1.1.** Pengembangan Transportasi Publik Terpadu Berbasis Digital.	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang layak, sehat, dan harmonis melalui perencanaan tata ruang yang berkelanjutan, peningkatan konektivitas dan mobilitas, serta penguatan layanan kesehatan dan sosial berbasis teknologi.
8		19.6. Persentase layanan transportasi umum kota yang dicakup oleh sistem pembayaran terpadu	**Lv.3.1.2.** Optimalisasi Manajemen Lalu Lintas Cerdas dan Pengendalian Lingkungan.	
9		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	**Lv.3.1.3.** Pembangunan Infrastruktur Mobilitas Aktif dan Inklusif.	
		Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum		

3.5 SMART SOCIETY

Smart Society bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang partisipatif dan berdaya guna melalui penguatan interaksi sosial, pengembangan ekosistem pembelajaran yang inklusif, serta penerapan sistem manajemen keamanan dan keselamatan yang efektif. Berdasarkan hasil analisis SWOT dan TOWS dalam Buku 1, sejumlah strategi *Smart Society* telah dirumuskan dan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Strategi *Smart Society*

No	Sasaran	Indikator (SNI ISO 37122:2019 dan RPJMD)	Strategi	Referensi Misi *Smart City*
S1. Mewujudkan Interaksi Masyarakat yang Efisien				
1	**S.1.1.** Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terampil, berdaya saing, dan berliterasi digital.	13.4. Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital	**S.1.1.1.** Pengembangan Platform Partisipasi Publik dan Kesejahteraan Digital Terpadu	Mendorong terciptanya masyarakat yang religius, berbudaya, inklusif, aman, dan tertib melalui pemanfaatan

No	Sasaran	Indikator (SNI ISO 37122:2019 dan RPJMD)	Strategi	Referensi Misi *Smart City*
2		Indeks Pembangunan Manusia	**S.1.1.2.** Penguatan Komunitas Inklusif Berbasis Teknologi.	teknologi informasi dalam mendukung interaksi sosial, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan literasi digital.
3			**S.1.1.3.** Pelembagaan Kemitraan Multipihak dalam Pembangunan Komunitas.	
S2. Membangun Ekosistem Belajar yang Efisien dan Komprehensif				
4	**S.2.1.** Mewujudkan masyarakat yang adaptif, inovatif, dan partisipatif dalam pembangunan daerah, termasuk dukungan terhadap kelompok rentan dan difabel.	13.1. Persentase bangunan publik yang dapat diakses oleh orang-orang dengan kebutuhan khusus	**S.2.1.1.** Transformasi Digital Pendidikan Berkelanjutan dari Hulu ke Hilir.	Mendorong terciptanya masyarakat yang religius, berbudaya, inklusif, aman, dan tertib melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung interaksi sosial, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan literasi digital.
5		6.2. Jumlah komputer, laptop, tablet atau perangkat pembelajaran digital lainnya yang tersedia per 1.000 siswa	**S.2.1.2**. Gerakan Literasi Digital Inklusif dan Berkelanjutan.	
6		17.3. Jumlah buku perpustakaan umum dan judul e-book per 100.000 penduduk	**S.2.1.3.** Pelembagaan Kemitraan Akademisi dan Industri untuk Riset dan Inovasi.	
		Harapan Lama Sekolah		
		Indeks Pembangunan Manusia		
S3. Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat				
7	**S.3.1.** Menciptakan sistem keamanan masyarakat yang terintegrasi dengan teknologi untuk mendukung rasa aman dan nyaman bagi warga.	15.1. Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital	**S.3.1.1.** Pengembangan Ekosistem Keamanan Digital Terpadu dan Responsif.	Mendorong terciptanya masyarakat yang religius, berbudaya, inklusif, aman, dan tertib melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung interaksi sosial, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan literasi digital.
8		Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)	**S.3.1.2.** Pelembagaan Sistem Peringatan Dini Bencana Berbasis Komunitas dan Teknologi,	
9		Persentase Penanganan Gangguan TRANTIBUM dan Pelanggaran PERDA	**S.3.1.3.** Peningkatan Perlindungan Sosial dan Hukum Berbasis Data.	

3.6 SMART ENVIRONMENT

Smart Environment bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam serta menjaga kelestarian lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan, dengan pendekatan yang mandiri. Berdasarkan hasil analisis SWOT dan TOWS yang tercantum dalam Buku 1, sejumlah strategi *Smart Environment* telah dirumuskan dan ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.6 Strategi *Smart Environment*

No	Sasaran	Indikator (SNI ISO 37122:2019 dan RPJMD)	Strategi	Referensi Misi *Smart City*
En1. Mengembangkan Program Perlindungan Lingkungan Hidup				
1	**En.1.1.** Mengembangkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.	23.2. Jumlah stasiun pemantauan kualitas air lingkungan langsung (*real-time*) per 100.000 populasi	**En.1.1.1.** Pembangunan Ekosistem Pemantauan Kualitas Lingkungan Cerdas	Menjaga kelestarian lingkungan berkelanjutan melalui perlindungan dan pengelolaan sumber daya, pengelolaan limbah dan sampajh, serta tata kelola energi berkelanjutan.
2		22.5. Persentase jaringan pipa air limbah yang dimonitor oleh system sensor data tracking *real time*	**En.1.1.2.** Penguatan Pengendalian dan Perlindungan Lahan Berbasis Data Geospasial.	
3		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**En.1.1.3.** Program Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem Berbasis Partisipasi Publik.	
En2. Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah				
4	**En.2.1.** Mengembangkan sistem terintegrasi untuk tata kelola limbah dan sampah.	16.1. Persentase pusat pembuangan limbah (kontainer) yang dilengkapi dengan telemetering.	**En.2.1.1**. Pembangunan Ekosistem Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Digital.	Menjaga kelestarian lingkungan berkelanjutan melalui perlindungan dan pengelolaan sumber daya, pengelolaan limbah dan sampajh, serta tata kelola energi berkelanjutan.
5		16.2. Persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga.	**En.2.1.2.** Gerakan Kulon Progo Nol Sampah melalui Edukasi dan Kemitraan Inovatif.	
6		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**En.2.1.3.** Optimalisasi Infrastruktur dan Regulasi Pengelolaan Sampah.	
En3. Mengembangkan Tata Kelola Energi Yang Bertanggung-jawab				
7	**En.3.1.** Mengoptimalkan pengelolaan energi dan sumber daya alam.	7.1. Persentase energi listrik dan energi termal yang dihasilkan dari pengolahan air limbah, limbah padat dan pengolahan limbah cair lainnya serta sumber daya limbah panas lainnya,	**En.3.1.1**. Pengembangan Peta Jalan Energi Terbarukan Daerah.	Menjaga kelestarian lingkungan berkelanjutan melalui perlindungan dan pengelolaan sumber daya, pengelolaan limbah

No	Sasaran	Indikator (SNI ISO 37122:2019 dan RPJMD)	Strategi	Referensi Misi *Smart City*
		sebagai bagian dari total bauran energi kota untuk tahun Tertentu		dan sampajh, serta tata kelola energi berkelanjutan.
8		Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	**En.3.1.2**. Implementasi Program Audit Energi dan Efisiensi Cerdas.	
9		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**En.3.1.3.** Pembangunan Ekosistem Energi Bersih Berbasis Komunitas dan Kemitraan.	

BAB IV
RENCANA AKSI *SMART CITY* KABUPATEN KULON PROGO

Rencana Aksi *Smart City* Kulon Progo ini dirancang sebagai sebuah instrumen strategis yang utuh dan holistik, yang secara langsung menerjemahkan visi jangka menengah daerah ke dalam inisiatif-inisiatif konkret. Rencana ini memiliki keterkaitan erat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo 2025–2029, yang mengusung visi "*Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya, yang Berkelanjutan*". Oleh karena itu, Rencana Aksi ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari strategi besar pembangunan daerah untuk mencapai visi dan misi tersebut.

Rencana Aksi *Smart City* Kulon Progo adalah sebuah cetak biru yang terintegrasi, holistik, dan komprehensif. Keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada komitmen dan kolaborasi terpadu dari semua pemangku kepentingan (*stakeholder*), termasuk pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Dokumen-dokumen rencana aksi menunjukkan bahwa setiap program inovasi telah memiliki sektor pelaksana utama (*Leading Sector*) dan sumber pendanaan yang jelas, yang berasal dari berbagai sumber seperti APBD, APBN, Dana Keistimewaan (DAIS), dan bahkan investasi swasta (CSR). Keterlibatan berbagai sumber pendanaan ini adalah bukti konkret dari upaya untuk mengatasi kelemahan daerah terkait keterbatasan keuangan.

Rencana Aksi ini juga berfungsi sebagai peta jalan (*roadmap*) yang terstruktur, menempatkan program-program dalam kerangka waktu jangka pendek (2025) hingga jangka menengah (2029) sejalan dengan periode RPJMD. Selaras dengan panduan dari Kominfo, implementasi rencana aksi ini akan dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan fleksibilitas dan adaptasi terhadap dinamika perubahan yang mungkin terjadi.

Secara keseluruhan, Rencana Aksi *Smart City* Kulon Progo ini merupakan dokumen strategis yang komprehensif dan terintegrasi, yang dirancang untuk menjadi jembatan antara visi pembangunan makro daerah dan implementasi program operasional di lapangan. Melalui enam pilar *Smart City*, inisiatif-inisiatif yang diusulkan dirumuskan dengan cermat untuk secara langsung menanggapi isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Kulon Progo, mulai dari masalah tata kelola, kemiskinan, lingkungan, hingga daya saing pariwisata.

4.1 RENCANA AKSI *SMART GOVERNANCE*

Bagian ini menyajikan daftar rencana aksi yang mencakup pengembangan kebijakan dan kelembagaan, pembangunan infrastruktur pendukung, pengembangan aplikasi digital, serta peningkatan literasi terkait *Smart City*. Rincian rencana aksi untuk *Smart Governance* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Rencana Aksi *Smart Governance* (Jangka Pendek - Menengah)

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Pelayanan Publik	**G.1.1.2.** Penguatan Mekanisme Umpan Balik dan Pengawasan Partisipatif Berbasis Platform Digital.	**G.1.1.2.P.1.** Pembangunan Aplikasi SIMPel (Sistem InforMasi Pengendalian)	**G.1.1.2.P.1.A.1.** Penerapan Peraturan Bupati tentang Pengendalian pembangunan bangunan infrastruktur pemerintah daerah	2025	**G.1.1.2.P.1.B.1.** Pengadaan sarana prasarana pendukung dan pemeliharaanya.	2025	**G.1.1.2.P.1.C.1.** Penyempurnaan aplikasi pelaporan progres kemajuan fisik	2028-2029	**G.1.1.2.P.1.D.1.** Sosialisasi kepada Perangkat Daerah, penyedia jasa konstruksi terkait pelaporan progres kemajuan fisik melalui Aplikasi SIMPel **G.1.1.2.P.1.D.2.** Membuat video tutorial penggunaan aplikasi SIMPel	2026

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	**Tahun**	**Infrastruktur Pendukung**	**Tahun**	**Perangkat Lunak Pendukung**	**Tahun**	**Penguatan Literasi**	**Tahun**
	G.1.1.1. Pengembangan Ekosistem Layanan Publik Terintegrasi Berbasis Identitas Digital Tunggal (*Single Citizen Identity*)	**G.1.1.1. P.1.** Eling Pajak Daerah (Elektronifikasi Layanan dan Integrasi Pajak Daerah)	**G.1.1.1. P.1.A.1.** Penerapan Perbup tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah **G.1.1.1. P.1.A.2.** Membangun kerja sama dengan berbagai pihak terutama lembaga keuangan seperti bank, untuk mendukung transaksi digital, seperti pembayaran pajak melalui aplikasi atau platform digital.	2025 2028	**G.1.1.1. P.1.B.1.** Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung	2025	**G.1.1.1. P.1.C.1.** Pengembangan Aplikasi menjadi *Single Sign On*	2026 - 2027	**G.1.1.1. P.1.D.1.** Sosialisasi layanan pajak daerah yang terintegrasi	2025
	G.1.1.2. Penguatan Mekanisme Umpan Balik dan Pengawasan Partisipatif Berbasis Platform Digital.	**G.1.1.2.P.3.** Aplikasi berbasis Web, BangsaKu	**G.1.1.2.P.3.A.1.** SOP Digitalisasi pendaftaran dan pelaporan Ormas	2025	**G.1.1.2.P.3.B.1.** Infrastruktur data dan jaringan apliaksi BangsaKu	2030	**G.1.1.2.P.3.C.1.** Pengembangan Aplikasi BangsaKu	2025	**G.1.1.2.P.3.D.1.** Sosialisasi kepada Ormas	2025

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	G.1.1.3. Otomatisasi dan Digitalisasi *End to End* Layanan Perizinan Multi Sektor.	**G.1.1.3.P.1.** SiPerimanis Kapanewpn	**G.1.1.3.P.1.A.1.** PP 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	2025-2029	**G.1.1.3.P.1.B.1.** Pengadaan perangkat pendukung: Laptop, Printer, dan Jaringan Internet	2025-2029	**G.1.1.3.P.1.C.1.** Pengembangan modul OSS dan SimBG, serta Video Tutorial	2026-2027	**G.1.1.3.P.1.D.1.** Sosialisasi kepda masyarakat **G.1.1.3.P.1.D.2.** Pelatihan Kepada Petugas Kapanewon	2025-2029
	G.1.1.1. Pengembangan Ekosistem Layanan Publik Terintegrasi Berbasis Identitas Digital Tunggal (Single Citizen Identity)	**G.1.1.1.P.2.** AKURAD (Aksi Kalurahan Ramah Administrasi Kependudukan)	**G.1.1.1.P.2.A.1.** Adanya penerapan Perbup tentang Disdukcapil	2025	**G.1.1.1.P.2.B.1.** Pengadaan sarana prasarana pendukung	2025	**G.1.1.1.P.2.C.1.** Pengembangan aplikasi pendaftaran penduduk dan catatan sipil	2025	**G.1.1.1.P.2.D.1.** Sosialisasi dan stimulasi kepada masyarakat	2025
	G.1.1.2. Penguatan Mekanisme Umpan Balik dan Pengawasan Partisipatif Berbasis Platform Digital.	**G.1.1.2.P.4.** Survey Kepuasan Masyarakat Kulon Progo (SKM-Ku)	**G.1.1.2.P.4.A.1.** Perencanaan pengembangan dan proses bisnis aplikasi **G.1.1.2.P.4.A.2.** Penyusunan SOP/ pedoman implementasi sistem **G.1.1.2.P.4.A.3.** Pembentukan Tim dan penanggung jawab sistem **G.1.1.2.P.4.A.4.**	2025 2027 2027	**G.1.1.2.P.4.B.1.** Server (menggunakan server kominfo) **G.1.1.2.P.4.B.2.** Perangkat Komputer di tempat layanan	2025 2027	**G.1.1.2.P.4.C.1.** Pengembangan SKMku (website) **G.1.1.2.P.4.C.2.** Penambahan fitur akses mandiri masyarakat **G.1.1.2.P.4.C.3.** Perbaikan Aplikasi **G.1.1.2.P.4.C.4.** Uji coba penggunaan aplikasi	2027 2027 2027 2027	**G.1.1.2.P.4.D.1.** Bimtek untuk admin yang telah dikembangkan (website) **G.1.1.2.P.4.D.2.** Sosialisasi ke pengguna layanan **G.1.1.2.P.4.D.3.** Penggunaan aplikasi oleh masyarakat	2027 2027 2027

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
			Evaluasi pelaksanaan Survey Mandiri pengguna layanan	2028					pengguna layanan **G.1.1.2.P.4.D.4.** Evaluasi dan Uji Efektivitas Program	2027-2029
Manajemen Birokrasi yang Efisien	**G.2.1.3.** Penguatan Manajemen Kinerja Berbasis Data dan Akuntabilitas Multi Level	**G.2.1.3.P.1.** Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan(E-SAKIP)	**G.2.1.3.P.1.A.1.** Perencanaan desain proses bisnis pengembangan sistem (Perencanaan, Pengukuran Pelaporan, Evaluasi) **G.2.1.3.P.1.A.2.** Pembentukan Tim dan penanggung jawab sistem **G.2.1.3.P.1.A.2.** Evaluasi perangkat penyimpanan data	2025-2026 2026 2029	**G.2.1.3.P.1.B.1.** Analisis kekuatan server dan prakiraan persiapan untuk tempat penyimpanan data sistem **G.2.1.3.P.1.B.2.** Pengadaan kebutuhan perangkat penyimpanan data maupun alat kelengkapannya	2027 2028	**G.2.1.3.P.1.C.1.** Penyempurnaan / Perbaikan sistem Dashboard dan pelaporan **G.2.1.3.P.1.C.2.** Proses Integrasi antar sistem pemerintah (MonevKu)	2027-2028 2028-2029	**G.2.1.3.P.1.D.1.** Pembuatan peraturan dan pedoman dari implementasi sistem **G.2.1.3.P.1.D.2.** Literasi penggunaan user maupun sosialisasi kepada admin Perangkat Daerah	2026 2026-2029
	G.2.1.3. Penguatan Manajemen Kinerja Berbasis Data dan Akuntabilitas Multi Level	**G.2.1.3.P.2.** Pengembangan Portal Data Pengadaan Barang/Jasa terintegrasi	**G.2.1.3.P.2.A.1.** Pembuatan proses bisnis modul pengarsipan, sistem penerimaan kunjungan tamu, survey indeks kepuasan masyarakat **G.2.1.3.P.2.A.2.** Pembuatan SOP pengarsipan dokumen pemiliahn	2026 2027	**G.2.1.3.P.2.B.1.** Ruang Fisik untuk Pelayanan dan Konsultasi.	2027	**G.2.1.3.P.2.C.1.** Penambahan fitur dashboard data e-pbjku **G.2.1.3.P.2.C.2.** Pengembangan pengarsipan dokumen pemilihan **G.2.1.3.P.2.C.3.**	2026 2027 2028	**G.2.1.3.P.2.D.1.** Benchmark/Studi komparasi ke Daerah yang telah berhasil membuat portal layanan digital pengadaan barang/jasa.	2026

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	**Tahun**	**Infrastruktur Pendukung**	**Tahun**	**Perangkat Lunak Pendukung**	**Tahun**	**Penguatan Literasi**	**Tahun**
			G.2.1.3.P.2.A.3. Pembuatan SOP sistem penerimaan kunjungan jasa layanan pengadaan barang/jasa **G.2.1.3.P.2.A.4.** Pembuatan Tim PIC Portal data PBJ	2028 2029			Pengembangan sistem penerimaan kunjungan pengguna jasa layanan pengadaan barang/jasa **G.2.1.3.P.2.C.4.** Pengintegrasian fitur-fitur layanan digital dalam satu portal	2029	**G.2.1.3.P.2.D.2.** Sosialisasi penggunaan sistem secara internal	2027-2029 (secara rutin)
	G.2.1.1. Transformasi Kapasitas SDM ASN Menuju Pola Pikir Digital dan Adaptif.	**G.2.1.1.P.1.** Pengembangan Kompetensi ASN terintegrasi secara Digital menuju Kulon Progo *Corporate University*	**G.2.1.1.P.1.A.1.** Pembentukan Tim Kerja kompeten **G.2.1.1.P.1.A.2.** Penyusunan Dasar Hukum Pelaksanaan Coporate University **G.2.1.1.P.1.A.3.** Penyusunan Roadmap Pengembangan Kompetensi ASN **G.2.1.1.P.1.A.4.** Analisis kebutuhan dan kurikulum pelatihan	2026 2026 2026 2027	**G.2.1.1.P.1.B.1.** Ruang Fisik untuk Kesekretariatan dan Pelayanan Konsultasi secara Luring, ruang kelas, peralatan teknologi.	2027	**G.2.1.1.P.1.C.1.** Penyiapan wahana digital (*Learning Management System*) dan porses Uji Coba **G.2.1.1.P.1.C.2.** Pembuatan *platform/* portal/*website Corporate University* BKPSDM **G.2.1.1.P.1.C.3.** Evaluasi sistem digital	2026 2027 2028	**G.2.1.1.P.1.D.1.** *Benchmark/*Studi komparasi ke Daerah yang telah berhasil menerapkan *Corporate University* **G.2.1.1.P.1.D.2.** Pelaksanaan Webinar dengan tema-tema menunjang keberhasilan *Corporate University.* **G.2.1.1.P.1.D.3.** Menjalin kemitraan dengan	2026 2027-2029 (dilaksanakan secara rutin) 2027-2029

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	**Tahun**	**Infrastruktur Pendukung**	**Tahun**	**Perangkat Lunak Pendukung**	**Tahun**	**Penguatan Literasi**	**Tahun**
									lembaga yang relevan (Universitas, lembaga pelatihan, badan diklat, maupun swasta)	
	G.2.1.2. Pembangunan dan Penguatan Ekosistem Tata Kelola Keamanan Informasi Terintegrasi	**G.2.1.2.P.1.** Aplikasi untuk TSP	**G.2.1.2.P.1.A.1.** Adanya penerapan peraturan Bupati no.45 tahun 223 tentang Peraturan pelaksanaan Perda Kab. Kulon Progo No.22 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	2025-2029	**G.2.1.2.P.1.B.1.** Pemeliharaan infrastruktur pendukung	2025-2029	**G.2.1.2.P.1.C.1.** Pemeliharaan sistem aplikasi dan pengembangannya	2026-2029	**G.2.1.2.P.1.D.1.** Sosialisasi dan simulasi kepada Perusahaan dan PD	2026-2029
	G.2.1.3. Penguatan Manajemen Kinerja Berbasis Data dan Akuntabilitas Multi Level	**G.2.1.3.P.3.** Monevku	**G.2.1.3.P.3.A.1.** Adanya reviu peraturan bupati tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah **G.2.1.3.P.3.A.2.** Adanya penerapan peraturan bupati tentang Pengendalian dan EvaluasPembangunan Daerah	2026 2025-2029	**G.2.1.3.P.3.B.1.** Pemeliharaan infrastruktur pendukung	2025-2029	**G.2.1.3.P.3.C.1.** Pemeliharaan sistem MonevKu dan pengembangannya	2025-2029	**G.2.1.3.P.3.D.1.** Sosialisasi Perbup **G.2.1.3.P.3.D.2.** Sosisialisasi kepada user di setiap perangkat daerah	2026 2025-2029
	G.2.1.1. Transformasi	**G.2.1.1.P.2.**	**G.2.1.1.P.2.A.1.**	2025-2029	**G.2.1.1.P.2.B.1.**	2025-2029	**G.2.1.1.P.2.C.1.**	2025-2029	**G.2.1.1.P.2.D.1.**	2026

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	**Tahun**	**Infrastruktur Pendukung**	**Tahun**	**Perangkat Lunak Pendukung**	**Tahun**	**Penguatan Literasi**	**Tahun**
	Kapasitas SDM ASN Menuju Pola Pikir Digital dan Adaptif.	Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah	Penerapan Perbup No 3.tahun 2024 tentang Inovasi daerah **G.2.1.1.P.2.A.2.** Penyusunan dan Penerapan Dokumen Rencana Induk Peta jalan Pemajuan Iptek Daerah 2025-2029 **G.2.1.1.P.2.A.3.** Penyusunan Perbup Riset Daerah **G.2.1.1.P.2.A.4.** Pengembangan Directory Hasil Riset **G.2.1.1.P.2.A.5.** Integrasi dengan sistem aplikasi Pengembangan kepegawaian	2025-2029 2026 2028 2027	Pemeliharaan infrastruktur pendukung		Pemeliharaan sistem aplikasi dan pengembangannya		Sosialisasi Perbup **G.2.1.1.P.2.D.2.** Bimbingan Teknis Operasional sistem aplikasi **G.2.1.1.P.2.D.3.** Penyusunan SOP Klinik Inovasi	2026 2025
	G.2.1.3. Penguatan Manajemen Kinerja Berbasis Data dan Akuntabilitas Multi Level	**G.2.1.3.P.4.** Sistem pengelolaan LHP, LHR, LHE berbasis elektronik	**G.2.1.3.P.4.A.1.** SOP Pengelolaan LHP, LHR, LHE yang sudah didigitalkan	2025	**G.2.1.3.P.4.B.1.** Pengadaan perangkat pendukung, seperti Komputer dan internet	2025 – 2029	**G.2.1.3.P.4.C.1.** Penyediaan dan manajemen *Cloud Storage*	2025 – 2029	**G.2.1.3.P.4.D.1.** Sosialisasi dan *Brainstorming* kepada internal Inspektorat agar sistem dapat digunakan secara optimal baik dari sisi pengarsipan dan	2025 – 2029

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
									pendistribusian dokumen digital	
Efisiensi kebijakan publik	**G.3.1.1.** Pemanfaatan Analitik Data untuk Perumusan Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence Based Policy*)	**G.3.1.1.P.2.** Dashboard Data Pro	**G.3.1.1.P.2.A.1.** **Kebijakan :** 1.Adanya Kebijakan Pengelolaan Data 2. Kebijakan keamanan data 3. Kebijakan akses data **G.3.1.1.P.2.A.2.** **Kelembagaan :** 1. pembentukan tim dashboard data pro untuk penetapan peran dan tanggung jawab dalam Tim 3. Penyusunan SOP manajemen infrastruktur	2026	**G.3.1.1.P.2.B.1.** Server untuk data center, data *warehouse* dan jaringan internet	2026	**G.3.1.1.P.2.C.1.** Algoritma data warehouse dan tablue untuk visualisasi data	2026	**G.3.1.1.P.2.D.1.** Memberikan atau meningkatkan kemampuan Tim dashboard data pro untuk merancang, membuat, mengelola, dan memanfaatkan dashboard yang menyajikan data secara visual dan interaktif untuk tujuan pemantauan, analisis, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. **G.3.1.1.P.2.D.2.** Sosialisasi di seluruh perangkat daerah tentang pentingnya literasi data **G.3.1.1.P.2.D.3.** Meningkatkan keterampilan	2026

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
									dan kompetensi anggota tim Dashboard data pro agar mampu merancang, mengelola, dan memanfaatkan dashboard data secara efektif untuk pengambilan keputusan yang terinformasi, pemantauan kinerja, dan identifikasi tren strategis demi kemajuan organisasi **G.3.1.1.P.2.D.4.** Kolaborasi dari berbagai pengetahuan antara Tim Dashboard data dan stakeholder lainnya.	
	G.3.1.3. Harmonisasi dan Standardisasi Regulasi Daerah dengan Kerangka Kerja Nasional.	**G.3.1.3.P.1.** JDIH Kabupaten Kulon Progo *userfriendly*	**G.3.1.3.P.1.A.1.** Perencanaan ekosistem JDIH Kabupaten Kulon Progo *userfriendly*. **G.3.1.3.P.1.A.2.**	2025 2026-2029	**G.3.1.3.P.1.B.1.** Pengadaan Ruang JDIH. **G.3.1.3.P.1.B.2.** Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Ketiga (website).	2025-2029	**G.3.1.3.P.1.C.1.** Pengembangan JDIH Kabupaten Kulon Progo (website). **G.3.1.3.P.1.C.2.** Audit kemanan data oleh BSSN (standart	2025-2029	**G.3.1.3.P.1.D.1.** Sosialisasi JDIH Kabupaten Kulon Progo yang telah dikembangkan (website) kepada	2027-2029

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
			Penyelarasan JDIH dengan JDIHN. **G.3.1.3.P.1.A.3.** Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Ketiga. **G.3.1.3.P.1.A.4.** Penyelarasan Produk Hukum Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan JDIH terkini. **G.3.1.3.P.1.A.5.** Pembentukan SOP dan Tim Kerja.				dari Kementerian Hukum)		masyarakat dan para pemangku kepentingan. **G.3.1.3.P.1.D.2.** Bimtek JDIH Kabupaten Kulon Progo yang telah dikembangkan (website) kepada anggota JDIH.	

Tabel 4.2 Rencana Aksi *Smart Governance* (Jangka Panjang)

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Pelayanan Publik	**G.1.1.1.** Pengembangan Ekosistem Layanan Publik Terintegrasi Berbasis Identitas Digital	**G.1.1.1. P.1.** Eling Pajak Daerah (Elektronifikasi layanan dan Integrasi Pajak Daerah)	**G.1.1.1. P.1.A.3.** Membangun kemitraan strategis lanjutan dengan pihak lain untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dan	2030	**G.1.1.1. P.1.B.2.** Gedung Pelayanan yang nyaman **G.1.1.1. P.1.B.3.** Akses layanan di pusat pelayanan, layanan jemput bola	2029 2030	**G.1.1.1. P.1.C.2.** Aplikasi yang dibangun diperbaharui secara berkala dan memperluas Kerjasama dengan mitra	2030	**G.1.1.1. P.1.D.2.** Melakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan terkait inovasi digital bagi aparatur sipil negara (ASN).	2031

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	**Tahun**	**Infrastruktur Pendukung**	**Tahun**	**Perangkat Lunak Pendukung**	**Tahun**	**Penguatan Literasi**	**Tahun**
	Tunggal (*Single Citizen Identity*)		memanfaatkan kecerdasan kolektif **G.1.1.1. P.1.A.4.** Bank dan Pemda bekerja sama dalam mengembangkan dan mengintegrasikan sistem teknologi informasi untuk mendukung layanan transaksi digital.	2031	dan pelayanan secara online/elektronik.		perbankan serta mitra strategis lainnya dalam pembayaran pajak daerah **G.1.1.1. P.1.C.3.** Menyediakan kanal pembayaran pajak daerah yang lebih mudah diakses oleh masyarakat melalui platform digital. **G.1.1.1. P.1.C.4.** Mengubah pengelolaan transaksi tunai menjadi non-tunai berbasis digital untuk efisiensi operasional. **G.1.1.1. P.1.C.5.** Memperluas penggunaan transaksi digital tidak hanya untuk pajak, tetapi juga untuk retribusi		**G.1.1.1. P.1.D.3.** Dilakukan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam menggunakan layanan digital.	

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	**Tahun**	**Infrastruktur Pendukung**	**Tahun**	**Perangkat Lunak Pendukung**	**Tahun**	**Penguatan Literasi**	**Tahun**
							daerah dan belanja daerah **G.1.1.1. P.1.C.6.** Mendukung ekosistem digital di daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital. **G.1.1.1. P.1.C.7.** Software/ aplikasi berbasis web yang dapat diakses dari mana saja.			
	G.1.1.2. Penguatan Mekanisme Umpan Balik dan Pengawasan Partisipatif Berbasis Platform Digital.	**G.1.1.2.P.3.** Aplikasi berbasis Web, BangsaKu	**G.1.1.2.P.3.A.2.** Reviu SOP Digitalisasi pendaftaran dan pelaporan Ormas	2030	**G.1.1.2.P.3.B.2.** Pemeliharaan Infrastruktur data dan jaringan apliaksi BangsaKu	2030	**G.1.1.2.P.3.C.2.** Pengembangan fitur baru Aplikasi BangsaKu	2030	**G.1.1.2.P.3.D.2.** Re-Sosialisasi kepada Ormas	2030
Manajemen Birokrasi yang Efisien	**G.2.1.3.** Penguatan Manajemen Kinerja Berbasis	**G.2.1.3.P.2.** Pengembangan Portal Data Pengadaan					**G.2.1.3.P.2.C.5.** Pemutakhiran platform/portal/website Pengadaan	2031	**G.2.1.3.P.2.D.3.** Melaksanakan Evaluasi	2030

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	**Tahun**	**Infrastruktur Pendukung**	**Tahun**	**Perangkat Lunak Pendukung**	**Tahun**	**Penguatan Literasi**	**Tahun**
	Data dan Akuntabilitas Multi Level	Barang/Jasa terintegrasi					Barang/Jasa terintegrasi			
	G.2.1.1. Transformasi Kapasitas SDM ASN Menuju Pola Pikir Digital dan Adaptif.	**G.2.1.1.P.1.** Pengembangan Kompetensi ASN terintegrasi secara Digital menuju Kulon Progo *Corporate University*	**G.2.1.1.P.1.A.5.** Penyesuaian/evaluasi Peraturan tentang implementasi *Corporate University* **G.2.1.1.P.1.A.6.** Penyusunan roadmap lanjutan pengembangan kompetensi ASN	2030 2031			**G.2.1.1.P.1.C.4.** Pemutakhiran platform/portal/website *corporate university*	2031	**G.2.1.1.P.1.D.4.** Melaksanakan Evaluasi dan Pengukuran Dampak	2030
	G.2.1.2. Pembangunan dan Penguatan Ekosistem Tata Kelola Keamanan Informasi Terintegrasi	**G.2.1.2.P.1.** Aplikasi untuk TSP	**G.2.1.2.P.1.A.1.** Adanya penerapan peraturan Bupati no.45 tahun 223 tentang Peraturan pelaksanaan Perda Kab. Kulon Progo No.22 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	2030-2034	**G.2.1.2.P.1.B.1.** Pemeliharaan infrastruktur pendukung	2030-2034	**G.2.1.2.P.1.C.1.** Pemeliharaan sistem aplikasi dan pengembangannya	2030-2034	**G.2.1.2.P.1.D.1.** Sosialisasi dan simulasi kepada Perusahaan dan PD	2030-2034
	G.2.1.3. Penguatan Manajemen Kinerja Berbasis	**G.2.1.3.P.3.** Monevku	**G.2.1.3.P.3.A.3.** Adanya reviu peraturan bupati tentang	2032	**G.2.1.3.P.3.B.2.** Pemeliharaan infrastruktur pendukung	2030-2034	**G.2.1.3.P.3.C.2.** Pemeliharaan sistem MonevKu dan	2030-2034	**G.2.1.3.P.3.D.3.** Sosialisasi Perbup **G.2.1.3.P.3.D.4.**	2030-2034

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	**Tahun**	**Infrastruktur Pendukung**	**Tahun**	**Perangkat Lunak Pendukung**	**Tahun**	**Penguatan Literasi**	**Tahun**
	Data dan Akuntabilitas Multi Level		Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah **G.2.1.3.P.3.A.4.** Adanya penerapan peraturan bupati tentang Pengendalian dan EvaluasPembangunan Daerah	2030-2034			pengembanganny a		Sosisialisasi kepada user di setiap perangkat daerah	
	G.2.1.1. Transformasi Kapasitas SDM ASN Menuju Pola Pikir Digital dan Adaptif.	**G.2.1.1.P.2.** Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah	**G.2.1.1.P.2.A.6.** Penerapan Perbup No 3.tahun 2024 tentang Inovasi daerah **G.2.1.1.P.2.A.7.** Penyusunan dan Penerapan Dokumen Rencana Induk Peta jalan Pemajuan Iptek Daerah 2030-2034	2030-2034 2030-2034	**G.2.1.1.P.2.B.2.** Pemeliharaan infrastruktur pendukung	2030-2034	**G.2.1.1.P.2.C.2.** Pemeliharaan sistem aplikasi dan pengembanganny a	2030-2034	**G.2.1.1.P.2.D.4.** Sosialisasi Perbup **G.2.1.1.P.2.D.5.** Bimbingan Teknis Operasional sistem aplikasi	2030-2034
Efisiensi Kebijakan Publik	**G.3.1.3.** Harmonisasi dan Standardisasi Regulasi Daerah dengan	**G.3.1.3. P.1.** JDIH Kabupaten Kulon Progo tersedia di aplikasi *playstore*	**G.3.1.3.P.1.A.6.** Perencanaan JDIH Kabupaten Kulon Progo di *playstore*. **G.3.1.3.P.1.A.7.** Kesepakatan	2030 2031-2034	**G.3.1.3.P.1.B.3.** Ruang JDIH. **G.3.1.3.P.1.B.4.** Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja	2030-2034	**G.3.1.3.P.1.C.3.** Pengembangan JDIH Kabupaten Kulon Progo (aplikasi di *playstore*).	2030-2034	**G.3.1.3.P.1.D.3.** Sosialisasi JDIH Kabupaten Kulon Progo (aplikasi di *playstore*) kepada masyarakat dan	2032-2034

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	**Tahun**	**Infrastruktur Pendukung**	**Tahun**	**Perangkat Lunak Pendukung**	**Tahun**	**Penguatan Literasi**	**Tahun**
	Kerangka Kerja Nasional.		Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Ketiga. **G.3.1.3.P.1.A.8.** Pembentukan SOP dan Tim Kerja.		Sama dengan Pihak Ketiga (aplikasi di *playstore*).		**G.3.1.3.P.1.C.4.** Audit kemanan data oleh BSSN (standart dari Kementerian Hukum)		para pemangku kepentingan. **G.3.1.3.P.1.D.4.** Bimtek JDIH Kabupaten Kulon Progo (aplikasi di *playstore*) kepada anggota JDIH.	

4.2 RENCANA AKSI *SMART BRANDING*

Pada bagian ini akan ditampilkan daftar rencana aksi, mulai dari pengembangan kebijakan dan kelembagaan, pembangunan infrastruktur pendukung, pengembangan perangkat lunak dan penguatan literasi *Smart Branding*. Rencana aksi *Smart Branding* dijelaskan seperti pada tabel berikut

Tabel 4.3 Rencana Aksi *Smart Branding* (Jangka Pendek - Menengah)

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Ekosistem Pariwisata	**B.1.1.1.** Pengembangan "Ekonomi Kreatif & Ekowisata Berbasis Geoheritage" Terintegrasi dengan Bandara YIA.	**B.1.1.1.P.1.** *All-in-One Tourism App* Kulon Progo: Aplikasi resmi wisata yang mengintegrasikan info destinasi, reservasi tiket, paket wisata, transportasi lokal, hingga UMKM kuliner.	**B.1.1.1.P.1.A.1.** Penyusunan regulasi daerah tentang tiket & reservasi wisata online	2025	**B.1.1.1.P.1.B.1.** Pembangunan jaringan internet di destinasi wisata utama (Glagah, Sermo, Kiskendo, Congot, Kawasan Menoreh Barat, Kawasan Jatimulyo)	2025-2027	**B.1.1.1.P.1.C.1.** Pengembangan All-in-One Tourism App Kulon Progo **B.1.1.1.P.1.C.2.** Integrasi pembayaran digital (QRIS, *e-wallet*, transfer bank)	2026-2027 2026	**B.1.1.1.P.1.D.1.** Pelatihan digital marketing untuk pelaku wisata/UMKM **B.1.1.1.P.1.D.2.** Workshop penggunaan aplikasi reservasi **B.1.1.1.P.1.D.3.** Edukasi masyarakat tentang festival & event digital	2025 - 2027 2026 - 2028 2029
	B.1.1.2. Penguatan Brand Budaya Lokal melalui Digitalisasi dan Event Tahunan yang Konsisten.	**B.1.1.2.P.1.** Sambanggo Smart Festival: Event budaya tahunan (batik khas Kulon Progo, pentas seni, festival kuliner) yang	**B.1.1.2.P.1.A.1.** MoU dengan pihak ketiga	2026	**B.1.1.2.P.1.B.1.** Pemasangan *QR-based ticketing gate*	2026-2028	**B.1.1.2.P.1.C.1.** Fitur AR/VR sederhana untuk promosi wisata	2029	**B.1.1.2.P.1.D.1.** Edukasi masyarakat tentang festival & event digital	2029

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		dipromosikan lewat live streaming & marketplace tiket online.								
	B.1.1.3. Kolaborasi Multi Aktor untuk Pemasaran Pariwisata yang Inklusif dan Terukur.	**B.1.1.3.P.1.** Gamifikasi Wisata "Sambanggo Explorer": Wisatawan dapat poin saat berkunjung (scan QR di destinasi)	**B.1.1.3.P.1.A.1.** Pembentukan Unit Layanan Digital Pariwisata	2027	**B.1.1.3.P.1.B.1.** Penyediaan ruang promosi digital (digital signage di alun-alun Wates)	2028	**B.1.1.3.P.1.C.1.** Fitur AR/VR sederhana untuk promosi wisata	2029	**B.1.1.3.P.1.D.1.** Edukasi masyarakat tentang festival & event digital	2029
	B.1.1.2. Penguatan Brand Budaya Lokal melalui Digitalisasi dan Event Tahunan yang Konsisten.	**B.1.1.2.P.2.** Kajian Warisan Budaya Tak Benda	**B.1.1.2.P.2.A.1.** Pembentukan Tim Kajian Warisan Budaya Tak Benda	2025-2029	**B.1.1.2.P.2.B.1.** Gelar Potensi Warisan Budaya Tak Benda	2025-2029	**B.1.1.2.P.2.C.1.** Database Kajian Warisan Budaya Tak Benda	2027 & 2029	**B.1.1.2.P.2.D.1.** Literasi Tetenger Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo kepada masyarakat umum sebanyak 1 kali	2028-2029
	B.1.1.2. Penguatan Brand Budaya Lokal melalui Digitalisasi dan Event	**B.1.1.2.P.3.** Naskah Rekomendasi Cagar Budaya	**B.1.1.2.P.3.A.1.** Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan	2025-2029	**B.1.1.2.P.3.B.1.** Rehabilitasi Cagar Budaya Eks Kapanewon Nanggulan	2026	**B.1.1.2.P.3.C.1.** Database Naskah Rekomendasi Cagar Budaya	2027 & 2029	**B.1.1.2.P.3.D.1.** Literasi Edukasi Cagar	2026; 2028; 2029

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	Tahunan yang Konsisten.		Rekomendasi Cagar Budaya		**B.1.1.2.P.3.B.2.** Penataan Lingkungan Cagar Budaya Eks. Pengepul Nila Bulurejo **B.1.1.2.P.3.B.3.** Pemeliharaan Cagar Budaya Penampungan Gonotirto **B.1.1.2.P.3.B.4.** Pemeliharaan Cagar Budaya Kompleks Kapanewon Kalibawang	2027 2028 2029			Budaya kepada Peserta Didik Jenjang SMP, SMA/SMK Sederajat sebanyak 3 kali	
	B.1.1.2. Penguatan Brand Budaya Lokal melalui Digitalisasi dan Event Tahunan yang Konsisten.	**B.1.1.2.P.4.** Kalurahan/Desa Budaya	**B.1.1.2.P.4.A.1.** Surat Keputusan Bupati tentang Kalurahan Budaya Kategori Tumbuh dan Berkembang. Surat Keputusan Gubernur tentang Desa Budaya	2025-2029	**B.1.1.2.P.4.B.1.** Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Budaya	2025-2029	**B.1.1.2.P.4.C.1.** Database Jumlah Kalurahan/Desa Budaya	2027 & 2029	**B.1.1.2.P.4.D.1.** Literasi Pendampingan Kalurahan Budaya Kategori Tumbuh dan Berkembang kepada Kalurahan/Kelurahan	2025-2029

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	**Tahun**	**Infrastruktur Pendukung**	**Tahun**	**Perangkat Lunak Pendukung**	**Tahun**	**Penguatan Literasi**	**Tahun**
									sebanyak 2 kali	
	B.1.1.2. Penguatan Brand Budaya Lokal melalui Digitalisasi dan Event Tahunan yang Konsisten.	**B.1.1.2.P.5.** Pengembangan Talenta Seni dan Budaya	**B.1.1.2.P.5.A.1.** Akta Pendirian Group Kesenian	2025-2029	**B.1.1.2.P.5.B.1.** Pengadaan Pojok Seni dan Budaya Taman Budaya Kulon Progo	2027	**B.1.1.2.P.5.C.1.** Database Group Kesenian di Kabupaten Kulon Progo	2027 & 2029	**B.1.1.2.P.5.D.1.** Pelatihan Pelaku Seni dan Budaya pada Bidang Seni dan Budaya kepada Group Kesenian yang telah memiliki Akta Pendirian sebanyak 5 kali.	2026-2029
Membangun Daya Saing Bisnis	**B.2.1.2.** Penguatan Ekosistem Kewirausahaan dan UMKM Melalui Literasi Digital dan Akses Pendanaan.	**B.2.1.2.P.1.** *Investment Smartboard* (Penyediaan informasi dan pemberian kemudahan investasi)	**B.2.1.2.P.1.A.1.** Penerapan Perda No 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda No 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan Kemudahan	2025	**B.2.1.2.P.1.B.1.** Pengadaan Perangkat Luring (CSW), Layanan konsultasi perizinan, dan smartphone.	2025	**B.2.1.2.P.1.C.1.** Implementasi sistem Call Center terpadu, modul FAQ, **B.2.1.2.P.1.C.2.** instalasi Cloud storage kapasitas besar, dan	2026 2026 2026	**B.2.1.2.P.1.D.1.** Penyusunan Panduan dan Pedoman **B.2.1.2.P.1.D.2.** Tipologi permasalahan dan penyelesaian	2027 2027

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
			Penanaman Modal				**B.2.1.2.P.1.C.3.** Perangkat Daring (Medsos, Call Center)		nya untuk menjadi materi utama FAQ	
Penataan Wajah Kota										

Tabel 4.4 Rencana Aksi *Smart Branding* (Jangka Panjang)

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Ekosistem Pariwisata	**B.1.1.1.** Pengembangan "Ekonomi Kreatif & Ekowisata Berbasis Geoheritage" Terintegrasi dengan Bandara YIA.	**B.1.1.1.P.1.** *All-in-One Tourism* App Kulon Progo: Aplikasi resmi wisata yang mengintegrasikan info destinasi, reservasi tiket, paket wisata, transportasi lokal, hingga UMKM kuliner.					**B.1.1.1.P.1.C.3.** Pengembangan Fitur Baru All-in-One Tourism App Kulon Progo	2030	**B.1.1.1.P.1.D.4.** Pelatihan operator aplikasi terhadap fitur baru aplikasi **B.1.1.1.P.1.D.4.** Sosialisasi masyarakat terhadap fitur baru aplikasi	2031 2031 2029

	B.1.1.2. Penguatan Brand Budaya Lokal melalui Digitalisasi dan Event Tahunan yang Konsisten.	**B.1.1.2.P.2.** Kajian Warisan Budaya Tak Benda	**B.1.1.2.P.2.A.2.** Surat Keputusan Tim Kajian Warisan Budaya Tak Benda	2030-2034	**B.1.1.2.P.2.B.2.** Gelar Potensi Warisan Budaya Tak Benda	2030-2034	**B.1.1.2.P.2.C.2.** Database Kajian Warisan Budaya Tak Benda	2031 & 2033	**B.1.1.2.P.2.D.2.** Literasi Warisan Budaya Tak Benda Kepada masyarakat umum	2030-2034
	B.1.1.2. Penguatan Brand Budaya Lokal melalui Digitalisasi dan Event Tahunan yang Konsisten.	**B.1.1.2.P.6.** Pembangunan Tetenger Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo	**B.1.1.2.P.6.A.1.** Surat Keputusan Tim Pembangunan Tetenger Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo	2030	**B.1.1.2.P.6.C.1.** Pembangunan Tetenger Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo	2030			**B.1.1.2.P.6.D.1.** Literasi Tetenger Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo kepada masyarakat umum	2031
	B.1.1.2. Penguatan Brand Budaya Lokal melalui Digitalisasi dan Event Tahunan yang Konsisten	**B.1.1.2.P.3.** Naskah Rekomendasi Cagar Budaya	**B.1.1.2.P.3.A.2.** Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekomendasi Cagar Budaya	2030	**B.1.1.2.P.3.B.5.** Pemeliharaan dan Rehabilitasi Cagar Budaya	2030-2034	**B.1.1.2.P.3.C.2.** Database Naskah Rekomendasi Cagar Budaya	2031 & 2033	**B.1.1.2.P.3.D.2.** Literasi Edukasi Cagar Budaya kepada Peserta Didik Jenjang Sekolah Menengah Pertama	2030-2034
	B.1.1.2. Penguatan Brand Budaya Lokal melalui Digitalisasi	**B.1.1.2.P.4.** Kalurahan/Desa Budaya	**B.1.1.2.P.4.A.2.** Surat Keputusan Bupati tentang Kalurahan Budaya Kategori Tumbuh dan	2030-2034	**B.1.1.2.P.4.B.2.** Pengadaan Sarana Prasarana Lembaga Budaya	2030-2034	**B.1.1.2.P.4.C.2.** Database Jumlah Kalurahan/Desa Budaya	2031 & 2023	**B.1.1.2.P.4.D.2.** Literasi Pendampingan Kalurahan Budaya Kategori Tumbuh dan Berkembang kepada Kalurahan/Kelurahan	2030-2034

	dan Event Tahunan yang Konsisten		Berkembang.Budaya Surat Keputusan Gubernur tentang Desa Budaya							
	B.1.1.2. Penguatan Brand Budaya Lokal melalui Digitalisasi dan Event Tahunan yang Konsisten	**B.1.1.2.P.5.** Pengembangan Talenta Seni dan Budaya	**B.1.1.2.P.5.A.2.** Akta Pendirian Group Kesenian	2030-2034	**B.1.1.2.P.5.B.2.** Revitalisasi Ruang Pameran Seni Rupa di Taman Budaya Kabupaten Kulon Progo	2030	**B.1.1.2.P.5.C.2.** Database Group Kesenian di Kabupaten Kulon Progo	2031; 2033	**B.1.1.2.P.5.D.2.** Pelatihan Pelaku Seni dan Budaya pada Bidang Seni dan Budaya kepada Group Kesenian yang telah memiliki Akta Pendirian.	2030-2034
Membangun Daya Saing Bisnis	**B.2.1.2.** Penguatan Ekosistem Kewirausahaan dan UMKM Melalui Literasi Digital dan Akses Pendanaan.	**B.2.1.2.P.1.** *Invesment Smartboard* (Penyediaan informasi dan pemberian kemudahan investasi)	**B.2.1.2.P.1.A.2.** Penerapan Perda No 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda No 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2030 - 3034	**B.2.1.2.P.1.B.2.** Layanan konsultasi perizinan **B.2.1.2.P.1.B.3.** Kajian peta potensi investasi **B.2.1.2.P.1.B.4.** Vidio promosi investasi	2030 - 2034	**B.2.1.2.P.1.C.4.** Pemelihataan dan upgrading: Call Center terpadu, FAQ, dan Cloud storage kapasitas besar	2030 - 2034	**B.2.1.2.P.1.D.3.** Pelatihan pengisian materi SmartBoard kepada pegawai DPMPTSP **B.2.1.2.P.1.D.4.** Sosialisasi penggunaan SmartBoard kepada masyarakat	2030 - 2034
Penataan Wajah Kota										

4.3 RENCANA AKSI *SMART ECONOMY*

Transformasi menuju kota cerdas tidak akan lengkap tanpa adanya pilar *Smart Economy* yang kuat. Pilar ini berfokus pada upaya inovatif untuk menumbuhkan ekosistem ekonomi yang kompetitif, produktif, dan berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi digital. Dengan mengintegrasikan teknologi ke dalam sektor-sektor kunci, mulai dari dukungan bagi UMKM hingga pengembangan industri kreatif, Kulon Progo dapat membuka

peluang baru, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Rencana aksi ini akan menguraikan strategi konkret untuk mendorong inovasi, menarik investasi, dan membangun sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan ekonomi masa depan.

Tabel 4.5 Rencana Aksi *Smart Economy* (Jangka Pendek - Menengah)

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Penataan Ekosistem Industri	**Ec.1.1.3.** Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM melalui Kolaborasi Sektor Swasta dan Teknologi.	**Ec.1.1.3.P.1.** Pay-On Pro	**Ec.1.1.3.P.1.A.1.** Peraturan Bupati mengenai tata kelola Pay-On Pro **Ec.1.1.3.P.1.A.2.** Penyusunan Proses bisnis Pay-On Pro **Ec.1.1.3.P.1.A.3.** Logo dan Branding (HAKI) Integrasi data UMKM **Ec.1.1.3.P.1.A.4.** Melakukan kerjasama dengan para pemangku kepentingan (Perbankan,	2025-2026	**Ec.1.1.3.P.1.B.1.** Kurasi Tenant/Produk	2025-2029	**Ec.1.1.3.P.1.C.1.** Pembuatan Aplikasi Pay-On Pro WA Blast untuk UMKM **Ec.1.1.3.P.1.C.2.** Pengembangan fitur aplikasi Pay-On Pro	2025-2029 2029	**Ec.1.1.3.P.1.D.1.** Sosialisasi, Kurasi, Bimtek dan Pendampingan **Ec.1.1.3.P.1.D.2.** Penyusunan Panduan/Tutorial penggunaan Pay-On Pro	2025-2029 2026

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	**Tahun**	**Infrastruktur Pendukung**	**Tahun**	**Perangkat Lunak Pendukung**	**Tahun**	**Penguatan Literasi**	**Tahun**
			Instansi, UMKM selaku Tenant)							
	Ec.1.1.2. Pengembangan Klaster Industri Kreatif dan Budaya Terintegrasi.	**Ec.1.1.2.P.1.** Pengembangan Klaster Industri Kreatif dan Budaya Terintegrasi.Kredit-Ku	**Ec.1.1.2.P.1.A.1.** Pembuatan SK, SOP, dan Perdir, dan kebijakan Pemda	2026	-		**Ec.1.1.2.P.1.C.1.** Dilakukan Study Banding dan akan dilakukan Koordinasi	2026	**Ec.1.1.2.P.1.D.1.** Akan dilakukan sosialisasi dan edukasi	2026
	Ec.1.1.1. Hilirisasi Pertanian dan Perikanan Berbasis Digital.	**Ec.1.1.1.P.1.** NGULIR BUDI adalah singkatan dari Ngupoyo Hulu Hilir Budidoyo Iwak	**Ec.1.1.1.P.1.A.1.** Penyusunan KAK Kegiatan Ngulir Budi **Ec.1.1.1.P.1.A.2.** SK Tim Pelaksana Ngulir Budi **Ec.1.1.1.P.1.A.3.** Penyusunan SOP Budidaya Cacing Sutra, SOP Perbenihan Ikan Lele dan Ikan Gurami, SOP Budidaya Pembesaran Ikan Lele dan Ikan Gurami, SOP Panen Benih	2025	**Ec.1.1.1.P.1.B.1.** Fasilitasi Sarana Produksi Budidaya Cacing Sutra **Ec.1.1.1.P.1.B.2.** Fasilitasi Sarana Produksi Perbenihan Rakyat, Fasilitasi Sarana Produksi Budidaya Pembesaran, dan Fasilitasi Sarana Pendukung Ngulir Budi (Gudang Penampungan Ikan dan Gerbang Ngulir Budi)	2025 2027	**Ec.1.1.1.P.1.C.1.** System penjualan produk perikanan Secara online.	2027	**Ec.1.1.1.P.1.D.1.** Pendampingan pengembangan usaha perikanan budidaya **Ec.1.1.1.P.1.D.2.** Pendampingan Audit Sertifikasi CPIB (Cara Perbenihan Ikan yang Baik) **Ec.1.1.1.P.1.D.3.** Pendampingan Audit Sertifikasi CBIB (Cara Perbenihan Ikan yang Baik) **Ec.1.1.1.P.1.D.4.**	2025-2027 2029

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	**Tahun**	**Infrastruktur Pendukung**	**Tahun**	**Perangkat Lunak Pendukung**	**Tahun**	**Penguatan Literasi**	**Tahun**
			Ikan, dan SOP Panen Ikan Pembesaran						Pendampingan pengurusan NIB	
	Ec.1.1.1. Hilirisasi Pertanian dan Perikanan Berbasis Digital.	**Ec.1.1.1.P.2.** PAMAN MOBILE singkatan dari Pakan Mandiri secara Mobile (berupa mesin cetak pakan mandiri sitem mobile/bergerak)	**Ec.1.1.1.P.2.A.1.** KAK Kegiatan Paman Mobile **Ec.1.1.1.P.2.A.2.** SK Tim Pelaksana Ngulir Budi **Ec.1.1.1.P.2.A.3.** SOP pembuatan pakan mandiri	2025	**Ec.1.1.1.P.2.B.1.** Fasilitasi Alat Pencetak Pakan Ikan system mobile **Ec.1.1.1.P.2.B.2.** Peningkatan kapasitas pembudidaya melalui pelatihan pembuatan pakan mandiri	2025 2027 2029	**Ec.1.1.1.P.2.C.1.** Pembuatan Sistem pengaturan/penjadwalan penggunaan alat pakan mandiri mobile **Ec.1.1.1.P.2.C.2.** Pembuatan system jaringan penyediaan bahan baku pakan mandiri	2027	**Ec.1.1.1.P.2.D.1.** Panduan/tutorial perawatan mesin pencetak pakan mandiri	2025 2027 2029
	Ec.1.1.1. Hilirisasi Pertanian dan Perikanan Berbasis Digital.	**Ec.1.1.1.P.3.** SETITI akronim dari Sistem Pengawasan Ikan Anti Formalin.	**Ec.1.1.1.P.3.A.1.** Pembuatan KAK **Ec.1.1.1.P.3.A.2.** Pembuatan SK Inovasi **Ec.1.1.1.P.3.A.3.** Pembuatan SK Tim Teknis Pelaksana **Ec.1.1.1.P.3.A.4.** Menjalin Kerjasama antar	2025	**Ec.1.1.1.P.3.B.1.** Pembangunan infrastruktur pengawasan **Ec.1.1.1.P.3.B.1.** Pengadaan perangkat jaringan sistem	2025	**Ec.1.1.1.P.3.C.1.** Mengembangkan sistem informasi yang lebih akurat dan simpel **Ec.1.1.1.P.3.C.2.** Updating sistem informasi	2025 2026	**Ec.1.1.1.P.3.D.1.** Pelatihan/bimtek/sosialisasi kepada petugas pengawas **Ec.1.1.1.P.3.D.2.** Edukasi Pelaku Usaha/Masyarakat **Ec.1.1.1.P.3.D.3.** Pilot project pelaksanaan sistem informasi	2025-2028

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	**Tahun**	**Infrastruktur Pendukung**	**Tahun**	**Perangkat Lunak Pendukung**	**Tahun**	**Penguatan Literasi**	**Tahun**
			instansi: Bapperida, Bag Organisasi, Bag Hukum, Diskominfo **Ec.1.1.1.P.3.A.5.** Membuat SOP Pelaksanaan						kepada pelaku usaha/masyarakat umum tersampel	
	Ec.1.1.2. Pengembangan Klaster Industri Kreatif dan Budaya Terintegrasi.	**Ec.1.1.2.P.2.** SUMINAR akronim dari Sistem Monitoring Pelaku Usaha Pengolahan Pemasaran	**Ec.1.1.2.P.2.A.1.** Pembuatan KAK **Ec.1.1.2.P.2.A.2.** Pembuatan SK Inovasi **Ec.1.1.2.P.2.A.3.** Pembuatan SK Tim Teknis Pelaksana	2026	**Ec.1.1.2.P.2.B.1.** Pengadaan infrastruktur pendukung seperti perangkat komputer dan jaringan internet	2026	**Ec.1.1.2.P.2.C.1.** Mengembangkan sistem informasi yang lebih akurat dan simpel	2026	**Ec.1.1.2.P.2.D.1.** Pelatihan/bimtek bagi petugas monitoring **Ec.1.1.2.P.2.D.2.** Sosialisasi sistem untuk pelaku usaha	2026
	Ec.1.1.3. Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM melalui Kolaborasi Sektor Swasta dan Teknologi.	**Ec.1.1.3.P.2. GEMATI** akronim dari Gerakan Makan Ikan Atasi Stunting	**Ec.1.1.3.P.2.A.1.** Penyusunan Dasar Pelaksanaan (Instruksi Bupati) **Ec.1.1.3.P.2.A.2.** Pembuatan KAK **Ec.1.1.3.P.2.A.3.**	2025	**Ec.1.1.3.P.2.B.1.** Perangkat komputer dan jaringan internet	2026 - 2029			**Ec.1.1.3.P.2.D.1.** Sosialisasi GEMATI kepada masyarakat **Ec.1.1.3.P.2.D.2.** Edukasi Pelaku Usaha/Masyarakat /Perangkat Daerah lain **Ec.1.1.3.P.2.D.3.**	2028

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	**Tahun**	**Infrastruktur Pendukung**	**Tahun**	**Perangkat Lunak Pendukung**	**Tahun**	**Penguatan Literasi**	**Tahun**
			Pembuatan SK Tim Teknis Pelaksana **Ec.1.1.3.P.2.A.4.** Koordinasi kerjasama antar instansi: Bapperida, Bag Organisasi, Bag Hukum, Diskominfo, Kemenag **Ec.1.1.3.P.2.A.5.** Membuat SOP Pelaksanaan						Edukasi dan konsolidasi dengan Poklahsar	
	Ec.1.1.1. Hilirisasi Pertanian dan Perikanan Berbasis Digital.	**Ec.1.1.1.P.4.** TPI Hebat (higienis, ekonomis, bersih, aman, tertib)	**Ec.1.1.1.P.4.A.1.** Review Perda No. 18 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan TPI **Ec.1.1.1.P.4.A.2.** SOP TPI Hebat	2025	**Ec.1.1.1.P.4.B.1.** Revitalisasi pengelola TPI **Ec.1.1.1.P.4.B.2.** Optimalisasi operasional TPI Congot dan TPI Trisik **Ec.1.1.1.P.4.B.3.** Pembangunan TPI Bugel **Ec.1.1.1.P.4.B.4.**	2026 2027	**Ec.1.1.1.P.4.C.1.** Digitalisasi transaksi (e-wallet, QRIS) **Ec.1.1.1.P.4.C.2.** Sistem Navigasi & Cuaca Digital → integrasi dengan BMKG & aplikasi *smart fishing*.	2027	**Ec.1.1.1.P.4.D.1.** Workshop Keamanan Digital → cara pakai e-wallet, QRIS, menghindari penipuan online.	2027-2029

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	**Tahun**	**Infrastruktur Pendukung**	**Tahun**	**Perangkat Lunak Pendukung**	**Tahun**	**Penguatan Literasi**	**Tahun**
					Elektronifinikasi transaksi di TPI **Ec.1.1.1.P.4.B.5.** Internet Akses di Pesisir → jaringan 4G/5G + Wi-Fi gratis di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).		**Ec.1.1.1.P.4.C.3.** Pembuatan Sistem Data Perikanan Tangkap (Fishery Data Center) → server & dashboard Aplikasi *Sistem Informasi Nelayan Kulon Progo (SINPro)* **Ec.1.1.1.P.4.C.4.** Program "Nelayan Go-Digital" → setiap nelayan wajib memiliki akun marketplace & dompet digital.			
	Ec.1.1.1. Hilirisasi Pertanian dan Perikanan Berbasis Digital.	**Ec.1.1.1.P.5.** *Smart Green house*	**Ec.1.1.1.P.5.A.1.** PKS dengan UGM **Ec.1.1.1.P.5.A.2.** MOU dengan BRMP	2025 2025 2026	**Ec.1.1.1.P.5.B.1.** Lahan dan jaringan intenet **Ec.1.1.1.P.5.B.2.** Penyediaan Sumber Air dan	2025 - 2029	**Ec.1.1.1.P.5.C.1.** Aplikasi *smart greenhouse* **Ec.1.1.1.P.5.C.2.** Pengembangan Sistem Pemasaran	2025 - 2029	**Ec.1.1.1.P.5.D.1.** Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan	2025 - 2029

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
			Ec.1.1.1.P.5.A.3. Penyusunan *Roadmap* **Ec.1.1.1.P.5.A.4.** Pembentukan Asosiasi		Jaringan Irigasi, Sumber Listrik, *Micro controller,* Sensor kelembaban, dan Akses Jalan					
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	**Ec.2.1.1.** Program Peningkatan Keterampilan Vokasional dan Kewirausahaan Inklusif.	**Ec.2.1.1.P.1.** Kalurahan Ramah Disabilitas (Bekerjasama dengan pihak ketiga seperti SIGAP untuk membangun kalurahan ramah disabilitas)	**Ec.2.1.1.P.1.A.1.** membuat SK Tim **Ec.2.1.1.P.1.A.2.** Membuat peraturan yang mendukung program membangun kalurahan ramah disabilitas **Ec.2.1.1.P.1.A.3.** melakukan sosialisasi dan peunjukkan kalurahan ramah disabilitas **Ec.2.1.1.P.1.A.4.** Melakukan pembinaan dan menambah jumlah KDK	2025 2026-2027	**Ec.2.1.1.P.1.B.1.** Aksesbilitas KDK ke pelatihan yang diadakan oleh BLK, Aksesbilitas KDK ke permodalan, dan Aksesbilitas KDK ke pemasaran		-		**Ec.2.1.1.P.1.D.1.** Membuat peraturan terkait kelurahan ramah disabilitas **Ec.2.1.1.P.1.D.2.** membuat SOP terkait pembentukan KDK **Ec.2.1.1.P.1.D.3.** Pemberian pelatihan dan sosialisasi terkait peluang bekerja, pendidikan, dll kepada anggota KDK	2025-2026 2025-2026 2026-2030

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
			Ec.2.1.1.P.1.A.5. Perbup No 57 Th 2012 ttg Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif **Ec.2.1.1.P.1.A.6.** Perbup No 7 Th 2023 ttg Pengembangan Perpustakaan Kalurahan menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial **Ec.2.1.1.P.1.A.7.** Perbup No 78 Th 2023 ttg Pariwisata Inklusif	2027-2030						
Membangun Ekosistem Transaksi Keuangan	**Ec.3.1.1.** Edukasi dan Literasi Keuangan Digital yang Inklusif.	**Ec.3.1.1.P.1.** Literasi Psar Modal (Pembentukan galeri investasi paralel antara pemda dengan Kampus UNY Wates untuk literasi pasar	**Ec.3.1.1.P.1.A.1.** Penyusunan MoU dan PKS untuk mengembangkan pasar modal. **Ec.3.1.1.P.1.A.2.** Program kerja pasar modal pada Tim Percepatan	2025	**Ec.3.1.1.P.1.B.1.** Fasilitas Mall Pelayanan Publik untuk galeri investasi **Ec.3.1.1.P.1.B.2.** Ruang pertemuan untuk sosialisasi **Ec.3.1.1.P.1.B.3.**	2025 2025-dst 2026-dst	**Ec.3.1.1.P.1.C.1.** Aplikasi dari sekuritas	2025-dst	**Ec.3.1.1.P.1.D.1.** Seminar pasar modal untuk ASN di awal tahun **Ec.3.1.1.P.1.D.2.** Seminar pasar modal untuk siswa SMA/ sederajat dalam rangka hari jadi daerah.	2025

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	**Tahun**	**Infrastruktur Pendukung**	**Tahun**	**Perangkat Lunak Pendukung**	**Tahun**	**Penguatan Literasi**	**Tahun**
		modal dan inkubator UMKM.)	Akses Keuangan Daerah. (kegiatan ini dengan anggaran rapat untuk ekonomi mikro) Rencana pada tahun berikutnya masuk ke anggaran pembinaan UMKM oleh dinas teknis.		Fasilitas PLUT untuk inkubator UMKM				**Ec.3.1.1.P.1.D.3.** Literasi pasar modal dan pendampingan umkm oleh dinas teknis dan UNY Wates.	2026-dst
	Ec.3.1.2. Integrasi Sistem Pembayaran Digital dalam Layanan Publik dan Transaksi Lokal.	**Ec.3.1.2.P.1.** Gitarku	**Ec.3.1.2.P.1.A.1.** Penyusunan Perbup tentang mekanisme pembayaran retribusi pelayanan pasar.dan SOP	2026	**Ec.3.1.2.P.1.B.1.** jaringan internet	2027-2029	**Ec.3.1.2.P.1.C.1.** Aplikasi pembayaran pada petugas pemungut **Ec.3.1.2.P.1.C.2.** Mobile banking	2027-2029	**Ec.3.1.2.P.1.D.1.** Sosialisasi aplikasi pembayaran kepada pedagang dan petugas pemungut 7x per tahun	2027-2029
	Ec.3.1.2. Integrasi Sistem Pembayaran Digital dalam Layanan Publik dan Transaksi Lokal.	**Ec.3.1.2.P.2.** BPR Mobile-Ku	**Ec.3.1.2.P.2.**A.1. Pembuatan SK, SOP, dan Perdir **Ec.3.1.2.P.2.**A.2. Kerjasama dengan pihak ke 3	2026	**Ec.3.1.2.P.2.**B.1. Pengadaan infrastruktur untuk mendukung layanan digital	2026	**Ec.3.1.2.P.2.**C.1. Pengembangan Aplikasi Digital **Ec.3.1.2.P.2.**C.2. Pemeliharaan infrastruktur pendukung aplikasi	2026	**Ec.3.1.2.P.2.**D.1. Adanya sosialisasi dan edukasi	2026

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	Ec.3.1.3. Pengembangan Skema Pendanaan Alternatif untuk Ekonomi Lokal.	**Ec.3.1.3.**P.1. Smart DesaKu	-	-	-	-	**Ec.3.1.3.**P.1.C.1. Perbaikan dan Pemeliharaan Program Smart DesaKu	2026	**Ec.3.1.3.**P.1.D.1. Bimtek Smart DesaKu kepada Kalurahan	2026

Tabel 4.6 Rencana Aksi* Smart Economy *(Jangka Panjang)

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	**Tahun**	**Infrastruktur Pendukung**	**Tahun**	**Perangkat Lunak Pendukung**	**Tahun**	**Penguatan Literasi**	**Tahun**
Penataan Ekosistem Industri	**Ec.1.1.1.** Hilirisasi Pertanian dan Perikanan Berbasis Digital.	**Ec.1.1.1.P.4.** TPI Hebat (higienis, ekonomis, bersih, aman, tertib)	**Ec.1.1.1.P.4.A.3.** Penerbitan SK Bupati tentang Digitalisasi TPI	2030	**Ec.1.1.1.P.4.B.6.** Dermaga & Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Modern → dilengkapi timbangan digital, cold storage, dan sistem pembayaran nontunai **Ec.1.1.1.P.4.B.7.** Unit Cold Storage & Ice Factory → untuk menjaga kualitas hasil tangkapan sebelum dipasarkan. **Ec.1.1.1.P.4.B.8.**	2030 2031 2033-2034	**Ec.1.1.1.P.4.C.5.** Sistem kartu digital untuk distribusi BBM tepat sasaran nelayan kecil. **Ec.1.1.1.P.4.C.6.** E-aution (lelang electronic) : proses lelang yang dilakukan secara digital atau daring menggunakan teknologi internet untuk menggantikan metode lelang konvensional.	2033 2034	**Ec.1.1.1.P.4.D.2.** Workshop dan Pelatihan E-auction	2034

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
					Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Cerdas					
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat										
Membangun Ekosistem Keuangan	**Ec.3.1.2.** Integrasi Sistem Pembayaran Digital dalam Layanan Publik dan Transaksi Lokal.	**Ec.3.1.2.P.2.** BPR Mobile-Ku					**Ec.3.1.2.P.2.**C.3. Pemeliharaan infrastruktur pendukung aplikasi	2030		
	Ec.3.1.3. Pengembangan Skema Pendanaan Alternatif untuk Ekonomi Lokal.	**Ec.3.1.3.**P.1. Smart DesaKu	-	-	-	-	**Ec.3.1.3.**P.1.C.2. Perbaikan dan Pemeliharaan Program Smart DesaKu	2030	**Ec.3.1.3.**P.1.D.2. Bimtek Smart DesaKu kepada Kalurahan	2030

4.4 RENCANA AKSI *SMART LIVING*

Pilar *Smart Living* menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kota yang benar-benar layak huni, di mana teknologi tidak hanya dimanfaatkan untuk efisiensi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Rencana aksi ini berfokus pada pembangunan ekosistem yang aman, sehat, dan nyaman, dengan mengintegrasikan solusi digital ke dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih mudah diakses hingga peningkatan ruang publik yang ramah bagi semua kalangan. Melalui

implementasi program-program inovatif, kita akan menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap warga untuk tumbuh dan berkembang, memastikan kota ini menjadi tempat yang ideal untuk tinggal, bekerja, dan berinteraksi.

Tabel 4.7 Rencana Aksi *Smart Living* (Jangka Pendek - Menengah)

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Harmonisasi Tata Ruang	**Lv.1.1.1.** Pengembangan SimtaruKu 2.0 sebagai Platform Kolaboratif Tata Ruang Digital.	**Lv.1.1.1.P.1.** Sistem Informasi Tata Ruang Kulon Progo (SimtaruKu)	**Lv.1.1.1.P.1.A.1.** Penetapan Tim Pengelola dengan SK Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang **Lv.1.1.1.P.1.A.2.** Penyusunan SOP layanan KRK online sebagai bagian dari perizinan PBG	2026-2027	**Lv.1.1.1.P.1.B.1.** Pengadaan jaringan komputer **Lv.1.1.1.P.1.B.2.** Pengadaan komputer **Lv.1.1.1.P.1.B.3.** Pengadaan tenaga ahli webgis **Lv.1.1.1.P.1.B.4.** Pemeliharaan server khusus & peningkatan kapasitas	2026-2027	**Lv.1.1.1.P.1.C.1.** Optimalisasi WebGis SimtaruKu Geoportal Kulon Progo	2026-2027	**Lv.1.1.1.P.1.D.1.** Pelatihan teknis staf DPTR terkait layanan KRK online **Lv.1.1.1.P.1.D.2.** Penguatan pemahaman pedoman teknis penggunaan sistem **Lv.1.1.1.P.1.D.3.** Sosialisasi ke OPD-OPD terkait (perizinan, lingkungan hidup, kominfo, dll)	2026-2027

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
					Lv.1.1.1.P.1.B.5. Penyesuaian infrastruktur untuk mendukung sistem					
Pelayanan Kesehatan	**Lv.2.1.1.** Pembangunan Ekosistem Kesehatan Digital Terpadu.	**Lv.2.1.1.P.1.** Pembangunan Ekosistem Kesehatan Digital Terpadu.Bumilku a. Memberikan pantauan *real-time* layanan ibu hamil mulai dari awal kehamilan, b. Tersedianya data ibu hamil dengan faktor Risikonya real time	**Lv.2.1.1.P.1.A.1.** Pembuatan SK TimBumilku **Lv.2.1.1.P.1.A.2.** SOP Layanan Kesehatan Ibu Hamil	2025-2029	**Lv.2.1.1.P.1.B.1.** Pengadaan PC, Laptop , smartphone atau tablet), perangkat jaringan komunikasi (Jaringan Internet), dan Server	2025-2029	**Lv.2.1.1.P.1.C.1.** Pembuatan Aplikasi Bumilku, Browser	2025-2029	**Lv.2.1.1.P.1.D.1.** Panduan dan Pedoman penggunaan aplikasi Bumilku **Lv.2.1.1.P.1.D.2.** Sosialisasi aplikasi bumilku dan Pelatihan penggunaan aplikasi kepada bidan yang ada di puskemas	2025-2029
	Lv.2.1.1. Pembangunan Ekosistem Kesehatan Digital Terpadu.	**Lv.2.1.1.P.2.** Simoku Sistem Informasi Manajemen Obat	**Lv.2.1.1.P.2.A.1.** SK Tim SIMOKU **Lv.2.1.1.P.2.A.2.** SOP Layanan Kerfarmasian	2025 - 2029	**Lv.2.1.1.P.2.B.1.** Pengadaan perangkat PC, Laptop , smartphone atau tablet, jaringan komunikasi	2025 - 2029	**Lv.2.1.1.P.2.C.1.** Pembuatan Aplikasi Simoku, Browser	2025 - 2029	**Lv.2.1.1.P.2.D.1.** Penyusunan Panduan dan Pedoman penggunaan aplikasi Simoku **Lv.2.1.1.P.2.D.2.**	2025 - 2029

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		Kabupaten Kulon Progo) Pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai			(Jaringan Internet), dan Server				Sosialisasi aplikasi Simoku dan Pelatihan penggunaan aplikasi kepada pengelola obat di puskesmas.	
	Lv.2.1.3. Jaringan Layanan Kesehatan Bergerak Terjadwal.	**Lv.2.1.3.P.1.** Pengembangan Sistem Integrasi Gangguan Pelayanan (SITEGAP) berbasis website dan android untuk publik	**Lv.2.1.3.P.1.A.1.** Pembuatan SOP pengaduan online melalui SITEGAP	2025 - 2029	-	-	**Lv.2.1.3.P.1.C.1.** Pengembangan sistem dengan modul: 1. Modul input pengaduan 2. Modul tracking pengaduan 3. Modul data pelanggan 4. Modul data informasi perbaikan berlangsung	2025 - 2029	**Lv.2.1.3.P.1.D.1.** Pembuatan video tutorial penggunaan bagi masyarakat **Lv.2.1.3.P.1.D.2.** Publikasi tata cara penggunaan melalui sosial media	2025 - 2029
	Lv.2.1.3. Jaringan Layanan Kesehatan Bergerak Terjadwal.	**Lv.2.1.3.P.2.** Pengembangan Sistem Informasi Gangguan Pelayanan PDAM Kulon Progo (SIGAPKU) berbasis website dan	**Lv.2.1.3.P.2.A.1.** Pembuatan SOP pendaftaran sambungan rumah melalui SIGAPKU **Lv.2.1.3.P.2.A.2.** Pembuatan SOP pengecekan dan pembayaran tagihan rekening air melalui SIGAPKU	2026 - 2029	-	-	**Lv.2.1.3.P.2.C.1.** Pengembangan aplikasi dengan modul: 1. Modul pendaftaran sambungan rumah 2. Modul tracking proses pendaftaran sambungan rumah 3. Modul tracking tagihan rekening air	2026 - 2029	**Lv.2.1.3.P.2.D.1.** Pembuatan video tutorial penggunaan bagi masyarakat **Lv.2.1.3.P.2.D.2.** Publikasi tata cara penggunaan melalui sosial media	2026 - 2029

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	**Tahun**	**Infrastruktur Pendukung**	**Tahun**	**Perangkat Lunak Pendukung**	**Tahun**	**Penguatan Literasi**	**Tahun**
		android untuk publik	**Lv.2.1.3.P.2.A.3.** Pembuatan SOP permohonan buka/tutup segel sambungan rumah melalui SIGAPKU **Lv.2.1.3.P.2.A.4.** Pembuatan SOP permohonan data kualitas air melalui SIGAPKU **Lv.2.1.3.P.2.A.5.** Permohonan tera meter **Lv.2.1.3.P.2.A.6.** Permohonan cek tekanan air				4. Modul permohonan buka/tutup segel sambungan rumah 5. Modul tracking proses buka/tutup segel sambungan rumah 6. Modul permohonan data kualitas air 7. Modul tracking permohonan data kualitas air 8. Modul tracking permohonan tera meter 8. Modul tracking permohonan cek tekanan air			
	Lv.2.1.1. Pembangunan Ekosistem Kesehatan Digital Terpadu.	**Lv.2.1.1.P.3.** Ranting Kuat (Rawat Anak Stunting Kulon Progo agar Sehat)	**Lv.2.1.1.P.3.A.1.** SK Tim Ranting Kuat **Lv.2.1.1.P.3.A.2.** SOP Pelaksanaan Ranting Kuat	2025-2029	**Lv.2.1.1.P.3.B.1.** Gedung Gizi yang memadai		**Lv.2.1.1.P.3.C.1.** Pemanfaatan aplikasi berbasis Internet dan Google Form		**Lv.2.1.1.P.3.D.1.** Sosialisasi dan Pelatihan. Melalui Bimtek **Lv.2.1.1.P.3.D.2.** Sosialisasi melalui media sosial	2025-2029
	Lv.2.1.3. Jaringan Layanan	**Lv.2.1.3.P.3.** Sapayandu	**Lv.2.1.3.P.3.A.1.** Penguatan regulasi dan kelembagaan.	**2026-2027**	**Lv.2.1.3.P.3.B.1.** Peningkatan kualitas dan	**2026-2027**	**Lv.2.1.3.P.3.C.1.** Aplikasi terintegrasi dengan dashboard	**2026-2027**	**Lv.2.1.3.P.3.D.1.**	**2026-2027**

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	**Tahun**	**Infrastruktur Pendukung**	**Tahun**	**Perangkat Lunak Pendukung**	**Tahun**	**Penguatan Literasi**	**Tahun**
	Kesehatan Bergerak Terjadwal.	(Aplikasi digital Posyandu sederhana. Kampanye edukasi berbasis komunitas.)	**Lv.2.1.3.P.3.A.2.** Pengembangan mekanisme pendanaan dan kemitraan.		cakupan jaringan internet. **Lv.2.1.3.P.3.B.2.** Fasilitas telemedicine dan ruang konsultasi digital.		monitoring sebagai platform edukasi dan telemedicine		Pengembangan materi edukasi digital interaktif. **Lv.2.1.3.P.3.D.2.** Kampanye kesadaran pola hidup sehat	
Pelayanan Transportasi	**Lv.3.1.1.** Pengembangan Transportasi Publik Terpadu Berbasis Digital.	**Lv.3.1.1.P.1.** Layanan Bus Inklusif (Layanan bus sekolah untuk antar jemput siswa dan layanan bus sekolah inklusif untuk antar jemput siswa berkebutuhan khusus secara gratis di Kulon Progo)	**Lv.3.1.1.P.1.A.1.** SK Kepala Dinas Perhubungan, SOP Penyelenggaraan Bus Sekolah **Lv.3.1.1.P.1.A.2.** Usulan permohonan bantuan armada bus sekolah ke Kemenhub. **Lv.3.1.1.P.1.A.3.** Surat ijin operasional bus sekolah	2025 2025	**Lv.3.1.1.P.1.B.1.** Pengadaan Bus Sekolah **Lv.3.1.1.P.1.B.2.** Pembangunan Halte bus **Lv.3.1.1.P.1.B.3.** Perlengkapan jalan .	2025-2029	**Lv.3.1.1.P.1.C.1.** Pemanfaatan aplikasi pendukung, seperti: Aplikasi Office dan browser internet (Google Chrome, Google Maps, dan Whatsapp)	2025	**Lv.3.1.1.P.1.D.1.** Sosialisasi pelaksanaan melalui Media sosial.	2025-2029
	Lv.3.1.1. Pengembangan Transportasi Publik Terpadu	**Lv.3.1.1.P.2.** Angkutan umum siswa	**Lv.3.1.1.P.2.A.1.** Usulan program/kegiatan melalui anggaran DAIS Yogyakarta.	2025	**Lv.3.1.1.P.2.B.1.** Pengadaan Angkudes, Halte, dan Perlengkapan jalan.	2027-2029	**Lv.3.1.1.P.2.C.1.** Aplikasi *Office* untuk mengelola data siswa dan rute bus.	2027	**Lv.3.1.1.P.2.D.1.** Sosialisasi program ke pengusaha angkudes/ operator angkudes	2027-2029

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	Berbasis Digital.		**Lv.3.1.1.P.2.A.2.** Penyusunan KAK Kegiatan						**Lv.3.1.1.P.2.D.2.** Sosialisasi pelaksanaan melalui Media sosial.	
	Lv.3.1.1. Pengembang-an Transportasi Publik Terpadu Berbasis Digital.	**Lv.3.1.1.P.3.** Angkutan Perintis Penyediaan jalur angkutan perintis di wilayah Kulon Progo (Samigaluh-Kalibawang-Nanggulan-Girimulyo-Pengasih-Wates)	**Lv.3.1.1.P.3.A.1.** Usulan permohonan penyediaan layanan angkutan perintis ke Kemenhub **Lv.3.1.1.P.3.A.2.** Kajian manfaat angkutan perintis	2025	**Lv.3.1.1.P.3.B.1.** Pengadaan Angkudes, Halte, Bengkel, dan Perlengkapan jalan.	2027-2029	**Lv.3.1.1.P.3.C.1.** Aplikasi *Office* untuk mengelola data dan rute bus.	2027	**Lv.3.1.1.P.3.D.1.** Sosialisasi program ke pengusaha angkudes/ operator angkudes **Lv.3.1.1.P.3.D.2.** Sosialisasi pelaksanaan melalui Media sosial.	2027-2029
	Lv.3.1.2. Optimalisasi Manajemen Lalu Lintas Cerdas dan Pengendalian Lingkungan.	**Lv.3.1.2.P.1.** Pengembangan sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi (ATCS)	**Lv.3.1.2.P.1.A.1.** Penyusunan DED ATMS (Advance Traffic managemant System) Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2023. **Lv.3.1.2.P.1.A.2.** Usul kebutuhan gedung/ruang	2025	**-**	-	**Lv.3.1.2.P.1.C.1.** DED ATMS (*Advance Traffic management System*) Kabupaten Kulon Progo	2025	**Lv.3.1.2.P.1.D.1.** Presentasi program ke Kemenhub, dan Provinsi	2026-2029

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	**Tahun**	**Infrastruktur Pendukung**	**Tahun**	**Perangkat Lunak Pendukung**	**Tahun**	**Penguatan Literasi**	**Tahun**
			ATCS (melalui APBD 2024, 2025 belum terakomodir)							
	Lv.3.1.2. Optimalisasi Manajemen Lalu Lintas Cerdas dan Pengendalian Lingkungan.	**Lv.3.1.2.P.2.** Peningkatan kualitas APJ Pintar berbasis digital	**Lv.3.1.2.P.2.A.1.** Penyusunan data prasarana jalan (APJ) **Lv.3.1.2.P.2.A.2.** KAK pembangunan APJ Pintar	2025	**Lv.3.1.2.P.2.B.1.** Pengadaan APJ Pintar **Lv.3.1.2.P.2.B.2.** Jaringan listrik Perangkat sensor	2027-2029	**Lv.3.1.2.P.2.C.1.** Pengelolaan Data APJ Pintar,dan data pengadaan LPJU **Lv.3.1.2.P.2.C.2.** Apliaksi Office dan Web Browser	2025	**Lv.3.1.2.P.2.D.1.** Sosialisasi melalui Media sosial.	2027-2029
	Lv.3.1.3. Pembangunan Infrastruktur Mobilitas Aktif dan Inklusif.	**Lv.3.1.3.P.1.** Peningkatan layanan pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis Digital	**Lv.3.1.3.P.1.A.1.** Upgrade SIM PKB yang terintegrasi aplikasi Kemenhub dan terintregasi langsung dengan alat uji kendaraan bermotor . **Lv.3.1.3.P.1.A.2.** Update Data Kendaraan bermotor wajib uji berkala.	2025	**Lv.3.1.3.P.1.B.1.** Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Hardware blu full cycle	2026-2029	**Lv.3.1.3.P.1.C.1.** Aplikasi Office dan SIM PKB	2025	**Lv.3.1.3.P.1.D.1.** Sosialisasi melalui Media sosial. **Lv.3.1.3.P.1.D.2.** Sosialisasi langsung kepada masyarakat/pengguna layanan.	2027-2039
	Lv.3.1.2. Optimalisasi Manajemen Lalu Lintas Cerdas dan	**Lv.3.1.2.P.3.** Layanan informasi tilang angkutan	**Lv.3.1.2.P.3.A.1.** SK Tim PPID **Lv.3.1.2.P.3.A.2.**	2025	**Lv.3.1.2.P.3.B.1.** Sarana pendukung operasi yustisi (Kendaraan, rambu, Catatan)	2025-2029	**Lv.3.1.2.P.3.C.1.** Pengembangan Website	2025	**Lv.3.1.2.P.3.D.1.** Sosialisasi melalui Media sosial.	2027-2029

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	**Tahun**	**Infrastruktur Pendukung**	**Tahun**	**Perangkat Lunak Pendukung**	**Tahun**	**Penguatan Literasi**	**Tahun**
	Pengendalian Lingkungan.	umum/barang berbasis digital	SOP Layanan Informasi **Lv.3.1.2.P.3.A.3.** SOP Layanan Aduan							
	Lv.3.1.2. Optimalisasi Manajemen Lalu Lintas Cerdas dan Pengendalian Lingkungan.	**Lv.3.1.2.P.4.** Pembangunan JPO (sarana pendukung pedestrian untuk menyeberangi rel kereta api dengan aman dan nyaman)	**Lv.3.1.2.P.4.A.1.** Penyusunan DED Jembatan Penyeberangan Orang Tahun 2023 **Lv.3.1.2.P.4.A.2.** Pembangunan JPO Tahap 2 Tahun 2025	2025	**Lv.3.1.2.P.4.B.1.** Jembatan Penyeberangan Orang **Lv.3.1.2.P.4.B.2.** Pemasangan CCTV, Ducting Kabel FO, dan Videotron	2025	**Lv.3.1.2.P.4.C.1.** Perangkat Lunak Manajemen Video (VMS) **Lv.3.1.2.P.4.C.2.** Perangkat Lunak Manajemen Konten (CMS) **Lv.3.1.2.P.4.C.3.** Perangkat Lunak Konfigurasi (Setting Software)	2025 - 2026	**Lv.3.1.2.P.4.D.1.** Sosialisasi melalui Media sosial.	2025-2026

Tabel 4.8 Rencana Aksi *Smart Living* (Jangka Panjang)

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Harmonisasi Tata Ruang	**Lv.1.1.1.** Pengembangan SimtaruKu 2.0 sebagai Platform Kolaboratif Tata Ruang Digital.	**Lv.1.1.1.P.1.** Sistem Informasi Tata Ruang Kulon Progo (SimtaruKu)	**Lv.1.1.1.P.1.A.3.** Penetapan Tim Pengelola dengan SK Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang **Lv.1.1.1.P.1.A.4.** Penyusunan SOP layanan KRK online sebagai bagian dari perizinan PBG	2030-2034	**Lv.1.1.1.P.1.B.6.** Pengadaan jaringan komputer **Lv.1.1.1.P.1.B.7.** Pengadaan komputer **Lv.1.1.1.P.1.B.8.** Pengadaan tenaga ahli webgis **Lv.1.1.1.P.1.B.9.** Pemeliharaan server khusus & peningkatan kapasitas **Lv.1.1.1.P.1.B.10.** Penyesuaian infrastruktur untuk mendukung sistem	2030-2034	**Lv.1.1.1.P.1.C.2.** Optimalisasi WebGis SimtaruKu Geoportal Kulon Progo	2030-2034	**Lv.1.1.1.P.1.D.4.** Pelatihan teknis staf DPTR terkait layanan KRK online **Lv.1.1.1.P.1.D.5.** Penguatan pemahaman pedoman teknis penggunaan sistem **Lv.1.1.1.P.1.D.6.** Sosialisasi ke OPD-OPD terkait (perizinan, lingkungan hidup, kominfo, dll)	2030-2034
Pelayanan Kesehatan	**Lv.2.1.1.** Pembangunan Ekosistem Kesehatan Digital Terpadu.	**Lv.2.1.1.P.1.** Pembangunan Ekosistem Kesehatan Digital Terpadu.Bumilku a. Memberikan pantauan *real-*	-	-	**Lv.2.1.1.P.1.B.2.** Pemelihataan perangkat jaringan komunikasi (Jaringan Internet), dan Server	2030-2034	**Lv.2.1.1.P.1.C.2.** Pengembangan fitur baru Aplikasi Bumilku, Browser	2030-2034	**Lv.2.1.1.P.1.D.3.** Re-Sosialisasi aplikasi bumilku dan Pelatihan penggunaan aplikasi kepada bidan yang ada di puskemas	2030-2034

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		time layanan ibu hamil mulai dari awal kehamilan, b. Tersedianya data ibu hamil dengan faktor Risikonya *real-time*								
	Lv.2.1.1. Pembangunan Ekosistem Kesehatan Digital Terpadu.	**Lv.2.1.1.P.2.** Simoku Sistem Informasi Manajemen Obat Kabupaten Kulon Progo) Pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai			**Lv.2.1.1.P.2.B.2.** Pemelihataan perangkat jaringan komunikasi (Jaringan Internet), dan Server	2030-2034	**Lv.2.1.1.P.2.C.2.** Pengembangan fitur baru Aplikasi simoku Browser	2030-2034	**Lv.2.1.1.P.2.D.3.** Re-Sosialisasi aplikasi simoku dan Pelatihan penggunaan aplikasi kepada bidan yang ada di puskemas	2030-2034
	Lv.2.1.1. Pembangunan Ekosistem Kesehatan Digital Terpadu.	**Lv.2.1.1.P.3.** Ranting Kuat (Rawat Anak Stunting Kulon Progo agar Sehat)	**Lv.2.1.1.P.3.A.3.** Reviu SK Tim Ranting Kuat **Lv.2.1.1.P.3.A.4.**	2030-2034	**Lv.2.1.1.P.3.B.2.** Pemeliharaan Gedung Gizi yang memadai	2030-2034	-	-	**Lv.2.1.1.P.3.D.1.** Sosialisasi dan Pelatihan. Melalui Bimtek **Lv.2.1.1.P.3.D.2.**	2030-2034

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	**Tahun**	**Infrastruktur Pendukung**	**Tahun**	**Perangkat Lunak Pendukung**	**Tahun**	**Penguatan Literasi**	**Tahun**
			Reviu SOP Pelaksanaan Ranting Kuat						Sosialisasi melalui media sosial	
	Lv.2.1.3. Jaringan Layanan Kesehatan Bergerak Terjadwal.	**Lv.2.1.3.P.3.** Sapayandu (Aplikasi digital Posyandu sederhana. Kampanye edukasi berbasis komunitas).	**Lv.2.1.3.P.3.A.3.** Kebijakan terkait AI untuk analisis data dan prediksi risiko. **Lv.2.1.3.P.3.A.4.** Kebijakan dan SOP Telemedicine skala luas. **Lv.2.1.3.P.3.A.5.** Kebijakan inovasi dan keberlanjutan. Integrasi kelembagaan dalam ekosistem *Smart City*.	**2027-2030**	**Lv.2.1.3.P.3.B.3.** Pemeliharaan dan peningkatan fasilitas infrastruktur *telemedicine* dan ruang konsultasi digital.	**2030-2034**	**Lv.2.1.3.P.3.C.2.** Pengembangan Sistem AI untuk analitik dan prediksi. **Lv.2.1.3.P.3.C.3.** Platform telemedicine dan *Smart City* terintegrasi	**2030-2034**	**Lv.2.1.3.P.3.D.3.** Pengembangan komunitas belajar digital. **Lv.2.1.3.P.3.D.4.** Forum diskusi kesehatan tingkat padukuhan hingga kapanewon	**2030-2034**
	Lv.2.1.3. Jaringan Layanan Kesehatan Bergerak **Terjadwal.**	**Lv.2.1.3.P.4.** Pelayanan Trauma Center	**Lv.2.1.3.P.4.A.1.** Pengurusan persetujuan bangunan dan gedung **Lv.2.1.3.P.4.A.2.** Konsultansi perencanaan DED	2030-2034	**Lv.2.1.3.P.4.B.1.** Pengembangan infrastruktur layanan, seperti: perluasan lahan parkir, genset, pembangunan sumur dalam, sumur dangkal, dan IPAL	2030-2034	**Lv.2.1.3.P.4.C.1.** Pemanfaatan SIMRS	2030	**Lv.2.1.3.P.4.D.1.** Sosialisasi layanan trauma center **Lv.2.1.3.P.4.D.2.** FGD lintas sektor tentang rencana pembangunan *trauma center*	2030-2034
Pelayanan Transportasi	**Lv.3.1.1.** Pengembanga	**Lv.3.1.1.P.1.**	**Lv.3.1.1.P.1.A.4.**	2030	**Lv.3.1.1.P.1.B.4.**	2030-2034	-	-	**Lv.3.1.1.P.1.D.2.**	2030-2034

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	**Tahun**	**Infrastruktur Pendukung**	**Tahun**	**Perangkat Lunak Pendukung**	**Tahun**	**Penguatan Literasi**	**Tahun**
	n Transportasi Publik Terpadu Berbasis Digital.	Layanan Bus Inklusif (Layanan bus sekolah untuk antar jemput siswa dan layanan bus sekolah inklusif untuk antar jemput siswa berkebutuhan khusus secara gratis di Kulon Progo)	Evaluasi Penyelenggaraan Bus Sekolah **Lv.3.1.1.P.1.A.5.** Usulan permohonan bantuan armada bus sekolah ke Kemenhub.	2030-2034	Pemeliharaan Bus Sekolah .				Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis **Lv.3.1.1.P.1.D.3.** Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan **Lv.3.1.1.P.1.D.4.** Peningkatan keterampilan supir bus	
	Lv.3.1.1. Pengembangan Transportasi Publik Terpadu Berbasis Digital.	**Lv.3.1.1.P.2.** Angkutan umum siswa	**-**	-	**Lv.3.1.1.P.2.B.2.** Pemeliharaan Angkudes, Halte, dan Perlengkapan jalan.	2030-2034	-	-	**Lv.3.1.1.P.2.D.1.** Sosialisasi program ke pengusaha angkudes/ operator angkudes **Lv.3.1.1.P.2.D.2.** Sosialisasi pelaksanaan	2030-2034

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
									melalui Media sosial.	
	Lv.3.1.1. Pengembangan Transportasi Publik Terpadu Berbasis Digital.	**Lv.3.1.1.P.3.** Angkutan Perintis	-	-	**Lv.3.1.1.P.3.B.2.** Pemeliharaan Angkudes, Halte, Bengkel, dan Perlengkapan jalan.	2030-2034	-	-	**Lv.3.1.1.P.3.D.1.** Sosialisasi program ke pengusaha angkudes/ operator angkudes **Lv.3.1.1.P.3.D.2.** Sosialisasi pelaksanaan melalui Media sosial.	2030-2034
	Lv.3.1.2. Optimalisasi Manajemen Lalu Lintas Cerdas dan Pengendalian Lingkungan.	**Lv.3.1.2.P.1.** Pengembangan sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi (ATCS)	-	-	**Lv.3.1.2.P.1.B.1.** Gedung/ruang ATCS Kabupaten Kulon Progo dan Perlengkapan jalan	2030-2035	**-**	-	**Lv.3.1.2.P.1.D.1.** Presentasi program ke Kemenhub, dan Provinsi	2030-2034
	Lv.3.1.2. Optimalisasi Manajemen Lalu Lintas Cerdas dan Pengendalian Lingkungan.	**Lv.3.1.2.P.2.** Peningkatan kualitas APJ Pintar berbasis digital	-	-	**Lv.3.1.2.P.2.B.3.** Pemeliharaan APJ Pintar **Lv.3.1.2.P.2.B.4.** Pemeliharaan Perangkat sensor	2030-2034	-	-	**Lv.3.1.2.P.2.D.2.** Sosialisasi 1. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan lalu lintas dan Angkutan Jalan.	2030-2034

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
									Lv.3.1.2.P.2.D.3. Peraturan Menteri perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 2 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/Kota;	
	Lv.3.1.3. Pembangunan Infrastruktur Mobilitas Aktif dan Inklusif.	**Lv.3.1.3.P.1.** Peningkatan layanan pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis Digital	-	-	**Lv.3.1.3.P.1.B.1.** Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Hardware blu full cycle	2026-2029	-	-	**Lv.3.1.3.P.1.D.3.** Sosialisasi Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan **Lv.3.1.3.P.1.D.4.** Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan **Lv.3.1.3.P.1.D.5.** Sosialisasi Peraturan Menteri	2030-2034

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	**Tahun**	**Infrastruktur Pendukung**	**Tahun**	**Perangkat Lunak Pendukung**	**Tahun**	**Penguatan Literasi**	**Tahun**
									Perhubungan RI 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	
	Lv.3.1.2. Optimalisasi Manajemen Lalu Lintas Cerdas dan Pengendalian Lingkungan.	**Lv.3.1.2.P.3.** Layanan informasi tilang angkutan umum/barang berbasis digital	-	-	**Lv.3.1.2.P.3.B.1.** Sarana pendukung operasi yustisi (Kendaraan, rambu, Catatan)	2025-2029	-	-	**Lv.3.1.2.P.3.D.1.** Sosialisasi Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2030-2034

4.5 RENCANA AKSI *SMART SOCIETY*

Pilar *Smart Society* adalah inti dari pembangunan kota cerdas yang humanis, menempatkan masyarakat sebagai pusat dari setiap inisiatif dan inovasi. Rencana aksi ini bertujuan untuk membangun komunitas yang inklusif, kolaboratif, dan berdaya melalui pemanfaatan teknologi untuk memperkuat interaksi sosial, meningkatkan partisipasi publik, serta memfasilitasi akses informasi dan layanan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan mendorong literasi digital, mempersempit kesenjangan akses, dan menciptakan platform partisipatif, kita akan memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi menjadi alat untuk menciptakan masyarakat yang lebih terhubung, cerdas, dan sejahtera.

Tabel 4.9 Rencana Aksi *Smart Society* (Jangka Pendek - Menengah)

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Mewujudkan Interaksi Masyarakat yang Efisien			-	-	-	-	-	-	-	-
Ekosistem Belajar yang Efisien dan Komprehensif	**S.2.1.1.** Transformasi Digital Pendidikan Berkelanjutan dari Hulu ke Hilir.	**S.2.1.1.P.1.** *Moral Technology School* Pembelajaran Numerasi dengan metode Gasing (Gampang asyik menyenangkan)	**S.2.1.1.P.1.A.1.** Pembuatan SK inovasi	2025	**S.2.1.1.P.1.B.1.** Pengadaan perangkat pendukung, seperti laptop dan jaringan internet	2025	**S.2.1.1.P.1.C.1.** Pemanfaatan whatsapp grup, website dan instagram dinas sebagai sarana publikasi	2025	**S.2.1.1.P.1.D.1.** Sosialisasi program kepada masyarakat **S.2.1.1.P.1.D.2.** workshop/bimtek untuk pelaksana	2025-2029
	S.2.1.2. Gerakan Literasi Digital Inklusif dan Berkelanjutan.	**S.2.1.2.P.1.** Mimpi Kurcaci	**S.2.1.2.P.1.A.1.** Penyusunan Standar Pelayanan **S.2.1.2.P.1.A.2.** Penyusunan SOP	2025	**S.2.1.2.P.1.B.1.** Pengadaan perangkat pendukung, seperti: Buku, Wireless, dan APE (Alat Peraga Edukatif)	2025-2029	**S.2.1.2.P.1.C.1.** Aplikasi e-book	2026-2029	**S.2.1.2.P.1.D.1.** Sosialisasi penguatan literasi kepada pengunjung/masyarakat yang datang ke perpustakaan **S.2.1.2.P.1.D.2.** Sosialisasi penguatan literasi di media sosial	2025-2029 2025-2029
Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat	**S.3.1.1.** Pengembangan Ekosistem Keamanan Digital Terpadu dan Responsif.	**S.3.1.1.P.1.** Penguatan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Satuan Pendidikan	**S.3.1.1.P.1.A.1.** Pembuatan SK tim	2026	**S.3.1.1.P.1.B.1.** Pengadaan perangkat pendukung, seperti laptop dan jaringan internet	2026	**S.3.1.1.P.1.C.1.** Pemanfaatan whatsapp grup, website dan instagram dinas sebagai sarana publikasi	2025	**S.3.1.1.P.1.D.1.** Melakukan sosialisasi untuk tim	2025-2029

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	**Tahun**	**Infrastruktur Pendukung**	**Tahun**	**Perangkat Lunak Pendukung**	**Tahun**	**Penguatan Literasi**	**Tahun**
	S.3.1.1. Pengembangan Ekosistem Keamanan Digital Terpadu dan Responsif.	**S.3.1.1.P.2.** *Smart Volunteer Digital System*	**S.3.1.1.P.2.A.1.** Pembuatan Kebijakan	2026	**S.3.1.1.P.2.B.1.** Pengadaan perangkat komputer pendukung	2026	**S.3.1.1.P.2.C.1.** Pengembangan aplikasi manajemen data laporan	2026-2029	**S.3.1.1.P.2.D.1.** Pelatihan tim penanganan laporan **S.3.1.1.P.2.D.2.** Sosialisasi kepada masyarakat	2026-2027 2026-2029
	S.3.1.1. Pengembangan Ekosistem Keamanan Digital Terpadu dan Responsif	**S.3.1.1.P.3.** Diklat TRC & Damkarmat berbasis kompetensi	**S.3.1.1.P.3.A.1.** Pembuatan Kebijakan damkarmat	2026	**S.3.1.1.P.3.B.1.** Pengadaan tempat pelatihan	2026-2028	**S.3.1.1.P.3.C.1.** Pemanfaatan aplikasi Office dan LMS	2026-2029	**S.3.1.1.P.3.D.1.** Pelatihan tim Diklat	2026-2027

Tabel 4.10 Rencana Aksi *Smart Society* (Jangka Panjang)

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Mewujudkan Interaksi Masyarakat yang Efisien	**S.1.1.1.** Pengembangan Platform Partisipasi Publik dan Kesejahteraan Digital Terpadu	**S.1.1.1.P.1.** Tuan Nonaku	**S.1.1.1.P.1.A.1.** Penyusunan kebijakan Tuan Nonaku **S.1.1.1.P.1.A.2.** Pembuatan SK Tim pelaksana	2026	-	-	**S.1.1.1.P.1.C.1.** Pemanfaatan aplikasi pendataan sosial	2027	**S.1.1.1.P.1.D.1.** Sosialisasi kepada masyarakat **S.1.1.1.P.1.D.1.** Bimtek Tim pelaksana	2026
Ekosistem Belajar yang Efisien dan Komprehensif	**S.2.1.1**. Transformasi Digital Pendidikan Berkelanjutan dari Hulu ke Hilir.	**S.2.1.1.P.2.** Optimalisasi Tata Kelola Manajemen ASN (Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara)	**S.2.1.1.P.2.A.1.** Pembuatan kebijakan *Assessment Center* di Kabupaten Kulon Progo	2034	-	-	**S.2.1.1.P.2.C.1.** Pengembangan Aplikasi E-Manajemen Talenta	2032	**S.2.1.1.P.2.D.1.** Pelatihan tim pelaksana **S.2.1.1.P.2.D.2.** Sosialisasi kepada ASN	2033-2034
	S.2.1.1. Transformasi Digital Pendidikan Berkelanjutan dari Hulu ke Hilir.	**S.2.1.1.P.1.** *Moral Technology School* Pembelajaran Numerasi dengan metode Gasing (Gampang asyik menyenangkan)	-	-	-	-	**S.2.1.1.P.1.C.2.** Update aplikasi pendukung komunikasi dan publikasi	2030	**S.2.1.1.P.1.D.3.** sosialisasi, koordinasi dan publikasi untuk pelaksanaan	2030-2034
	S.2.1.1. Transformasi Digital Pendidikan	**S.2.1.1.P.3.** Digitalisasi Sekolah	**S.2.1.1.P.3.A.1.** SK Penerima manfaat	2030-2034	**S.2.1.1.P.3.B.1.** Pengadaan perangkat pendukung:	2030-2034	**S.2.1.1.P.3.C.1.** Aplikasi belajar.id (rumahbelajar)	2030-2034	**S.2.1.1.P.3.D.1.** Sosialisasi program kepada sekolah	2030-2034

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	Berkelanjutan dari Hulu ke Hilir.	(Digitalisasi sekolah (lanjutan), Pengembangan Pembelajaran e-learning program kesetaraan)	**S.2.1.1.P.3.A.2.** SK tim digitalisasi sekolah **S.2.1.1.P.3.A.3.** SK penetapan e-learning untuk Pendidikan kesetaraan		Smartboard atau Interaktif Flat Panel, Laptop, Hardisk, internet		**S.2.1.1.P.3.C.2.** Aplikasi pendukung sarana komunikasi dan publikasi/media sosial		**S.2.1.1.P.3.D.2.** Workshop/bimtek kepada tim pelaksana	
Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat	**S.3.1.2.** Pelembagaan Sistem Peringatan Dini Bencana Berbasis Komunitas dan Teknologi,	**S.3.1.2.P.1.** Tanggap Bencana Mandiri	**S.3.1.2.P.1.A.1.** Penyusunan regulasi yang mengizinkan dan mendukung partisipasi masyarakat dalam penanganan bencana. **S.3.1.2.P.1.A.2.** Pembentukan kelompok/komunitas tanggap bencana di tingkat lokal. **S.3.1.2.P.1.A.3.** Kerjasama dengan lembaga terkait.	2030-2034	**S.3.1.2.P.1.B.1.** Posko/ruang siaga bencana di setiap kelurahan/desa. **S.3.1.2.P.1.B.2.** Jaringan komunikasi darurat yang mandiri (misalnya, radio komunikasi, Walkie Talkie). **S.3.1.2.P.1.B.3.** Peralatan dasar P3K dan evakuasi.	2030-2032	**S.3.1.2.P.1.C.1.** Aplikasi seluler untuk pelaporan dan koordinasi darurat (misalnya, fitur Panic Button). **S.3.1.2.P.1.C.2.** Sistem informasi geografis (GIS) untuk memetakan area rawan bencana. **S.3.1.2.P.1.C.3.** Platform komunikasi internal komunitas.	2030-2032	**S.3.1.2.P.1.D.1.** Pelatihan dan simulasi bencana secara berkala. **S.3.1.2.P.1.D.2.** Edukasi publik tentang jenis bencana dan cara mitigasinya. **S.3.1.2.P.1.D.3.** Kampanye kesadaran melalui media sosial dan lokakarya	2030-2034

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	**Tahun**	**Infrastruktur Pendukung**	**Tahun**	**Perangkat Lunak Pendukung**	**Tahun**	**Penguatan Literasi**	**Tahun**
	S.3.1.2. Pelembagaan Sistem Peringatan Dini Bencana Berbasis Komunitas dan Teknologi,	**S.3.1.2.P.2.** Pos Damkar Mandiri Berbasis Teknologi	**S.3.1.2.P.2.A.1.** Penerbitan regulasi yang mengakui keberadaan Pos Damkar mandiri dan standar operasionalnya. **S.3.1.2.P.2.A.2.** Pembentukan unit pos damkar mandiri di area-area padat penduduk atau industri. **S.3.1.2.P.2.A.3.** Integrasi data dan koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran setempat.	2030-2032	**S.3.1.2.P.2.B.1.** Posko fisik yang dilengkapi dengan alat pemadam api standar (APAR, Hydrant) dan kendaraan darurat. **S.3.1.2.P.2.B.2.** Jaringan sensor deteksi api/asap di area rawan. **S.3.1.2.P.2.B.3.** Koneksi internet yang stabil di setiap pos.	2030-2032	**S.3.1.2.P.2.C.1.** Aplikasi pelaporan kebakaran dan permintaan bantuan (Emergency Call). **S.3.1.2.P.2.C.2.** Dashboard pemantauan *real-time* untuk status pos dan laporan kejadian.	2030-2032	**S.3.1.2.P.2.D.1.** Pelatihan teknis penggunaan peralatan pemadam kebakaran modern. **S.3.1.2.P.2.D.2.** Sosialisasi cara penanganan api kecil dan prosedur darurat. **S.3.1.2.P.2.D.3.** Kursus sertifikasi bagi relawan yang mengoperasikan pos.	2030-2034
	S.3.1.2. Pelembagaan Sistem Peringatan Dini Bencana Berbasis Komunitas dan Teknologi,	**S.3.1.2.P.3.** TRC Damkar dan Relawan Profesional dengan Sertifikasi Kompetensi	**S.3.1.2.P.3.A.1.** Penyusunan kurikulum dan standar sertifikasi kompetensi untuk relawan dan tim TRC. **S.3.1.2.P.3.A.2.** Pembentukan lembaga sertifikasi	2030-2034	**S.3.1.2.P.3.B.1.** Pusat pelatihan dan simulasi kebakaran yang realistis. **S.3.1.2.P.3.B.2.** Peralatan pelatihan modern (misalnya, simulator ruang terbatas, alat	2030-2034	**S.3.1.2.P.3.C.1.** Sistem manajemen pembelajaran (LMS) untuk modul pelatihan online. **S.3.1.2.P.3.C.2.** Database relawan	2030-2032	**S.3.1.2.P.3.D.1.** Promosi profesi relawan pemadam kebakaran. **S.3.1.2.P.3.D.2.** Program beasiswa atau insentif untuk mendorong partisipasi dalam sertifikasi.	2030-2034

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	**Tahun**	**Infrastruktur Pendukung**	**Tahun**	**Perangkat Lunak Pendukung**	**Tahun**	**Penguatan Literasi**	**Tahun**
			yang kredibel bekerjasama dengan Kemnaker dan Damkar. **S.3.1.2.P.3.A.3.** Kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk program pelatihan		pemadam api canggih). **S.3.1.2.P.3.B.3.** Fasilitas medis untuk pertolongan pertama pasca simulasi.		bersertifikasi yang dapat diakses secara nasional. **S.3.1.2.P.3.C.3.** Aplikasi untuk manajemen jadwal dan penugasan tim TRC.		**S.3.1.2.P.3.D.3.** Edukasi tentang pentingnya kompetensi dan profesionalisme dalam penanganan darurat	
	S.3.1.1. Pengembangan Ekosistem Keamanan Digital Terpadu dan Responsif.	**S.3.1.1.P.4.** EWS IoT Terintegrasi Nasional	**S.3.1.1.P.4.A.1.** Penyusunan kebijakan yang mewajibkan implementasi EWS IoT di area rawan bencana. **S.3.1.1.P.4.A.2.** Pembentukan pusat kendali dan koordinasi nasional untuk EWS. **S.3.1.1.P.4.A.3.** Kemitraan publik-swasta untuk penyediaan dan pemeliharaan perangkat IoT.	2030-2034	**S.3.1.1.P.4.B.1.** Jaringan sensor IoT (banjir, gempa, longsor) yang tersebar di seluruh wilayah. **S.3.1.1.P.4.B.2.** Menara telekomunikasi dan stasiun pemancar sinyal peringatan dini. **S.3.1.1.P.4.B.3.** Infrastruktur cloud server untuk penyimpanan dan pengolahan data.	2030-2034	**S.3.1.1.P.4.C.1.** Sistem manajemen data sensor (Sensor Data Management System). **S.3.1.1.P.4.C.2.** Aplikasi notifikasi massal (push notification) ke ponsel warga. **S.3.1.1.P.4.C.3.** Dashboard visualisasi data *real-time* untuk operator di pusat kendali.	2030-2032	**S.3.1.1.P.4.D.1.** Sosialisasi cara kerja EWS dan makna dari setiap sinyal peringatan. **S.3.1.1.P.4.D.2.** Edukasi tentang tindakan yang harus diambil saat menerima peringatan. **S.3.1.1.P.4.D.3.** Kampanye digital untuk mendorong aktivasi fitur EWS di perangkat seluler.	2030-2034

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	S.3.1.1. Pengembangan Ekosistem Keamanan Digital Terpadu dan Responsif.	**S.3.1.1.P.1.** Penguatan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Satuan Pendidikan	**S.3.1.1.P.1.A.2.** Update SK tim	2030	-	-	**S.3.1.1.P.1.C.2.** Aplikasi system pelaporan	2030	**S.3.1.1.P.1.D.2.** Melakukan sosialisasi untuk tim	2030-2034

4.6 RENCANA AKSI *SMART ENVIRONMENT*

Pilar *Smart Environment* merupakan komitmen fundamental dalam membangun kota cerdas yang berkelanjutan dan berketahanan, di mana keberlanjutan ekologi menjadi prioritas utama. Rencana aksi ini berfokus pada pemanfaatan teknologi untuk mengatasi tantangan lingkungan, mulai dari pengelolaan sumber daya alam yang efisien, mitigasi dampak perubahan iklim, hingga peningkatan kualitas udara dan air. Dengan mengadopsi sistem sensor pintar, data analitik, dan solusi energi terbarukan, kita akan menciptakan ekosistem perkotaan yang lebih ramah lingkungan, memastikan kelestarian alam untuk generasi mendatang, dan menjadikan kota ini sebagai tempat yang aman dan sehat untuk semua.

Tabel 4.11 Rencana Aksi *Smart Environment* (Jangka Pendek - Menengah)

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Mengembangkan Program Perlindungan Lingkungan Hidup										
Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah	**En.2.1.1.** Pembangunan Ekosistem Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Digital.	**En.2.1.1.P.1.** Pembentukan 1 Bank Sampah Induk setiap Kelurahan/ Kalurahan	**En.2.1.1.P.1.A.1.** Perda Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengelolaan sampah **En.2.1.1.P.1.A.2.** SE Bupati tentang Pembentukan 1 Bank Sampah Induk setiap Kelurahan/Kalurahan **En.2.1.1.P.1.A.3.** Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah	2025-2029			**En.2.1.1.P.1.C.1.** Sikompas	2026	**En.2.1.1.P.1.D.1.** Sosialisasi terkait pembentukan bank sampah	2025
	En.2.1.1. Pembangunan Ekosistem Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Digital.	**En.2.1.1.P.2.** Pembuatan web Sikompas (Sistem Informasi Kelompok Pengelola Sampah)	**En.2.1.1.P.2.A.1.** Kewajiban bagi kelompok pengelola sampah untuk menginout data di Sikompas setiap bulan.	2025	**En.2.1.1.P.2.B.1.** Pengadaan perangkat pendukung, seperti smartphone, komputer, dan jaringan internet.	2025	**En.2.1.1.P.2.C.1.** Sikompas	2025	**En.2.1.1.P.2.D.1.** Sosialisasi penggunaan Sikompas kepada kelompok	2025

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
									pengelola sampah **En.2.1.1.P.2.D.2.** Manual book Sikompas	
Tata Kelola Energi										

Tabel 4.12 Rencana Aksi *Smart Environment* (Jangka Panjang)

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Mengembangkan Program Perlindungan Lingkungan Hidup										
Mengembangkan Tata Kelola	**En.2.1.3.** Optimalisasi Infrastruktur	**En.2.1.3.P.1.** Zero Waste	**En.2.1.3.P.1.A.1.** Larangan bertahap penggunaan plastik	2030-2034	**En.2.1.3.P.1.B.1.**	2030-2034	**En.2.1.3.P.1.C.1.**	2030-2034	**En.2.1.3.P.1.D.1.**	2030-2034

Sub-Dimensi	Strategi	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Sampah dan Limbah	dan Regulasi Pengelolaan Sampah.	1. 95% masyarakat menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 2. 0% sampah residu ke TPA (semua sampah terolah di sumber, didaur ulang, atau dimanfaatkan kembali)	sekali pakai dan insentif kemasan ramah lingkungan		Bank sampah induk/ unit maupun TPS 3R		Sikompas (tidak ada sampah yang tidak terkelola)		Sosialisasi/ edukasi kepada masyarakat	
Tata Kelola Energi										

BAB V
PETA JALAN PEMBANGUNAN *SMART CITY* KABUPATEN KULON PROGO

Smart City (Kota Cerdas) di Kabupaten Kulon Progo merupakan implementasi dari pendekatan pembangunan modern yang menekankan pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), inovasi, dan kolaborasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan efisiensi tata kelola pemerintahan. Pendekatan ini bukan sekadar mengikuti tren global, tetapi telah menjadi kebutuhan strategis untuk memenuhi standar pelayanan publik yang cepat, tepat sasaran, terjangkau, dan mudah diakses oleh warga.

Peta jalan ini disusun sebagai panduan strategis yang sistematis dan komprehensif, mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam Buku Panduan Penyusunan Masterplan *Smart City*. Kerangka ini bertujuan untuk memastikan bahwa inisiatif *smart city* sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kulon Progo Tahun 2025-2029.

Visi pembangunan Kulon Progo, yaitu "Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya, yang Berkelanjutan", menjadi landasan utama bagi peta jalan ini. Pembangunan *smart city* akan diintegrasikan dengan empat misi utama daerah, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat yang makmur, berbudaya, dan religius.
2. Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan lingkungan yang lestari serta tangguh terhadap bencana.

Dengan memadukan konsep *smart city* dari Kominfo dan visi-misi pembangunan daerah, peta jalan ini dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

1. Penguatan fondasi pembangunan daerah melalui peningkatan akses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.
2. Peningkatan daya saing ekonomi yang berbasis pada potensi lokal.
3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan adaptif.
4. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, efektif, dan akuntabel.

5.1 PETA JALAN *SMART GOVERNANCE*

Smart Governance adalah jantung dari inisiatif *Smart City* Kulon Progo, yang berperan sebagai fondasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi birokrasi, dan partisipasi masyarakat. Peta jalan ini dirancang sebagai dokumen yang dinamis, berakar pada fondasi kebijakan yang kuat (Perbup SPBE) dan inovasi yang sudah ada, dengan secara proaktif merespons tantangan dan menyelaraskan diri dengan inisiatif nasional (INA DIGITAL). Keberhasilan implementasinya akan sangat ditentukan oleh tiga pilar utama: transformasi internal birokrasi, penguatan infrastruktur digital, dan pengembangan layanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Tabel 5.1 Peta Jalan *Smart Governance* Jangka Pendek - Menengah (2025 – 2029)

Sub Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Layanan Publik	**G.1.1.2.** Penguatan Mekanisme Umpan Balik dan Pengawasan Partisipatif Berbasis Platform Digital	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	10.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	**G.1.1.2.P.1.** Pembangunan Aplikasi SIMPel (Sistem InforMasi Pengendalian)	5 (salah satunya pengujian / trial eror aplikasi SIMPel)	27.289.300	2 (pengoperasian SIMPel secara terbatas)	24.014.500	2 (Pengoperasian secara penuh SIMPel)	29.298.000	2 (persiapan pengebangan SIMPel)	29.883.000	2 (pengembangan SIMPel yang terkoneksi dengan SIRUP)	30.600.000	APBD	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo

Sub Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	G.1.1.1. Pengembangan Ekosistem Layanan Publik Terintegrasi Berbasis Identitas Digital Tunggal (*Single Citizen Identity*)	Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terintegrasinya layanan pajak daerah dan pembayaran pajak daerah dalam satu portal.	10.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	**G.1.1.1. P.1.** Eling Pajak Daerah (Elektronifikasi Layanan dan Integrasi Pajak Daerah)	Perencanaan; Koordinasi stakeholder; Pembangunan Aplikasi; Pembayaran Pajak Daerah QRIS; Launching;	75.000.000	Integrasi *Single Sign On;* Pembayaran Pajak Daerah VA; Ujicoba SSO	80.000.000	*Launching* SSO; *Update* dan pemeliharaan aplikasi	75.000.000	*Update* dan pemeliharaan aplikasi	75.000.000	*Update* dan pemeliharaan aplikasi	50.000.000	APBD	BKAD
	G.1.1.2. Penguatan Mekanisme Umpan Balik dan Pengawasan Partisipatif Berbasis	Program pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pengawasan organisasi kemasyarakatan	10.2.persentase layanan yang tersedia/ minta secara daring 10.3.rata-rata waktu respons	**G.1.1.2.P.3.** Aplikasi berbasis Web, BangsaKu	79,87	119.707.200	84,56	105.268.053	89,26	128.959.653	93,96	131.917.736	97,32	135.108.073	APBD	Badan Kesbangpol

Sub Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	Platform Digital.			non-darurat													
	G.1.1.3. Otomatisasi dan Digitalisasi End to End Layanan Perizinan Multi Sektor.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah pemohon yang melakukan pembuatan izin di kapanewon	10.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	**G.1.1.3.P.1.** SiPerimanis Kapanewpn	1 video	26.000.000	3 Unit - 300 izin	100.000.000	3 Unit - 300 izin	100.000.000	3 Unit - 300 izin	100.000.000	3 Unit - 300 izin	100.000.000	APBD	DPMPTSP
	G.1.1.1. Pengembangan Ekosistem Layanan Publik Terintegrasi Berbasis Identitas Digital Tunggal (*Single Citizen Identity*)	**Sub Kegiatan :** Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan. **Kegiatan :** Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	Terbangunnya sistem layanan akte kelahiran dan kematian yang terintegrasi dengan data NIK serta kemudahan pemantauan data kependudukan	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	**G.1.1.1.P.2.** AKURAD (Aksi Kaluraha n Ramah Administrasi Kependudukan)	3 Dokumen	10.159.950	3 Dokumen	10.159.950	3 Dokumen	11.135.300	3 Dokumen	11.759.000	3 Dokumen	12.397.000	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
		Program : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan															
	G.1.1.2. Penguatan Mekanisme Umpan Balik dan Pengawasan Partisipatif Berbasis Platform Digital.	**Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan : Penataan Organisasi Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana**	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	SNI 10. Pemerintahan	**G.1.1.2.P.4.** Survey Kepuasan Masyarakat Kulon Progo (SKM-Ku)	100% laporan hasil SKM		100% laporan hasil SKM		100% laporan hasil SKM		100% laporan hasil SKM		100% laporan hasil SKM		APBD	Bagian Organisasi Setda

Sub Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Manajemen Birokrasi yang Efisien	**G.2.1.3.** Penguatan Manajemen Kinerja Berbasis Data dan Akuntabilitas Multi Level	**Program :** Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota **Kegiatan** : Penataan Organisasi **Sub Kegiatan** : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kebijakan bidang peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi	SNI 10. Pemerintahan	**G.2.1.3.P.1.** Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan(E-SAKIP)	1 dokumen Perencanaan dan pengembangan probis sistem		1 dokumen Perencanaan dan pengembangan probis		1 dokumen Analisis kebutuhan penyimpanan data		1 paket Pengadaan penyimpanan data		1 dokumen evaluasi		APBD	Bagian Organisasi Setda
	G.2.1.3. Penguatan Manajemen Kinerja Berbasis Data dan Akuntabilitas Multi Level	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	21.1. Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses	**G.2.1.3.P.2.** Pengembangan Portal Data Pengadaan Barang/Jasa terintegrasi	1	25.000.000	1 (pengoperasian aplikasi tambahan secara terbatas)	27.000.000	1 (Pengoperasian secara penuh aplikasi tambahan	28.000.000	1 (persiapan pengintegrasian	50.000.000	1 (pengoperasian portal web pbj secara terbatas)	50.000.000	APBD	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo

Sub Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
				perencanaan													
	G.2.1.1. Transformasi Kapasitas SDM ASN Menuju Pola Pikir Digital dan Adaptif.	**Program Kepegawaian Daerah**--Subkegiatan Koordinasi dan kerjasama Pelaksanaan Diklat. **Program Pengembangan Sumber Daya Manusi**a-Subkegiatan-Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan Kompetensi	-	**G.2.1.1.P.1**. Pengembangan Kompetensi ASN terintegrasi secara Digital menuju Kulon Progo *Corporate University*	1 dokumen hasil koordinasi dan kerjasama diklat	1.878.745.300	43,14%	2.178.745.050	44,83%	1.986.890.485	46,30%	2.019.141.910	47,88%	2.071.012.665	APBD	BKPSDM

Sub Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
		, Kepemimpinan, dan Prajabatan															
	G.2.1.2. Pembangunan dan Penguatan Ekosistem Tata Kelola Keamanan Informasi Terintegrasi	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Subkegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terbangun dan beroperasinya sistem aplikasi untuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	21.1. Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan	**G.2.1.2.P.1.** Aplikasi untuk TSP	1 aplikasi	0	1 aplikasi	0	1 aplikasi	0	1 aplikasi	0	1 aplikasi	0	ABPD	Bapperida dan DinasKominfo

Sub Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	G.2.1.3. Penguatan Manajemen Kinerja Berbasis Data dan Akuntabilitas Multi Level	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Subkegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Terlaksanaya monitoring dan evaluasi kinerja	21.1. Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan	**G.2.1.3.P.3.** Monevku	1 aplikasi	40.000.000	1 aplikasi	40.000.000	1 aplikasi	40.000.000	1 aplikasi	40.000.000	1 aplikasi	40.000.000	ABPD	Bapperida
	G.2.1.1. Transformasi Kapasitas SDM ASN	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Terbangunnya sistem informasi riset dan	21.1. Jumlah warga kota per 100.000 pendudu	**G.2.1.1.P.2.** Sistem Informasi Riset dan	1 aplikasi	40.000.000	1 aplikasi	40.000.000	1 aplikasi	50.000.000	1 aplikasi	50.000.000	1 aplikasi	50.000.000	ABPD	Bapperida

Sub Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	Menuju Pola Pikir Digital dan Adaptif.	Subkegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	inovasi daerah	k per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan	Inovasi Daerah												
	G.2.1.3. Penguatan Manajemen Kinerja Berbasis Data dan Akuntabilitas Multi Level	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LHP, LHR, LHE digital	SNI 10. Pemerintahan	**G.2.1.3.P.4**. Sistem pengelolaan LHP, LHR, LHE berbasis elektronik	Membuat sistem pengelolaan LHP, LHR, LHE berbasis elektronik	0	-	0	-	0	-	0	-	0	APBD	Inspektorat Derah

Sub Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
Efisiensi Kebijakan Publik	**G.3.1.1.** Pemanfaatan Analitik Data untuk Perumusan Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence Based Policy)	Program : Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Kegiatan : Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota Sub Kegiatan : Pelayanan informasi Publik	Terintegrasinya data dar berbagai sektor yang dapat digunakan sebgai DDS (Decision Support System)	SNI 10. Pemerintahan	**G.3.1.1.P.2.** Dashboard Data Pro	-	0,00	1 paket Perangkat Layanan Informasi Media Pimpinan Daerah	618.240.000	-	0,00	-	0,00	-	-	APBD	Dinas Kominfo

Sub Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	G.3.1.3. Harmonisasi dan Standardisasi Regulasi Daerah dengan Kerangka Kerja Nasional.	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Masyarakat mudah dalam mengakses produk hukum dan informasi hukum di JDIH Kabupaten Kulon Progo	10.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	**G.3.1.3.P.1.** JDIH Kabupaten Kulon Progo *user friendly*	Perencanaan ekosistem JDIH Kabupaten Kulon Progo *userfriendly* (1 Laporan)	17.005.000	Pematangan rencana JDIH Kabupaten Kulon Progo *userfriendly* (1 Laporan)	20.000.000	Pelaksanaan pengembangan JDIH Kabupaten Kulon Progo *userfriendly*, Pihak Ketiga (1 website)	20.000.000 100.000.000 (dalam permohonan)	Implementasi JDIH Kabupaten Kulon Progo *userfriendly* (1 website)	20.000.000	Evaluasi dan Uji Kepuasan Masyarakat, Para Pemangku Kepentingan (1 Laporan)	20.000.000	APBD	Bagian Hukum Setda

Tabel 5.2 Peta Jalan *Smart Governance* Jangka Panjang (2030-2034)

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Layanan Publik																	
Manajemen Birokrasi yang Efisien	**G.2.1.1.** Transformasi Kapasitas SDM ASN Menuju Pola Pikir Digital		Peningkatan persentase ASN yang memenuhi Pengembangan Kompetens	-	**G.2.1.1.P.1.** Pengembangan Kompetensi ASN terintegrasi secara Digital	49,39%	2.136.424.105	50,30%	2.243.245.310	51,30%	2.355.407.576	52,30%	2.473.177.955	53,30%	2.596.836.852	APBD Kab. Kulon Progo	BKPSDM

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	dan Adaptif.				menuju Kulon Progo Corporate University												
	G.2.1.2. Pembangunan dan Penguatan Ekosistem Tata Kelola Keamanan Informasi Terintegrasi		Terbangun dan beroperasinya sistem aplikasi untuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan		**G.2.1.2.P.1.** Aplikasi untuk TSP	1 aplikasi	0	1 aplikasi	0	1 aplikasi	0	1 aplikasi	0	1 aplikasi	0	ABPD	Bapperida dan DinasKominfo
Efisiensi Kebijakan Publik	**G.3.1.3.** Harmonisasi dan Standardisasi Regulasi Daerah dengan Kerangka Kerja Nasional.	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Masyarakat mudah mengakses JDIH Kabupaten Kulon Progo melalui aplikasi *playstore*	10.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	**G.3.1.3.P.1.** JDIH Kabupaten Kulon Progo tersedia di aplikasi playstore	Perencanaan JDIH Kabupaten Kulon Progo tersedia di aplikasi *playstore*	20.000.000	Pematangan rencana JDIH Kabupaten Kulon Progo tersedia di *playstore* (1 Laporan)	20.000.000	Pelaksanaan pengembangan JDIH Kabupaten Kulon Progo di *playstore* (1 aplikasi *playstore*)	20.000.000 50.000.000 (dalam permohonan)	Implementasi JDIH Kabupaten Kulon Progo di *playstore* (1 aplikasi *playstore*)	20.000.000	Evaluasi dan Uji Kepuasan Masyarakat, Para Pemangku Kepentingan (1 Laporan)	20.000.000	APBD	Bagian Hukum Setda

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
						(1 Laporan)											

5.2 PETA JALAN *SMART BRANDING*

Pembangunan *Smart Branding* di Kabupaten Kulon Progo merupakan strategi penting untuk mempromosikan keunikan daerah dan meningkatkan daya saingnya di tingkat nasional maupun global. Konsep ini melampaui pemasaran konvensional, berfokus pada pembentukan citra yang kuat, unik, dan otentik yang didukung oleh teknologi. Berdasarkan analisis studi kasus dari daerah lain, keberhasilan *branding* sangat bergantung pada kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta kemampuan untuk menginternalisasi nilai-nilai merek di seluruh pemangku kepentingan. Implementasi peta jalan ini akan berfokus pada strategi promosi digital yang holistik, termasuk produksi konten yang menarik, pemanfaatan media sosial dan platform digital, serta kolaborasi dengan komunitas dan UMKM lokal. Dengan pendekatan ini, Kulon Progo tidak hanya akan mempromosikan destinasi, tetapi juga akan membangun ekosistem yang otentik, di mana masyarakat menjadi duta merek yang aktif dan efektif.

Tabel 5.2 Peta Jalan *Smart Branding* Jangka Pendek - Menengah (2025 – 2029)

Sub-Dimensi	Strategi	Program /Inovasi (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Ekosistem Pariwisata	**B.1.1.1.** Pengembangan "Ekonomi Kreatif & Ekowisata Berbasis Geoheritage" Terintegrasi dengan Bandara YIA.	Program Pemasaran Pariwisata: 1.Kampanye digital “Sambanggo Friendly Kulon Progo”, Paket Wisata Terpadu,	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan yang datang ke Kab. Kulon Progo	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan daring	**B.1.1.1.P.1.** All-in-One Tourism App Kulon Progo: Aplikasi resmi wisata yang mengintegrasikan info destinasi, reservasi tiket, paket wisata, transportasi lokal, hingga UMKM kuliner	1.-	-	Uji coba; 3% layanan rekreasi publik online	100.000.000	5% layanan rekreasi publik online, 10 pemesan aplikasi	250.000.000	10% layanan rekreasi publik online, 50 pemesan aplikasi	250.000.000	20% layanan rekreasi publik online, 500 pemesan aplikasi	350.000.000	APBD (Dana Keistimewaan dan PAD), CSR	Dinas Pariwisata Kolaborasi dengan :: Dinas Kominfo, BKAD dan Bapperida
	B.1.1.2. Penguatan Brand Budaya Lokal melalui Digitalisasi dan Event Tahunan yang Konsist	Festival Budaya Tahunan, Paket wisata terpadu (alam, budaya, kuliner)	Jumlah aplikasi wisata yang digunakan pengunjung	17.1 Jumlah pemesanan daring fasilitas budaya/100.000 penduduk	**B.1.1.2.P.1.** Sambanggo Smart Festival: Event budaya tahunan (batik khas Kulon Progo, pentas seni,	1 festival	75.000.000	2 Festival	100.000.000	3 Festival	150.000.000	4 Festival	200.000.000	5 Festival	300.000.000		

Sub-Dimensi	Strategi	Program /Inovasi (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	en.				festival kuliner) yang dipromosikan lewat live streaming & marketplace tiket online.												
	B.1.1.3. Kolaborasi Multi Aktor untuk Pemasaran Pariwisata yang Inklusif dan Terukur.	Festival budaya tahunan Integrasi tiket & reservasi online (QRIS, aplikasi wisata Kulon Progo)	Jumlah event tahunan yang menarik wisatawan	9.1 Pendapatan ekonomi berbagi sebagai persentase PAD	**B.1.1.3.P.1.** Gamifikasi Wisata "Sambanggo Explorer": Wisatawan dapat poin saat berkunjung (scan QR di destinasi)	-	-	Uji Coba	100.000.000	100 user	100.000.000	300 user	200.000.000	500 user	250.000.000		
	B.1.1.2. Penguatan Brand Budaya Lokal melalui Digitalis	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan	Jumlah aktifitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa,	17b.2 Persentase catatan budaya kota yang telah	**B.1.1.2.P.2.** Kajian Warisan Budaya Tak Benda	11 (satu) Dokumen	72.000.000	1 (satu) Dokumen	72.000.000	1 (satu) Dokumen	72.000.000	1 1 (satu) Dokumen	72.000.000	1 (satu) Dokumen	72.000.000	Dana Keistimewaan	Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan)*

Sub-Dimensi	Strategi	Program /Inovasi (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	asi dan Event Tahunan yang Konsisten.	Kebudayaan	sastra, dan permuseuman	didigitalkan													
	B.1.1.2. Penguatan Brand Budaya Lokal melalui Digitalisasi dan Event Tahunan yang Konsisten.		Warisan Budaya yang sudah ditetapkan;		**B.1.1.2.P.3.** Naskah Rekomendasi Cagar Budaya	20 (dua puluh) Naskah Rekomendasi	160.000.000	10 (sepuluh) Naskah Rekomendasi	80.000.000	10 (sepuluh) Naskah Rekomendasi	80.000.000	10 (sepuluh) Naskah Rekomendasi	80.000.000	10 (sepuluh) Naskah Rekomendasi	80.000.000	Dana Keistimewaan	Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan)*
	B.1.1.2. Penguatan Brand Budaya Lokal melalui Digitalisasi dan Event Tahunan yang Konsisten.		Jumlah Kelurahan/ Kaluraha n Budaya dan Rintisan Kelurahan/Kalurahan Budaya Kategori		**B.1.1.2.P.4.** Kalurahan/ Desa Budaya	1 (satu) Kalurahan/ Desa Budaya	20.000.000	1 (satu) Kalurahan/ Desa Budaya	20.000.000	1 (satu) Kalurahan/ Desa Budaya	20.000.000	1 Kalurahan/ Desa Budaya	200.000.000	1 (satu) Kalurahan/ Desa Budaya	200.000.000	Dana Keistimewaan	Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan)*

Sub-Dimensi	Strategi	Program /Inovasi (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
			Berkembang														
	B.1.1.2. Penguatan Brand Budaya Lokal melalui Digitalisasi dan Event Tahunan yang Konsisten.	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik di Taman Budaya Kulon Progo Jumlah penonton pertunjukan seni di Taman Budaya	7.8 Persentase bangunan umum yang membutuhkan renovasi / perbaikan	**B.1.1.2.P.5.** Pengembangan Talenta Seni dan Budaya	Rehabilitasi Ruang Galeri Seni Taman Budaya Kulon Progo	24.000.000	71.300 orang/ pengunjung Taman Budaya Kulon Progo	500.000.000	72.300 orang/p engunjung Taman Budaya Kulon Progo	600.000.000	73.300 orang/p engunjung Taman Budaya Kulon Progo	700.000.000	74.300 orang/p engunjung Taman Budaya Kulon Progo	800.000.000	DAK Non Fisik	Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan)*
Daya Saing Bisnis	**B.2.1.2.** Penguatan Ekosistem Kewirausahaan dan UMKM Melalui Literasi Digital	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan Penanaman Modal / *Investment*	Peningkatan realisasi investasi	SNI 14. Rekreasi (14.1) Presentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan	**B.2.1.2.P.1.** *Investment Smartboard* (Penyediaan informasi dan pemberian kemudahan investasi)	10% 10 orang yang mengakses layanan *Investment Smartboard*	100.000.000	20%	100.000.000	30%	75.000.000	40%	50.000.000	50%	30.000.000	APBD	DPMPTSP

Sub-Dimensi	Strategi	Program /Inovasi (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	dan Akses Pendanaan.	*Smartboard*		secara daring													
Wajah Kota																	

Tabel 5.4 Peta Jalan *Smart Branding* Jangka Panjang (2030-2034)

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Ekosistem Pariwisata	**B.1.1.1.** Pengembangan "Ekonomi Kreatif & Ekowisata Berbasis Geoheritage" Terintegrasi dengan	Program Pemasaran Pariwisata: 1.Kampanye digital “Sambanggo Friendly Kulon Progo”, Paket Wisata Terpadu	Kunjungan wisatawan mancanegara	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan daring	**B.1.1.1.P.1.** All-in-One Tourism App Kulon Progo	Fokus pada digitalisasi praktis (aplikasi, reservasi, QRIS).: 50% destinasi wisata bisa dipesan online	-	Fokus pada digitalisasi praktis (aplikasi, reservasi, QRIS).: 60% destinasi wisata bisa dipesan online	-	Fokus pada digitalisasi praktis (aplikasi, reservasi, QRIS).: 70% destinasi wisata bisa dipesan online	-	Fokus pada digitalisasi praktis (aplikasi, reservasi, QRIS).: 85% destinasi wisata bisa dipesan online	-	Fokus pada digitalisasi praktis (aplikasi, reservasi, QRIS).: 100% destinasi wisata bisa dipesan online	-	APBD (Dana Keistimewaan dan PAD), CSR	Dinas Pariwisata Kolaborasi dengan: Dinas Kominfo, BKAD dan Bapperida

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	Bandara YIA.																
	B.1.1.2. Penguatan Brand Budaya Lokal melalui Digitalisasi dan Event Tahunan yang Konsisten.	Festival Budaya Tahunan, Paket wisata terpadu (alam, budaya, kuliner)	Persentase destinasi berbasis digital	17.1 Jumlah pemesanan daring fasilitas budaya/100.000 penduduk	**B.1.1.2.P.2.** Kajian Warisan Budaya Tak Benda (Festival budaya & kuliner rutin bertaraf nasional)	Branding tetap "Sambanggo Friendly Kulon Progo" →ramah, budaya, kuliner, alam: 10 festival		Branding tetap "Sambanggo Friendly Kulon Progo" →ramah, budaya, kuliner, alam: 10 festival		Branding tetap "Sambanggo Friendly Kulon Progo" →ramah, budaya, kuliner, alam: 10 festival		Branding tetap "Sambanggo Friendly Kulon Progo" →ramah, budaya, kuliner, alam: 10 festival		Branding tetap "Sambanggo Friendly Kulon Progo" →ramah, budaya, kuliner, alam: 10 festival		APBD (Dana Keistimewaan dan PAD), CSR	Dinas Pariwisata Kolaborasi dengan: Dinas Kominfo, BKAD dan Bapperida
	B.1.1.2. Penguatan Brand Budaya Lokal melalui Digitalisasi dan Event Tahunan yang		Persentase Warisan Budaya yang Sudah ditetapkan: Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa,	17b.2 Persentase catatan budaya kota yang telah didigitalkan	**B.1.1.2.P.6**. Pembanguan Tetenger Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo	Tetenger Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo	300.000.000										Dana Keistimewaan	Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	Konsisten.		sastra, dan permuseuman														
	B.1.1.2. Penguatan Brand Budaya Lokal melalui Digitalisasi dan Event Tahunan yang Konsisten		Warisan Budaya yang sudah ditetapkan;		**B.1.1.2.P.3.** Naskah Rekomendasi Cagar Budaya	20 (dua puluh) Naskah Rekomendasi	80.000.000	10 (sepuluh) Naskah Rekomendasi	80.000.000	10 (sepuluh) Naskah Rekomendasi	80.000.000	10 (sepuluh) Naskah Rekomendasi	80.000.000	10 (sepuluh) Naskah Rekomendasi	80.000.000	Dana Keistimewaan	Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*
	B.1.1.2. Penguatan Brand Budaya Lokal melalui Digitalisasi dan Event Tahunan yang Konsist		Jumlah Kelurahan/ Kalurahan Budaya dan Rintisan Kelurahan/Kaluraha n Budaya Kategori Berkembang		**B.1.1.2.P.4.** Kalurahan/Desa Budaya	1 (satu) Desa Budaya	20.000.000	1 (satu) Desa Budaya	20.000.000	1 (satu) Desa Budaya	20.000.000	1 (satu) Desa Budaya	20.000.000	1 (satu) Desa Budaya	20.000.000	Dana Keistimewaan	Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	en																
	B.1.1.2. Penguatan Brand Budaya Lokal melalui Digitalisasi dan Event Tahunan yang Konsisten	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik di Taman Budaya Kulon Progo 1.1 Jumlah penonton pertunjukan seni di Taman Budaya	7.8 Persentase bangunan umum yang membutuhkan renovasi/ perbaikan	**B.1.1.2.P.5.** Pengembangan Talenta Seni dan Budaya	75.300 orang/pengunjung	850.000.000	76.300 orang/pengunjung	900.000.000	77.300 orang/pengunjung	950.000.000	78.300 orang/pengunjung	1M	80.000 orang/pengunjung	1M	DAK Non Fisik	Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*
Daya Saing Bisnis	**B.2.1.2.** Penguatan Ekosistem Kewirausahaan dan UMKM Melalui Literasi Digital dan Akses	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal / *Investment Smartboard*		**B.2.1.2.P.1.** *Invesment Smartboard (*Penyediaan informasi dan pemberian kemudahan	10% : 30 orang yang mengakses layanan *Investment Smartboard*	150.000.000	20%	150.000.000	30%	100.000.000	40%	100.000.000	50%	75.000.000	APBD	DPMPTSP

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	Pendanaan.				investasi)												
Wajah Kota																	

5.3 PETA JALAN *SMART ECONOMY*

Pembangunan dimensi *Smart Economy* dalam kerangka Masterplan *Smart City* Kabupaten Kulon Progo berfokus pada strategi untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang kompetitif, inovatif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah berkomitmen penuh untuk mendorong transformasi digital sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Inisiatif strategis seperti program "*Bela Beli Kulon Progo*" dan pengembangan platform digital **Belabeliku.com** telah menjadi landasan awal yang kuat dalam mendigitalkan pemasaran produk lokal, membuktikan keseriusan pemerintah dalam memberdayakan UMKM dan memperluas jangkauan pasar mereka. Peta jalan ini akan menguraikan langkah-langkah lebih lanjut untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, mengatasi tantangan digitalisasi yang ada, dan memastikan bahwa teknologi dapat menjadi katalisator nyata untuk meningkatkan pendapatan dan daya saing industri lokal.

Tabel 5.3 Peta Jalan *Smart Economy* Jangka Pendek - Menengah (2025 – 2029)

Sub-Dimensi	Strategi	Program Inovasi (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Industri Berdaya Saing	**Ec.1.1.3.** Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM melalui	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha	1. Nilai Usaha Industri 2. Jumlah UMKM MIkr	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	**Ec.1.1.3.P.1.** *Pay-On Pro*	2.732.693.188.016 18.141	876.634.100 1.984.173.400	2.735.445.369.345 20.653	913.014.415 2.066.516.596	2.738.200.259.828 23.267	950.904.513 257.406.334	2.740.957.861.567 25.983	990.367.051 268.088.697	2.743.718.176.659 28.801	1.031.467.283 279.214.378	APBD Kabupaten DAIS	Dinas Perindustrian Koperasi UKM kolaborasi dengan Kominfo

Sub-Dimensi	Strategi	Program Inovasi (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	Kolaborasi Sektor Swasta dan Teknologi.	Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	o yang naik Subkelas														dan BPD DIY
	Ec.1.1.2. Pengembangan Klaster Industri Kreatif dan Budaya Terintegrasi.	1. Identifikasi kebijakan pemerintah	Mengidentifikasi Peluang Bisnis Sejalan dengan Kebijakan Pemerintah	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	**Ec.1.1.2.P.1.** Produk Kredit-Ku			V	100	V	100	V	100	V	100	Bank Kulon Progo	Bank Kulon Progo
	Ec.1.1.1. Hilirisasi Pertanian dan Perikanan Berbasis Digital.		Jumlah lokasi Ngulir Budi	20.3. Persentase luas tanah kota yang dicakup oleh sistem pemetaan pemasok makanan daring	**Ec.1.1.1.P.1.** NGULIR BUDI adalah singkatan dari Ngupoyo Hulu Hilir Budidoyo Iwak	1	350.000.000	0	0	1	370.000.000	0	0	1	390.000.000	DAIS	Dinas kelautan dan Perikanan
	Ec.1.1.1.	Program Pengelola	Jumlah pakan	20.3. Persenta	**Ec.1.1.1.P.2.**	10 ton	250.000.000	12 ton	5.000.000	15 ton	260.000.000	20ton	5.000.000	23ton	270.000.000	APBD	Dinas kelautan

Sub-Dimensi	Strategi	Program Inovasi (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	Hilirisasi Pertanian dan Perikanan Berbasis Digital.	an Perikanan Budidaya	mandiri yang diproduksi (ton)	se luas tanah kota yang dicakup oleh sistem pemetaan pemasok makanan daring	PAMAN MOBILE singkatan dari Pakan Mandiri secara Mobile (berupa mesin cetak pakan mandiri sistem mobile/ bergerak)												dan Perikanan
	Ec.1.1.1. Hilirisasi Pertanian dan Perikanan Berbasis Digital.	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	1. Terlaksananya Uji Keamanan Pangan Asal Ikan (sampel) 2. Persentase pangan asal ikan	SNI : 20.3. Persentase luas tanah kota yang dicakup oleh sistem pemetaan pemasok makanan daring	**Ec.1.1.1.P.3.** SETITI akronim dari Sistem Pengawasan Ikan Anti Formalin.	1. 165 2. 94%	2.000.000	1. 165 2. 94%	1.000.000	1. 165 2. 94%	10.000.000	1. 165 2. 94%	10.000.000			APBD	Dinas kelautan dan Perikanan

Sub-Dimensi	Strategi	Program Inovasi (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
			bebas formalin (%)														
	Ec.1.1.2. Pengembangan Klaster Industri Kreatif dan Budaya Terintegrasi.	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	1. Pelaku usaha yang dilakukan monitoring dan evaluasi terpadu (orang) 2. Peningkatan pelaku usaha pengolah dan pemasar ikan yang melakukan usaha sesuai standar **(%)**	SNI: 5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	**Ec.1.1.2.P.2. SUMINAR** akronim dari Sistem Monitoring Pelaku Usaha Pengolahan Pemasaran			1. 100 2. 65	2.200.000							APBD	Dinas kelautan dan Perikanan
	Ec.1.1.3.	Program pengolah	1. Jumlah	SNI: 20.3.	**Ec.1.1.3.P.2.**	1. 180 2. 31,9	16.200.000	1. 180 2. 32,4	16.300.000	1. 180 2. 32,8	16.400.000	1. 180 2. 33,4	16.600.000	1. 180 2. 33,9	17.000.000	APBD, DAIS	Dinas kelautan

Sub-Dimensi	Strategi	Program Inovasi (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM melalui Kolaborasi Sektor Swasta dan Teknologi.	an dan pemasaran hasil perikanan	peserta GEMATI (orang) 2. Peningkatan Angka Konsumsi Ikan (AKI) dalam kg/orang/tahun	Persentase luas tanah kota yang dicakup oleh sistem pemetaan pemasok makanan daring	**GEMATI** akronim dari Gerakan Makan Ikan Atasi Stunting												dan Perikanan
	Ec.1.1.1. Hilirisasi Pertanian dan Perikanan Berbasis Digital.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap laut (ton)	SNI: 5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	**Ec.1.1.1.P.4.** TPI Hebat (higienis, ekonomis, bersih, aman, tertib)	861	1 M	862	3,5M	867	1 M	868	1 M	869	1 M	APBD, DAIS, APBN	Dinas kelautan dan Perikanan
	Ec.1.1.1. Hilirisasi Pertanian dan Perikanan Berbasi	Peningkatan kualitas Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan Peningkatan kualitas Sumber Daya Genetik	20.1. Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk	Ec.1.1.1.P.5. *Smart Green house*	1 dokumen	1.000.000.000	1 dokumen	4.500.000.000	1 dokumen	4.500.000.000	1 dokumen	4.500.000.000	1 dokumen	6.300.000.000	APBD Kabupaten, UGM, Swasta	Dinas Pertanian dan Pangan

Sub-Dimensi	Strategi	Program Inovasi (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	s Digital.	Kewenangan Kabupaten/Kota	(SDG) Hewan/Tanaman	inisiatif pertanian perkotaan													
Kesejahteraan Masyarakat	**Ec.2.1.1.** Program Peningkatan Keterampilan Vokasional dan Kewirausahaan Inklusif.		Membangun kaluraha n ramah disabilitas	5.4. Persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian dan pengembangan	**Ec.2.1.1.P.1.** Kalurahan Ramah Disabilitas (bekerjasama dengan pihak ketiga seperti SIGAP untuk membangun kalurahan ramah disabilitas)	1. membuat SK Tim 2. Membuat peraturan yang mendukung program membangun kalurahan ramah disabilitas		- melakukan sosialisasi dan penunjukkan kalurahan ramah disabilitas - Melakukan pembinaan dan menambah jumlah KDK		- melakukan sosialisasi dan penunjukkan kalurahan ramah disabilitas - Melakukan pembinaan dan menambah jumlah KDK - Memudahkan aksesibilitas anggota KDK ke BLK dan		- melakukan sosialisasi dan penunjukkan kalurahan ramah disabilitas - Melakukan pembinaan dan menambah jumlah KDK - Memudahkan aksesibilitas anggota KDK ke BLK dan		- melakukan sosialisasi dan penunjukkan kalurahan ramah disabilitas - Melakukan pembinaan dan menambah jumlah KDK - Memudahkan aksesibilitas anggota KDK ke BLK dan			Kesra, Disnakertrans, PMDKal, Bank Kulon Progo, BPD, Kaluraha n, Kapanewon, Pihak Ketiga

Sub-Dimensi	Strategi	Program Inovasi (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
										permodalan		permodalan		permodalan			
Transaksi Keuangan	**Ec.3.1.1.** Edukasi dan Literasi Keuangan Digital yang Inklusif.	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah peserta seminar yang hadir.	9.2. Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	**Ec.3.1.1.P.1.** Literasi Psar Modal (Pembentukan galeri investasi paralel antara pemda dengan Kampus UNY Wates untuk literasi pasar modal dan inkubator UMKM.)	100 orang 200 orang	10.000.000									APBD	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	Ec.3.1.2. Integrasi Sistem Pemba	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Jumlah pedagang yang melakukan pembay	9.2 Persentase pembayaran ke kota	**Ec.3.1.2.P.1.** Gitarku	-	-	-	-	500 pedagang	250.000.000	1500 pedagang	50.000.000	5000 pedagang	80.000.000	APBD	Dinas Perdagangan, Diskominfo, APPSI

Sub-Dimensi	Strategi	Program Inovasi (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	yaran Digital dalam Layanan Publik dan Transaksi Lokal.		aran retribusi secara digital	yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik													
	Ec.3.1.2. Integrasi Sistem Pembayaran Digital dalam Layanan Publik dan Transaksi Lokal.	1. Pengembangan sistem informasi digital kepada nasabah Bank Kulon Progo 2. Peningkatan SDM TI	1. Meningkatnya pelayanan digitalisasi kepada nasabah Bank Kulon Progo 2. Peningkatan kompetensi SDM TI	9.2. Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	**Ec.3.1.2.P.2.** BPR-Ku Mobile			V	500.000.000	V	2500.000.000	V	250.000.000	V	2500.000.000	Bank Kulon progo	Bank Kulon Progo
	Ec.3.1.3. Pengembangan	Perbaikan dan Pemeliharaan Program	Meningkatkan pelayanan kepada Kaluraha	9.2. Persentase pembayaran ke	**Ec.3.1.3.P.1.** Smart DesaKu			V	100.000.000	V	100.000.000	V	100.000.000	V	100.000.000	Bank Kulon progo	Bank Kulon Progo

Sub-Dimensi	Strategi	Program Inovasi (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	Skema Pendanaan Alternatif untuk Ekonomi Lokal.		n terkait transaksi non tunai dengan cara pemindahbukuan yang dilakukan oleh Bank	kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik													

Tabel 5.6 Peta Jalan *Smart Economy* Jangka Panjang (2030-2034)

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Industri Berdaya Saing	**Ec.1.1.1**. Hilirisasi Pertanian dan Perikanan Berbasis Digital.		Peningkatan produksi perikanan tangkap laut	SNI: 5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	**Ec.1.1.1.P.4.** TPI Hebat (higienis, ekonomis, bersih, aman, tertib)	870	20 M	880	5 M	890	1 M	900	1 M	910	2 M	APBD, DAIS, APBN	Dinas kelautan dan Perikanan
Kesejahteraan Masyarakat																	

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Transaksi Keuangan	**Ec.3.1.2.** Integrasi Sistem Pembayaran Digital dalam Layanan Publik dan Transaksi Lokal.	1. Pengembangan sistem informasi digital kepada nasabah Bank Kulon Progo 2. Peningkatan SDM TI	1.Meningkatnya pelayanan digitalisasi kepada nasabah Bank Kulon Progo 2.Peningkatan kompetensi SDM TI	9.2. Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	**Ec.3.1.2.P.2.** BPR-Ku Mobile	V	250.000.000									Bank Kulon Progo	Bank Kulon Progo
	Ec.3.1.3. Pengembangan Skema Pendanaan Alternatif untuk Ekonomi Lokal.	Perbaikan dan Pemeliharaan Program	Meningkatkan pelayanan kepada Kaluraharan terkait transaksi non tunai dengan cara pemindahbukuan yang dilakukan oleh Bank	9.2. Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	**Ec.3.1.3.P.1.** Smart DesaKu	V	100.000.000									Bank Kulon Progo	Bank Kulon Progo

5.4 PETA JALAN *SMART LIVING*

Pembangunan dimensi *Smart Living* dalam kerangka *Masterplan Smart City* Kabupaten Kulon Progo berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui harmonisasi perencanaan ruang, aksesibilitas kesehatan, dan mobilitas yang efisien. Lebih dari sekadar penyediaan infrastruktur dasar, *Smart Living* adalah tentang menciptakan sebuah ekosistem yang aman, nyaman, dan berkelanjutan, di mana teknologi menjadi fasilitator untuk mempermudah kehidupan sehari-hari dan meningkatkan kebahagiaan warga.

Tabel 5.4 Peta Jalan *Smart Living* Jangka Pendek - Menengah (2025 – 2029)

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Harmonisasi Tata Ruang	**Lv.1.1.1.** Pengembangan Simtaru Ku 2.0 sebagai Platform Kolaboratif Tata Ruang Digital.	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penataan Kawasan Berbasis Geospasial	12.1. Persentase rumah tangga dengan pengukur energi pintar	**Lv.1.1.1.P.1.** Sistem Informasi Tata Ruang Kulon Progo (Simtaru Ku)	Pemeliharaan dan pengembangan berupa Penambahan filtur layanan permohonan KRK (keterangan rencana kabupaten) sebagai salah satu syarat PBG	36.000.000	Penambahan filtur layanan permohonan KRK (keterangan rencana kabupaten) sebagai salah satu syarat PBG	40.000.000	Pemeliharaan dan pengembangan berupa Penambahan filtur layanan permohonan KRK (keterangan rencana kabupaten) sebagai salah satu syarat PBG, entry peta RDTR	40.000.000	Pemeliharaan dan pengembangan berupa Penambahan filtur layanan permohonan KRK (keterangan rencana kabupaten) sebagai salah satu syarat PBG, entry peta RDTR	40.000.000	Pemeliharaan dan pengembangan berupa Penambahan filtur layanan permohonan KRK (keterangan rencana kabupaten) sebagai salah satu syarat PBG, entry peta RDTR	40.000.000	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Komunikasi dan Informatika,

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
										dan Peta Tematik		dan Peta Tematik		dan Peta Tematik			
Sarana / Prasarana Kesehatan	**Lv.2.1.1**. Pembangunan Ekosistem Kesehatan Digital Terpadu.	Membangun dan Meningkatkan Fasilitas Layanan Kesehatan Primer dan Sekunder	Pelayanan kesehatan ibu hamil	11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	**Lv.2.1.1.P.1.** Pembangunan Ekosistem Kesehatan Digital Terpadu Bumilku	83,33	54.464.222.676	91,84	57.963.229.944	100	61.813.732.938	100	67.264.103.232	100	72.956.862.705	APBD, BOK	DINAS KESEHATAN

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	Lv.2.1.1. Pembangunan Ekosistem Kesehatan Digital Terpadu.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yg dilakukan pendampingan	11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	**Lv.2.1.1.P.2.** Simoku Sistem Informasi Manajemen Obat Kabupaten Kulon Progo) Pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai	22,22	518.464.100	25,56	570.310.510	27,78	627.341.561	30,00	690.075.717	33,33	759.083.288	APBD, BOK	DINAS KESEHATAN
Sarana / Prasarana Kesehatan Sarana / Prasarana Kesehatan	Lv.2.1.3. Jaringan Layanan Kesehatan Bergerak Terjadwal.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penerapan teknologi yang dianjurkan	11.3. Persentase populasi kota yang memiliki akses ke sistem peringatan public langsung	**Lv.2.1.3.P.1.** Pengembangan Sistem Integrasi Gangguan Pelayanan (SITEG	30%	6.000.000	100%	50.000.000							PDAM	PDAM

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
				(*real-time*) untuk saran kualitas udara dan air	AP) berbasis website dan android untuk publik												
	Lv.2.1.3. Jaringan Layanan Kesehatan Bergerak Terjadwal.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penerapan teknologi yang dianjurkan	11.3. Persentase populasi kota yang memiliki akses ke sistem peringatan public langsung (*real-time*) untuk saran kualitas udara dan air	**Lv.2.1.3.P.2.** Pengembangan Sistem Informasi Gangguan Pelayanan PDAM Kulon Progo (SIGAPKU) berbasis website dan android untuk publik			20%	30.000.000							PDAM	PDAM
	Lv.2.1.1. Pembangunan Ekosistem	Program Pemenuhan	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat	Persentase populasi kota yang masuk	**Lv.2.1.1.P.3**. Ranting Kuat	50 Anak,	250.000.000	50 Anak	250.000.000	50 Anak	250.000.000	50 Anak	250.000.000	50 Anak	250.000.000	BLUD	RSUD WATES

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	Kesehatan Digital Terpadu.	Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Daerah berkinerja sangat tinggi	dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses penyedia layanan kesehatan	(Rawat Anak Stunting Kulon Progo agar Sehat)												

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	Lv.2.1.3. Jaringan Layanan Kesehatan Bergerak Terjadwal.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	a. Persentase Posyandu yang menggunakan sistem digital pencatatan data b. Jumlah kader Posyandu yang mengikuti pelatihan teknologi dan pela yanan	11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	**Lv.2.1.3.P.3**. Sapayandu (Aplikasi digital Posyandu sederhana. Kampanye edukasi berbasis komunitas.)	✓ Persentase Posyandu yang menggunakan sistem digital pencatatan data 80% ✓ Jumlah kader Posyandu yang mengikuti pelatihan teknologi dan pelayanan 90% kader ✓ Penurunan angka stunting di wilayah program 10% ✓ Persentase balita yang	**36.000.000**	✓ Persentase Posyandu yang menggunakan sistem digital pencatatan data 90% ✓ Jumlah kader Posyandu yang mengikuti pelatihan teknologi dan pelayanan 95% kader ✓ Penurunan angka stunting di wilayah program 15% ✓ Persentase balita yang	**38.500.000**	✓ Persentase Posyandu yang menggunakan sistem digital pencatatan data 95% ✓ Jumlah kader Posyandu yang mengikuti pelatihan teknologi dan pelayanan 100% kader ✓ Penurunan angka stunting di wilayah program 20%	**40.500.000**	✓ Persentase Posyandu yang menggunakan sistem digital pencatatan data 100% ✓ Jumlah kader Posyandu yang mengikuti pelatihan teknologi dan pelayanan 100% kader ✓ Penurunan angka stunting di wilayah program 30%	**43.000.000**	✓ Persentase Posyandu yang menggunakan sistem digital pencatatan data 100% ✓ Jumlah kader Posyandu yang mengikuti pelatihan teknologi dan pelayanan 100% kader ✓ Penurunan angka stunting di wilayah program 30%	**43.000.000**	APBD	Kapanewon Kalibawang

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
			c. Penurunan angka stunting di wilayah program d. Jumlah kegiatan edukasi dan kampanye kesehatan di tingkat padukuhan e. Tingkat kepuasan masyara			menerima PMT sesuai standar gizi 100% ✓ Jumlah kegiatan edukasi dan kampanye kesehatan di tingkat padukuhan 12 kegiatan ✓ Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Posyandu 85%		menerima PMT sesuai standar gizi 100% ✓ Jumlah kegiatan edukasi dan kampanye kesehatan di tingkat padukuhan 18 kegiatan ✓ Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Posyandu 90%		✓ Persentase balita yang menerima PMT sesuai standar gizi 100% ✓ Jumlah kegiatan edukasi dan kampanye kesehatan di tingkat padukuhan 18 kegiatan Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Posyandu 95%		✓ Persentase balita yang menerima PMT sesuai standar gizi 100% ✓ Jumlah kegiatan edukasi dan kampanye kesehatan di tingkat padukuhan 20 kegiatan Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Posyandu 100%		✓ Persentase balita yang menerima PMT sesuai standar gizi 100% ✓ Jumlah kegiatan edukasi dan kampanye kesehatan di tingkat padukuhan 20 kegiatan Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Posyandu 100%			

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
			kat terhadap layanan posyandu														

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Prasarana Transportasi	**Lv.3.1.1.** Pengembangan Transportasi Publik Terpadu Berbasis Digital	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah siswa dan Sekolah di Kulon Progo yang terlayani bus sekolah dan penurunan angka kecelakaan dikalangan pelajar.	19.2. Jumlah penggunaa transportasi ekonomi berbagi per 100.000 penduduk	**Lv.3.1.1.**P.1. Layanan Bus Inklusif (Layanan bus sekolah untuk antar jemput siswa dan layanan bus sekolah inklusif untuk antar jemput siswa berkebutuhan khusus secara gratis di Kulon Progo)	Pelayanan antar jemput siswa sekolah (jumlah siswa 40 siswa dari 13 sekolah) dan siswa SLB (1 SLB dengan jumlah siswa 20 orang) diwilayah Wates-Pengasih-Panjatan	377.564.950	Pelayanan antar jemput siswa sekolah (jumlah siswa 40 siswa dari 13 sekolah) dan siswa SLB (1 SLB dengan jumlah siswa 20 orang) diwilayah Wates-Pengasih-Panjatan	476.427.300 -	Pelayan an antar jemput siswa sekolah (jumlah siswa 40 siswa dari 13 sekolah) dan siswa SLB (1 SLB dengan jumlah siswa 20 orang) diwilaya h Wates-Pengasi h-Panjatan	476.427.300	Pelayanan antar jemput siswa sekolah (jumlah siswa 40 siswa dari 13 sekolah) dan siswa SLB (1 SLB dengan jumlah siswa 20 orang) diwilayah Wates-Pengasih-Panjatan	476.427.300	Pelayan an antar jemput siswa sekolah (jumlah siswa 40 siswa dari 13 sekolah) dan siswa SLB (1 SLB dengan jumlah siswa 20 orang) diwilaya h Wates-Pengasi h-Panjatan	476.427.300	APBD	Dinas Perhubungan, SD, SMP, SLTA, SLB

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	Lv.3.1.1. Pengembangan Transportasi Publik Terpadu Berbasis Digital.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah siswa dan Sekolah di Kulon Progo yang terlayani dan Jumlah angkutan pedesaan yang beroperasi.	19.2. Jumlah penggunaa transportasi ekonomi berbagi per 100.000 penduduk	**Lv.3.1.1.P.2.** Angkutan umum siswa					Pelayanan antar jemput siswa sekolah di Kulon Progo wilayah utara (sebanyak 17 sekolah) dengan bekerjasama dengan angkutan pedesaan (sebanyak 6 angkudes)	260.262.600	Pelayanan antar jemput siswa sekolah di Kulon Progo wilayah utara (sebanyak 17 sekolah) dengan bekerjasama dengan angkutan pedesaan (sebanyak 6 angkudes)	290.000.000	Pelayanan antar jemput siswa sekolah di Kulon Progo wilayah utara (sebanyak 17 sekolah) dengan bekerjasama dengan angkutan pedesaan (sebanyak 6 angkudes)	290.000.000	DAIS	Dinas Perhubungan
	Lv.3.1.1. Pengembangan Transportasi Publik	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkut	Jumlah masyarakat yang terlayani dan jumlah angkuta	19.5. Persentase jalur transportasi umum yang dilengkap	**Lv.3.1.1.P.3.** Angkutan Perintis Penyediaan					Tersedianya jalur angkutan perintis dan layanan angkutan melalui	(menyesuaikan anggaran yang disetujui	Tersedianya jalur angkutan perintis dan layanan angkutan melalui	(menyesuaikan anggaran yang disetujui	Tersedianya jalur angkutan perintis dan layanan angkutan melalui	(menyesuaikan anggaran yang disetujui	APBN	Dinas Perhubungan

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	Terpadu Berbasis Digital	an Jalan (LLAJ)	n pedesaan yang beroperasi melalui jalur angkutan perintis	i dengan sistem langsung (*real-time*) yang dapat diakses publik	jalur angkutan perintis di wilayah Kulon Progo (Samigaluh-Kalibawang-Nanggulan-Girimulyo-Pengasih-Wates)					jalur perintis	Kemenhub)	jalur perintis	Kemenhub)	jalur perintis	Kemenhub)		
	Lv.3.1.2. Optimalisasi Manajemen Lalu Lintas Cerdas dan Pengendalian Lingkungan.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Tersedianya sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi (ATCS)	19.5. Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (*real-time*) yang dapat	**Lv.3.1.2.P.1.** Pengembangan sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informa	- .		- .		- .		1.Tersediany a gedung/ruang ATCS Kabupaten Kulon Progo	2.000.000.000	-	-	APBD	DinasPerhubungan, Kementrian Perhubungan

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
				diakses publik	si (ATCS)												
	Lv.3.1.2. Optimalisasi Manajemen Lalu Lintas Cerdas dan Pengendalian Lingkungan.	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	1. Jumlah APJ Pintar yang tersedia	19.9. Persentase lampu lalu lintas yang cerdas	**Lv.3.1.2.P.2.** Peningkatan kualitas APJ Pintar berbasis digital	Pembangunan APJ Pintar bernuansa budaya sebanyak 152 unit	3.018.106.800	Pembangunan APJ Pintar sebanyak 180 unit	3.569.595.250	Pembangunan APJ Pintar sebanyak 200 unit	4.800.000.000	Pembangunan APJ Pintar sebanyak 200 unit	5.000.000.000	Pembangunan APJ Pintar sebanyak 200 unit	5.000.000.000	APBD/ DAIS DIY	Dinas Perhubungan, Provinsi
	Lv.3.1.3. Pembangunan Infrastruktur Mobilitas Aktif dan Inklusif.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2. Tingkat kualitas layanan Penguji an Kendaraan Bermotor	19.3. Persentase kendaraan yang terdaftar di kota yang merupakan kendaraan rendah emisi	**Lv.3.1.3.P.1.** Peningkatan layanan pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis Digital	Upgrade SIM PKB yang terintegrasi aplikasi Kemenhub	85.000.000,	Peningkatan layanan pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis Digital	-	Pengembangan layanan pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis Digital	-	Pengembangan layanan pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis Digital	100.000.000	Pengembangan layanan pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis Digital	-	APBD	Dinas Perhubungan, Kementrian Perhubungan

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	Lv.3.1.2. Optimalisasi Manajemen Lalu Lintas Cerdas dan Pengendalian Lingkungan.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3. Peningkatan layanan informasi tilang angkutan umum/barang berbasis digital	19.5. Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (*real-time*) yang dapat diakses publik	**Lv.3.1.2.P.3.** Layanan informasi tilang angkutan umum/barang berbasis digital	Peningkatan layanan informasi tilang angkutan umum/barang berbasis digital	-	Peningkatan kualitas sarana prasarana informasi tilang angkutan umum/barang berbasis digital	-	Peningkatan kualitas sarana prasarana informasi tilang angkutan umum/barang berbasis digital	12.000.000	Peningkatan kualitas sarana prasarana informasi tilang angkutan umum/barang berbasis digital	-	Peningkatan kualitas sarana prasarana informasi tilang angkutan umum/barang berbasis digital	-	APBD	Dinas Perhubungan
	Lv.3.1.2. Optimalisasi Manajemen Lalu Lintas Cerdas dan Pengendalian Lingkungan.	Program Penyelenggaraan Jalan	5. Tersedianya sarana pendukung pedestrian untuk menyeberangi rel kereta api dengan aman dan nyaman	-	**Lv.3.1.2.P.4.** Pembangunan JPO (sarana pendukung pedestrian untuk menyeberangi rel kereta api dengan aman	100	6.500.000.000										Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
					dan nyaman)												

Tabel 5.8 Peta Jalan *Smart Living* Jangka Panjang (2030-2034)

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Harmonisasi Tata Ruang	**Lv.1.1.1.** Pengembangan SimtaruKu 2.0 sebagai Platform Kolaboratif Tata Ruang Digital.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penataan Kawasan Berbasis Geospasial	12.1. Persentase rumah tangga dengan pengukur energi pintar	**Lv.1.1.1. P.1.** Sistem Informasi Tata Ruang Kulon Progo (SimtaruKu)	Pemeliharaan dan pengembangan berupa Penambahan filtur layanan permohonan KRK (keterangan rencana	120.000.000	Penambahan filtur layanan permohonan KRK (keterangan rencana kabupaten) sebagai salah satu	120.000.000	Pemeliharaan dan pengembangan berupa Penambahan filtur layanan permohonan KRK (keterangan rencana	120.000.000	Pemeliharaan dan pengembangan berupa penyesuaian dengan RTRW	100.000.000	Pemeliharaan dan pengembangan berupa penyesuaian dengan RTRW	100.000.000	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Komunikasi dan Informatika,

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
						kabupaten) sebagai salah satu syarat PBG		syarat PBG		kabupaten) sebagai salah satu syarat PBG, entry peta RDTR dan Peta Tematik							
Sarana / Prasarana Kesehatan	**Lv.2.1.1.** Pembangunan Ekosistem Kesehatan Digital Terpadu.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan kesehatan usia balita	11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	**Lv.2.1.1. P.3.** Ranting Kuat (Rawat Anak Stunting Kulon Progo agar Sehat)		250.000.000		250.000.000	50 Anak	250.000.000	50 Anak	250.000.000	50 Anak	250.000.000	BLUD	RSUD WATES

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	Lv.2.1.1. Pembangunan Ekosistem Kesehatan Digital Terpadu.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasyankes yg memiliki sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar	11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	**Lv.2.1.1. P.1.** Pembangunan Ekosistem Kesehatan Digital Terpadu. Bumiluku a. Memberikan pantauan *real-time* layanan ibu hamil mulai dari awal kehamilan, b. Tersedianya data ibu hamil dengan faktor Risikonya *real-time*	100	80.252.548.976	100	88.277.803.873	100	97.105.584.260	100	106.816.142.686	100	117.497.756.955	APBD, BOK	DINAS KESEHATAN
	Lv.2.1.1. Pembangunan Ekosistem Kesehata	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko	11.1. Persentase populasi kota yang	**Lv.2.1.1. P.2.** Simoku Sistem Informasi	36,67	834.991.617	36,67	918.490.778	36,67	1.010.339.856	36,67	1.111.373.842	36,67	1.222.511.226	APBD, BOK	DINAS KESEHATAN

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	n Digital Terpadu.	Makanan Minuman	Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yg dilakukan pendampingan	masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	Manajemen Obat Kabupaten Kulon Progo) Pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai												
	Lv.2.1.3. Jaringan Layanan Kesehatan Bergerak Terjadwal.	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah gedung tersedia	-	**Lv.2.1.3. P.4.** Pelayanan Trauma Center	1 Unit	45.755.200.000	1 Unit	45.755.200.000	1 Unit	45.755.200.000	1 Unit	48.381.400.000	1 Unit	52.009.900.000	BLUD	RSUDNAS
Sarana/ Prasarana Transportasi	**Lv.3.1.1.** Pengembangan Transportasi Publik Terpadu Berbasis Digital..	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Jumlah siswa dan Sekolah di Kulon Progo yang terlayani bus	19.2. Jumlah penggunaan transportasi ekonomi berbagi per 100.000	**Lv.3.1.1. P.1. Layanan** Bus Inklusif (Layanan bus sekolah untuk	Pelayanan antar jemput siswa sekolah dan siswa SLB diwilayah	510.000.000	Pelayanan antar jemput siswa sekolah dan siswa SLB diwilayah	510.000.000	Pelayanan antar jemput siswa sekolah dan siswa SLB diwilayah	520.000.000	Pelayanan antar jemput siswa sekolah dan siswa SLB diwilayah	520.000.000	Pelayanan antar jemput siswa sekolah dan siswa SLB diwilayah	520.000.000	APBD	Dinas Perhubungan, Sekolah, SLB

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
			sekolah dan penurunan angka kecelakaan dikalangan pelajar.	penduduk	antar jemput siswa dan layanan bus sekolah inklusif untuk antar jemput siswa berkebutuhan khusus secara gratis di Kulon Progo)	Wates-Pengasih-Panjatan		Wates-Pengasih-Panjatan		Wates-Pengasih-Panjatan		Wates-Pengasih-Panjatan		Wates-Pengasih-Panjatan			
	Lv.3.1.1. Pengembangan Transportasi Publik Terpadu Berbasis Digital.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2. Jumlah siswa dan Sekolah di Kulon Progo yang terlayani dan Jumlah angkutan pedesaan yang		**Lv.3.1.1. P.2.** Angkutan umum siswa	Pelayanan antar jemput siswa sekolah di Kulon Progo wilayah utara dengan bekerjasama dengan angkutan pedesaan.	300.000.000	Pelayanan antar jemput siswa sekolah di Kulon Progo wilayah utara dengan bekerjasama dengan angkutan pedesaan.	310.000000	Pelayanan antar jemput siswa sekolah di Kulon Progo wilayah utara dengan bekerjasama dengan angkutan pedesaan.	320.000.000	Pelayanan antar jemput siswa sekolah di Kulon Progo wilayah utara dengan bekerjasama dengan angkutan pedesaan.	330.000.000	Pelayanan antar jemput siswa sekolah di Kulon Progo wilayah utara dengan bekerjasama dengan angkutan pedesaan.	340.000.000	DAIS	Dinas Perhubungan

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
			beroperasi.														
	Lv.3.1.1. Pengembangan Transportasi Publik Terpadu Berbasis Digital.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3. Jumlah masyarakat yang terlayani dan jumlah angkutan pedesaan yang beroperasi melalui jalur angkutan perintis		**Lv.3.1.1. P.3.** Angkutan Perintis	Tersedianya jalur angkutan perintis dan layanan angkutan melalui jalur perintis	menyesuaikan anggaran yang disetujui Kemenhub)	Tersedianya jalur angkutan perintis dan layanan angkutan melalui jalur perintis	-	Tersedianya jalur angkutan perintis dan layanan angkutan melalui jalur perintis	-	Tersedianya jalur angkutan perintis dan layanan angkutan melalui jalur perintis	-	Tersedianya jalur angkutan perintis dan layanan angkutan melalui jalur perintis	-	APBD/APBN	Dinas Perhubungan, Kementrian Perhubungan
	Lv.3.1.2. Optimalisasi Manajemen Lalu Lintas Cerdas dan Pengendalian Lingkungan.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Tersedianya sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi (ATCS)	19.5. Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (*real-time*) yang dapat	**Lv.3.1.2. P.1.** Pengembangan sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi (ATCS)	-	-	Penyediaan ATCS Wilayah Kulon Progo (tahap 1)	40.000.000.000	Penyediaan ATCS Wilayah Kulon Progo (tahap 2)	25.000.000.000	-	-	-	-	APBN	Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan DIY, Kementrian Perhubungan

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
				diakses publik													
	Lv.3.1.2. Optimalisasi Manajemen Lalu Lintas Cerdas dan Pengendalian Lingkungan.	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Jumlah APJ Pintar yang tersedia	19.9. Persentase lampu lalu lintas yang cerdas	**Lv.3.1.2. P.2.** Peningkatan kualitas APJ Pintar berbasis digital	Pembangunan APJ Pintar	5.000.000.000	Pembangunan APJ Pintar	5.000.000.000	Pembangunan APJ Pintar	5.000.000.000	Pembangunan APJ Pintar	5.000.000.000	Pembangunan APJ Pintar	5.000.000.000	APBD/ DAIS	Dinas Perhubungan
	Lv.3.1.3. Pembangunan Infrastruktur Mobilitas Aktif dan Inklusif.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Tingkat kualitas layanan Pengujian Kendaraan Bermotor	19.3. Persentase kendaraan yang terdaftar di kota yang merupakan kendaraan rendah emisi	**Lv.3.1.3. P.1.** Peningkatan layanan pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis Digital	Peningkatan layanan pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis Digital	-	Peningkatan layanan pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis Digital	-	Peningkatan layanan pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis Digital	-	Peningkatan layanan pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis Digital	150.000.000	Peningkatan layanan pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis Digital		APBD	Dinas Perhubungan, Kementrian Perhubungan
	Lv.3.1.2. Optimalisasi Manajemen Lalu Lintas	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan	2. Peningkatan layanan infor	19.5. Persentase jalur transportasi umum yang	**Lv.3.1.2. P.3.** Layanan informasi tilang angkutan	Peningkatan layanan informasi tilang angkuta	-	Peningkatan layanan informasi tilang angkuta	-	Peningkatan layanan informasi tilang angkuta	-	Peningkatan layanan informasi tilang angkuta	-	Peningkatan layanan informasi tilang angkuta	-	APBD	Dinas Perhubungaan

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	Cerdas dan Pengendalian Lingkungan.	Angkutan Jalan (LLAJ)	masi tilang angkutan umum/barang berbasis digital	dilengkapi dengan sistem langsung (*real-time*) yang dapat diakses publik	umum/barang berbasis digital	n umum/barang berbasis digital		n umum/barang berbasis digital		n umum/barang berbasis digital		n umum/barang berbasis digital		n umum/barang berbasis digital			

5.5 PETA JALAN *SMART SOCIETY*

Pembangunan dimensi *Smart Society* dalam kerangka *Masterplan Smart City* Kabupaten Kulon Progo adalah pilar esensial yang berfokus pada pembentukan masyarakat yang cerdas, inklusif, dan produktif. Ini mencakup peningkatan interaksi komunitas, pengembangan ekosistem pembelajaran yang adaptif, serta penguatan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga. Visi ini sejalan dengan komitmen Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki literasi digital dan adaptabilitas tinggi. Kulon Progo telah memiliki fondasi yang kuat untuk pilar ini. Peta jalan ini akan berfokus pada strategi yang dapat memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat, membangun budaya kolaborasi, dan memastikan setiap warga memiliki keterampilan digital yang diperlukan untuk beradaptasi dengan era modern.

Tabel 5.5 Peta Jalan *Smart Society* Jangka Pendek - Menengah (2025 – 2029)

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Interaksi Masyarakat yang Efisien																	
Ekosistem Belajar	**S.2.1.1.** Transformasi Digital Pendidikan Berkelanjutan dari Hulu ke Hilir.	Program Pengelolaan Pendidikan	1. Skor kemampuan literasi dan numerasi SD 2. Skor kemampuan literasi dan numerasi SMP	6.1. Persentase populasi kota dengan kecakapan profesional di lebih dari satu bahasa	**S.2.1.1.P.1.** *Moral Technology School* Pembelajaran Numerasi dengan metode Gasing (Gampang asyik menyenangkan)	1.66.72.78.1	487.600.000	1.69.42.79.4	492.000.000	1.72.12.80.7	544.750.000	1.74.82.82	571.900.000	1.77.52.83.3	594.000.000	APBD, BAZNAS	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	S.2.1.2. Gerakan Literasi Digital Inklusif dan	Program Pembinaan Perpustakaan	TGM (Tingkat Kegemaran Membaca	17.3 Jumlah buku perpustakaan umum	**S.2.1.2.P.1.** Mimpi Kurcaci	8 Kali	7.252.000	10 Kali	7.252.000	12 Kali	7.252.000	14 Kali	7.252.000	16 Kali	7.252.000	APBD	Disperpusip

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	Berkelanjutan.			dan judul e-book per 100.000 penduduk													
Sistem Keamanan dan Keselamatan Masyarakat	**S.3.1.1.** Pengembangan Ekosistem Keamanan Digital Terpadu dan Responsif.	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase penguatan karakter	-	**S.3.1.1.P.1**. Penguatan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Satuan Pendidikan	58.5%	71.100.000	59.12%	73.400.000	59.82%	175.000.000	60.52%	183.700.000	61.22%	192.900.000	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	S.3.1.1. Pengembangan Ekosistem Keamanan Digital Terpadu dan Responsif.	Program Penanggulangan bencana	Jumlah laporan kejadian bencana masyarakat via aplikasi	**15.1.** Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital	**S.3.1.1.P.2**. *Smart Volunteer Digital System*	100 laporan	150.000.000	200 laporan	150.000.000	300 laporan	150.000.000	400 laporan	150.000.000	500 laporan	150.000.000	APBD	BPBD
	S.3.1.1. Pengembangan	Program Penanggulangan	Jumlah personel TRC dan	**15.1.** Persentase area	**S.3.1.1.P.3.**	10 personel	100.000.000 –	20 persone	200.000.000 –	50 persone	200.000.000 –	50 persone	200.000.000 –	50 persone	200.000.000 –	APBD, BNPB	BPBD

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	Ekosistem Keamanan Digital Terpadu dan Responsif	bencana dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	damkar terlatih	kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital	Diklat TRC & Damkar mat berbasis kompetensi		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		

Tabel 5.10 Peta Jalan *Smart Society* Jangka Panjang (2030-2034)

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Interaksi Masyarakat yang Efisien	**S.1.1.1.** Pengembangan Platform Partisipasi Publik dan Kesejahteraan Digital Terpadu	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Prosentase Perlindungan sosial	**13.4.** Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital	**S.1.1.1.P.1.** Tuan Nonaku	3271 orang	7.165.389.400	3271 orang	7.165.389.400	3271 orang	7.165.389.400	3271 orang	7.165.389.400	3271 orang	7.165.389.400	APBD	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Ekosistem Belajar	**S.2.1.1.** Transformasi Digital Pendidikan Berkelanjutan dari Hulu ke Hilir.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang memenuhi Pengembangan Kompetensi	**6.3.** Jumlah tingkat pendidikan tinggi sains, teknologi, teknik dan matematika (STEM) per 100.000 penduduk	**S.2.1.1.P.2**. Optimalisasi Tata Kelola Manajemen ASN (Pengembangan Sumber Daya Manusia	49,39%	837.980.000	50,30%	852.000.000	51,30%	867.000.000	52,30%	882.000.000	53,30%	897.000,000	APBD Kab. Kulon PRogo	BKPSDM

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
					Aparatur Sipil Negara)												
	S.2.1.1. Transformasi Digital Pendidikan Berkelanjutan dari Hulu ke Hilir.	Program Pengelolaan Pendidikan	1.Skor kemampuan literasi dan numerasi SD 2.Skor kemampuan literasi dan numerasi SMP	6.1. Persentase populasi kota dengan kecakapan profesional di lebih dari satu bahasa	**S.2.1.1.P.1.** *Moral Technology School* Pembelajaran Numerasi dengan metode Gasing (Gampang asyik menyenangkan)	1.79.5 2.84.3	632.100.000	1. 80.5 2.85.3	651.100.000	1.81.5 2.86.3	670.600.000	1.82.5 2.87.3	690.700.000	1.83.5 2.88.3	711.000.000	APBD, BAZNAS	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	S.2.1.1. Transformasi Digital Pendidikan Berkelanjutan dari Hulu ke Hilir.	Program pengelolaan sekolah	1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 tahun 2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-15 tahun 3. Angka Partisipasi	6.2. Jumlah komputer, laptop, tablet atau perangkat pembelajaran digital lainnya yang tersedia per 1.000 siswa	**S.2.1.1.P.3**. Digitalisasi Sekolah (Digitalisasi sekolah (lanjutan), Pengembangan Pembelajaran e-learning program kesetaraan)	1.98.91 % 2.99.13 % 3.18.10 %	1.25M	1.98.95 % 2.99.16 % 3.18.30 %	1,29M	1.99.11 % 2.99.19 % 3.18.50 %	1.33M	1.99.25 % 2.99.22 % 3.17.14 %	1.37M	1.99.31 % 2.99.25 % 3.17.91 %	1.41M	APBD, APBN	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
			Sekolah(APS) Kesetaraan Usia 7-18 tahun														
Sistem Keamanan dan Keselamatan Masyarakat	**S.3.1.2.** Pelembagaan Sistem Peringatan Dini Bencana Berbasis Komunitas dan Teknologi,	Program penanggulangan bencana	Jumlah kalurahan tangguh bencana	15.1. Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital	**S.3.1.2.P.1**. Tanggap Bencana Mandiri	30 kalurahan	100.000.000 – 250.000.000	35 kalurahan	100.000.000 – 250.000.000	40 kalurahan	100.000.000 – 250.000.000	45 kalurahan	100.000.000 – 250.000.000	50 kalurahan	100.000.000 – 250.000.000	APBD, CSR, BNPB	BPBD
	S.3.1.2. Pelembagaan Sistem Peringatan Dini Bencana Berbasis	Program penanggulangan bencana	Jumlah pos damkar aktif & berfungsi	15.1. Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital	**S.3.1.2.P.2.** Pos Damkar Mandiri Berbasis Teknologi	4 pos	2.000.000.000 – 5.000.000.000	4 pos	2.000.000.000 – 5.000.000.000	5 pos	2.000.000.000 – 5.000.000.000	5 pos	2.000.000.000 – 5.000.000.000	≥ 5 pos	2.000.000.000 – 5.000.000.000	APBD, DAK, BNPB, DAIS	BPBD

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	Komunitas dan Teknologi,																
	S.3.1.2. Pelembagaan Sistem Peringatan Dini Bencana Berbasis Komunitas dan Teknologi,	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah TRC , damkar dan relawan bersertifikasi nasional	15.1. Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital	**S.3.1.2.P.3.** TRC Damkar dan Relawan Profesional dengan Sertifikasi Kompetensi	70 personel	200.000.000 – 300.000.000	900 personel	200.000.000 – 300.000.000	100 personel	200.000.000 – 300.000.000	120 personel	200.000.000 – 300.000.000	≥120 personel	200.000.000 – 300.000.000	APBD, BNPB	BPBD
	S.3.1.1. Pengembangan Ekosistem Keamanan Digital Terpadu dan Responsif.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan wilayah rawan dengan EWS	15.1. Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital	**S.3.1.1.P.4.** EWS IoT Terintegrasi Nasional	55%	100.000.000 – 200.000.000	60%	100.000.000 – 200.000.000	65%	100.000.000 – 200.000.000	70%	100.000.000 – 200.000.000	75%	100.000.000 – 200.000.000	APBD, BNPB	BPBD

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Sistem Keamanan dan Keselamatan Masyarakat	**S.3.1.1.** Pengembangan Ekosistem Keamanan Digital Terpadu dan Responsif.	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase penguatan karakter	-	**S.3.1.1.P.1.** Penguatan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Satuan Pendidikan	62.22%	208.000.000	63.22%	214.000.000	64.22%	221.000.000	65.22%	228.000.000	66.22%	234.000.000	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

5.6 PETA JALAN *SMART ENVIRONMENT*

Pembangunan dimensi *Smart Environment* dalam kerangka *Masterplan Smart City* Kabupaten Kulon Progo adalah sebuah komitmen strategis untuk menciptakan lingkungan yang lestari, tangguh, dan berkelanjutan bagi seluruh warganya. Peta jalan ini berfokus pada respons inovatif terhadap tantangan ekologis lokal, seperti pengelolaan sampah dan mitigasi bencana, dengan mengintegrasikan teknologi berbasis data dan *Internet of Things* (IoT) pada inisiatif yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan efisiensi, mempromosikan partisipasi aktif masyarakat dalam praktik-praktik ramah lingkungan, dan memastikan Kulon Progo dapat tumbuh sebagai kabupaten yang harmonis antara kemajuan teknologi dan perlindungan alam.

Tabel 5.6 Peta Jalan *Smart Environment* Jangka Pendek - Menengah (2025 – 2029)

SubDimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Mengembangkan Program Perlindungan Lingkungan Hidup																	
Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah	**En.2.1.1.** Pembangunan Ekosistem Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Digital	Program pengurangan timbulan sampah	Terbentuknya 1 Bank sampah Indusk setiap Keluraha n/Kalurh an	16.1 persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan	**En.2.1.1. P.1.** Pembentukan 1 Bank Sampah Induk setiap Keluraha n/ Kaluraha n	Terbitnya SE Bupati		25 kalurahan/kelurahan	271.000.000	43 kalurahan/kelurahan)	300.000.000	66 kalurahan/kelurahan)	330.000.000	88 kalurahan/kelurahan)	360.000.000	APBD, DAIS	DLH

SubDimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
				individu terhadap jumlah sampah rumah tangga 16.4 presentase dari jumlah total sampah plastik yang di daur ulang di kota …													
	En.2.1.1. Pembangunan Ekosistem Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Digital.	Program pengurangan timbulan sampah	Adanya pelaporan terkait volume timbulan sampah yang masuk, volume sampah yang terkelola dan	16.1 presentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan	**En.2.1.1.P.2.** Pembuatan web Sikompas (Sistem Informasi Kelompok Pengelola Sampah)	Pelaporan dilakukan oleh 135 bank sampah yang sudah ada	-	Pelaporan dilakukan oleh 160 bank sampah	271.000.000	Pelaporan dilakukan oleh 181 bank sampah	300.000.000	Pelaporan dilakukan oleh 201 bank sampah	330.000.000	Seluruh kelompok pengelola sampah yang sudah teregister di DLH Kulon Progo	360.000.000	APBD, DAIS	DLH

SubDimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
			tidak dari setiap kelompok pengelola sampah	individu terhadap jumlah sampah rumah tangga 16.4 presentase dari jumlah total sampah plastik yang di daur ulang di kota …													
Tata Kelola Energi																	

Tabel 5.12 Peta Jalan *Smart Environment* Jangka Panjang (2030-2034)

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Mengembangkan Program Perlindungan Lingkungan Hidup																	
Pengurangan sampah melalui batasan timbulan sampah	**En.2.1.3.** Optimalisasi Infrastruktur dan Regulasi Pengelolaan Sampah.	Program pengelolaan persampahan	0% sampah residu ke TPA (semua sampah terolah di sumber, di daur ulang, atau dimanfaatkan kembali)	16.1 persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga 16.4 presentase dari	**En.2.1.3. P.1.** Zero Waste 1.95% masyarakat menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) 2.0% sampah residu ke TPA (semua sampah terolah di sumber, didaur ulang,	Tingkat penanganan 60 %	390.000.000	Tingkat penanganan 70 %	420.000.000	Tingkat penanganan 80 %	450.000.000	Tingkat penanganan 90 %	480.000.000	Tingkat penanganan 100 %	510.000.000	APBN, DAIS, APBD	DLH

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
				jumlah total sampah plastik yang di daur ulang di kota	atau dimanfaatkan kembali)												
Tata Kelola Energi																	

BAB VI
PENUTUP

Penyusunan *Masterplan Smart City* Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2034 merupakan komitmen strategis Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dokumen ini bukan hanya sebuah rencana, melainkan peta jalan yang memandu seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat, dalam mengimplementasikan konsep kota cerdas secara sistematis dan terintegrasi.

Keberhasilan pembangunan *smart city* di Kulon Progo sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi yang kuat. Dengan fondasi visi pembangunan daerah yang kokoh, yaitu "*Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya, yang Berkelanjutan*", inisiatif *smart city* akan menjadi katalisator untuk mencapai tujuan-tujuan RPJMD. Pemanfaatan teknologi tidak hanya ditujukan untuk efisiensi, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat agar lebih inovatif, partisipatif, dan sejahtera.

Pembangunan *smart city* di Kulon Progo memiliki potensi besar, terutama dengan adanya Kawasan Strategis Nasional seperti Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) dan Kawasan Industri Sentolo. Potensi ini menciptakan peluang unik untuk mengembangkan dimensi *Smart Economy* dan *Smart Living*. YIA dapat menjadi pintu gerbang ekonomi digital dan pariwisata berbasis teknologi, sementara sentra-sentra ekonomi lokal, seperti kerajinan dan produk pertanian, dapat diperkuat melalui platform digital yang menghubungkan produsen dengan pasar yang lebih luas. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur cerdas di sekitar area strategis ini akan meningkatkan konektivitas dan kualitas hidup masyarakat.

Secara lebih luas, enam pilar *smart city*, yaitu *Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society*, dan *Smart Environment*, akan diintegrasikan secara bertahap. Peta jalan yang telah disusun akan menjadi acuan utama untuk memastikan setiap program dan kegiatan selaras dengan target yang telah ditetapkan, mulai dari peningkatan layanan publik berbasis elektronik hingga promosi pariwisata budaya secara digital, serta pengelolaan lingkungan yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Masterplan ini diharapkan menjadi pedoman yang dinamis, yang dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Pada akhirnya, keberhasilan *smart city* Kulon Progo tidak diukur dari seberapa canggih teknologi yang digunakan, tetapi dari sejauh mana teknologi tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, dan kebahagiaan seluruh warga Kulon Progo.

LAMPIRAN

Bimtek *Smart City* Bertempat Di Aula Adikarta Komplek Pemkab Kabupaten Kulon Progo

KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

BUKU III

EXECUTIVE SUMMARY MASTERPLAN SMART CITY

KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2026 - 2034

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga proses penyusunan Buku *Masterplan Smart City* Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2034 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, komunitas, dan sektor swasta yang memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih cerdas, inklusif, dan berkelanjutan.

Transformasi menuju *Smart City* bukan sekadar tren global, melainkan sebuah keniscayaan dalam menghadapi tantangan zaman. Kota-kota besar seperti Tokyo, Seoul, Amsterdam, dan Singapura telah membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi dengan partisipasi masyarakat mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas hidup warganya. Kabupaten Kulon Progo pun mengambil langkah strategis untuk tidak hanya mengikuti arus perubahan, tetapi menjadi pelopor inovasi daerah yang berakar pada kearifan lokal dan berorientasi pada masa depan.

Melalui *Masterplan* ini, Kabupaten Kulon Progo menetapkan arah pembangunan berbasis enam dimensi *Smart City*: *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan *Smart Environment*. Visi yang ingin diwujudkan adalah: " **Terwujudnya Kulon Progo yang makmur, mandiri, religius, berbudaya, dan berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi cerdas, inovasi, dan kolaborasi yang inklusif**." Visi ini menjadi landasan dalam merancang program, kebijakan, dan infrastruktur digital yang selaras dengan RPJMD, SNI ISO 37122, dan agenda pembangunan nasional.

Akhir kata, semoga Buku *Masterplan Smart City* ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi sumber inspirasi, rujukan strategis, dan pemantik kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan Kulon Progo yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing melalui pendekatan *Smart City*.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Kabupaten Kulon Progo, September 2025

Bupati Kulon Progo

Dr. H. R. Agung Setyawan, S.T., M.Sc., MM

SAMBUTAN DEWAN *SMART CITY*

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) *Smart City* hingga penyusunan Buku *Masterplan Smart City* Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2034 dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Smart City merupakan wujud nyata dari inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi, data, dan kolaborasi lintas sektor. Konsep ini hadir sebagai jawaban atas berbagai tantangan pembangunan daerah, mulai dari efisiensi layanan, peningkatan partisipasi masyarakat, hingga penguatan daya saing daerah di era digital. Oleh karena itu, seluruh jajaran perangkat daerah, camat, dan pemangku kepentingan di Kabupaten Kulon Progo telah menyatakan komitmen bersama untuk mendukung transformasi menuju Kabupaten Cerdas yang inklusif dan berkelanjutan.

Dewan Smart City Kabupaten Kulon Progo berperan sebagai pengarah dan pengawal strategi, memastikan bahwa setiap langkah pembangunan *Smart City* senantiasa selaras dengan visi daerah, RPJMD, dan standar nasional maupun internasional. Kami percaya bahwa sinergi antara perencanaan, pengembangan, dan implementasi akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan ekosistem digital yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Harapan kami, melalui *Masterplan* ini, Kabupaten Kulon Progo dapat membangun fondasi yang kuat untuk menghadirkan layanan publik yang lebih cerdas, meningkatkan produktivitas sumber daya, serta memperkuat identitas dan daya saing daerah di tingkat nasional maupun global.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Kabupaten Kulon Progo, September 2025

Sekretaris Dewan *Smart City*

....

.....

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... ***ii***

SAMBUTAN DEWAN SMART CITY ..... ***iii***

DAFTAR GAMBAR ..... ***v***

DAFTAR TABEL ..... ***vi***

BAB I LATAR BELAKANG ***1***

BAB II VISI SMART CITY KULON PROGO ***3***

BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY KULON PROGO ***4***

3.1 STRATEGI SMART GOVERNANCE 4

3.2 STRATEGI SMART BRANDING 6

3.3 STRATEGI SMART ECONOMY 9

3.4 STRATEGI SMART LIVING 12

3.4 STRATEGI SMART SOCIETY 14

3.4 STRATEGI SMART ENVIRONMENT 18

BAB IV PETA JALAN PEMBANGUNAN SMART CITY KULON PROGO ***21***

4.1 PETA JALAN SMART GOVERNANCE 1

4.2 PETA JALAN SMART BRANDING 11

4.3 PETA JALAN SMART ECONOMY 18

4.5 PETA JALAN SMART LIVING 28

4.5 PETA JALAN SMART SOCIETY 51

4.6 PETA JALAN SMART ENVIRONMENT 57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Asta Cita Presiden Prabowo dan Wapres Gibran 1

Gambar 1. 2 Penerapan Teknologi AWD di Kabupaten Kulon Progo……2

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Analisis SWOT Smart Governance 4
Tabel 3. 2 Sasaran Smart Governance 6
Tabel 3. 3 Analisis SWOT Smart Branding 6
Tabel 3. 4 Sasaran Smart Branding 8
Tabel 3. 5 Analisis SWOT Smart Economy 9
Tabel 3. 6 Sasaran Smart Economy 11
Tabel 3. 7 Analisis SWOT Smart Living 12
Tabel 3. 8 Sasaran Smart Living 14
Tabel 3. 9 Analisis SWOT Smart Society 15
Tabel 3. 10 Sasaran Smart Society 17
Tabel 3. 11 Analisis SWOT Smart Environment 18
Tabel 3. 12 Sasaran Smart Environment 19

Tabel 4. 1 Peta Jalan Smart Governance Jangka Pendek - Menengah (2025 – 2029) 1
Tabel 4. 2 Peta Jalan Smart Governance Jangka Panjang (2030-2034) 9
Tabel 4. 3 Peta Jalan Smart Branding Jangka Pendek - Menengah (2025 – 2029) 11
Tabel 4. 4 Peta Jalan Smart Branding Jangka Panjang (2030-2034) 15
Tabel 4. 5 Peta Jalan Smart Economy Jangka Pendek - Menengah (2025 – 2029) 18
Tabel 4. 6 Peta Jalan Smart Economy Jangka Panjang (2030-2034) 26
Tabel 4. 7 Peta Jalan Smart Living Jangka Pendek - Menengah (2025 – 2029) 28
Tabel 4. 8 Peta Jalan Smart Living Jangka Panjang (2030-2034) 43
Tabel 4. 9 Peta Jalan Smart Society Jangka Pendek - Menengah (2025 – 2029) 51
Tabel 4. 10 Peta Jalan Smart Society Jangka Panjang (2030-2034) 53
Tabel 4. 11 Peta Jalan Smart Environment Jangka Pendek - Menengah (2025 – 2029) 57
Tabel 4. 12 Peta Jalan Smart Environment Jangka Panjang (2030-2034) 60

BAB I
LATAR BELAKANG

Kabupaten Kulon Progo menyusun *Masterplan Smart City* tidak hanya untuk mengikuti tren pembangunan kota global, tetapi sebagai jawaban strategis atas tantangan lokal yang nyata. Rangkaian program dalam *masterplan* ini mengintegrasikan visi “Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya, dan Berkelanjutan” dengan delapan misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,

seperti kemandirian pangan dan pengembangan ekonomi hijau-biru untuk memperkokoh ketahanan daerah serta meningkatkan kualitas hidup warga.

Gambar 1. 1 Asta Cita Presiden Prabowo dan Wapres Gibran

Sumber Gambar : www.setneg.go.id

Globalisasi menuntut setiap kota bersaing setara dengan pusat-pusat ekonomi internasional. Oleh karena itu, Kabupaten Kulon Progo berfokus pada layanan publik cepat, tepat sasaran, dan terjangkau, sejalan dengan semangat Asta Cita untuk mencapai nol kelaparan dan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat, dua indikator utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDGs) yang diadopsi oleh agenda pemerintahan saat ini.

Revolusi digital telah mempercepat urbanisasi dan meredefinisi interaksi masyarakat. *Masterplan* ini memanfaatkan teknologi sebagai *enabler* inovasi dan kolaborasi, selaras dengan misi Asta Cita yang mendorong transformasi ekonomi kreatif dan digitalisasi layanan public, langkah penting untuk menyongsong percepatan perubahan kombinatorial yang diprediksi akan melampaui tiga ratus tahun perkembangan sebelumnya.

Gambar 1. 2 Penerapan Teknologi AWD di Kabupaten Kulon Progo

Sumber Gambar : Jogja Benih (link :
https://jogjabenih.jogjaprov.go.id/read/7dc24d00ccef2511490bf94783e7e1625f730c16fb8c616758c6bcd3c1d22a553179)

Konsep *Smart City* di Kabupaten Kulon Progo dijalankan secara komprehensif dan inklusif. Pendekatan ini sejalan dengan Asta Cita yang menekankan *good governance* serta hak atas keadilan dan partisipasi publik (SDG 16). Melalui partisipasi warga, teknologi informasi tidak hanya memangkas birokrasi, tapi juga memfasilitasi keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

Masterplan ini juga memperdalam fondasi filosofis dengan mengintegrasikan prinsip *Green Constitution* dan *Right to the City*. Langkah ini paralel dengan Asta Cita, khususnya misi penguatan hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan, sehingga pembangunan tidak hanya pintar secara teknologi, tetapi juga adil dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Secara nasional, Gerakan Menuju *Smart City* Kementerian Kominfo mendukung 100 kota/kabupaten menyusun *masterplan* dan *quickwins* dalam 5–10 tahun ke depan. Inisiatif tersebut mengantarkan Kulon Progo untuk menerjemahkan Asta Cita, terutama kemandirian pangan dan ekonomi hijau, ke dalam program prioritas lokal, sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045 yang menjadi pijakan makro negara.

Masterplan ini mengadopsi pendekatan **T-H-I-S (Tematik, Holistik, Integratif, Spasial)** untuk memastikan keterpaduan dimensi digital, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Fokus spasial pada Aerotropolis Wates, Kawasan Industri Kreatif, dan Pariwisata Berkelanjutan dirancang untuk mengoptimalkan potensi lokal sesuai karakteristik wilayah dan misi Asta Cita dalam memperkokoh daya saing daerah.

BAB II
VISI SMART CITY KULON PROGO

Mempertimbangkan kondisi kesiapan, visi, misi dan program unggulan Kabupaten Kulon Progo, maka perlu ditetapkan visi pembangunan *Smart City*. Visi Misi *Smart City* Kabupaten Kulon Progo, yaitu:

"**Terwujudnya Kulon Progo yang makmur, mandiri, religius, berbudaya, dan berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi cerdas, inovasi, dan kolaborasi yang inklusif**."

Sedangkan Misi *Smart City* Kabupaten Kulon Progo, yaitu :

a) Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang transparan, akuntabel, efisien, dan partisipatif melalui pemanfaatan data dan teknologi.
b) Mengembangkan identitas dan daya saing Kulon Progo melalui integrasi ekosistem pariwisata, penguatan produk unggulan daerah, pengembangan ekosistem bisnis, serta penataan ruang kota yang indah, nyaman, dan berkarakter budaya.
c) Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan agribisnis, penguatan UMKM, digitalisasi ekonomi, pengembangan ekosistem industri kreatif, menuju masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing.
d) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang layak, sehat, dan harmonis melalui perencanaan tata ruang yang berkelanjutan, peningkatan konektivitas dan mobilitas, serta penguatan layanan kesehatan dan sosial berbasis teknologi.
e) Mendorong terciptanya masyarakat yang religius, berbudaya, inklusif, aman, dan tertib melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung interaksi sosial, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan literasi digital.
f) Menjaga kelestarian lingkungan berkelanjutan melalui perlindungan dan pengelolaan sumber daya, pengelolaan limbah dan sampah, serta tata kelola energi berkelanjutan.

BAB III
STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY KULON PROGO

Di dalam dokumen *masterplan* ini, perumusan strategi pembangunan *smart city* Kabupaten Kulon Progo dilakukan dengan metode *SWOT Analysis* dan *TOWS Analysis* untuk mengevaluasi 4 (empat) aspek analisis, yaitu kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Hasil dari analisis tersebut akan didapatkan strategi-strategi untuk masing-masing dimensi *Smart City* Kabupaten Kulon Progo. Strategi pembangunan *smart city* Kabupaten Kulon Progo berdasarkan dimensi *smart city* adalah sebagai berikut.

3.1 STRATEGI SMART GOVERNANCE

Tujuan Smart Governance adalah mewujudkan pelayanan publik dan birokrasi yang efektif, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Kulon Progo.

a. Analisis SWOT-TOWS *Smart Governance*

Tabel 3. 1 Analisis SWOT Smart Governance

Analisis *TOWS – Strength, Weakness, Opportunities and Threats*		
Faktor Internal	**Kekuatan**	**Kelemahan**
Faktor Eksternal	- Adanya Peraturan Bupati No. 100 Tahun 2018 tentang *Masterplan Smart City* Kabupaten Kulon Progo - Kolaborasi antar dewan, tim pelaksana, OPD, dan forum *smart city* sudah berjalan secara efektif dan harmonis - Seluruh OPD telah terhubung dengan layanan *wireless* - Adanya upaya pemerintah daerah untuk mengakses dana dari sumber lain seperti (DAK, CSR) - Kinerja dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (Perda/Perkada) juga menunjukkan capaian optimal, yakni 100% sepanjang lima tahun terakhir.	- Kemampuan keuangan daerah terbatas, terutama setelah covid dan adanya efisiensi sehingga menghambat belanja infrastruktur - Masyarakat belum memahami program-program *smart city* - Kurangnya infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia yang terampil dalam teknologi informasi. - Indeks Pelayanan Publik masih fluktuatif, salah satu penyebabnya adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan implementasi regulasi

Analisis *TOWS – Strength, Weakness, Opportunities and Threats*		
	- Beberapa OPD telah tersertifikasi ISO 27001	
Ancaman - Tingkat literasi digital masyarakat masih rendah - Adanya perubahan kebijakan SPBE menjadi pemerintah digital, menyebabkan pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian - Berkembangnya kejahatan keamanan informasi yang dapat memengaruhi sistem di Kab. Kulon Progo	**Strategi Ancaman dan Kekuatan** - Membangun sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data pemerintah dan masyarakat. - Mengadakan sosialisasi untuk peningkatan literasi digital masyarakat	**Strategi Kelemahan dan Ancaman** - Menerapkan sistem keamanan yang berlapis, melakukan audit keamanan secara berkala, dan melatih petugas untuk mengelola keamanan sistem. - Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang pemanfaatan teknologi digital, serta memastikan ketersediaan akses internet yang terjangkau.

b. Strategi *Smart Governance*

Dari hasil analisis didapatkan beberapa strategi *smart governance* pada tabel berikut. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan berintegritas melalui reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik yang terintegrasi, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan kepuasan masyarakat.

Tabel 3. 2 Sasaran Smart Governance

Sub Dimensi 1: G.1. Pelayanan Publik (*Public Service*)

G.1.1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan warga. Sasaran ini dirancang untuk mengatasi fluktuasi pada Indeks Pelayanan Publik dan memastikan penegakan peraturan yang konsisten.
Sub Dimensi 2: G.2. Manajemen Birokrasi (*Bureaucracy Management*)
G.2.1. Mewujudkan sistem pemerintahan digital yang terpadu dan berkelanjutan. Sasaran ini dirancang untuk mengatasi tantangan seperti rendahnya indeks SPBE/Indeks Pemdi dan kesenjangan keterampilan digital di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
Sub Dimensi 3: G.3. Kebijakan Publik (*Public Policy*)
G.3.1. Menciptakan perancangan kebijakan yang berbasis data dan partisipatif. Sasaran ini bertujuan mengintegrasikan masukan masyarakat untuk merumuskan regulasi yang relevan dan efektif.

3.2 STRATEGI SMART BRANDING

a. Analisis *SWOT-TOWS Smart Branding*

Tabel 3. 3 Analisis SWOT Smart Branding

Analisis *TOWS – Strength, Weakness, Opportunities and Threats*		
Faktor Internal	**Kekuatan** - Adanya bandara internasional YIA - Letak geografis Kabupaten Kulon Progo membuat Kulon Progo memiliki berbagai kekayaan alam yang dapat dioptimalkan sebagai daya tarik wisata - Tumbuhnya kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap perekonomian daerah, yang dapat dikaitkan dengan meningkatnya aktivitas pariwisata dan pelayanan pendukungnya.	**Kelemahan** - Perkembangan investasi masih kurang - Belum ada pendanaan alternatif lain selain dari sumber APBD untuk pengembangan *smart city* - *Branding* daerah *Kulon Progo The Jewel of Java* belum cukup kuat untuk menggambarkan dan mempromosikan Kulon Progo - Pada tahun 2024, tingkat hunian akomodasi dan peningkatan perjalanan wisatawan nusantara di Kulon
Faktor Eksternal		

Analisis *TOWS – Strength, Weakness, Opportunities and Threats*		
	- Adanya upacara adat dan budaya Kulon Progo yang berpotensi menjadi daya tarik wisata	Progo cenderung menurun
Peluang - Terdapat perencanaan yang strategis untuk memperindah lampu jalan di Wates - Adanya perencanaan *Smart Tourism* dalam pengembangan Kawasan Aerotropolis Kulon Progo yang meliputi 3 Kapanewon: Temon, Wates, Kokap	**Strategi Peluang dan Kekuatan** - Membangun fasilitas pendukung pariwisata - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kawasan pariwisata - Membuat paket wisata dan dipromosikan melalui berbagai media publikasi termasuk kerjasama dengan Angkasa Pura - Bekerjasama dengan hotel restoran dalam penyelenggaran event dan promosi paket wisata - *Launching kalender of event* (gabungan event di KP yang diselenggarakan oleh OPD di KP) - Melaksanakan *event* rutin skala internasional, dan nasional - Membangun/menata Kota Wates sehingga menarik bagi masyarakat di luar Kulon Progo untuk dapat mampir ke Kota Wates	**Strategi Kelemahan dan Peluang** - Memperbarui *branding* daerah untuk meningkatkan peluang investasi - Menyusun kajian potensi investasi yang *ready offer* di kawasan aerotropolis - *Rebranding* baru dengan melihat perkembangan di Kulon Progo. - Menggandeng pihak Perguruan Tinggi dan swasta dalam pengembangan *smart city* - Membangun terminal ekspor sehingga bisa ekspor mandiri

Analisis *TOWS – Strength, Weakness, Opportunities and Threats*		
Ancaman - Transportasi umum yang mumpuni membuat wisatawan hanya datang ke YIA tanpa ada aktivitas yang dapat mendukung perekonomian Kulon Progo - Digitalisasi dan tren terkini berpotensi menggerus budaya lokal	**Strategi Ancaman dan Kekuatan** - Memanfaatkan teknologi informasi untuk mempromosikan budaya lokal Kulon Progo - Melakukan banyak promosi potensi unggulan baik wisata dan produk unggulan Kulon Progo - Merespons secara cepat dan efektif melalui saluran digital untuk menjaga citra positif daerah	**Strategi Kelemahan dan Ancaman** - Meningkatkan pendampingan para pelaku usaha sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk dari luar daerah - Meningkatkan sasaran kurasi produk UKM - Meningkatkan legalitas usaha pelaku UKM - Mempromosikan dan menjual produk-produk di gerai UMKM di Bandara YIA - Kolaborasi stakeholder dalam upaya menyediakan ruang-ruang promosi

b. Sasaran *Smart Branding*

Menguatkan identitas dan daya saing daerah melalui promosi digital yang efektif, dengan fokus pada pengembangan pariwisata berkelanjutan dan produk-produk unggulan berbasis kearifan lokal.

Tabel 3. 4 Sasaran Smart Branding

Sub Dimensi 1: B1. Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata (*Tourism Branding*)
B.1.1. Meningkatkan daya tarik dan citra daerah di tingkat nasional dan internasional melalui strategi pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Sub Dimensi 2: B2. Membangun platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah (*Business Branding*)
B.2.1. Menciptakan ekosistem pariwisata yang inovatif dan terintegrasi, didukung oleh pemasaran digital yang masif. Sasaran ini bertujuan untuk mengatasi masalah promosi yang masih terbatas pada destinasi prioritas.

Sub Dimensi 3: B3. Membangun dan Memasarkan Wajah Kota (*City Appearance Branding*)
B.3.1. Meningkatkan pengembangan wajah kota yang mencerminkan identitas budaya lokal dan mendukung potensi pariwisata serta bisnis.

3.3 STRATEGI SMART ECONOMY

a. Analisis *SWOT-TOWS Smart Economy*

Tabel 3. 5 Analisis SWOT Smart Economy

Analisis *TOWS – Strength, Weakness, Opportunities and Threats*		
Faktor Internal	**Kekuatan**	**Kelemahan**
Faktor Eksternal	- Adanya peraturan daerah terkait kawasan industri, mengatur penyerapan tenaga kerja lokal dalam perusahaan-perusahaan asing yang berinvestasi - Terdapat berbagai potensi produk lokal yang sudah berhasil ekspor - Pengembangan *aerotropolis city* memunculkan beragam potensi baru untuk mendorong perekonomian Kulon Progo - Memiliki hasil bumi dan laut yang bagus karena punya waduk, sungai, dan laut selatan - Implementasi *smart farming* yang sudah berjalan dan berdampak bagi masyarakat	- Ketimpangan perkembangan ekonomi antara kawasan selatan (Temon, Wates, Kokap, Sentolo) dengan kawasan utara (Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo) yang masih belum banyak dijadikan sebagai strategi pembangunan menggunakan konsep *smart city* - Rasio Kewirausahaan di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan pola fluktuatif sepanjang periode 2020–2024 - Anggaran promosi daerah minim - Literasi teknologi di pedesaan, terutama di sektor pertanian, masih rendah. - Kurangnya infrastruktur penunjang usaha juga turut mempengaruhi tingginya angka

Analisis *TOWS – Strength, Weakness, Opportunities and Threats*		
		kemiskinan di Kulon Progo
Peluang - Terjalinnya kerja sama dengan JAICA - Perkembangan teknologi yang terus berkembang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi - Adanya peluang pengembangan *smart farming* di bidang lain seperti perikanan - Adanya Koperasi Desa Merah Putih yang sudah terbentuk di 88 kelurahan di Kulon Progo	**Strategi Peluang dan Kekuatan** - Memaksimalkan produksi komoditas unggulan di pertanian dan perkebunan - Pengembangan *smart farming* di sektor selain pertanian - Pengembangan kawasan di 5 (lima) program prioritas aerotropolis - Memanfaatkan PSN Jalan TOL untuk promosi produk UKM maupun tempat destinasi wisata (*rest area*) - Kemudahan berinvestasi yang didukung sistem perizinan online	**Strategi Kelemahan dan Peluang** - Mengadakan Pelatihan marketing e-commerce untuk pelaku UMKM - Menguatkan kemitraan dengan perusahaan swasta - Pemerintah dalam pendanaan pengembangan *smart city* - Memanfaatkan sarana perdagangan yang ada khususnya pasar tradisional agar bisa menjadi tempat pemasaran hasil produk masyarakat Kulon Progo. Contoh: Hasil bumi, daging, telur, dan produk kerajinan. - Upaya pemerintah memiliki bank tanah

Analisis *TOWS – Strength, Weakness, Opportunities and Threats*		
Ancaman - Adanya proses bisnis yang dimiliki oleh warga kabupaten lain, sehingga *credit* didapat oleh kabupaten lain - Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB ADHK, Kabupaten Kulon Progo menunjukkan dinamika pertumbuhan ekonomi yang cukup fluktuatif selama periode 2021–2024	**Strategi Ancaman dan Kekuatan** - Mengarahkan belanja pemerintah ke sektor-sektor produktif dan prioritas yang memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) tinggi, seperti infrastruktur digital dan fisik, pendidikan, kesehatan, serta riset dan pengembangan. - Penyederhanaan Regulasi dan Perizinan - Memastikan efektivitas penyaluran bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi. - Mendorong pertumbuhan sektor baru seperti industri teknologi, ekonomi kreatif, dan pariwisata yang berkelanjutan.	**Strategi Kelemahan dan Ancaman** - Fasilitasi Akses KUR dan Pembiayaan Mikro - Optimalisasi Koperasi Desa Merah Putih - Memfasilitasi penggunaan platform digital (e-commerce, media sosial) untuk pemasaran dan penjualan produk - Mendorong inovasi produk dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang melimpah, seperti hasil pertanian, kerajinan tangan, atau kuliner tradisional, dan mengemasnya secara modern agar memiliki nilai tambah dan daya saing - Kolaborasi Multistakeholder: Membangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah (Dinas Koperasi dan UKM), akademisi, komunitas wirausaha, sektor swasta, dan lembaga keuangan. - Optimalisasi TOMIRA dan Program Pay On Pro

b. Sasaran *Smart Economy*

Menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang tangguh, mandiri, dan inklusif, dengan mendorong hilirisasi produk pertanian dan perikanan, pemberdayaan UMKM berbasis digital, serta optimalisasi investasi di kawasan-kawasan strategis.

Tabel 3. 6 Sasaran Smart Economy

Sub Dimensi 1: Ec1. Membangun ekosistem industri yang berdaya saing (*Industry*)
Ec.1.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah. Sasaran ini bertujuan mengatasi tingkat kemiskinan dan rasio kewirausahaan yang masih fluktuatif.
Sub Dimensi 2: Ec2. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat (*Welfare*)
Ec.2.1. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui peningkatan nilai tambah produk lokal dan daya saing UMKM. Sasaran ini memanfaatkan peluang dari infrastruktur strategis seperti YIA dan JJLS.
Sub Dimensi 3: Ec3. Membangun Ekosistem Transaksi Keuangan (*Transaction*)
Ec.3.1. Menciptakan ekosistem industri yang adaptif dan inovatif. Sasaran ini direncanakan dengan memprioritaskan industri pengolahan (seperti agroindustri kopi, kelapa, dan teh) serta ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal.

3.4 STRATEGI SMART LIVING

a. Analisis *SWOT-TOWS Smart Living*

Tabel 3. 7 Analisis SWOT Smart Living

Analisis *TOWS – Strength, Weakness, Opportunities and Threats*		
Faktor Internal	**Kekuatan** - Adanya bandara Yogya International Airport (YIA), mendukung pengembangan kawasan aerotropolis - Adanya stasiun kereta yang terhubung	**Kelemahan** - Transportasi jalur darat (bus) terbatas - Kemampuan keuangan daerah terbatas, terutama setelah covid dan adanya efisiensi
Faktor Eksternal		

Analisis *TOWS – Strength, Weakness, Opportunities and Threats*		
	dengan ibukota provinsi dan negara - Adanya monitoring kualitas air secara *real-time* (onlimo) di Sungai Serang yang berada di kawasan pariwisata Glagah - Mempunyai bentang alam yang beragam yaitu pantai, dataran rendah, waduk dan pegunungan beserta kekayaan alam yang melimpah - Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh - Selama lima tahun terakhir, kinerja urusan kesehatan di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan tren yang cukup positif dengan beberapa capaian signifikan pada berbagai indikator kunci.	sehingga menghambat belanja infrastruktur - Perlindungan terhadap kawasan permukiman rawan bencana belum dilakukan secara konsisten - Masih ada kawasan kumuh yang ditetapkan dengan SK BUPATI KULON PROGO Nomor 53/C/2025 tentang Lokasi Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2029 - *Gap* infrastruktur antar area masih tinggi

Analisis *TOWS – Strength, Weakness, Opportunities and Threats*		
Peluang - Bentang alam dapat dikembangkan sebagai wisata unggulan - Kab. Kulon Progo telah meraih penghargaan adipura, kabupaten sehat kabupaten layak anak	**Strategi Peluang dan Kekuatan** - Pengembangan aplikasi yang menyediakan informasi obyek wisata, pemesanan tiket online dan pembayaran nontunai - Menambah penggunaan sensor untuk memantau kualitas udara atau air di area wisata, serta sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien - Penerapan teknologi untuk meningkatkan hasil pertanian - Peningkatan infrastruktur - Pelatihan dan pendampingan bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) agar masyarakat dapat mengelola dan merawat kawasan yang sudah diperbaiki.	**Strategi Kelemahan dan Peluang** - Peningkatan layanan transportasi umum (misal bus sekolah)
Ancaman - Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan strategis seperti Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), ada potensi munculnya kawasan-kawasan kumuh	**Strategi Ancaman dan Kekuatan** - Edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan kawasan/lingkungan tempat tinggal	**Strategi Kelemahan dan Ancaman** - Penguatan TAGANA dan DESTANA - Anggaran untuk mitigasi bencana dikolaborasikan dengan anggaran untuk konservasi lingkungan

baru, terutama di wilayah yang mengalami kepadatan populasi		

b. Sasaran *Smart Living*

Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan infrastruktur dasar yang merata, layanan kesehatan yang terintegrasi, serta penanggulangan kemiskinan dan stunting berbasis data.

Tabel 3. 8 Sasaran Smart Living

Sub Dimensi 1: Lv1. Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (*Harmony*)
Lv.1.1. Memberikan akses masyarakat terhadap layanan dasar (air bersih dan sanitasi aman) secara merata.
Sub Dimensi 2: Lv2. Mewujudkan Prasarana Kesehatan (*Health*)
Lv.2.1. Meningkatkan kualitas kesehatan dan ketahanan sosial masyarakat, termasuk melalui penurunan prevalensi stunting yang meningkat.
Sub Dimensi 3: Lv3. Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi (*Mobility*)
Lv.3.1. Meningkatkan harmonisasi tata ruang dan transportasi yang mendukung mobilitas efisien dan kualitas hunian yang layak di seluruh wilayah.

3.4 STRATEGI SMART SOCIETY

a. Analisis *SWOT-TOWS Smart Society*

Tabel 3. 9 Analisis SWOT Smart Society

Analisis *TOWS – Strength, Weakness, Opportunities and Threats*		
Faktor Internal **Faktor Eksternal**	**Kekuatan** - Terdapat beberapa Perguruan Tinggi Negeri & Swasta - Pemerintah Daerah memiliki fasilitas untuk masyarakat seperti *co-working space* - Indikator persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan secara konsisten menunjukkan capaian 100% setiap tahun - Adanya perpustakaan daerah, perpustakaan desa, atau taman baca masyarakat (TBM) yang dapat menjadi pusat kegiatan literasi. - Potensi untuk mengintegrasikan cerita rakyat, sejarah lokal, atau nilai-nilai budaya Kulon Progo dalam materi literasi, sehingga lebih relevan dan menarik bagi masyarakat setempat - Keterlibatan Aktif Akademisi dan Sektor Pendidikan.	**Kelemahan** - Terbatasnya akses terhadap pelatihan keterampilan dan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Kulon Progo - Meskipun ada fasilitas, aksesibilitasnya mungkin belum merata, terutama di daerah pelosok atau terpencil - Keterbatasan jumlah dan kualitas koleksi buku di perpustakaan atau TBM yang ada. - Belum banyak yang memanfaatkan ikulonprogo - Program literasi yang mungkin masih konvensional dan kurang menarik bagi berbagai kelompok usia atau segmen masyarakat. - Kurangnya variasi kegiatan literasi selain membaca buku.
Peluang - Teknologi dapat mendukung peningkatan literasi, terutama di kalangan pemuda	**Strategi Peluang dan Kekuatan** - Pengembangan platform literasi digital, e-book, atau audio book untuk menjangkau lebih	**Strategi Kelemahan dan Peluang**

Analisis *TOWS – Strength, Weakness, Opportunities and Threats*		
- Adanya peluang untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, sektor swasta, atau penerbit - Adanya program-program literasi dari pemerintah pusat (Kemendikbudristek, Perpusnas) yang bisa disinergikan dengan program di daerah. - Kesempatan untuk mendapatkan hibah atau pendanaan dari pihak luar. - Kesempatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi melalui kampanye, seminar, atau lokakarya. - Peluang untuk berkolaborasi dengan sektor swasta (CSR perusahaan), komunitas, atau lembaga pendidikan tinggi untuk memperluas jangkauan program literasi.	banyak masyarakat, terutama generasi muda. - Penggunaan media sosial untuk kampanye literasi dan promosi kegiatan membaca.	

Analisis *TOWS – Strength, Weakness, Opportunities and Threats*		
Ancaman - Kecenderungan masyarakat terhadap media digital yang lebih dominan dibandingkan dengan bahan bacaan cetak - Potensi *cyber attack* pada sistem informasi kebencanaan - Meningkatnya frekuensi kejadian bencana (hidrometeorologi) - Ketergantungan sistem digital pada infrastruktur yang rawan rusak akibat bencana - Kesenjangan Digital dan Aksesibilitas - Kurangnya literasi digital membuat masyarakat rentan menjadi korban atau penyebar hoaks.	**Strategi Ancaman dan Kekuatan** - Menggunakan teknologi untuk kewaspadaan dini bencana	**Strategi Kelemahan dan Ancaman** - Optimalisasi pengembangan sistem kebencanaan berbasis digital - Peningkatan kapasitas SDM pemerintah dan komunitas dalam *disaster digital governance*

Membangun masyarakat yang kreatif, inovatif, dan berbudaya, dengan fokus pada peningkatan literasi digital, penguatan pendidikan karakter, dan pelestarian nilai-nilai lokal untuk menciptakan kohesi sosial yang kuat.

Tabel 3. 10 Sasaran Smart Society

Sub Dimensi 1: S1. Mewujudkan Interaksi Masyarakat yang Efisien (*Community*)
S.1.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terampil, berdaya saing, dan berliterasi digital. Sasaran ini untuk mengatasi rata-rata lama sekolah yang masih rendah.
Sub Dimensi 2: S2. Membangun Ekosistem Belajar yang Efisien *(Learning)* dan Komprehensif

S.2.1. Mewujudkan masyarakat yang adaptif, inovatif, dan partisipatif dalam pembangunan daerah, termasuk dukungan terhadap kelompok rentan dan difabel.
Sub Dimensi 3: S3. Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat (*Security*)
S.3.1. Menciptakan sistem keamanan masyarakat yang terintegrasi dengan teknologi untuk mendukung rasa aman dan nyaman bagi warga.

3.4 STRATEGI SMART ENVIRONMENT

a. Analisis *SWOT-TOWS Smart Environment*

Tabel 3. 11 Analisis SWOT Smart Environment

Analisis *TOWS – Strength, Weakness, Opportunities and Threats*		
Faktor Internal **Faktor Eksternal**	**Kekuatan** - Adanya UU yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup - Adanya peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengelolaan persampahan - Adanya Peraturan Bupati 35 Tahun 2019 tentang pengendalian sampah plastik pada tempat daya tarik wisata	**Kelemahan** - Masyarakat banyak yang belum sadar terhadap pengelolaan lingkungan hidup - Pembangunan Kulon Progo masih ada yang belum mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup - Timbulan sampah dari aktivitas/kegiatan masyarakat/ industri/ pariwisata dll akan meningkat seiring pertumbuhan ekonomi Kulon Progo - Kapasitas TPA Banyuroto akan overload
Peluang - Teknologi yang berkembang dapat mendukung pelestarian lingkungan - Adanya peluang untuk kerja sama dengan perguruan tinggi di Kulon Progo dalam upaya	**Strategi Peluang dan Kekuatan** - Pengembangan platform literasi digital tentang lingkungan hidup, e-book, atau audio book untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama generasi muda.	**Strategi Kelemahan dan Peluang** - Optimalisasi pengembangan sistem informasi lingkungan hidup (kualitas air, udara, tanah dll) berbasis digital - Peningkatan kapasitas SDM pemerintah dan komunitas dalam

Analisis *TOWS – Strength, Weakness, Opportunities and Threats*		
pelestarian lingkungan	- Penggunaan media sosial untuk kampanye literasi dan promosi pelestarian lingkungan hidup - Peningkatan *online monitoring* kualitas lingkungan	*environmental empowering* melalui *digital governance* dan kolaborasi dengan perguruan tinggi - Pengembangan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan dan minim budget operasional
Ancaman - Tingkat risiko bencana di Kulon Progo tergolong tinggi	**Strategi Ancaman dan Kekuatan** - Menggunakan teknologi informasi lingkungan hidup	**Strategi Kelemahan dan Ancaman** - Membuat standar ramah lingkungan pada pembangunan di Kulon Progo - Mengadakan sosialisasi terkait isu lingkungan secara masif, termasuk untuk mitigasi bencana yang mungkin terjadi

b. Sasaran *Smart Environment*

Mewujudkan lingkungan hidup yang lestari dan tangguh terhadap bencana, dengan strategi pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, penanganan sampah terpadu, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Tabel 3. 12 Sasaran Smart Environment

Sub Dimensi 1: En1. Mengembangkan Program Perlindungan Lingkungan Hidup (*Protection*)
En.1.1. Mengembangkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Sasaran ini termasuk penanganan sampah dan konservasi lahan, untuk mengatasi penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan meningkatnya volume sampah.
Sub Dimensi 2: En2. Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah (*Waste*)
En.2.1. Mengembangkan sistem terintegrasi untuk tata kelola limbah dan sampah.

Sub Dimensi 3: En3. Mengembangkan Tata Kelola Energi Yang Bertanggung-jawab (*Energy*)
En.3.1. Mengoptimalkan pengelolaan energi dan sumber daya alam. Sasaran ini termasuk pemanfaatan potensi perdagangan karbon dari kawasan hutan dan mangrove.

BAB IV
PETA JALAN PEMBANGUNAN SMART CITY KULON PROGO

Peta jalan pembangunan *smart city* Kabupaten Kulon Progo dibagi menjadi 3 jangka waktu, yaitu: jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka panjang (10 tahun). Pada penyusunan peta jalan pembangunan *Smart City* Kulon Progo, terdiri dari program *Smart City*, Dimensi *Smart City*, *timeline*, Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab program, sumber pembiayaan, besaran anggaran, dan keterkaitan program dengan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Program pembangunan *smart city* dalam bagian ini dipetakan berdasarkan prioritas tahun.

4.1 PETA JALAN SMART GOVERNANCE

Tabel 4. 1 Peta Jalan Smart Governance Jangka Pendek - Menengah (2025 – 2029)

Sub Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Layanan Publik	**G.1.1.2.** Penguatan Mekanisme Umpan Balik dan Pengawasan Partisipatif Berbasis Platform Digital	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	10.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	**G.1.1.2.P.1.** Pembangunan Aplikasi SIMPel (Sistem InforMasi Pengendalian)	5 (salah satunya pengujian / trial eror aplikasi SIMPel)	27.289.300	2 (pengoperasian SIMPel secara terbatas)	24.014.500	2 (Pengoperasian secara penuh SIMPel)	29.298.000	2 (persiapan pengembangan SIMPel)	29.883.000	2 (pengembangan SIMPel yang terkoneksi dengan SIRUP)	30.600.000	APBD	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
	G.1.1.1. Pengembangan Ekosistem Layanan Publik Terintegrasi Berbasis Identitas	Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : Pelayanan	Terintegrasinya layanan pajak daerah dan pembayaran pajak daerah dalam satu portal.	10.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secar	**G.1.1.1.P.1.** Eling Pajak Daerah (Elektronifikasi Layanan dan Integrasi Pajak Daerah)	Perencanaan; Koordinasi stakeholder; Pembangunan Aplikasi; Pembayaran	75.000.000	Integrasi *Single Sign On;* Pembayaran Pajak Daerah VA; Ujicoba SSO	80.000.000	*Launching* SSO; *Update* dan pemeliharaan aplikasi	75.000.000	*Update* dan pemeliharaan aplikasi	75.000.000	*Update* dan pemeliharaan aplikasi	50.000.000	APBD	BKAD

Sub Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	Digital Tunggal (*Single Citizen Identity*)	dan Konsultasi Pajak Daerah		a daring		Pajak Daerah QRIS; Launching;											
	G.1.1.2. Penguatan Mekanisme Umpan Balik dan Pengawasan Partisipatif Berbasis Platform Digital.	Program pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pengawasan organisasi kemasyarakatan	10.2. persentase layanan yang tersedia/minta secara daring 10.3.rata-rata waktu respons non-darurat	**G.1.1.2.P.3.** Aplikasi berbasis Web, BangsaKu	79,87	119.707.200	84,56	105.268.053	89,26	128.959.653	93,96	131.917.736	97,32	135.108.073	APBD	Badan Kesbangpol
	G.1.1.3. Otomatisasi dan Digitalisasi End to End	Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah pemohon yang melakukan pembuatan izin di	10.2 Persentase layanan kota yang dapat diaks	**G.1.1.3.P.1.** SiPerimanis Kapanewpn	1 video	26.000.000	3 Unit - 300 izin	100.000.000	3 Unit - 300 izin	100.000.000	3 Unit - 300 izin	100.000.000	3 Unit - 300 izin	100.000.000	APBD	DPMPTSP

Sub Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	Layanan Perizinan Multi Sektor.		kapan ewon	es dan yang dapat diminta secara daring													
	G.1.1.1. Pengembangan Ekosistem Layanan Publik Terintegrasi Berbasis Identitas Digital Tunggal (*Single Citizen Identity*)	**Sub Kegiatan:** Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan. **Kegiatan:** Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. **Program:** Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terbangunnya sistem layanan akte kelahiran dan kematian yang terintegrasi dengan data NIK serta kemudahan pemantauan data kependudukan	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	**G.1.1.1.P.2.** AKURAD (Aksi Kalurahan Ramah Administrasi Kependudukan)	3 Dokumen	10.159.950	3 Dokumen	10.159.950	3 Dokumen	11.135.300	3 Dokumen	11.759.000	3 Dokumen	12.397.000	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	G.1.1.2. Penguatan	**Program : Penunjang Urusan Pemerinta**	Laporan Hasil Survey Kepuas	SNI 10. Peme	**G.1.1.2.P.4.** Survey Kepuasan	100% laporan hasil SKM		100% laporan hasil SKM		100% laporan hasil SKM		100% laporan hasil SKM		100% laporan hasil SKM		APBD	Bagian Organ

Sub Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	Mekanisme Umpan Balik dan Pengawasan Partisipatif Berbasis Platform Digital.	**han Daerah Kabupaten/ Kota** **Kegiatan : Penataan Organisasi** **Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana**	an Masyarakat (SKM)	rintahan	Masyarakat Kulon Progo (SKM-Ku)												isasi Setda
Manajemen Birokrasi yang Efisien	**G.2.1.3.** Penguatan Manajemen Kinerja Berbasis Data dan Akuntabilitas Multi Level	**Program :** Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota **Kegiatan** : Penataan Organisasi **Sub Kegiatan** : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kebijakan bidang peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi	SNI 10. Pemerintahan	**G.2.1.3.P.1.** Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan(E-SAKIP)	1 dokumen Perencanaan dan pengembangan probis sistem		1 dokumen Perencanaan dan pengembangan probis		1 dokumen Analisis kebutuhan penyimpanan data		1 paket Pengadaan penyimpanan data		1 dokumen evaluasi		APBD	Bagian Organisasi Setda

Sub Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	G.2.1.3. Penguatan Manajemen Kinerja Berbasis Data dan Akuntabilitas Multi Level	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	21.1. Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan	**G.2.1.3.P.2.** Pengembangan Portal Data Pengadaan Barang/Jasa terintegrasi	1	25.000.000	1 (pengoperasian aplikasi tambahan secara terbatas)	27.000.000	1 (Pengoperasian secara penuh aplikasi tambahan	28.000.000	1 (persiapan pengintegrasian	50.000.000	1 (pengoperasian portal web pbj secara terbatas)	50.000.000	APBD	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
	G.2.1.1. Transformasi Kapasitas SDM ASN Menuju Pola Pikir Digital dan Adaptif.	**Program Kepegawaian Daerah**--Subkegiatan Koordinasi dan kerjasama Pelaksanaan Diklat. **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**-Subkegiatan-	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan Kompetensi	-	**G.2.1.1.P.1.** Pengembangan Kompetensi ASN terintegrasi secara Digital menuju Kulon Progo *Corporate University*	1 dokumen hasil koordinasi dan kerjasama diklat	1.878.745.300	43,14 %	2.178.745.050	44,83 %	1.986.890.485	46,30 %	2.019.141.910	47,88 %	2.071.012.665	APBD	BKPSDM

Sub Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan															
	G.2.1.2. Pembangunan dan Penguatan Ekosistem Tata Kelola Keamanan Informasi Terintegrasi	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Subkegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terbangun dan beroperasinya sistem aplikasi untuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	21.1. Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan	**G.2.1.2.P.1.** Aplikasi untuk TSP	1 aplikasi	0	1 aplikasi	0	1 aplikasi	0	1 aplikasi	0	1 aplikasi	0	ABPD	Bapperida dan Dinas Kominfo

Sub Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	G.2.1.3. Penguatan Manajemen Kinerja Berbasis Data dan Akuntabilitas Multi Level	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Subkegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja	21.1. Jumlah warga kota per 100.000 penduduk pertahun yang terlibat dalam proses perencanaan	**G.2.1.3.P.3.** Monevku	1 aplikasi	40.000.000	1 aplikasi	40.000.000	1 aplikasi	40.000.000	1 aplikasi	40.000.000	1 aplikasi	40.000.000	ABPD	Bapperida
	G.2.1.1. Transformasi Kapasitas SDM ASN Menuj	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Subkegiatan Penelitian,	Terbangunnya sistem informasi riset dan	21.1. Jumlah warga kota per 100.000	**G.2.1.1.P.2.** Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah	1 aplikasi	40	1 aplikasi	40	1 aplikasi	50.000.000	1 aplikasi	50.000.000	1 aplikasi	50.000.000	ABPD	Bapperida

Sub Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	u Pola Pikir Digital dan Adapti f.	Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	inovasi daerah	penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan													
	G.2.1.3. Penguatan Manajemen Kinerja Berbasis Data dan Akuntabilitas Multi Level	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LHP, LHR, LHE digital	SNI 10. Pemerintahan	**G.2.1.3.P.4**. Sistem pengelolaan LHP, LHR, LHE berbasis elektronik	Membuat sistem pengelolaan LHP, LHR, LHE berbasis elektronik	0	-	0	-	0	-	0	-	0	APBD	Inspektorat Derah

Sub Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Efisiensi Kebijakan Publik	**G.3.1.1.** Pemanfaatan Analitik Data untuk Perumusan Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence Based Policy)	Program : Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Kegiatan : Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten /kota Sub Kegiatan : Pelayanan informasi Publik	Terintegrasinya data dar berbagai sektor yang dapat digunakan sebgai DDS (Decision Support System)	SNI 10. Pemerintahan	**G.3.1.1.P.2.** Dashboard Data Pro	-	0,00	1 paket Perangkat Layanan Informasi Media Pimpinan Daerah	618.240.000	-	0,00	-	0,00	-	-	APBD	Dinas Kominfo
	G.3.1.3. Harmonisasi dan Standardisasi Regulasi Daerah dengan	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Masyarakat mudah dalam mengakses produk hukum dan informasi hukum	10.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat	**G.3.1.3.P.1.** JDIH Kabupaten Kulon Progo *user friendly*	Perencanaan ekosistem JDIH Kabupaten Kulon Progo *userfriendly*	17.005.000	Pematangan rencana JDIH Kabupaten Kulon Progo *userfriendly*	20.000.000	Pelaksanaan pengembangan JDIH Kabupaten Kulon Progo *userfriendly*,	20.000.000 100.000.000 (dalam permohonan)	Implementasi JDIH Kabupaten Kulon Progo *userfriendly* (1 website)	20.000.000	Evaluasi dan Uji Kepuasan Masyarakat, Para Pemangku Kepentingan	20.000.000	APBD	Bagian Hukum Setda

Sub Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	Kerangka Kerja Nasional.		di JDIH Kabupaten Kulon Progo	diminta secara daring		(1 Laporan)		(1 Laporan)		Pihak Ketiga (1 website)				(1 Laporan)			

Tabel 4. 2 Peta Jalan Smart Governance Jangka Panjang (2030-2034)

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Layanan Publik																	
Manajemen Birokrasi yang Efisien	**G.2.1.1.** Transformasi Kapasitas SDM ASN Menuju Pola Pikir		Peningkatan persentase ASN yang memenuhi Pengembangan Kompetensi	-	**G.2.1.1.P.1.** Pengembangan Kompetensi ASN terintegrasi secara	49,39%	2.136.424.105	50,30%	2.243.245.310	51,30%	2.355.407.576	52,30%	2.473.177.955	53,30%	2.596.836.852	APBD Kab. Kulon Progo	KPSDM

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	Digital dan Adaptif.				Digital menuju Kulon Progo Corporate University												
	G.2.1.2. Pembangunan dan Penguatan Ekosistem Tata Kelola Keamanan Informasi Terintegrasi		Terbangun dan beroperasinya sistem aplikasi untuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan		**G.2.1.2.P.1.** Aplikasi untuk TSP	1 aplikasi	0	1 aplikasi	0	1 aplikasi	0	1 aplikasi	0	1 aplikasi	0	ABPD	Bappeda dan Dinas Kominfo
Efisiensi Kebijakan Publik	**G.3.1.3.** Harmonisasi dan Standardisasi Regulasi Daerah dengan Kerangka Kerja	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Masyarakat mudah mengakses JDIH Kabupaten Kulon Progo melalui aplikasi *playstore*	10.2 Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat	**G.3.1.3.P.1.** JDIH Kabupaten Kulon Progo tersedia di aplikasi playstore	Perencanaan JDIH Kabupaten Kulon Progo tersedia di aplikasi	20.000.000	Pemantangan rencana JDIH Kabupaten Kulon Progo tersedia di *playstore* (1 Laporan)	20.000.000	Pelaksanaan pengembangan JDIH Kabupaten Kulon Progo di *playstore* (1 aplikasi *playstore*)	20.000.000 50.000.000 (dalam permohonan)	Implementasi JDIH Kabupaten Kulon Progo di *playstore* (1 aplikasi *playstore*)	20.000.000	Evaluasi dan Uji Kepuasan Masyarakat, Para Pemangku Kepentingan	20.000.000	APBD	Bagian Hukum Setda

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	Nasional.			diminta secara daring		*playstore* (1 Laporan)								(1 Laporan)			

4.2 PETA JALAN SMART BRANDING

Tabel 4. 3 Peta Jalan Smart Branding Jangka Pendek - Menengah (2025 – 2029)

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Inovasi (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Ekosistem Pariwisata	**B.1.1.1.** Pengembangan "Ekonomi Kreatif & Ekowisata Berbasis Geoheritage" Terintegrasi dengan	Program Pemasaran Pariwisata: 1.Kampanye digital “Sambanggo Friendly Kulon Progo”, Paket Wisata Terpadu,	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan yang datang ke Kab. Kulon Progo	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan daring	**B.1.1.1. P.1.** All-in-One Tourism App Kulon Progo: Aplikasi resmi wisata yang mengintegrasikan info destinasi, reservasi tiket, paket	1.-	-	Uji coba; 3% layanan rekreasi publik online	100.000.000	5% layanan rekreasi publik online, 10 pemesan aplikasi	250.000.000	10% layanan rekreasi publik online, 50 pemesan aplikasi	250.000.000	20% layanan rekreasi publik online, 500 pemesan aplikasi	350.000.000	APBD (Dana Keistimewaan dan PAD), CSR	Dinas Pariwisata Kolaborasi dengan:: Dinas Kominfo, BKAD dan Bapperida

Sub - Dimensi	Strategi	Program/Inovasi (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Ang g.	Target Kinerja	Ang g.	Target Kinerja	Ang g.	Target Kinerja	Ang g.	Target Kinerja	Ang g.		
	Bandara YIA.				wisata, transportasi lokal, hingga UMKM kuliner												
	B.1.1.2. Penguatan Brand Budaya Lokal melalui Digitalisasi dan Event Tahunan yang Konsisten.	Festival Budaya Tahunan, Paket wisata terpadu (alam, budaya, kuliner)	Jumlah aplikasi wisata yang digunakan pengunjung	17.1 Jumlah pemesanan daring fasilitas budaya/100.000 penduduk	**B.1.1.2.P.1.** Sambanggo Smart Festival: Event budaya tahunan (batik khas Kulon Progo, pentas seni, festival kuliner) yang dipromosikan lewat live streaming & market place tiket online.	1 festival	75.000.000	2 Festival	100.000.000	3 Festival	150.000.000	4 Festival	200.000.000	5 Festival	300.000.000		

Sub - Dimensi	Strategi	Program/Inovasi (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Ang g.	Target Kinerja	Ang g.	Target Kinerja	Ang g.	Target Kinerja	Ang g.	Target Kinerja	Ang g.		
	B.1.1.3. Kolaborasi Multi Aktor untuk Pemasaran Pariwisata yang Inklusif dan Terukur.	Festival budaya tahunan Integrasi tiket & reservasi online (QRIS, aplikasi wisata Kulon Progo)	Jumlah event tahunan yang menarik wisatawan	9.1 Pendapatan ekonomi berbagi sebagai persentase PAD	**B.1.1.3.P.1.** Gamifikasi Wisata "Sambanggo Explorer": Wisatawan dapat poin saat berkunjung (scan QR di destinasi)	-	-	Uji Coba	100.000.000	100 user	100.000.000	300 user	200.000.000	500 user	250.000.000		
	B.1.1.2. Penguatan Brand Budaya Lokal melalui Digitalisasi dan Event Tahunan yang Konsisten.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah aktifitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa, sastra, dan permuseuman	17b.2 Persentase catatan budaya kota yang telah didigitalkan	**B.1.1.2.P.2.** Kajian Warisan Budaya Tak Benda	11 (satu) Dokumen	72.000.000	1 (satu) Dokumen	72.000.000	1 (satu) Dokumen	72.000.000	1 1 (satu) Dokumen	72.000.000	1 (satu) Dokumen	72.000.000	Dana Keistimewaan	Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan)*

Sub - Dimensi	Strategi	Program/Inovasi (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Ang g.	Target Kinerja	Ang g.	Target Kinerja	Ang g.	Target Kinerja	Ang g.	Target Kinerja	Ang g.		
	B.1.1.2. Penguatan Brand Budaya Lokal melalui Digitalisasi dan Event Tahunan yang Konsisten.		Warisan Budaya yang sudah ditetapkan;		**B.1.1.2.P.3.** Naskah Rekomendasi Cagar Budaya	20 (dua puluh) Naskah Rekomendasi	160.000.000	10 (sepuluh) Naskah Rekomendasi	80.000.000	10 (sepuluh) Naskah Rekomendasi	80.000.000	10 (sepuluh) Naskah Rekomendasi	80.000.000	10 (sepuluh) Naskah Rekomendasi	80.000.000	Dana Keistimewaan	Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan)*
	B.1.1.2. Penguatan Brand Budaya Lokal melalui Digitalisasi dan Event Tahunan yang Konsisten.		Jumlah Kelurahan/ Kaluraha n Budaya dan Rintisan Kelurahan/Kalurahan Budaya Kategori Berkembang		**B.1.1.2.P.4.** Kalurahan/Desa Budaya	1 (satu) Kalurahan/ Desa Budaya	20.000.000	1 (satu) Kalurahan/ Desa Budaya	20.000.000	1 (satu) Kalurahan/ Desa Budaya	20.000.000	1 Kalurahan/ Desa Budaya	200.000.000	1 (satu) Kalurahan/ Desa Budaya	200.000.000	Dana Keistimewaan	Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan)*
	B.1.1.2. Penguatan Brand	Program Pengembangan	Persentase sarana dan prasaran	7.8 Persentase bangunan	**B.1.1.2.P.5.** Pengembangan	Rehabilitasi Ruang	24.000.000	71.300 orang/pengunjung Taman	500.000.000	72.300 orang/pengunjung Taman	600.000.000	73.300 orang/pengunjung Taman	700.000.000	74.300 orang/pengunjung Taman	800.000.000	DAK Non Fisik	Dinas Kebudayaan

Sub - Dimensi	Strategi	Program/Inovasi (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Ang g.	Target Kinerja	Ang g.	Target Kinerja	Ang g.	Target Kinerja	Ang g.	Target Kinerja	Ang g.		
	Budaya Lokal melalui Digitalisasi dan Event Tahunan yang Konsisten.	Kebudayaan	a kondisi baik di Taman Budaya Kulon Progo Jumlah penonton pertunjukan seni di Taman Budaya	umum yang memb utuhkan renovasi/ perbaikan	Talenta Seni dan Budaya	Galeri Seni Taman Budaya Kulon Progo		Budaya Kulon Progo		Budaya Kulon Progo		Budaya Kulon Progo		Budaya Kulon Progo			(*Kundha Kabudayan)*
Daya Saing Bisnis	**B.2.1.2.** Penguatan Ekosistem Kewirausahaan dan UMKM Melalui Literasi Digital dan Akses Pendanaan.	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan Penanaman Modal / *Investment Smartboard*	Peningkatan realisasi investasi	SNI 14. Rekreasi (14.1) Presentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	**B.2.1.2.P.1.** *Investment Smartboard* (Penyediaan informasi dan pemberian kemudahan investasi)	10% 10 orang yang mengakses layanan *Investment Smartboard*	100.000.000	20%	100.000.000	30%	75.000.000	40%	50.000.000	50%	30.000.000	APBD	DPMPTSP
Wajah Kota																	

Tabel 4. 4 Peta Jalan Smart Branding Jangka Panjang (2030-2034)

Sub - Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Ang g.	Target Kinerja	Ang g.	Target Kinerja	Ang g.	Target Kinerja	Ang g.	Target Kinerja	Ang g.		
Ekosistem Pariwisata	**B.1.1.1.** Pengembangan "Ekonomi Kreatif & Ekowisata Berbasis Geoheritage" Terintegrasi dengan Bandara YIA.	Program Pemasaran Pariwisata: 1.Kampanye digital "Sambanggo Friendly Kulon Progo", Paket Wisata Terpadu	Kunjungan wisatawan mancanegara	14.1 Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan daring	**B.1.1.1.P.1.** All-in-One Tourism App Kulon Progo	Fokus pada digitalisasi praktis (aplikasi, reservasi, QRIS).: 50% destinasi wisata bisa dipesan online		Fokus pada digitalisasi praktis (aplikasi, reservasi, QRIS).: 60% destinasi wisata bisa dipesan online		Fokus pada digitalisasi praktis (aplikasi, reservasi, QRIS).: 70% destinasi wisata bisa dipesan online		Fokus pada digitalisasi praktis (aplikasi, reservasi, QRIS).: 85% destinasi wisata bisa dipesan online		Fokus pada digitalisasi praktis (aplikasi, reservasi, QRIS).: 100% destinasi wisata bisa dipesan online		APBD (Dana Keistimewaan dan PAD), CSR	Dinas Pariwisata Kolaborasi dengan: Dinas Kominfo, BKAD dan Bapperida
	B.1.1.2. Penguatan Brand Budaya Lokal melalui Digitalisasi dan Event Tahunan yang Konsisten.	Festival Budaya Tahunan, Paket wisata terpadu (alam, budaya, kuliner)	Persentase destinasi berbasis digital	17.1 Jumlah pemesanan daring fasilitas budaya/100.000 penduduk	**B.1.1.2.P.2.** Kajian Warisan Budaya Tak Benda (Festival budaya & kuliner rutin bertaraf nasional)	Branding tetap "Sambanggo Friendly Kulon Progo" →ramah, budaya, kuliner, alam: 10 festival		Branding tetap "Sambanggo Friendly Kulon Progo" →ramah, budaya, kuliner, alam: 10 festival		Branding tetap "Sambanggo Friendly Kulon Progo" →ramah, budaya, kuliner, alam: 10 festival		Branding tetap "Sambanggo Friendly Kulon Progo" →ramah, budaya, kuliner, alam: 10 festival		Branding tetap "Sambanggo Friendly Kulon Progo" →ramah, budaya, kuliner, alam: 10 festival		APBD (Dana Keistimewaan dan PAD), CSR	Dinas Pariwisata Kolaborasi dengan: Dinas Kominfo, BKAD dan Bapperida

Sub - Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
	B.1.1.2. Penguatan Brand Budaya Lokal melalui Digitalisasi dan Event Tahunan yang Konsisten.		Persentase Warisan Budaya yang Sudah ditetapkan: Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa, sastra, dan permuseuman	17b.2 Persentase catatan budaya kota yang telah didigitalkan	**B.1.1.2.P.6**. Pembangunan Tetenger Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo	Tetenger Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo	300.000.000										Dana Keistimewaan	Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*
	B.1.1.2. Penguatan Brand Budaya Lokal melalui Digitalisasi dan Event Tahunan yang Konsisten		Warisan Budaya yang sudah ditetapkan;		**B.1.1.2.P.3.** Naskah Rekomendasi Cagar Budaya	20 (dua puluh) Naskah Rekomendasi	000.000	10 (sepuluh) Naskah Rekomendasi	000.000	10 (sepuluh) Naskah Rekomendasi	80.000.000	10 (sepuluh) Naskah Rekomendasi	80.000.000	10 (sepuluh) Naskah Rekomendasi	80.000.000	Dana Keistimewaan	Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*
	B.1.1.2. Pengu		Jumlah Kelurahan/		**B.1.1.2.P.4.**	atu) Desa Budaya	000.000	1 (satu) Desa Budaya	000.000	1 (satu) Desa Budaya	20.000.000	1 (satu) Desa Budaya	20.000.000	1 (satu) Desa Budaya	20.000.000	Dana Keisti	Dinas Kebu

Sub - Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran		
	atan Brand Budaya Lokal melalui Digitalisasi dan Event Tahunan yang Konsisten		Kaluraha n Budaya dan Rintisan Keluraha n/Kalura han Budaya Kategori Berkemb ang		Kaluran han/De sa Budaya											mewa an	daya an (*Kun dha Kabu daya n*
	B.1.1.2. Penguatan Brand Budaya Lokal melalui Digitalisasi dan Event Tahunan yang Konsisten	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik di Taman Budaya Kulon Progo 1.1 Jumlah penonton pertunjukan seni di Taman Budaya	7.8 Persentase bangunan umum yang membutuhkan renovasi/ perbaikan	**B.1.1.2.P.5.** Pengembangan Talenta Seni dan Budaya	75.300 orang/pengunjung	850.000.000	76.300 orang/pengunjung	900.000.000	77.300 orang/pengunjung	950.000.000	78.300 orang/pengunjung	1M	80.000 orang/pengunjung	1M	DAK Non Fisik	Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*
Daya Saing Bisnis	**B.2.1.2.** Penguatan Ekosistem Kewira	Program Pengelolaan Data dan Inform	Program Promosi Penanaman Modal / *Investment*		**B.2.1.2.P.1.** *Invesment Smartboard*	10% : 30 orang yang mengakses layanan	150.000.000	20%	150.000.000	30%	100.000.000	40%	100.000.000	50%	75.000.000	APBD	DPM PTSP

Sub - Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Ang g.	Target Kinerja	Ang g.	Target Kinerja	Ang g.	Target Kinerja	Ang g.	Target Kinerja	Ang g.		
	usahaan dan UMKM Melalui Literasi Digital dan Akses Pendanaan.	asi Perizinan Penanaman Modal	*Smartboard*		*(*Penyediaan informasi dan pemberian kemudahan investasi)	*Investment Smartboard*											
Wajah Kota																	

4.3 PETA JALAN SMART ECONOMY

Tabel 4. 5 Peta Jalan Smart Economy Jangka Pendek - Menengah (2025 – 2029)

Sub-Dimensi	Strategi	Program Inovasi (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Industri Berdaya Saing	**Ec.1.1.3.** Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM melalui	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1. Nilai Usaha Industri 2. Jumlah UMKM MIkro	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	**Ec.1.1.3.P.1.** *Pay-On Pro*	2.732.693.188.016 18.141	876.634.100 1.984.173.400	2.735.445.369.345 20.653	913.014.415 2.066.516.596	2.738.200.259.828 23.267	950.904.513 257.406.334	2.740.957.861.567 25.983	990.367.051 268.088.697	2.743.718.176.659 28.801	1.031.467.283 279.214.378	APBD Kabupaten DAIS	Dinas Perindustrian Koperasi UKM kolaborasi dengan Kominfo dan

Sub-Dimensi	Strategi	Program Inovasi (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	Kolaborasi Sektor Swasta dan Teknologi.		yang naik Subkelas														BPD DIY
	Ec.1.1.2. Pengembangan Klaster Industri Kreatif dan Budaya Terintegrasi.	1. Identifikasi kebijakan pemerintah	Mengidentifikasi Peluang Bisnis Sejalan dengan Kebijakan Pemerintah	5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	**Ec.1.1.2.P.1.** Produk Kredit-Ku			V	100	V	100	V	100	V	100	Bank Kulon Progo	Bank Kulon Progo
	Ec.1.1.1. Hiliriasi Pertanian dan Perikanan Berbasis Digital.		Jumlah lokasi Ngulir Budi	20.3. Persentase luas tanah kota yang dicakup oleh sistem pemetaan pemasok makanan daring	**Ec.1.1.1.P.1.** NGULIR BUDI adalah singkatan dari Ngupoyo Hulu Hilir Budidoyo Iwak	1	350juta	0	0	1	370juta	0	0	1	390juta	DAIS	Dinas kelautan dan Perikanan

Sub-Dimensi	Strategi	Program Inovasi (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	Ec.1.1.1. Hiliriasi Pertanian dan Perikanan Berbasis Digital.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah pakan mandiri yang diproduksi (ton)	20.3. Persentase luas tanah kota yang dicakup oleh sistem pemetaan pemasok makanan daring	**Ec.1.1.1.P.2.** PAMAN MOBILE singkatan dari Pakan Mandiri secara Mobile (berupa mesin cetak pakan mandiri sistem mobile/bergerak)	10 ton	250juta	12 ton	5juta	15 ton	260juta	20ton	5juta	23ton	270juta	APBD	Dinas kelautan dan Perikanan
	Ec.1.1.1. Hiliriasi Pertanian dan Perikanan Berbasis Digital.	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	1. Terlaksananya Uji Keamanan Pangan Asal Ikan (sampel) 2. Persentase pangan	SNI : 20.3. Persentase luas tanah kota yang dicakup oleh sistem pemetaan pemasok	**Ec.1.1.1.P.3.** SETITI akronim dari Sistem Pengawasan Ikan Anti Formalin.	1. 165 2. 94%	2juta	1. 165 2. 94%	1 juta	1. 165 2. 94%	10juta	1. 165 2. 94%	10juta			APBD	Dinas kelautan dan Perikanan

Sub-Dimensi	Strategi	Program Inovasi (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
			asal ikan bebas formalin (%)	makanan daring													
	Ec.1.1.2. Pengembangan Klaster Industri Kreatif dan Budaya Terintegrasi.	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	1. Pelaku usaha yang dilakukan monitoring dan evaluasi terpadu (orang) 2. Peningkatan pelaku usaha pengolah dan pemasar ikan yang melakukan usaha sesuai standar **(%)**	SNI: 5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	**Ec.1.1.2.P.2.** **SUMINAR** akronim dari Sistem Monitoring Pelaku Usaha Pengolahan Pemasaran			1. 100 2. 65	2,2 juta							APBD	Dinas kelautan dan Perikanan
	Ec.1.1.3. Penin	Program pengola	1. Jumlah peserta	SNI: 20.3. Perse	**Ec.1.1.3.P.2.**	1. 180 2. 31,9	16,2 juta	1. 180 2. 32,4	16,3 juta	1. 180 2. 32,8	16,4 juta	1. 180 2. 33,4	16,6 juta	1. 180 2. 33,9	17 juta	APBD, DAIS	Dinas kelautan

Sub-Dimensi	Strategi	Program Inovasi (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	gkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM melalui Kolaborasi Sektor Swasta dan Teknologi.	han dan pemasaran hasil perikanan	GEMATI (orang) 2. Peningkatan Angka Konsumsi Ikan (AKI) dalam kg/orang/tahun	ntase luas tanah kota yang dicakup oleh sistem pemetaan pemasok makanan daring	**GEMATI** akronim dari Gerakan Makan Ikan Atasi Stunting												dan Perikanan
	Ec.1.1.1. Hiliriasi Pertanian dan Perikanan Berbasis Digital.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap laut (ton)	SNI: 5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	**Ec.1.1.1.P.4.** TPI Hebat (higienis, ekonomis, bersih, aman, tertib)	861	1 M	862	3,5M	867	1 M	868	1 M	869	1 M	APBD, DAIS, APBN	Dinas kelautan dan Perikanan
	Ec.1.1.1. Hilirisasi Pertanian dan Perikanan	Peningkatan kualitas Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/ Tanama	Jumlah pelaksanaan Peningkatan kualitas Sumber Daya Genetik	20.1. Persentase tahunan dari anggaran kota	Ec.1.1.1.P.5. *Smart Green house*	1 dokumen	1.000	1 dokumen	4.500	1 dokumen	4.500	1 dokumen	4.500	1 dokumen	6.300	APBD Kabupaten, UGM, Swasta	Dinas Pertanian dan Pangan

Sub-Dimensi	Strategi	Program Inovasi (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	Berbasis Digital.	n Kewenangan Kabupaten/Kota	(SDG) Hewan/ Tanaman	yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan													
Kesejahteraan Masyarakat	**Ec.2.1.1.** Program Peningkatan Keterampilan Vokasional dan Kewirausahaan Inklusif.		Membangun kalurahan ramah disabilitas	5.4. Persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian dan pengembangan	**Ec.2.1.1.P.1.** Kalurahan Ramah Disabilitas (bekerjasama dengan pihak ketiga seperti SIGAP untuk membangun kalurahan ramah disabilitas)	1. membuat SK Tim 2. Membuat peraturan yang mendukung program membangun kalurahan ramah disabilitas		- melakukan sosialisasi dan penunjukkan kalurahan ramah disabilitas - Melakukan pembinaan dan menambah jumlah KDK		- melakukan sosialisasi dan penunjukkan kalurahan ramah disabilitas - Melakukan pembinaan dan menambah jumlah KDK - Memudahkan aksesibilitas anggota KDK ke BLK dan		- melakukan sosialisasi dan penunjukkan kalurahan ramah disabilitas - Melakukan pembinaan dan menambah jumlah KDK - Memudahkan aksesibilitas anggota KDK ke BLK dan		- melakukan sosialisasi dan penunjukkan kalurahan ramah disabilitas - Melakukan pembinaan dan menambah jumlah KDK - Memudahkan aksesibilitas anggota KDK ke BLK dan			Kesra, Disnakertrans, PMD Kal, Bank Kulon Progo, BPD, Kalurahan, Kapanewon, Pihak Ketiga

Sub-Dimensi	Strategi	Program Inovasi (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
										permodalan		permodalan		permodalan			
Transaksi Keuangan	**Ec.3.1.1.** Edukasi dan Literasi Keuangan Digital yang Inklusif.	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah peserta seminar yang hadir.	9.2. Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	**Ec.3.1.1.P.1.** Literasi Psar Modal (Pembentukan galeri investasi paralel antara pemda dengan Kampus UNY Wates untuk literasi pasar modal dan inkubator UMKM.)	100 orang 200 orang	N/A Rp10.000.000,-									APBD	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	Ec.3.1.2. Integrasi Sistem Pembayara	Program peningkatan sarana distribusi	Jumlah pedagang yang melakukan pembayaran	9.2 Persentase pembayaran ke kota yang	**Ec.3.1.2.P.1.** Gitarku	-	-	-	-	500 pedagang	Rp250.000.000,-	1500 pedagang	Rp50.000.000,-	5000 pedagang	Rp 80.000.000,-	APBD	Dinas Perdagangan, Diskominfo,

Sub-Dimensi	Strategi	Program Inovasi (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	n Digital dalam Layanan Publik dan Transaksi Lokal.	perdagangan	retribusi secara digital	dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik													APPSI
	Ec.3.1.2. Integrasi Sistem Pembayaran Digital dalam Layanan Publik dan Transaksi Lokal.	1. Pengembangan sistem informasi digital kepada nasabah Bank Kulon Progo 2. Peningkatan SD	1. Meningkatnya pelayanan digitalisasi kepada nasabah Bank Kulon Pr	9.2. Persentase pembayaran kekota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	**Ec.3.1.2.P.2.** BPR-Ku Mobile			V	500.000.000	V	2500.000.000	V	250.000.000	V	2500.000.000	Bank Kulon progo	Bank Kulon Progo

Sub-Dimensi	Strategi	Program Inovasi (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
		MTI	ogo 2. Peningkatan kompetensi SDM TI														
	Ec.3.1.3. Pengembangan Skema Pendanaan Alternatif untuk Ekonomi Lokal.	Perbaikan dan Pemeliharaan Program	Meningkatkan pelayanan kepada Kalurahan terkait transaksi non tunai dengan cara pemindahbukuan yang dilakukan oleh Bank	9.2. Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	**Ec.3.1.3.P.1.** Smart DesaKu			V	100.000.000	V	100.000.000	V	100.000.000	V	100.000.000	Bank Kulon progo	Bank Kulon Progo

Tabel 4. 6 Peta Jalan Smart Economy Jangka Panjang (2030-2034)

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Industri Berdaya Saing	**Ec.1.1.1**. Hilirisasi Pertanian dan Perikanan Berbasis Digital.		Peningkatan produksi perikanan tangkap laut	SNI: 5.2. Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	**Ec.1.1.1. P.4.** TPI Hebat (higienis, ekonomis, bersih, aman, tertib)	870	20 M	880	5 M	890	1 M	900	1 M	910	2 M	APBD, DAIS, APBN	Dinas kelautan dan Perikanan
Kesejahteraan Masyarakat																	
Transaksi Keuangan	**Ec.3.1.2.** Integrasi Sistem Pembayaran Digital dalam Layanan Publik dan Transaksi Lokal.	1. Pengembangan sistem informasi digital kepada nasabah Bank Kulon Progo 2. Peningkatan SDM TI	1.Meningkatnya pelayanan digitalisasi kepada nasabah Bank Kulon Progo 2.Peningkatan kompetensi SDM TI	9.2. Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	**Ec.3.1.2. P.2.** BPR-Ku Mobile	V	250.000.000									Bank Kulon Progo	Bank Kulon Progo
	Ec.3.1.3. Pengembangan	Perbaikan dan Pemelihar	Meningkatkan pelayanan	9.2. Persentase	**Ec.3.1.3. P.1.**	V	100.000.000									Bank Kulon	Bank Kulon Progo

4.5 PETA JALAN SMART LIVING

Tabel 4. 7 Peta Jalan Smart Living Jangka

	Skema Pendanaan Alternatif untuk Ekonomi Lokal.	aan Program	kepada Kalurahan terkait transaksi non tunai dengan cara pemindahbukuan yang dilakukan oleh Bank	pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	Smart DesaKu											Progo	

Pendek -

Menengah (2025 – 2029)

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Harmonisasi Tata Ruang	**Lv.1.1.1.** Pengembangan SimtaruKu 2.0 sebagai Platform Kolaboratif Tata Ruang Digital.	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penataan Kawasan Berbasis Geospasial	12.1. Persentase rumah tangga dengan pengukur energi pintar	**Lv.1.1.1.P.1.** Sistem Informasi Tata Ruang Kulon Progo (SimtaruKu)	Pemeliharaan dan pengembangan berupa Penambahan filtur layanan permohonan KRK (keterangan rencana kabupaten) sebagai salah satu syarat PBG	36.000.000	Penambahan filtur layanan permohonan KRK (keterangan rencana kabupaten) sebagai salah satu syarat PBG	40.000.000	Pemeliharaan dan pengembangan berupa Penambahan filtur layanan permohonan KRK (keterangan rencana kabupaten) sebagai salah satu syarat PBG,	40.000.000	Pemeliharaan dan pengembangan berupa Penambahan filtur layanan permohonan KRK (keterangan rencana kabupaten) sebagai salah satu syarat PBG,	40.000.000	Pemeliharaan dan pengembangan berupa Penambahan filtur layanan permohonan KRK (keterangan rencana kabupaten) sebagai salah satu syarat PBG,	40.000.000	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Komunikasi dan Informatika,

Tabel 4.8 Peta Jalan Smart Living Jangka Panjang (2030-2034)

										entry peta RDTR dan Peta Tematik		entry peta RDTR dan Peta Tematik		entry peta RDTR dan Peta Tematik			
Sarana/ Prasarana Kesehatan	**Lv.2.1.1**. Pembangunan Ekosistem Kesehatan Digital Terpadu.	Membangun dan Meningkatkan Fasilitas Layanan Kesehatan Primer dan Sekunder	Pelayanan kesehatan ibu hamil	11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu dari ng yang dapat diakses oleh penyedia layanan kese	**Lv.2.1.1.P.1.** Pembangunan Ekosistem Kesehatan Digital Terpadu.Bumilku	83,33	54.464.222.676	91,84	57.963.229.944	100	61.813.732.938	100	67.264.103.232	100	72.956.862.705	APBD, BOK	DINAS KESEHATAN

				hata n													

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Harmonisasi Tata Ruang	**Lv.1.1.1.** Pengembangan SimtaruKu 2.0 sebagai Platform Kolaboratif	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penataan Kawasan Berbasis Geospasial	12.1. Persentase rumah tangga dengan pengukuran energi	**Lv.1.1.1.P.1.** Sistem Informasi Tata Ruang Kulon Progo (SimtaruKu)	Pemeliharaan dan pengembangan berupa Penambahan fitur layanan permo	120.000.000	Penambahan fitur layanan permohonan KRK (Keterangan Rencana Kabupaten)	120.000.000	Pemeliharaan dan pengembangan berupa Penambahan filtur layanan	120.000.000	Pemeliharaan dan pengembangan berupa penyesuaian dengan RTRW	100.000.000	Pemeliharaan dan pengembangan berupa penyesuaian dengan RTRW	100.000.000	APBD	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Komunikasi dan Informatika,

	Lv.2.1.1. Pembangunan Ekosistem Kesehatan Digital Terpadu.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yg dilakukan pendampingan	11.1. Persentase popu lasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	**Lv.2.1.1.P.2.** Simoku Sistem Informasi Manajemen Obat Kabupaten Kulon Progo) Pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai	22,22	518.464.100	25,56	570.310.510	27,78	627.341.561	30,00	690.075.717	33,33	759.083.288	APBD, BOK	DINAS KESEHATAN
Sarana/ Prasarana Kesehatan	Lv.2.1.3. Jaringan Layanan Kesehatan Berge	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem	Persentase penerapan teknologi yang dianjurkan	11.3. Persentase popu lasi kota yan	**Lv.2.1.3.P.1.** Pengembangan Sistem Integrasi Gangg	30%	6	100%	50							PDAM	PDAM

Sarana/ Prasarana Kesehatan	rak Terjadwal.	Penyediaan Air Minum		gmemiliki akses kesistem peringatan public langsung (real-time) untuk saran kualitas udara dan air	uan Pelayanan (SITE GAP) berbasis website dan android untuk publik												
	Lv.2.1.3. Jaringan Layanan Kesehatan Bergerak Terjadwal.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penerapan teknologi yang dianjurkan	11.3. Persentase populasi kota yang memiliki akses kesistem	**Lv.2.1.3.P.2.** Pengembangan Sistem Informasi Gangguan Pelayanan PDAM Kulon Progo (SIGAPKU)			20%	30							PDAM	PDAM

				peringatan public langsung (real-time) untuk saran kualitas udara dan air	berbasis website dan android untuk publik												
	Lv.2.1.1. Pembangunan Ekosistem Kesehatan Digital Terpadu.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah berkinerja sangat tinggi	Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu dari ng yang dapat diak	**Lv.2.1.1.P.3**. Ranting Kuat (Rawat Anak Stunting Kulon Progo agar Sehat)	50 Anak,	250	50 Anak	250	50 Anak	250	50 Anak	250	50 Anak	250	BLUD	RSUD WATES

				sespenyedialayanankesehatan													
	Lv.2.1.3. Jaringan Layanan Kesehatan Bergerak Terjadwal.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	.	11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu dari ng yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	**Lv.2.1.3.P.3**. Sapayandu (Aplikasi digital Posyandu sederhana. Kampanye edukasi berbasis komunitas.)	● Persentase Posyandu yang menggunakan sistem digital pencatatan data 80% ● Jumlah kader Posyandu yang mengikuti pelatihan	**Rp. 36.000.000**	● Persentase Posyandu yang menggunakan sistem digital pencatatan data 90% ● Jumlah kader Posyandu yang mengikuti pelatihan	**Rp. 38.500.000**	● Persentase Posyandu yang menggunakan sistem digital pencatatan data 95% ● Jumlah kader Posyandu yang mengikuti pelatihan	**Rp. 40.500.000**	● Persentase Posyandu yang menggunakan sistem digital pencatatan data 100 % ● Jumlah kader Posyandu yang mengikuti pelatiha	**Rp. 43.000.000**	● Persentase Posyandu yang menggunakan sistem digital pencatatan data 100 % ● Jumlah kader Posyandu yang mengikuti pelatiha	**Rp. 43.000.000**	APBD	Kapanewon Kalibawang

							teknologi dan pelayanan 90% kader • Penurunan angka stunting di wilayah program 10% • Persentase balita yang menerima PMT sesuai standar gizi 100 % • Jumlah kegiatan		teknologi dan pelayanan 95% kader • Penurunan angka stunting di wilayah program 15% • Persentase balita yang menerima PMT sesuai standar gizi 100 % • Jumlah kegiatan		teknologi dan pelayanan 100 % kader • Penurunan angka stunting di wilayah program 20% • Persentase balita yang menerima PMT sesuai standar gizi 100 % • Jumlah kegi		n teknologi dan pelayanan 100 % kader • Penurunan angka stunting di wilayah program 30% • Persentase balita yang menerima PMT sesuai standar gizi 100 % • Jumlah		n teknologi dan pelayanan 100 % kader • Penurunan angka stunting di wilayah program 30% • Persentase balita yang menerima PMT sesuai standar gizi 100 % • Jumlah			

			a.			edukasi dan kampanye kesehatan di tingkat pada ukuhan 12 kegiatan • Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Posyandu 85%		edukasi dan kampanye kesehatan di tingkat pada ukuhan 18 kegiatan • Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Posyandu 90%		atan edukasi dan kampanye kesehatan di tingkat pada ukuhan 18 kegiatan Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Posyandu 95%		kegiatan edukasi dan kampanye kesehatan di tingkat pada ukuhan 20 kegiatan Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Posyandu 100%		kegiatan edukasi dan kampanye kesehatan di tingkat pada ukuhan 20 kegiatan Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Posyandu 100%			

			b.															

			c.															

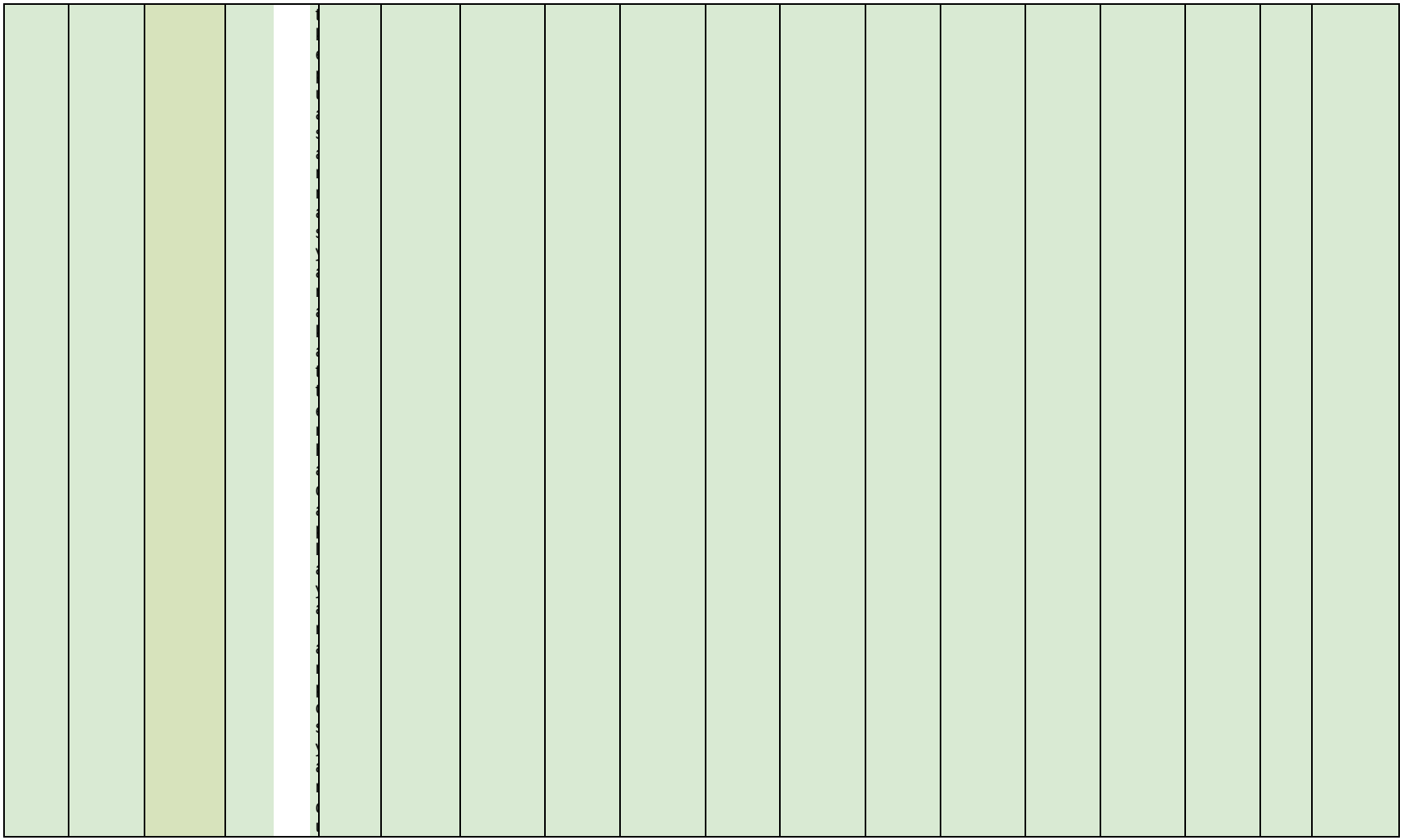

Prasarana Transportasi	**Lv.3.1.1.** Pengembangan Transportasi Publik Terpadu Berbasis Digital	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah siswa dan Sekolah di Kulon Progo yang terlayani bus sekolah dan penurunan angka kecelakaan dikalangan pelajar.	19.2. Jumlah pengguna transportasi ekonomi berbagi per 100.000 penduduk	**Lv.3.1.1.**P.1. Layanan Bus Inklusif (Layanan bus sekolah untuk antar jemput siswa dan layanan bus sekolah inklusif untuk antar jemput siswa berkebutuhan khusus secara gratis di Kulon Progo)	Pelayanan antar jemput siswa sekolah (jumlah siswa 40 siswa dari 13 sekolah) dan siswa SLB (1 SLB dengan jumlah siswa 20 orang) diwilayah Wates-Pengasih-Panjatan	377.564.950	Pelayanan antar jemput siswa sekolah (jumlah siswa 40 siswa dari 13 sekolah) dan siswa SLB (1 SLB dengan jumlah siswa 20 orang) diwilayah Wates-Pengasih-Panjatan	476.427.300	Pelayanan antar jemput siswa sekolah (jumlah siswa 40 siswa dari 13 sekolah) dan siswa SLB (1 SLB dengan jumlah siswa 20 orang) diwilayah Wates-Pengasih-Panjatan	476.427.300	Pelayanan antar jemput siswa sekolah (jumlah siswa 40 siswa dari 13 sekolah) dan siswa SLB (1 SLB dengan jumlah siswa 20 orang) diwilayah Wates-Pengasih-Panjatan	476.427.300	Pelayanan antar jemput siswa sekolah (jumlah siswa 40 siswa dari 13 sekolah) dan siswa SLB (1 SLB dengan jumlah siswa 20 orang) diwilayah Wates-Pengasih-Panjatan	476.427.300	APBD	Dinas Perhubungan, SD, SMP, SLTA, SLB

									-								

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	Tata Ruang Digital.			pintar		honan KRK (Keterangan Rencana		sebagai salah satu syarat PBG		permohonan KRK (Keterangan Renca							

	Lv.3.1.1. Pengembangan Transportasi Publik Terpadu Berbasis Digital.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah siswa dan Sekolah di Kulon Progo yang terlayani dan Jumlah angkutan pedesaan yang beroperasi.	19.2. Jumlah pengguna transportasi ekonomi berbagi per 100.000 penduduk	**Lv.3.1.1.P.2.** Angkutan umum siswa					Pelayanan antar jemput siswa sekolah di Kulon Progo wilayah utara (sebanyak 17 sekolah) dengan bekerjasama dengan angkutan pedesaan (sebanyak 6 angkudes)	260.262.600	Pelayanan antar jemput siswa sekolah di Kulon Progo wilayah utara (sebanyak 17 sekolah) dengan bekerjasama dengan angkutan pedesaan (sebanyak 6 angkudes)	290.000.000	Pelayanan antar jemput siswa sekolah di Kulon Progo wilayah utara (sebanyak 17 sekolah) dengan bekerjasama dengan angkutan pedesaan (sebanyak 6 angkudes)	290.000.000	DAIS	Dinas Perhubungan
	Lv.3.1.1. Pengembangan Transportasi Publik Terpa	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkut	Jumlah masyarakat yang terlayani dan jumlah angkutan pedesaan yang	19.5. Persentase jalur transportasi umum	**Lv.3.1.1.P.3.** Angkutan Perintis Penyediaa					Tersedianya jalur angkutan perintis dan layanan angkutan	(menyesuaikan anggaran yang disetujui Kemenhub)	Tersedianya jalur angkutan perintis dan layanan angkutan	(menyesuaikan anggaran yang disetujui Kemenhub)	Tersedianya jalur angkutan perintis dan layanan angkutan	(menyesuaikan anggaran yang disetujui Kemenhub)	APBN	Dinas Perhubungan

	du Berbasis Digital	an Jalan (LLAJ)	beroperasi melalui jalur angkutan perintis	yang dilengkapi dengan sistem langsung (real-time) yang dapat diakses publik	n jalur angkutan perintis di wilayah Kulon Progo (Samigaluh-Kalibawang-Nanggulan-Girimulyo-Pengasih-Wates)					melalui jalur perintis		melalui jalur perintis		melalui jalur perintis			
	Lv.3.1.2. Optimalisasi Manajemen Lalu Lintas Cerdas dan Pengendalian Lingkungan.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Tersedianya sistem pengendalian lalulintas berbasis teknologi informasi	19.5. Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (real-time)	**Lv.3.1.2.P.1.** Pengembangan sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi (ATCS)	- .		- .		- .		1.Tersedianya gedung/ruang ATCS Kabupaten Kulon Progo	2.000.000.000	-	-	APBD	DinasPerhubungan, Kementrian Perhubungan

			(ATCS)	yang dapat diakses publik													
	Lv.3.1.2. Optimalisasi Manajemen Lalu Lintas Cerdas dan Pengendalian Lingkungan.	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	1. Jumlah APJ Pintar yang tersedia	19.9. Persentase lampu lalulintas yang cerdas	**Lv.3.1.2.P.2.** Peningkatan kualitas APJ Pintar berbasis digital	Pembangunan APJ Pintar bernuansa budaya sebanyak 152 unit	3.018.106.800	Pembangunan APJ Pintar sebanyak 180 unit	3.569.595.250	Pembangunan APJ Pintar sebanyak 200 unit	4.800.000.000	Pembangunan APJ Pintar sebanyak 200 unit	5.000.000.000	Pembangunan APJ Pintar sebanyak 200 unit	5.000.000.000	APBD/DAISDIY	Dinas Perhubungan, Provinsi
	Lv.3.1.3. Pembangunan Infrastruktur Mobilitas Aktif dan Inklusif.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Tingkat kualitas layanan Pengujian Kendaraan Bermotor	19.3. Persentase kendaraan yang terdaftar di kota yang merupakan kendaraan rendah emisi	**Lv.3.1.3.P.1.** Peningkatan layanan pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis Digital	Upgrade SIM PKB yang terintegrasi aplikasi Kemenhub	85.000.000,	Peningkatan layanan pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis Digital	-	Pengembangan layanan pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis Digital	-	Pengembangan layanan pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis Digital	100.000.000	Pengembangan layanan pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis Digital	-	APBD	Dinas Perhubungan, Kementrian Perhubungan

	Lv.3.1.2. Optimalisasi Manajemen Lalu Lintas Cerdas dan Pengendalian Lingkungan.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Peningkatan layanan informasi tilang angkutan umum/barang berbasis digital	19.5. Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (real-time) yang dapat diakses publik	**Lv.3.1.2.P.3.** Layanan informasi tilang angkutan umum/barang berbasis digital	Peningkatan layanan informasi tilang angkutan umum/barang berbasis digital	-	Peningkatan kualitas sarana prasarana informasi tilang angkutan umum/barang berbasis digital	-	Peningkatan kualitas sarana prasarana informasi tilang angkutan umum/barang berbasis digital	12.000.000	Peningkatan kualitas sarana prasarana informasi tilang angkutan umum/barang berbasis digital	-	Peningkatan kualitas sarana prasarana informasi tilang angkutan umum/barang berbasis digital	-	APBD	Dinas Perhubungan
	Lv.3.1.2. Optimalisasi Manajemen Lalu Lintas Cerdas dan Penge	Program Penyelenggaraan Jalan	5. Tersedianya sarana pendukung pedestrian untuk menyeberangi rel	-	**Lv.3.1.2.P.4.** Pembangunan JPO (sarana pendukung pedestrian	100	6.500										Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

	ndalian Lingkungan.		kereta api dengan aman dan nyaman		untuk menyeberangi rel kereta api dengan aman dan nyaman)												

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
						Kabupaten) sebagai salah satu syarat PBG				na Kabupaten) sebagai salah satu syarat PBG, entry peta RDTR dan Peta Tematik							
Sarana / Prasarana Kesehatan	**Lv.2.1.1.** Pembangunan Ekosistem Keseh	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perora	Pelayanan kesehatan usia balita	11.1. Persentase populasi kota yang	**Lv.2.1.1.P.3.** Ranting Kuat (Rawat Anak Stuntin		250		250	50 Anak	250	50 Anak	250	50 Anak	250	BLUD	RSUD WATES

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	atan Digital Terpadu.	ngan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	g Kulon Progo agar Sehat)												
	Lv.2.1.1. Pembangunan Ekosistem Kesehatan Digital Terpadu.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasyankes yg memiliki sarana prasarana kesehatan yang memenuhi	11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan	**Lv.2.1.1.P.1.** Pembangunan Ekosistem Kesehatan Digital Terpadu.Bumiku a. Memberikan	100	80.252.548.976	100	88.277.803.873	100	97.105.584.260	100	106.816.142.686	100	117.497.756.955	APBD, BOK	DINAS KESEHATAN

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
			standar	terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	pantauan *real time* layanan ibu hamil mulai dari awal kehamilan, b. Tersedianya data ibu hamil dengan faktor Risiko nya *real time*												
	Lv.2.1.1. Pembangunan Ekosistem Kesehatan Digital Terpadu.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terp	**Lv.2.1.1.P.2.** Simoku Sistem Informasi Manajemen Obat Kabupaten Kulon Progo)	36,67	834.991.617	36,67	918.490.778	36,67	1.010.339.856	36,67	1.111.373.842	36,67	1.222.511.226	APBD, BOK	DINAS KESEHATAN

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
			(UMOT) yg dilakukan pendampingan	adu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	Pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai												
	Lv.2.1.3. Jaringan Layanan Kesehatan Bergerak Terjadwal.	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah gedung tersedia	-	**Lv.2.1.3.P.4.** Pelayanan Trauma Center	1 Unit	45755,2	1 Unit	45755,2	1 Unit	45755,2	1 Unit	48381,4	1 Unit	52009,9	BLUD	RSU DNAS
Sarana/ Prasarana Transportasi	**Lv.3.1.1.** Pengembangan Transportasi Publik Terpadu	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan	1. Jumlah siswa dan Sekolah di Kulon Progo yang	19.2. Jumlah pengguna transportasi ekonomi	**Lv.3.1.1.P.1. Layanan** Bus Inklusi (Layanan bus sekolah untuk antar	Pelayanan antar jemput siswa sekolah dan siswa SLB diwila	510.000.000	Pelayanan antar jemput siswa sekolah dan siswa SLB diwilay	510.000.000	Pelayanan antar jemput siswa sekolah dan siswa SLB diwilay	520.000.000	Pelayanan antar jemput siswa sekolah dan siswa SLB diwila	520.000.000	Pelayanan antar jemput siswa sekolah dan siswa SLB diwila	520.000.000	APBD	Dinas Perhubungan, Sekolah, SLB

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	Berbasis Digital..	Angkutan Jalan (LLAJ)	terlayani bus sekolah dan penurunan angka kecelakaan dikalangan pelajar.	berbagi per 100.000 penduduk	jemput siswa dan layanan bus sekolah inklusif untuk antar jemput siswa berkebutuhan khusus secara gratis di Kulon Progo)	yah Wates - Pengasih-Panjatan		ah Wates - Pengasih-Panjatan		ah Wates - Pengasih-Panjatan		yah Wates - Pengasih-Panjatan		yah Wates - Pengasih-Panjatan			
	Lv.3.1.1. Pengembangan Transportasi Publik Terpadu Berbasis Digital.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2. Jumlah siswa dan Sekolah di Kulon Progo yang terlayani dan Jumlah angkutan pedesaan yang		**Lv.3.1.1.P.2.** Angkutan umum siswa	Pelayanan antar jemput siswa sekolah di Kulon Progo wilayah utara dengan bekerjasama dengan angkutan	300.000.000	Pelayanan antar jemput siswa sekolah di Kulon Progo wilayah utara dengan bekerjasama dengan angkutan	310.000.000	Pelayanan antar jemput siswa sekolah di Kulon Progo wilayah utara dengan bekerjasama dengan angkutan	320.000.000	Pelayanan antar jemput siswa sekolah di Kulon Progo wilayah utara dengan bekerjasama dengan angkutan	330.000.000	Pelayanan antar jemput siswa sekolah di Kulon Progo wilayah utara dengan bekerjasama dengan angkutan	340.000.000	DAIS	Dinas Perhubungan

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
			beroperasi.			pedesaan.		pedesaan.		pedesaan.		pedesaan.		pedesaan.			
	Lv.3.1.1. Pengembangan Transportasi Publik Terpadu Berbasis Digital.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3. Jumlah masyarakat yang terlayani dan jumlah angkutan pedesaan yang beroperasi melalui jalur angkutan perintis		**Lv.3.1.1.P.3.** Angkutan Perintis	Tersedianya jalur angkutan perintis dan layanan angkutan melalui jalur perintis	Menyesuaikan anggaran yang disetujui Kemenhub	Tersedianya jalur angkutan perintis dan layanan angkutan melalui jalur perintis	-	Tersedianya jalur angkutan perintis dan layanan angkutan melalui jalur perintis	-	Tersedianya jalur angkutan perintis dan layanan angkutan melalui jalur perintis	-	Tersedianya jalur angkutan perintis dan layanan angkutan melalui jalur perintis	-	APBD/APBN	Dinas Perhubungan, Kementrian Perhubungan
	Lv.3.1.2. Optimalisasi Manajemen Lalu Lintas Cerdas dan Pengendalian Lingkungan.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Tersedianya sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi	19.5. Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi deng	**Lv.3.1.2.P.1.** Pengembangan sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknol	-	-	Penyediaan ATCS Wilayah Kulon Progo (tahap 1)	40.000.000.000	Penyediaan ATCS Wilayah Kulon Progo (tahap 2)	25.000.000.000	-	-	-	-	APBN	Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan DIY, Kementrian Perhubungan

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
			(ATCS)	an sistem langsung (*real-time*) yang dapat diakses publik	ogi informasi (ATCS)												
	Lv.3.1.2. Optimalisasi Manajemen Lalu Lintas Cerdas dan Pengendalian Lingkungan.	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Jumlah APJ Pintar yang tersedia	19.9. Persentase lampu lalu lintas yang cerdas	**Lv.3.1.2.P.2.** Peningkatan kualitas APJ Pintar berbasis digital	Pembangunan APJ Pintar	5.000.000.000	Pembangunan APJ Pintar	5.000.000.000	Pembangunan APJ Pintar	5.000.000.000	Pembangunan APJ Pintar	5.000.000.000	Pembangunan APJ Pintar	5.000.000.000	APBD/ DAIS	Dinas Perhubungan
	Lv.3.1.3. Pembangunan Infrastruktur Mobilitas Aktif	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkut	Tingkat kualitas layanan Pengujian Kendaraan	19.3. Persentase kendaraan yang terdaftar	**Lv.3.1.3.P.1.** Peningkatan layanan pengujian Kendaraan	Peningkatan layanan pengujian Kendaraan Bermotor	-	Peningkatan layanan pengujian Kendaraan Bermotor	-	Peningkatan layanan pengujian Kendaraan Bermotor	-	Peningkatan layanan pengujian Kendaraan Bermotor	150.000.000	Peningkatan layanan pengujian Kendaraan Bermotor		APBD	Dinas Perhubungan, Kementrian Perhubungan

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	dan Inklusif.	an Jalan (LLAJ)	Bermotor	di kota yang merupakan kendaraan rendah emisi	Bermotor Berbasis Digital	Berbasis Digital		Berbasis Digital		Berbasis Digital		Berbasis Digital		Berbasis Digital			
	Lv.3.1.2. Optimalisasi Manajemen Lalu Lintas Cerdas dan Pengendalian Lingkungan.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Peningkatan layanan informasi tilang angkutan umum/barang berbasis digital	19.5. Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (*real-time*) yang dapat diakses	**Lv.3.1.2.P.3.** Layanan informasi tilang angkutan umum/barang berbasis digital	Peningkatan layanan informasi tilang angkutan umum/barang berbasis digital	-	Peningkatan layanan informasi tilang angkutan umum/barang berbasis digital	-	Peningkatan layanan informasi tilang angkutan umum/barang berbasis digital	-	Peningkatan layanan informasi tilang angkutan umum/barang berbasis digital	-	Peningkatan layanan informasi tilang angkutan umum/barang berbasis digital	-	APBD	Dinas Perhubungan

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
				publik													

4.5 PETA JALAN SMART SOCIETY

Tabel 4. 9 Peta Jalan Smart Society Jangka Pendek - Menengah (2025 – 2029)

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Interaksi Masyarakat yang Efisien																	
Ekosistem Belajar	**S.2.1.1.** Transformasi Digital Pendidikan Berkelanjutan dari Hulu ke Hilir.	Program Pengelolaan Pendidikan	1. Skor kemampuan literasi dan numerasi SD 2. Skor kemampuan literasi dan	6.1. Persentase populasi kota dengan kecakapan profesional di lebih dari satu bahasa	**S.2.1.1. P.1.** *Moral Technology School* Pembelajaran Numerasi dengan metode Gasing (Gampang asyik	1.666.7 2.781	487.600.000	1.694 2.794	492.000.000	1.721 2.807	544.750.000	1.748 2.82	571.900.000	1.775 2.833	594.000.000	APBD, BAZNAS	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
			numerasi SMP.		menyenangkan)												
	S.2.1.2. Gerakan Literasi Digital Inklusif dan Berkelanjutan.	Program Pembinaan Perpustakaan	TGM (Tingkat Kegemaran Membaca	17.3 Jumlah buku perpustakaan umum dan judul e-book per 100.000 penduduk	**S.2.1.2.P.1**. Mimpi Kurcaci	8 Kali	7.252.000	10 Kali	7.252.000	12 Kali	7.252.000	14 Kali	7.252.000	16 Kali	7.252.000	APBD	Dispersip
Sistem Keamanan dan Keselamatan Masyarakat	**S.3.1.1.** Pengembangan Ekosistem Keamanan Digital Terpadu dan Responsif.	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase penguatan karakter	-	**S.3.1.1.P.1**. Penguatan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Satuan Pendidikan	58.5%	71.100.000	59.12%	73.400.000	59.82%	175.000.000	60.52%	183.700.000	61.22%	192.900.000	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	S.3.1.1. Pengembangan	Program Penangg	Jumlah laporan kejadian	**15.1.** Persentase	**S.3.1.1.P.2**.	100 laporan	150.000.000	200 laporan	150.000.000	300 laporan	150.000.000	400 laporan	150.000.000	500 laporan	150.000.000	APBD	BPBD

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	Ekosistem Keamanan Digital Terpadu dan Responsif.	ulangan bencana	bencana masyarakat via aplikasi	area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital	*Smart Volunteer Digital System*												
	S.3.1.1. Pengembangan Ekosistem Keamanan Digital Terpadu dan Responsif	Program Penanggulangan bencana dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah personel TRC dan damkar terlatih	**15.1.** Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital	**S.3.1.1.P.3.** Diklat TRC & Damkarmat berbasis kompetensi	10 personel	100.000.000 – 300.000.000	20 personel	200.000.000 – 300.000.000	50 personel	200.000.000 – 300.000.000	50 personel	200.000.000 – 300.000.000	50 personel	200.000.000 – 300.000.000	APBD, BNPB	BPBD

Tabel 4. 10 Peta Jalan Smart Society Jangka Panjang (2030-2034)

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Interaksi Masyarakat yang Efisien	**S.1.1.1.** Pengembangan Platform Partisipasi Publik dan Kesejahteraan Digital Terpadu	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Prosentase Perlindungan sosial	**13.4.** Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital	**S.1.1.1. P.1.** Tuan Nonaku	3271 orang	7.165.389.400	3271 orang	7.165.389.400	3271 orang	7.165.389.400	3271 orang	7.165.389.400	3271 orang	7.165.389.400	APBD	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Ekosistem Belajar	**S.2.1.1.** Transformasi Digital Pendidikan Berkelanjutan dari Hulu ke Hilir.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang memenuhi Pengembangan Kompetensi	**6.3.** Jumlah tingkat pendidikan tinggi sains, teknologi, teknik dan matematika (STEM) per 100.000	**S.2.1.1. P.2**. Optimalisasi Tata Kelola Manajemen ASN (Pengembangan Sumber Daya Manusia	49,39%	837.980.000	50,30%	852.000.000	51,30%	867.000.000	52,30%	882.000.000	53,30%	897.000,000	APBD Kab. Kulon PRogo	BKPSDM

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
				penduduk	Aparatur Sipil Negara)												
	S.2.1.1. Transformasi Digital Pendidikan Berkelanjutan dari Hulu ke Hilir.	Program Pengelolaan Pendidikan	1.Skor kemampuan literasi dan numerasi SD 2.Skor kemampuan literasi dan numerasi SMP	6.1. Persentase populasi kota dengan kecakapan profesional di lebih dari satu bahasa	**S.2.1.1. P.1.** *Moral Technology School* Pembelajaran Numerasi dengan metode Gasing (Gampang asyik menyenangkan)	1.795 2.843	632.100.000	1. 80.52.853	651.100.000	1.815 2.863	670.600.000	1.825 2.873	690.700.000	1.835 2.883	711.000.000	APBD, BAZNAS	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	S.2.1.1. Transformasi Digital Pendidikan Berkelanjutan dari Hulu ke Hilir.	Program pengelolaan sekolah	1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 tahun 2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-15 tahun 3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)	6.2. Jumlah komputer, laptop, tablet atau perangkat pembelajaran digital lainnya yang tersedia per 1.000 siswa	**S.2.1.1. P.3**. Digitalisasi Sekolah (Digitalisasi sekolah (lanjutan), Pengembangan Pembelajaran e-learning program kesetaraan)	1.98.91% 2.99.13% 3.18.10%	1.25M	1.98.95% 2.99.16% 3.18.30%	1,29M	1.99.11% 2.99.19% 3.18.50%	1.33M	1.99.25% 2.99.22% 3.17.14%	1.37M	1.99.31% 2.99.25% 3.17.91%	1.41M	APBD, APBN	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
			Kesetaraan Usia 7-18 tahun														
Sistem Keamanan dan Keselamatan Masyarakat	**S.3.1.2.** Pelembagaan Sistem Peringatan Dini Bencana Berbasis Komunitas dan Teknologi,	Program penanggulangan bencana	Jumlah kalurahan tangguh bencana	15.1. Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital	**S.3.1.2. P.1**. Tanggap Bencana Mandiri	30 kalurahan	100.000.000 – 250.000.000	35 kalurahan	100.000.000 – 250.000.000	40 kalurahan	100.000.000 – 250.000.000	45 kalurahan	100.000.000 – 250.000.000	50 kalurahan	100.000.000 – 250.000.000	APBD, CSR, BNPB	BPBD
	S.3.1.2. Pelembagaan Sistem Peringatan Dini Bencana Berbasis Komunitas dan Teknologi,	Program penanggulangan bencana	Jumlah pos damkar aktif & berfungsi	15.1. Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital	**S.3.1.2. P.2.** Pos Damkar Mandiri Berbasis Teknologi	4 pos	2.000.000.000 – 5.000.000.000	4 pos	2.000.000.000 – 5.000.000.000	5 pos	2.000.000.000 – 5.000.000.000	5 pos	2.000.000.000 – 5.000.000.000	≥ 5 pos	2.000.000.000 – 5.000.000.000	APBD, DAK, BNPB, DAIS	BPBD
	S.3.1.2. Pelembagaan Sistem Peringatan Dini	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyela	Jumlah TRC , damkar dan relawan bersertif	15.1. Persentase area kota yang	**S.3.1.2. P.3.** TRC Damkar dan Relawa	70 personel	200.000.000 – 300.000.000	900 personel	200.000.000 – 300.000.000	100 personel	200.000.000 – 300.000.000	120 personel	200.000.000 – 300.000.000	≥120 personel	200.000.000 – 300.000.000	APBD, BNPB	BPBD

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	Bencana Berbasis Komunitas dan Teknologi,	matan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	ikasi nasional	dicakup oleh kamera pengintai digital	n Profesional dengan Sertifikasi Kompetensi												
	S.3.1.1. Pengembangan Ekosistem Keamanan Digital Terpadu dan Responsif.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan wilayah rawan dengan EWS	15.1. Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital	**S.3.1.1. P.4.** EWS IoT Terintegrasi Nasional	55%	100.000.000 – 200.000.000	60%	100.000.000 – 200.000.000	65%	100.000.000 – 200.000.000	70%	100.000.000 – 200.000.000	75%	100.000.000 – 200.000.000	APBD, BNPB	BPBD
Sistem Keamanan dan Keselamatan Masyarakat	**S.3.1.1.** Pengembangan Ekosistem Keamanan Digital Terpadu dan Responsif.	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase penguatan karakter	-	**S.3.1.1. P.1.** Penguatan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Satuan Pendidikan	62.22%	208.000.000	63.22%	214.000.000	64.22%	221.000.000	65.22%	228.000.000	66.22%	234.000.000	APBD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

4.6 PETA JALAN SMART ENVIRONMENT

Tabel 4. 11 Peta Jalan Smart Environment Jangka Pendek - Menengah (2025 – 2029)

SubDimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Mengembangkan Program Perlindungan Lingkungan Hidup																	
Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah	**En.2.1.1.** Pembangunan Ekosistem Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Digital	Program penguranganan timbulan sampah	Terbentuknya 1 Bank sampah Induk setiap Kelurahan/Kalurahan	16.1 persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individ	**En.2.1.1.P.1.** Pembentukan 1 Bank Sampah Induk setiap Kelurahan/ Kalurahan	Terbitnya SE Bupati		25 kaluraha n/kelurah an	271.000.000	43 kalurahan /keluraha n) 2. 3.	300.000.000	66 kalurahan /keluraha n) 2. 3.	330.000.000	88 kalurahan /keluraha n) 2. 3.	360.000.000	APBD, DAIS	DLH

SubDimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
				u terhadap jumlah sampah rumah tangga 16.4 presentase dari jumlah total sampah plastik yang di daur ulang di kota …													
	En.2.1.1. Pembangunan Ekosistem Pengelolaan Sampah Terpa	Program pengurangan timbulan sampah	Adanya pelaporan terkait volume timbulan sampah yang masuk, volume sampah yang	16.1 persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan	**En.2.1.1.P.2.** Pembuatan web Sikompas (Sistem Informasi	Pelaporan dilakukan oleh 135 bank sampah	-	Pelaporan dilakukan oleh 160 bank sampah	271.000.000	Pelaporan dilakukan oleh 181 bank sampah	300.000.000	Pelaporan dilakukan oleh 201 bank sampah	330.000.000	Seluruh kelompok pengelola sampah yang sudah teregister di DLH Kulon Progo	360.000.000	APBD, DAIS	DLH

SubDimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	du Berbasis Digital.		terkelola dan tidak dari setiap kelompok pengelola sampah	sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga 16.4 presentase dari jumlah total sampah plastik yang di daur ulang di kota	Kelompok Pengelola Sampah)	yang sudah ada											

SubDimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2025		2026		2027		2028		2029			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Tata Kelola Energi																	

Tabel 4. 12 Peta Jalan Smart Environment Jangka Panjang (2030-2034)

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Mengembangkan Program Perlindungan Lingkungan Hidup																	
Pengurangan sampah melalui batasan timbulan sampah	**En.2.1.3.** Optimalisasi Infrastruktur dan Regulasi Pengelolaan Sampah.	Program pengelolaan persampahan	0% Sampah residu ke TPA (semua sampah terolah di sumber, di daur ulang, atau dimanf	16.1 persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan	**En.2.1.3.P.1.** Zero Waste 1.95% masyarakat menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*)	Tingkat penanganan 60 %	390.000.000	Tingkat penanganan 70 %	420.000.000	Tingkat penanganan 80 %	450.000.000	Tingkat penanganan 90 %	480.000.000	Tingkat penanganan 100 %	510.000.000	APBN, DAIS, APBD	DLH

Sub-Dimensi	Strategi	Program (SIPD)	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2030		2031		2032		2033		2034			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
			aatkan kembali)	pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga 16.4 presentase dari jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota	2.0% sampah residu ke TPA (semua sampah terolah di sumbe, didaur ulang, atau dimanfaatkan kembali)												
Tata Kelola Energi																	

Formatted

BUKU IV

QUICKWIN SMART CITY

KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2025 - 2034

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga proses penyusunan Buku *Masterplan Smart City* Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2034 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, komunitas, dan sektor swasta yang memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih cerdas, inklusif, dan berkelanjutan.

Transformasi menuju *Smart City* bukan sekadar tren global, melainkan sebuah keniscayaan dalam menghadapi tantangan zaman. Kota-kota besar seperti Tokyo, Seoul, Amsterdam, dan Singapura telah membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi dengan partisipasi masyarakat mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas hidup warganya. Kabupaten Kulon Progo pun mengambil langkah strategis untuk tidak hanya mengikuti arus perubahan, tetapi menjadi pelopor inovasi daerah yang berakar pada kearifan lokal dan berorientasi pada masa depan.

Melalui *Masterplan* ini, Kabupaten Kulon Progo menetapkan arah pembangunan berbasis enam dimensi *Smart City*: *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan *Smart Environment*. Visi yang ingin diwujudkan adalah: " **Terwujudnya Kulon Progo yang makmur, mandiri, religius, berbudaya, dan berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi cerdas, inovasi, dan kolaborasi yang inklusif**." Visi ini menjadi landasan dalam merancang program, kebijakan, dan infrastruktur digital yang selaras dengan RPJMD, SNI ISO 37122, dan agenda pembangunan nasional.

Akhir kata, semoga Buku *Masterplan Smart City* ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi sumber inspirasi, rujukan strategis, dan pemantik kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan Kulon Progo yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing melalui pendekatan *Smart City*.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Kabupaten Kulon Progo, September 2025

Bupati Kulon Progo

DR. H. R. Agung Setyawan, S.T., M.Sc., MM

SAMBUTAN DEWAN *SMART CITY*

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) *Smart City* hingga penyusunan Buku *Masterplan Smart City* Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2034 dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Smart City merupakan wujud nyata dari inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi, data, dan kolaborasi lintas sektor. Konsep ini hadir sebagai jawaban atas berbagai tantangan pembangunan daerah, mulai dari efisiensi layanan, peningkatan partisipasi masyarakat, hingga penguatan daya saing daerah di era digital. Oleh karena itu, seluruh jajaran perangkat daerah, camat, dan pemangku kepentingan di Kabupaten Kulon Progo telah menyatakan komitmen bersama untuk mendukung transformasi menuju Kabupaten Cerdas yang inklusif dan berkelanjutan.

Dewan *Smart City* Kabupaten Kulon Progo berperan sebagai pengarah dan pengawal strategi, memastikan bahwa setiap langkah pembangunan *Smart City* senantiasa selaras dengan visi daerah, RPJMD, dan standar nasional maupun internasional. Kami percaya bahwa sinergi antara perencanaan, pengembangan, dan implementasi akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan ekosistem digital yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Harapan kami, melalui *Masterplan* ini, Kabupaten Kulon Progo dapat membangun fondasi yang kuat untuk menghadirkan layanan publik yang lebih cerdas, meningkatkan produktivitas sumber daya, serta memperkuat identitas dan daya saing daerah di tingkat nasional maupun global.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Kabupaten Kulon Progo, September 2025

Sekretaris Dewan *Smart City*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **1**

SAMBUTAN DEWAN SMART CITY ***2***

DAFTAR GAMBAR ***5***

DAFTAR TABEL ***6***

BAB I
VISI & PRIORITAS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH ***7***

1.1 Visi, Misi, dan Sasaran RPJMD Terhadap Dimensi Smart City **7**

BAB II ***12***

VISI & MISI SMART CITY KABUPATEN KULON PROGO ***12***

2.1 Visi & Misi Smart City **12**

2.2 Sasaran Smart City Daerah **12**

2.2.1 Smart Governance (G) 13

2.2.2 Smart Branding (B) 13

2.2.3 Smart Economy (Ec) 14

2.2.4 Smart Living (Lv) 15

2.2.5 Smart Society (S) 15

2.2.6 Smart Environment (En) 16

BAB III ***18***

PROFIL QUICKWINS SMART CITY DAERAH ***18***

3.1 Quickwin Smart Governance **18**

3.2 Quickwin Smart Branding **21**

3.3 Quickwin Smart Economy **25**

3.4 Quickwin Smart Living **27**

3.5 Quickwin Smart Society **32**

3.6 Quickwin Smart Environment **42**

BAB IV
Manajemen Resiko Quickwins ***46***

4.1 Manajemen Risiko Quickwins Smart Governance **48**

4.1.1 Program Eling Pajak Daerah 48

4.2 MANAJEMEN RISIKO Quickwins Smart Economy **56**

4.2.1 Program Smart Farming Agriculture Green house Melon 56

4.3 Quickwins Smart Living **65**

4.3.1 Program RANTING KUAT 65

4.4 Quickwins Smart Society **67**

4.4.1 Program TRANSIGRAK 68

4.5 Quickwins Smart Environment **92**

4.5.1 Gerakan 1 Kalurahan/Kelurahan, 1 Bank Sampah Induk 92

BAB V ***98***

PENUTUP ***98***

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Pilar Manajemen Risiko 45
Gambar 4. 2 Matriks Nilai Risiko 46

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pemetaan Misi dan Sasaran RPJMD Kab. Kulon Progo 9

Tabel 2. 1 Sasaran Smart Governance 12
Tabel 2. 2 Sasaran Smart Branding 12
Tabel 2. 3 Sasaran Smart Economy 13
Tabel 2. 4 Sasaran Smart Living 14
Tabel 2. 5 Sasaran Smart Society 14
Tabel 2. 6 Sasaran Smart Environment 15

Tabel 3. 1 Profil Quickwins Smart Governance 17
Tabel 3. 2 Profil Quickwins Smart Branding 20
Tabel 3. 3 Profil Quickwins Smart Economy 24
Tabel 3. 4 Profil Quickwins Smart Living 26
Tabel 3. 5 Profil Quickwins Smart Society 31
Tabel 3. 6 Profil Quickwins Smart Environment 41

Tabel 4. 1 Penjelasan Kemungkinan Risiko 45
Tabel 4. 2 Penjelasan nilai dampak risiko 46
Tabel 4. 3 Identifikasi Risiko Quick Wins Smart Governance 47
Tabel 4. 4 Analisis Risiko Quick Wins Smart Governance 48
Tabel 4. 5 Penentuan Ranking Risiko Quick Wins Smart Governance 49
Tabel 4. 6 Penanganan Risiko Quick Wins Smart Governance 49
Tabel 4. 7 Mitigasi Risiko Quick Wins Smart Governance 50
Tabel 4. 8 Identifikasi Risiko Quick Wins Smart Branding 51
Tabel 4. 9 Analisis Risiko Quick Wins Smart Branding 52
Tabel 4. 10 Penentuan Ranking Risiko Quick Wins Smart Branding 53
Tabel 4. 11 Penanganan Risiko Quick Wins Smart Branding 54
Tabel 4. 12 Mitigasi Risiko Quick Wins Smart Branding 54
Tabel 4. 13 Identifikasi Risiko Quick Wins Smart Economy 56
Tabel 4. 14 Analisis Risiko Quick Wins Smart Economy 57
Tabel 4. 15 Penentuan Ranking Risiko Quick Wins Smart Economy 58
Tabel 4. 16 Penanganan Risiko Quick Wins Smart Economy 59
Tabel 4. 17 Mitigasi Risiko Quick Wins Smart Economy 62
Tabel 4. 18 Identifikasi Risiko Quick Wins Smart Living 64
Tabel 4. 19 Penentuan Ranking Risiko Quick Wins Smart Living 65
Tabel 4. 20 Penanganan Risiko Quick Wins Smart Living 66
Tabel 4. 21 Mitigasi Risiko Quick Wins Smart 66
Tabel 4. 22 Identifikasi Risiko Quick Wins Smart Society 67
Tabel 4. 23 Analisis Risiko Quick Wins Smart Society 69
Tabel 4. 24 Penentuan Ranking Risiko Quick Wins Smart Society 72
Tabel 4. 25 Penanganan Risiko Quick Wins Smart Society 74
Tabel 4. 26 Mitigasi Risiko Quick Wins Smart Society 88
Tabel 4. 27 Identifikasi Risiko Quick Wins Smart Environment 92
Tabel 4. 28 Analisis Risiko Quick Wins Smart Environment 92
Tabel 4. 29 Penentuan Ranking Risiko Quick Wins Smart Environment 93
Tabel 4. 30 Penanganan Risiko Quick Wins Smart Environment 94
Tabel 4. 31 Mitigasi Risiko Quick Wins Smart Environment 94

BAB I
VISI & PRIORITAS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

1.1 VISI, MISI, DAN SASARAN RPJMD TERHADAP DIMENSI SMART CITY

Pada dokumen RPJPD Kab. Kulon Progo tahun 2025-2045, visi Kabupaten Kulon Progo adalah:

"Kulon Progo yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Berbudaya & Berkelanjutan (SEMARAK)". Visi tersebut memiliki akronim SEMARAK yang dipilih untuk menggambarkan kondisi Kabupaten Kulon Progo di masa depan. Kata "Semarak" memiliki arti kemuliaan, kemegahan, keelokan. Kata ini mengandung harapan bahwa pada 2045 nanti Kabupaten Kulon Progo telah menjadi kabupaten yang maju penuh dengan kemegahan dan kemuliaan dan tetap elok. Visi pada RPJPD kemudian diturunkan menjadi 4 misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan manusia Kulon Progo berbudaya, maju, dan sejahtera.
2. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah serta menciptakan pemerataan ekonomi.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif serta masyarakat yang aman dan religius, dan demokratis.
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta lingkungan yang lestari dan tangguh bencana.

Pada tahun 2024, Kabupaten Kulon Progo telah memilih Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2024-2029. Periode ini juga akan menjadi periode pertama dalam pelaksanaan RPJPD 2025-2045. Fokus utama pembangunan daerah pada periode ini adalah penguatan fondasi pembangunan melalui respon kebijakan yang tepat sesuai isu strategis atau tantangan yang mengemuka pada periode 2025-2029 untuk memastikan keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan di masa mendatang. Perencanaan pembangunan daerah Kab. Kulon Progo pada periode ini telah dituliskan melalui Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kab. Kulon Progo 2025-2029. Berdasarkan rancangan akhir tersebut, dalam menjalankan pemerintahan, Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 mengusung visi pembangunan daerah sebagai berikut:

"Terwujudnya Kulon Progo yang Makmur, Mandiri, Religius, Berbudaya, yang Berkelanjutan"

Lebih lanjut, kata dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Makmur: Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu mewujudkan kondisi masyarakat yang makmur, di mana kesejahteraan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, serta memiliki akses yang layak terhadap pendidikan dan kesehatan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan memiliki pendapatan yang memadai untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, disertai dengan terciptanya peluang kerja yang luas dan lingkungan ekonomi yang stabil.

2. Mandiri: Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang mandiri, yaitu masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bergantung sepenuhnya pada pihak lain. Hal ini diwujudkan melalui pengembangan potensi lokal, pemberdayaan sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi yang relevan. Dengan semangat kemandirian, masyarakat diharapkan mampu beradaptasi dengan perubahan global dan menjaga keberlanjutan pembangunan melalui inovasi, kreativitas, dan kerja sama komunitas.
3. Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai religius yang kuat dalam kehidupan masyarakat dan aparatur pemerintah. Masyarakat yang religius diharapkan memiliki keyakinan yang kokoh terhadap ajaran agama yang dianut, yang tercermin dalam sikap, perilaku, dan tindakan sehari-hari. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi landasan moral dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga tercipta harmoni sosial yang dilandasi oleh toleransi, rasa hormat, dan solidaritas antar umat beragama.
4. Berbudaya: Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu melestarikan budaya lokal sebagai bagian dari identitas masyarakat yang berkelanjutan. Nilai-nilai luhur budaya dijunjung tinggi dan ditanamkan dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari pemikiran, sikap, hingga aktivitas sehari-hari. Aspek pendidikan dalam budaya akan menentukan terwujudnya profil pelajar Pancasila, yaitu: Beriman, Bertakwa kepada Tuhan YME, dan Berakhlak Mulia, Berkebinekaan Global, Gotong Royong, Mandiri, Bernalar Kritis, Kreatif.
5. Berkelanjutan: Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Dengan cara ini, budaya lokal yang kaya dapat diwariskan kepada generasi mendatang tanpa mengorbankan ekosistem dan lingkungan hidup, menciptakan harmoni antara tradisi dan modernisasi.

Visi Kabupaten Kulon Progo tahun 2025-2029 tersebut kemudian diturunkan menjadi 4 (empat) misi pembangunan. Penjelasan komprehensif terkait misi-misi tersebut sebagai berikut:

1. Misi Pertama: Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya, dan Religius. Pembangunan lima tahun mendatang diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang makmur, di mana setiap individu dapat menikmati kesejahteraan lahir dan batin. Upaya ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan pendapatan yang layak. Selain itu, masyarakat Kulon Progo diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari, seperti kesantunan, kesopanan, dan penghormatan terhadap adat istiadat. Di sisi lain, penguatan nilai-nilai religius yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa juga menjadi prioritas, guna menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan harmonis dalam kehidupan beragama.

2. Misi Kedua: Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi. Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kemandirian daerah dengan memanfaatkan potensi lokal secara maksimal dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan pengembangan sektor-sektor unggulan, seperti pertanian, industri, dan pariwisata, yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Pembangunan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat agar memiliki keterampilan dan kapasitas untuk berkontribusi dalam perekonomian lokal. Dengan peningkatan daya saing produk daerah yang bernilai tambah tinggi, diharapkan ekonomi daerah dapat berkembang secara merata, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang masih tertinggal.
3. Misi Ketiga: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang *Good Governance*, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis. Pembangunan lima tahun mendatang menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang prima dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Dalam lingkungan yang aman dan demokratis, masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan tenang dan damai. Stabilitas sosial akan dijaga melalui penegakan hukum yang adil, konsisten, dan non diskriminatif, dengan menumbuhkan rasa percaya antar *stakeholder* pembangunan. Demokrasi yang sehat akan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
4. Misi Keempat: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung pemerataan antar wilayah, dengan fokus pada peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar pusat pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang berkualitas akan mempercepat distribusi barang dan jasa, menurunkan biaya produksi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan dilakukan dengan prinsip keberlanjutan, memperhatikan pelestarian lingkungan, serta mitigasi risiko bencana alam. Sebagai daerah yang rentan terhadap kerusakan lingkungan dan bencana, pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara hati-hati untuk mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem dan menjamin keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang. Infrastruktur tangguh yang dirancang sesuai dengan potensi dan risiko daerah akan menjadi dasar bagi terciptanya lingkungan yang aman dan produktif.

Selanjutnya, analisis keterkaitan visi misi RPJMD Kab. Kulon Progo dengan Enam Dimensi Smart City dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Pemetaan Misi dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kulon Progo Terhadap Dimensi Smart City

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Dimensi Smart City					
			S. Governance	S. Branding	S. Economy	S. Living	S. Society	S. Environment
MISI 1: Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo Makmur, Berbudaya dan Religius	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				✓		
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat					✓	
	Meningkatnya Kemakmuran Masyarakat Kulon Progo	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat				✓		
	Mewujudkan Masyarakat Kulon Progo yang Berbudaya dan Religius	Meningkatnya Peran Keberagamaan dan Kebudayaan dalam Kehidupan Bermasyarakat					✓	
MISI 2: Meningkatkan Kemandirian dan Daya saing Daerah serta Menciptakan Pemerataan Ekonomi	Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Daerah	Meningkatnya Kemandirian Daerah		✓	✓			
		Meningkatnya Daya Saing Daerah		✓				
	Meningkatnya Pemerataan Ekonomi Daerah	Menurunnya Pengangguran			✓			

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Dimensi Smart City					
			S. Governance	S. Branding	S. Economy	S. Living	S. Society	S. Environment
MISI 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance, Aspiratif serta Mewujudkan Masyarakat yang Aman dan Demokratis	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	✓					
	Meningkatnya Kehidupan Bermasyarakat yang Aman dan Demokratis	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat					✓	
MISI 4: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Kesesuaian Peruntukan Ruang				✓		
		Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Daerah				✓		
	Meningkatnya Lingkungan yang Lestari dan Tangguh Bencana	Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup						✓
		Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana					✓	

BAB II
VISI & MISI SMART CITY KABUPATEN KULON PROGO

Bab ini akan membahas terkait visi dan misi Smart City Kabupaten Kulon Progo. Visi dan Misi Smart City Kabupaten Kulon Progo mengacu kepada Rencana Pembangunan Kabupaten Kulon Progo, baik pada jangka menengah maupun jangka panjang. Visi misi tersebut kemudian akan diturunkan menjadi sasaran pembangunan pada tiap dimensi *smart city.*

2.1 VISI & MISI SMART CITY

Mempertimbangkan kondisi kesiapan, visi, misi dan program unggulan Kabupaten Kulon Progo, maka perlu ditetapkan visi pembangunan *Smart City*. Visi Misi *Smart City* Kabupaten Kulon Progo, yaitu:

"Terwujudnya Kulon Progo yang makmur, mandiri, religius, berbudaya, dan berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi cerdas, inovasi, dan kolaborasi yang inklusif."

Sedangkan Misi *Smart City* Kabupaten Kulon Progo, yaitu :

a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang transparan, akuntabel, efisien, dan partisipatif melalui pemanfaatan data dan teknologi.
b. Mengembangkan identitas dan daya saing Kulon Progo melalui integrasi ekosistem pariwisata, penguatan produk unggulan daerah, pengembangan ekosistem bisnis, serta penataan ruang kota yang indah, nyaman, dan berkarakter budaya.
c. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan agribisnis, penguatan UMKM, digitalisasi ekonomi, pengembangan ekosistem industri kreatif, menuju masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing.
d. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang layak, sehat, dan harmonis melalui perencanaan tata ruang yang berkelanjutan, peningkatan konektivitas dan mobilitas, serta penguatan layanan kesehatan dan sosial berbasis teknologi.
e. Mendorong terciptanya masyarakat yang religius, berbudaya, inklusif, aman, dan tertib melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung interaksi sosial, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan literasi digital.
f. Menjaga kelestarian lingkungan berkelanjutan melalui perlindungan dan pengelolaan sumber daya, pengelolaan limbah dan sampah, serta tata kelola energi berkelanjutan.

2.2 SASARAN SMART CITY DAERAH

Sasaran *Smart City* Kabupaten Kulon Progo dirumuskan sebagai langkah terukur untuk menerjemahkan visi dan misi RPJMD ke dalam implementasi enam dimensi Kota Cerdas. Sasaran-sasaran ini dirancang untuk menjawab isu-isu strategis dan tantangan pembangunan yang dihadapi daerah, dengan mengedepankan pendekatan inovatif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Berikut adalah sasaran untuk setiap dimensi *Smart City*, yang juga dilengkapi dengan sistem kodifikasi yang mengacu pada panduan penyusunan *Masterplan Smart City*.

2.2.1 SMART GOVERNANCE (G)

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan berintegritas melalui reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik yang terintegrasi, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan kepuasan Masyarakat.

Tabel 2. 1 Sasaran Smart Governance

Sub Dimensi 1: G.1. Pelayanan Publik (*Public Service*)
G.1.1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan warga. Sasaran ini dirancang untuk mengatasi fluktuasi pada Indeks Pelayanan Publik dan memastikan penegakan peraturan yang konsisten.
Sub Dimensi 2: G.2. Manajemen Birokrasi (*Bureaucracy Management*)
G.2.1. Mewujudkan sistem pemerintahan digital yang terpadu dan berkelanjutan. Sasaran ini dirancang untuk mengatasi tantangan seperti rendahnya indeks SPBE/Indeks Pemdi dan kesenjangan keterampilan digital di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
Sub Dimensi 3: G.3. Kebijakan Publik (*Public Policy*)
G.3.1. Menciptakan perancangan kebijakan yang berbasis data dan partisipatif. Sasaran ini bertujuan mengintegrasikan masukan masyarakat untuk merumuskan regulasi yang relevan dan efektif.

2.2.2 SMART BRANDING (B)

Menguatkan identitas dan daya saing daerah melalui promosi digital yang efektif, dengan fokus pada pengembangan pariwisata berkelanjutan dan produk-produk unggulan berbasis kearifan lokal.

Tabel 2. 2 Sasaran Smart Branding

Sub Dimensi 1: B1. Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata (*Tourism Branding*)
B.1.1. Meningkatkan daya tarik dan citra daerah di tingkat nasional dan internasional melalui strategi pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Sub Dimensi 2: B2. Membangun platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah (*Business Branding*)

B.2.1. Menciptakan ekosistem pariwisata yang inovatif dan terintegrasi, didukung oleh pemasaran digital yang massif. Sasaran ini bertujuan untuk mengatasi masalah promosi yang masih terbatas pada destinasi prioritas.
Sub Dimensi 3: B3. Membangun dan Memasarkan Wajah Kota (*City Appearance Branding*)
B.3.1. Meningkatkan pengembangan wajah kota yang mencerminkan identitas budaya lokal dan mendukung potensi pariwisata serta bisnis.

2.2.3 SMART ECONOMY (EC)

Menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang tangguh, mandiri, dan inklusif, dengan mendorong hilirisasi produk pertanian dan perikanan, pemberdayaan UMKM berbasis digital, serta optimalisasi investasi di kawasan-kawasan strategis.

Tabel 2. 3 Sasaran Smart Economy

Sub Dimensi 1: Ec1. Membangun ekosistem industri yang berdaya saing (*Industry*)
Ec.1.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah. Sasaran ini bertujuan mengatasi tingkat kemiskinan dan rasio kewirausahaan yang masih fluktuatif.
Sub Dimensi 2: Ec2. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat (*Welfare*)
Ec.2.1. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui peningkatan nilai tambah produk lokal dan daya saing UMKM. Sasaran ini memanfaatkan peluang dari infrastruktur strategis seperti YIA dan JJLS.
Sub Dimensi 3: Ec3. Membangun Ekosistem Transaksi Keuangan (*Transaction*)
Ec.3.1. Menciptakan ekosistem industri yang adaptif dan inovatif. Sasaran ini direncanakan dengan memprioritaskan industri pengolahan (seperti agroindustri kopi, kelapa, dan teh) serta ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal.

2.2.4 SMART LIVING (LV)

Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan infrastruktur dasar yang merata, layanan kesehatan yang terintegrasi, serta penanggulangan kemiskinan dan stunting berbasis data.

Tabel 2. 4 Sasaran Smart Living

Sub Dimensi 1: Lv1. Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (*Harmony*)
Lv.1.1. Memberikan akses masyarakat terhadap layanan dasar (air bersih dan sanitasi aman) secara merata.
Sub Dimensi 2: Lv2. Mewujudkan Prasarana Kesehatan (*Health*)
Lv.2.1. Meningkatkan kualitas kesehatan dan ketahanan sosial masyarakat, termasuk melalui penurunan prevalensi stunting yang meningkat.
Sub Dimensi 3: Lv3. Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi (*Mobility*)
Lv.3.1. Meningkatkan harmonisasi tata ruang dan transportasi yang mendukung mobilitas efisien dan kualitas hunian yang layak di seluruh wilayah.

2.2.5 Smart Society (S)

Membangun masyarakat yang kreatif, inovatif, dan berbudaya, dengan fokus pada peningkatan literasi digital, penguatan pendidikan karakter, dan pelestarian nilai-nilai lokal untuk menciptakan kohesi sosial yang kuat.

Tabel 2. 5 Sasaran Smart Society

Sub Dimensi 1: S1. Mewujudkan Interaksi Masyarakat yang Efisien (*Community*)
S.1.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terampil, berdaya saing, dan berliterasi digital. Sasaran ini untuk mengatasi rata-rata lama sekolah yang masih rendah.
Sub Dimensi 2: S2. Membangun Ekosistem Belajar yang Efisien *(Learning)* dan Komprehensif
S.2.1. Mewujudkan masyarakat yang adaptif, inovatif, dan partisipatif dalam pembangunan daerah, termasuk dukungan terhadap kelompok rentan dan difabel.
Sub Dimensi 3: S3. Mewujudkan Sistem Keamanan Masyarakat (*Security*)
S.3.1. Menciptakan sistem keamanan masyarakat yang terintegrasi dengan teknologi untuk mendukung rasa aman dan nyaman bagi warga.

2.2.6 Smart Environment (En)

Mewujudkan lingkungan hidup yang lestari dan tangguh terhadap bencana, dengan strategi pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, penanganan sampah terpadu, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Tabel 2. 6 Sasaran Smart Environment

Sub Dimensi 1: En1. Mengembangkan Program Perlindungan Lingkungan Hidup (*Protection*)
En.1.1. Mengembangkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Sasaran ini termasuk penanganan sampah dan konservasi lahan, untuk mengatasi penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan meningkatnya volume sampah.
Sub Dimensi 2: En2. Mengembangkan Tata Kelola Sampah dan Limbah (*Waste*)
En.2.1. Mengembangkan sistem terintegrasi untuk tata kelola limbah dan sampah.
Sub Dimensi 3: En3. Mengembangkan Tata Kelola Energi Yang Bertanggung-jawab (*Energy*)
En.3.1. Mengoptimalkan pengelolaan energi dan sumber daya alam. Sasaran ini termasuk pemanfaatan potensi perdagangan karbon dari kawasan hutan dan mangrove.

BAB III
PROFIL QUICKWINS SMART CITY DAERAH

Pada Bab III Buku Quickwins Smart City Kabupaten Kulon Progo akan membahas program unggulan yang telah disusun oleh Kabupaten Kulon Progo dalam mewujudkan *Smart City* Kabupaten Kulon Progo. Program-program unggulan ini dipilih melalui Forum Group Discussion (FGD) di Kabupaten Kulon Progo di 2024.

3.1 QUICKWIN SMART GOVERNANCE

Informasi lengkap tentang ELING PAJAK dapat dilihat pada tabel dibawah:

Elektronifikasi Layanan dan Integrasi Pajak Daerah
(ELING PAJAK)

Tabel 3. 1 Profil Quickwins Smart Governance

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
1. Nama Singkat Inovasi	ELING PAJAK DAERAH
2. Penjelasan singkat	Eling Pajak Daerah (Elektronifikasi Layanan dan Integrasi Pajak Daerah) **1.** Masalah/kebutuhan yang diatasi/dipenuhi : - Layanan pajak daerah yang terpisah pada beberapa jenis aplikasi eSPTPD, eBPHTB, eSPPT dan eLayananPBB - Wajib Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah harus menunggu SKPD yang dikirim secara manual untuk mengetahui kewajiban Pajak Daerahnya - Masyarakat belum dapat mengetahui perkiraan besaran Pajak BPHTB yang harus dibayarkan **2.** Pembaruan/ide/solusi apa yang diberikan untuk hal di atas: Eling Pajak Daerah adalah sebuah gerakan dan sistem integratif di Kabupaten Kulon Progo yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak daerah, sekaligus menyederhanakan proses pembayaran pajak melalui digitalisasi dan integrasi aplikasi. Kata eling dalam bahasa Jawa berarti “ingat” atau “sadar”, mencerminkan semangat agar masyarakat sadar akan

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
	pentingnya pajak sebagai sumber pembangunan daerah. Eling Pajak Daerah juga akronim dari elektronifikasi layanan dan integrasi Pajak Daerah. a. Partisipasi: Melibatkan semua Wajib Pajak dalam 1 aplikasi layanan untuk semua jenis Pajak Daerah b. Kontrol: Memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran dan pelaporan c. Manfaat: Akses semakin mudah dalam 1 aplikasi bagi Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran dan pelaporan Pajak Daerah Aspek Eling Pajak Daerah meliputi: a. Integrasi Aplikasi Pajak Daerah, Menyatukan berbagai sistem informasi layanan pajak (eSPTPD, eBPHTB, eSPPT dan eLayananPBB) dalam satu aplikasi. Menggunakan data dari instansi lain yang berpotensi sebagai data pertanahan, data perizinan. b. Elektronifikasi Pembayaran Pajak Daerah, Menyediakan kanal pembayaran digital melalui QRIS dan *Virtual Account* untuk semua jenis Pajak Daerah. c. Peningkatan Literasi dan Kesadaran Edukasi ke masyarakat bahwa kewajiban pajak sebagai kontribusi dalam pembangunan dan rasa cinta kepada Daerah. Tujuan Inovasi Daerah : a. meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajiban pajak daerah, b. meningkatkan elektronifikasi layanan pajak daerah sebagai bagian upaya meningkatkan kepatuhan pajak, c. meningkatkan kemutakhiran, akuntabilitas dan reliabilitas data pajak daerah. d. mengoptimalkan potensi pajak Daerah dan capaian pajak Daerah.

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
3. Status Saat Ini a. Kode status b. Persentase Selesai c. Penjelasan	Kode Status dalam siklus manajemen inovasi 1. Implementasi Inovasi sedang berlangsung 2. Evaluasi dan rencana pengembangan lebih lanjut sedang berlangsung Penahapan: 1. Pengembangan portal Eling Pajakku sudah selesai dilakukan di tahun 2025. Aplikasi sudah digunakan mulai bulan Maret 2025 2. Pengembangan Single Sign On akan diselesaikan pada tahun 2026. 3. Pengembangan dan pemeliharaan dilakukan mulai tahun 2027 dan seterusnya, Persentase Penyelesaian (progres waktu/pekerjaan) 90% Waktu Uji Coba Inovasi Daerah : Triwulan I-II Tahun 2025 Waktu Implementasi : Bulan Juni 2025 sampai dengan saat ini
4. Manfaat dari inovasi	Manfaat Yang Diperoleh : 1. Untuk Masyarakat: a. Pembayaran dan pelaporan Pajak Daerah semakin mudah b. Meningkatkan pembayaran Pajak Daerah secara non tunai dalam capaian ETPD c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah. d. Meningkatkan kesadaran terhadap kewajiban pajak daerah 2. Untuk Pemerintah Daerah: a. Meningkatkan PAD b. Mempermudah pelaporan pendapatan daerah c. Laporan lebih akuntabel Hasil Inovasi : 1. Aplikasi Eling Pajak Daerah 2. Integrasi data tekstual pertanahan dan pajak daerah 3. Kalkulator BPHTB online 4. Edukasi Eling Pajak Daerah meningkatkan kesadaran Pajak Daerah 5. Peningkatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)
5. Keunikan / kreativitas	1. Aplikasi dengan nama/branding yang mengingatkan terhadap kewajiban Pajak Daerah

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
	2. Integrasi data tekstual antara data pertanahan dengan data pajak daerah memberikan kemudahan kepada masyarakat/ wajib pajak 3. Tersedia dalam aplikasi android di PlayStore 4. Mengintegrasikan layanan dalam 1 aplikasi memberikan kemudahan akses bagi wajib pajak 5. Kemudahan dalam pilihan pembayaran untuk secara non tunai
6. Kemitraan	Masyarakat sebagai wajib pajak, Bank Pembangunan Daerah DIY, dan Bank Indonesia (Layanan QRIS)
7. Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	1. Aplikasi Eling Pajak daerah dikembangkan menjadi one single sign on (2026) 2. Integrasi data melalui NIK (2026) 3. Wajib Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dapat mengakses SKPD melalui Eling Pajak Daerah (2025) 4. Pengembangan aplikasi Eling Pajak untuk Apple dalam app store (2026) 5. Integrasi dengan peta PBB P2 (2026)
8. Strategi Menjaga Keberlangsungan	Langkah yang diambil dalam rangka memastikan keberlangsungan (*sustainability*), implementasi dan pengembangan dari inovasi Eling Pajak Daerah dapat terjadi melalui kebijakan/regulasi, kelembagaan, penyediaan infrastruktur, dan sumber daya dengan kompetensi yang sesuai. Untuk mengedukasi masyarakat terkait aplikasi Eling Pajakku dilakukan sosialisasi secara luring dan sosialisasi melalui media sosial, diantaranya: Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp, Web BKAD.
9. Sumber daya yang digunakan	1. SDM = 8 orang 2. Pihak Ketiga = 1 Konsultan (Anggaran: Rp 50.000.000) 3. *Maintanance* setiap tahun Rp 20.000.000
10. Analisa Risiko	1. Gangguan Sistem / *Downtime* 2. Keamanan Siber/ peretasan *3. Physing* 4. Resisten masyarakat dalam penggunaan aplikasi

3.2 QUICKWIN SMART BRANDING

Tabel 3. 2 Profil Quickwins Smart Branding

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
1. Nama Singkat Inovasi	LandPocket
2. Penjelasan singkat	Landpocket (Informasi lahan potensi dan peluang investasi) 1. Masalah/kebutuhan yang diatasi/dipenuhi : a. Akses Belum tersedianya Informasi terkait lahan-lahan strategis potensi dan peluang investasi yang sudah sesuai dengan ketentuan tata ruang; b. Partisipasi Partisipasi masyarakat dalam mendukung kemudahan investasi masih rendah c. Kontrol Informasi tentang lahan-lahan strategis potensi dan peluang investasi belum diketahui oleh calon investor d. Manfaat Calon investor dapat mengetahui lahan-lahan strategis potensi dan peluang investasi di kulon progo 2. Pembaruan/ide/solusi apa yang diberikan untuk hal di atas. Pemerintah senantiasa berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui pembangunan insfrastruktur. Pembangunan berbagai infrastruktur di Kulon Progo belum cukup untuk menarik minat calon investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kulon Progo. Hal ini ditunjukkan dari nilai realisasi investasi di Kulon Progo yang masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan nilai realisasi investasi Kabupaten/Kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Upaya peningkatan nilai realisasi investasi harus terus dilakukan karena investasi merupakan salah satu elemen dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Penyediaan data tentang lahan-lahan strategis potensi dan peluang investasi serta penyusunan berbagai kajian potensi investasi merupakan salah satu upaya untuk memberikan kemudahan kepada calon investor, dalam rangka memperoleh berbagai informasi dan data pendukung terkait proyek investasi yang akan direalisasikan.

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
	Investasi khususnya di kulon progo saat ini merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak. Untuk itu, Pemerintah harus terus responsif dalam menyediakan berbagai informasi yang berkaitan dengan lahan-lahan strategis peluang investasi yang berpotensi untuk menarik minat calon investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kulon Progo. Tujuan Inovasi Daerah : a. Tersedianya data/informasi lahan-lahan strategis yang siap untuk ditawarkan kepada calon investor. b. Adanya Jaminan kepastian (assurance) terhadap lahan-lahan strategis yang ditawarkan.
3. Status Saat Ini a. Kode status b. Persentase Selesai c. Penjelasan	Kode Status dalam siklus manajemen inovasi 1. Implementasi inovasi sedang berlangsung 2. Evaluasi dan rencana pengembangan lebih lanjut sedang berlangsung Persentase Penyelesaian (progres waktu/pekerjaan) 100% 1. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah : Tahun 2023 2. Waktu Implementasi : 2024 sampai dengan saat ini
4. Manfaat dari inovasi	Manfaat Yang diperoleh : 1. Memberikan kemudahan kepada calon investor untuk memilih lahan-lahan strategis potensi dan peluang investasi; 2. Adanya jaminan kepastian (*assurance*) terhadap lahan-lahan yang ditawarkan. Hasil Inovasi : 1. Tersedianya informasi lokasi yang secara tata ruang sesuai rencana investasi; 2. Tersedianya Informasi lokasi yang secara tata ruang sesuai rencana investasi dan ada kerelaan dari pemilik lahan; dan 3. Tersedianya Informasi lokasi yang secara tata ruang sesuai rencana investasi dan telah dilakukan kajian IPRO Investasi merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkatkan

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
	kesejahteraan masyarakat. Dalam menarik minta para investor pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk memberikan kemudahan dan fasilitasi kepada investor agar mau berinvestasi di daerahnya. LandPocket merupakan salah satu inovasi yang diinisiasi oleh DPMPTSP Kulon Progo dalam rangka memberikan kemudahan dan fasilitasi kepada calon investor untuk berinvestasi di Kulon Progo melalui penyediaan data/informasi lahan-lahan strategis potensi dan peluang investasi.
5. Keunikan / kreativitas	LandPocket menyediakan informasi lahan-lahan strategi yang sesuai dengan ketentuan tata ruang, yang dapat dimanfaatkan oleh calon investor untuk berinvestasi di Kulon Progo. Bagi calon investor dapat mengakses data lahan-lahan strategis secara gratis tanpa dipungut biaya apapun juga. Inovasi ini secara bertahap akan dikembangkan terus dan diintegrasikan dengan inovasi literasi investasi dan inovasi *smartboard* (rencana jangka panjang).
6. Kemitraan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Kapanewon dan Kalurahan/Kelurahan.
7. Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	LandPocket selain menyediakan data lahan strategis potensi dan peluang investasi juga memberikan ruang bagi investor/calon investor untuk mengakses langsung melalui menu literasi investasi Tahun 2025 serta smartboard (rencana jangka panjang) Tahun 2027.
8. Strategi Menjaga Keberlangsungan	Langkah yang diambil dalam rangka memastikan keberlangsungan (*sustainability*), implementasi dan pengembangan dari inovasi LandPocket dapat terjadi melalui kebijakan/regulasi, kelembagaan, penyediaan infrastruktur, dan sumber daya dengan kompetensi yang sesuai.
9. Sumber daya yang digunakan	Sumber daya yang digunakan berbentuk pendanaan kegiatan operasional, tenaga ahli yang kompeten, dan sarana prasarana LandPocket.
10. Analisa Risiko	Data lahan strategis dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mencari keuntungan pribadi

3.3 QUICKWIN SMART ECONOMY

Tabel 3. 3 Profil Quickwins Smart Economy

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
1. Nama Singkat Inovasi	1. SMART GREEN HOUSE
2. Penjelasan singkat	Smart Green House 1. Masalah/kebutuhan yang diatasi/dipenuhi a. Perubahan Iklim dan Cuaca Ekstrim b. Adanya serangan hama dan penyakit, tanaman di ruang terbuka rentan terhadap hama dan penyakit c. Kesulitan bercocok tanam di lingkungan urban karena keterbatasan ruang d. Produktivitas tanaman rendah karena tidak optimalnya lingkungan tumbuh e. Sistem irigasi tradisional tidak efisien dan boros air 2. Pembaruan/ide/solusi apa yang diberikan untuk hal di atas Inovasi Smart Greenhouse sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan pertanian modern dengan keberlanjutan dan efisiensi. Smart Greenhouse dapat mengoptimalkan hasil pertanian, mengurangi biaya produksi, dan meminimalisir kehilangan hasil produksi.
3. Status Saat Ini a. Kode status b. Persentase Selesai c. Penjelasan	Kode Status dalam siklus manajemen inovasi 1. Implementasi inovasi sedang berlangsung 2. Evaluasi dan rencana pengembangan lebih lanjut sedang berlangsung Persentase Penyelesaian (progres waktu/pekerjaan) 100% 1. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah : Tahun 2023 2. Waktu Implementasi : 2025

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
4. Manfaat dari inovasi	Dengan Smart Greenhouse: 1. Kontrol terhadap lingkungan (suhu, kelembaban, cahaya) presisi sehingga pertumbuhan tanaman optimal, hasil panen akan lebih banyak dan berkualitas, bahkan bisa panen sepanjang tahun. 2. Penggunaan irigasi otomatis berbasis sensor kelembaban tanah dapat menghemat penggunaan air 40-60% dan pemberian pupuk presisi mengurangi pemborosan dan dampak lingkungan. 3. Smart green house mengurangi resiko serangan hama dari luar; deteksi dini dengan sensor dan kamera cerdas meminimalkan penggunaan pestisida 4. Otomatisasi proses (penyiraman, pemupukan) mengurangi kebutuhan tenaga manusia, petani bisa memantau dan mengendalikan dari jarak jauh. 5. Penggunaan sumber daya alam (air, pupuk, energi) yang hemat dan terkontrol sehingga bisa mewujudkan pertanian ramah lingkungan 6. Mendukung ketahanan pangan di kota-kota besar karena dengan smart greenhouse memungkinkan pertanian di lahan sempit/ area urban
5. Keunikan / kreativitas	Kemampuannya menggabungkan teknologi tinggi dengan pertanian, menghasilkan sistem budidaya yang lebih cerdas, hemat dan berkelanjutan.
6. Kemitraan	Universitas Gadjah Mada (UGM), Bank Indonesia(BI), swasta (LAN/penyedia saprodi greenhouse dan pelatihan budidaya greenhouse melon)
7. Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	Keberhasilan inovasi Smart Greenhouse juga mampu menggerakkan kaum milenial untuk terjun menjadi petani milenial. Smart Greenhouse bisa direplikasi di daerah lain terutama kota-kota besar.
8. Strategi Menjaga Keberlangsungan	1. Pendampingan dari produksi sampai dengan pemasaran 2. Pemeliharaan dan monitoring rutin 3. Penggunaan energi terbarukan 4. Peningkatan kapasitas SDM 5. Bangun kerja sama dengan pasar lokal, restoran atau distributor organik 6. Edukasi dan kolaborasi komunitas

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
9. Sumber daya yang digunakan	- sumber daya pertanian (air, pupuk, struktur fisik) - teknologi modern (sensor, otomatisasi, energi, internet)
10. Analisa Risiko	- Resiko teknis (gangguan pada sensor, sistem otomatisasi, software) - ketergantungan pada listrik - gangguan koneksi internet - Biaya investasi awal tinggi - kurangnya SDM terlatih

3.4 QUICKWIN SMART LIVING

Tabel 3. 4 Profil Quickwins Smart Living

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
1. Nama Singkat Inovasi	RANTING KUAT
2. Penjelasan singkat	Deskripsi RANTING KUAT (RAWAT ANAK STUNTING KULON PROGO AGAR SEHAT) Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi anak stunting di Kulon Progo masih cukup tinggi. Pada tahun 2023 prevalensi stunting sebesar 10,48%, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 10,48. Dalam upaya penurunan prevalensi stunting dan wasting, Rumah Sakit Daerah memegang peranan sebagai runah sakit rujukan kasus stunting. RSUD Wates sebagai salah satu Rumah Sakit Daerah di Kabupaten Kulon Progo, selama periode bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan Juni tahun 2025 sudah merawat anak stunting sebanyak 38 pasien, yang terdiri dari 21 pasien pada tahun 2023, 10 pasien pada tahun 2024 dan 7 pasien pada semester 1 tahun 2025. Berdasarkan latar belakang tersebut, instalasi gizi RSUD Wates melakukan kegiatan inovasi pengembangan layanan “Ranting Kuat” Rawat Anak Stunting Kulon Progo Agar Sehat, melalui pemberian makanan tambahan sumber protein hewani berupa

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
	telur rebus 1 butir perhari dan edukasi gizi kepada orang tua pasien anak rawat inap dengan stunting, ibu hamil, ibu menyusui dan masyarakat luas. Makanan tambahan yang dipilih adalah makanan sumber protein hewani, karena protein hewani mengandung asam amino yang lebih lengkap dan lebih mudah diserap dibandingkan protein nabati (mempunyai nilai Biological value yang lebih tinggi). Jenis protein hewani yang digunakan yaitu telur, karena telur termasuk makanan sumber protein hewani yang harganya terjangkau, mudah didapat, mudah cara mengolahnya, kebanyakan anak menyukainya, dan mengandung protein yang cukup tinggi (7 gram protein setiap 1 butir telur ayam). Inovasi ini bertujuan untuk mendukung proses penyembuhan penyakit anak stunting melalui upaya peningkatan asupan protein hewani, yaitu dengan pemberian makanan tambahan sumber protein hewani berupa telur rebus 1 butir perhari dan edukasi gizi secara rutin, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan orang tua pasien anak stunting tentang tata laksana gizi anak stunting dan tentang pentingnya asupan energi dan protein yang cukup untuk mendukung proses penyembuhan dan mengoptimalkan potensi yang ada pada anak stunting. Metode yang dilakukan dalam inovasi ini meliputi beberapa tahapan seperti: 1. Membentuk Tim penurunan prevalensi stunting dan wasting. 2. Sosialisasi program penurunan prevalensi stunting dan wasting. 3. Menyusun program kerja. 4. Melaksanakan kegiatan 5. Melakukan monitoring dan evaluasi 6. Melakukan pencatatan dan pelaporan 7. Menyusun rencana tindak lanjut. 8. Koordinasi dengan unit terkait seperti wakil direktur, bidang penunjang. 9. Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO).

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
3. Status Saat Ini a. Kode status b. Persentase Selesai c. Penjelasan	Kode Status Implementasi Inovasi sedang berlangsung Dalam memberikan layanan gizi untuk pasien anak stunting, di RSUD Wates pada saat ini melaksanakan diet TKTP anak ekstra protein hewani (pemberian makanan tambahan sumber protein hewani berupa telur rebus) dan edukasi gizi secara rutin.
4. Manfaat dari inovasi	Manfaat dari inovasi ini adalah: 1. Mendukung pelaksanaan program nasional dalam upaya penurunan prevalensi stunting dan wasting. 2. Membantu meningkatkan asupan protein anak stunting. 3. Membantu meningkatkan pengetahuan orang tua pasien anak stunting tentang tata laksana gizi stunting 4. Sebagai sarana promosi pelayanan kesehatan rumah sakit. 5. Berperan serta dalam membantu menurunkan prevalensi stunting dan wasting di wilayah Kulon Progo.
5. Keunikan / kreativitas	**1.** Inovasi ini mendukung langsung terhadap Program Prioritas Nasional. **2.** Inovasi ini sangat mungkin untuk bisa dikembangkan dirumah sakit lain. Peluang replikasi inovasi ini sangat tinggi karena kendala permasalahan tidak terlalu banyak.
6. Kemitraan	Kemitraan dalam program ini diantaranya pasien dan keluarga pasien, tenaga kesehatan, dan rekanan penyedia telur,
7. Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	Potensi Pengembangan Inovasi ini sangat mungkin untuk bisa dikembangkan di layanan gizi rumah sakit lain. Peluang replikasi inovasi ini sangat tinggi karena kendala permasalahan tidak terlalu banyak. Kendala dan permasalahan yang muncul hanya berkaitan dengan adanya kemungkinan anak stunting yang memiliki alergi terhadap telur. Hal ini bisa diantisipasi dengan melakukan asesmen awal pasien terlebih dahulu sebelum diberikan intervensi gizi, Inovasi ini telah menginisiasi dilakukannya pengembangan pelayanan yang serupa di rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, dan puskesmas rawat inap di Kabupaten Kulon Progo.

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
8. Strategi Menjaga Keberlangsungan	Keberlanjutan inovasi ini diharapkan dapat dilakukan melalui : 1. Menetapan regulasi dalam bentuk Surat Keputusan Direktur tentang Pembentukan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting yang melibatkan unit-unit terkait perencanaan, serta pengalokasian sumber daya baik sumber daya keuangan, sumber daya manusia dapat terus dilaksanakan. 2. Menggali kreatifitas staff instalasi gizi dalam membuat kreasi menu makanan sumber protein hewani berbahan dasar telur dengan penampilan dan bentuk yang lebih menarik. 3. Mengembangkan bentuk kerjasama, koordinasi, serta kolaborasi dengan semua sistem dan unit yang ada di rumah sakit agar pelaksanaan inovasi ini bisa berjalan dengan baik. 4. Penyusunan Standar Operasioanl Prosedur (SPO) yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai unit terkait dan disosialisasikan.
9. Sumber daya yang digunakan	Inovasi RANTING KUAT (RAWAT ANAK STUNTING KULON PROGO AGAR SEHAT) dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan sumber daya diantaranya I. PENDANAAN Pendanaan dalam pelaksanaan Program ini bersumber dari Dana BLUD. II. Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Kesehatan RSUD Wates, Unit Instalasi Gizi III. Sarana dan Prasarana Sarana Instalasi Gedung Gizi,
10. Analisa Risiko	Analisis Risiko pada Inovasi ini diantaranya: 1. Bahan baku yang didapatkan dalam hal ini telur yang akan diberikan pada pasien anak stunting kondisinya tidak layak. 2. Pemberian asupan telur dapat menimbulkan alergi pada pasien anak stunting yang memiliki alergi terhadap asupan telur.

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
	3. Edukasi Gizi yang diberikan kepada orang tua pasien tidak ditindaklanjuti setelah pasien anak stunting tidak dalam perawatan di RSUD

3.5 QUICKWIN SMART SOCIETY

Tabel 3. 5 Profil Quickwins Smart Society

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
1. Nama Singkat Inovasi	TRANSIGRAK
2. Penjelasan singkat	TRANSIGRAK (Transportasi Inklusif Gratis Ramah Anak Sekolah) TRANSIGRAK adalah layanan transportasi yang hadir sebagai solusi inovatif dari Dinas Perhubungan Kulon Progo untuk mendukung pendidikan inklusif dan kesejahteraan anak-anak berkebutuhan khusus. 1. Masalah yang Diatasi Layanan ini menjawab tiga masalah utama yang selama ini dihadapi anak-anak berkebutuhan khusus (ABK), khususnya yang bersekolah di SLB Negeri Kulon Progo: ● Aksesibilitas: Banyak keluarga ABK kesulitan mencari transportasi yang aman, nyaman, dan ramah disabilitas. ● Biaya: Beban biaya transportasi harian seringkali memberatkan keluarga, terutama dari kalangan kurang mampu. ● Keamanan dan Keterbatasan: Keterbatasan pendamping saat bepergian membuat anak rentan terhadap risiko di jalan. 2. TRANSIGRAK (Transportasi Inklusif Gratis Ramah Anak Sekolah) memberikan pembaruan dan solusi berupa: ● Aksesibilitas Fisik: Bus dilengkapi dengan fasilitas modern ruang khusus untuk kursi roda, sehingga memastikan anak-anak dengan mobilitas terbatas dapat naik dan turun bus dengan mudah dan aman. ● Pendampingan Terlatih: Setiap bus didampingi oleh petugas yang terlatih untuk membantu anak-anak selama perjalanan. Ini tidak hanya meningkatkan keamanan, tetapi juga memberikan kenyamanan dan dukungan yang personal. ● Layanan Nol Biaya: Program ini sepenuhnya gratis, yang secara signifikan meringankan beban finansial orang tua dan memastikan akses pendidikan tidak terhalang oleh kendala ekonomi.

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
	● Manajemen Terpadu: Sistem operasional yang terintegrasi memungkinkan pengelolaan rute, jadwal, dan komunikasi yang efektif antara Dinas Perhubungan, sekolah, dan orang tua.
3. Status Saat Ini a. Kode status b. Persentase Selesai c. Penjelasan	Kode Status dalam siklus manajemen inovasi 1. Rencana pembangunan/implementasi dalam pembuatan 4. Inovasi dan komponen pendukungnya dalam pembangunan 6. Evaluasi dan rencana pengembangan lebih lanjut sedang berlangsung Persentase Penyelesaian (progres waktu/pekerjaan) 80% Waktu Uji Coba Inovasi Daerah : Triwulan IV Tahun 2025
4. Manfaat dari inovasi	Penerima Manfaat **1.** Anak-anak Berkebutuhan Khusus (Penerima Manfaat Langsung): Mereka adalah subjek utama yang mendapatkan akses transportasi aman, nyaman, dan gratis ke sekolah. **2.** Orang Tua/Keluarga ABK (Penerima Manfaat Langsung): Beban biaya transportasi dan logistik harian berkurang signifikan, memberikan mereka ketenangan pikiran dan keringanan finansial. **3.** Sekolah (Penerima Manfaat Langsung): Kehadiran siswa menjadi lebih terjamin dan tepat waktu, mendukung efektivitas proses belajar mengajar. Dampak/Keuntungan/Manfaat Dampak Langsung dan Internal ● Peningkatan Akses Pendidikan: Anak-anak ABK dapat pergi ke sekolah secara rutin tanpa hambatan, yang secara langsung meningkatkan partisipasi dan kehadiran mereka dalam pendidikan. ● Efisiensi Anggaran Keluarga: Keluarga tidak lagi perlu mengalokasikan dana besar untuk transportasi harian, sehingga dana tersebut dapat dialihkan untuk kebutuhan lain, seperti terapi atau nutrisi. ● Peningkatan Citra Pemerintah Daerah: Layanan ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah Kulon Progo

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
	dalam mendukung pendidikan inklusif dan kesejahteraan warganya. ● Penguatan Kapasitas Internal: Dishub Kulon Progo dan pihak sekolah mendapatkan pengalaman dalam mengelola layanan transportasi inklusif, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme staf. Dampak Tidak Langsung dan Eksternal ● Penciptaan Ekosistem Inklusif: Kehadiran bus inklusif di jalanan menjadi pengingat visual bagi masyarakat tentang pentingnya inklusivitas, mendorong empati, dan mengurangi stigma terhadap penyandang disabilitas. ● Pengurangan Kepadatan Lalu Lintas: Penggunaan transportasi kolektif dapat membantu mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan raya, terutama pada jam sibuk. ● Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Inovasi ini berkontribusi pada pencapaian (Pendidikan Berkualitas) dan (Mengurangi Kesenjangan), memperkuat posisi Kulon Progo sebagai wilayah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. ● Pemberdayaan Ekonomi: Dengan meringankan beban biaya transportasi, keluarga dapat memiliki lebih banyak sumber daya untuk kegiatan ekonomi lain, berpotensi meningkatkan taraf hidup mereka secara keseluruhan. (tambah mengurangi kecelakaan dikalangan pelajar)
5. Keunikan / kreativitas	Kekhasan dan Kreativitas **1.** Pendekatan Holistik terhadap Aksesibilitas: Inovasi ini tidak hanya menyediakan kendaraan, tetapi juga ekosistem pendukung yang komprehensif. Bus-busnya didesain secara khusus ruang kursi roda, bukan hanya bus sekolah biasa yang dimodifikasi seadanya. Selain itu, adanya petugas pendamping yang terlatih memastikan anak-anak merasa aman dan terdukung, sebuah fitur yang jarang ditemukan pada layanan transportasi publik umum. **2.** Pemikiran Baru tentang Aset Publik: TRANSIGRAK mengubah cara pandang terhadap aset pemerintah. Armada busnya bukan hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi sebagai simbol nyata komitmen daerah terhadap pembangunan inklusif. Inovasi ini memosisikan

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
	kendaraan sebagai "kelas berjalan" yang menumbuhkan empati di masyarakat, sebuah gagasan yang jauh melampaui fungsi utamanya. **3.** Layanan Terintegrasi dan Door-to-Door: Inovasi ini menawarkan layanan yang terintegrasi penuh, mulai dari penjemputan dari rumah hingga pengantaran ke sekolah. Pendekatan layanan door-to-door yang personal ini sangat berbeda dengan transportasi umum yang hanya berhenti di halte tertentu. Hal ini sangat krusial bagi anak-anak berkebutuhan khusus, di mana setiap meter perjalanan bisa menjadi tantangan. **4.** Keterlibatan Multisektor: Keunikan lain dari TRANSIGRAK adalah kolaborasi kuat antara Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, dan sekolah. Sinergi ini memastikan bahwa layanan tidak hanya berjalan efisien secara logistik, tetapi juga selaras dengan kebutuhan akademis dan kesejahteraan siswa, menciptakan model yang berkelanjutan dan efektif. Secara keseluruhan, orisinalitas TRANSIGRAK terletak pada kemampuannya menggabungkan fungsionalitas transportasi, desain yang berpusat pada manusia, dan misi sosial yang kuat. Inovasi ini tidak hanya menyelesaikan masalah praktis, tetapi juga membangun fondasi bagi masyarakat Kulon Progo yang lebih berempati dan inklusif.
6. Kemitraan	Inovasi TRANSIGRAK (Transportasi Inklusif Gratis ramah Anak Sekolah) di Kulon Progo adalah hasil kolaborasi strategis dengan berbagai pihak. Keterlibatan mereka sangat penting dalam pembangunan, implementasi, dan evaluasi program ini. Pihak yang Terlibat dan Perannya ● Kementrian Perhubungan ○ Pemberian Hibah Bus: Kemenhub, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, memberikan hibah satu unit bus sekolah kepada Dinas Perhubungan Kulon Progo pada awal 2025. Bus ini akan digunakan sebagai angkutan sekolah bagi para siswa.

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
	○ Dukungan Program Pemerintah Daerah: Hibah bus sekolah ini merupakan bentuk dukungan Kemenhub terhadap program-program pemerintah daerah, seperti yang terlihat pada program Bus Sekolah Gratis di Kabupaten Sleman. ● Dinas Perhubungan (Dishub) Kulon Progo ○ Peran: Sebagai inisiator dan pengelola utama program. Dishub bertanggung jawab atas pengadaan armada bus, perawatan kendaraan, penentuan rute, serta pengelolaan operasional harian. ○ Status Kemitraan: Pembangunan dan implementasi sudah berjalan, dengan Dishub bertindak sebagai koordinator. ● Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kulon Progo ○ Peran: Bertindak sebagai mitra kebijakan dan penghubung dengan sekolah. Disdikpora membantu mengidentifikasi siswa yang membutuhkan layanan, menyosialisasikan program, dan mengintegrasikan TRANSIGRAK ke dalam sistem pendidikan daerah. ○ Status Kemitraan: Kolaborasi telah terjalin erat sejak tahap perencanaan, memastikan program sesuai dengan kebutuhan pendidikan. ● Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kulon Progo ○ Peran: Sebagai mitra pelaksana langsung di lapangan. Pihak sekolah menyediakan data siswa, membantu koordinasi jadwal penjemputan dan pengantaran, serta berinteraksi langsung dengan orang tua untuk mengoptimalkan layanan. ○ Status Kemitraan: Kemitraan sudah sangat aktif, di mana sekolah menjadi titik krusial dalam keberhasilan implementasi. ● Orang Tua dan Komunitas Penyandang Disabilitas ○ Peran: Sebagai pihak penerima manfaat dan sumber masukan berharga. Mereka memberikan umpan balik langsung mengenai efektivitas layanan dan tantangan di lapangan. Partisipasi mereka sangat penting untuk memastikan program berpusat pada kebutuhan pengguna.

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
	○ Status Kemitraan: Kemitraan ini bersifat organik dan berkelanjutan, dengan forum komunikasi dan survei reguler untuk evaluasi. Potensi Kemitraan Lain (Rencana Pengembangan) ● Sektor Usaha (CSR): Mengajak perusahaan swasta untuk berkontribusi melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), misalnya dalam pengadaan unit bus tambahan atau sponsor biaya perawatan.
7. Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	TRANSIGRAK (Transportasi Inklusif Gratis Ramah Anak Sekolah) memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih jauh, baik dari sisi produk maupun jangkauan, demi memberikan manfaat yang lebih luas. 1. Pengembangan Produk ● Penerapan Teknologi Smart Transportasi: Integrasi dengan aplikasi mobile dapat memberikan fitur pelacakan bus secara real-time bagi orang tua. Fitur notifikasi juga bisa digunakan untuk memberi tahu orang tua saat bus mendekati lokasi penjemputan, sehingga mengurangi waktu tunggu. ● Pengembangan Armada: Penambahan armada dengan jenis kendaraan yang lebih bertenaga dan ramah lingkungan (misalnya, bus listrik) akan meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi jejak karbon. Desain interior bus juga bisa dikembangkan untuk kenyamanan yang lebih optimal, seperti penambahan rak penyimpanan kursi roda portabel atau sistem hiburan edukatif. 2. Perluasan Ruang Lingkup dan Jangkauan ● Ekspansi Rute dan Wilayah: Setelah sukses di wilayah Kulon Progo, program ini bisa diperluas ke kabupaten lain di Provinsi Yogyakarta atau bahkan secara nasional, beradaptasi dengan kondisi geografis dan kebutuhan lokal. ● Target Pengguna yang Lebih Luas: Layanan TRANSIGRAK bisa diperluas tidak hanya untuk anak sekolah, tetapi juga untuk memfasilitasi kebutuhan transportasi para

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
	penyandang disabilitas yang ingin mengakses fasilitas kesehatan, pusat pelatihan vokasi, atau tempat kerja. 3. Replikasi dan Penyebaran ● Model Kemitraan Publik-Swasta: TRANSIGRAK dapat dijadikan model percontohan (blueprint) untuk program serupa. Daerah lain bisa mengadopsi model ini dengan menggandeng sektor swasta melalui skema Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) untuk pendanaan pengadaan atau operasional bus. ● Penyebaran Informasi dan Edukasi: Kesuksesan TRANSIGRAK bisa didokumentasikan dalam studi kasus atau seminar nasional untuk menginspirasi inovasi di daerah lain. Materi edukasi tentang pentingnya transportasi inklusif juga bisa disebarkan melalui berbagai media untuk meningkatkan kesadaran publik. Secara keseluruhan, TRANSIGRAK adalah sebuah fondasi. Dengan pengembangan yang tepat, inovasi ini dapat menjadi standar baru bagi transportasi publik yang inklusif di Indonesia.
8. Strategi Menjaga Keberlangsungan	Untuk memastikan keberlanjutan TRANSIGRAK (Transportasi Inklusif Gratis Ramah Anak Sekolah), diperlukan langkah-langkah strategis yang mencakup berbagai aspek. Pendekatan ini bertujuan agar program tidak hanya sukses saat peluncuran, tetapi juga dapat terus berjalan dan berkembang. 1. Kebijakan dan Regulasi Integrasi dalam RPJMD: Memasukkan TRANSIGRAK ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kulon Progo akan memastikan program ini menjadi prioritas pembangunan yang berjangka panjang. 2. Kelembagaan ● Pembentukan Tim Pengelola Khusus: Dibentuknya tim lintas instansi (misalnya, dari Dishub, Disdikpora, dan SLB) yang memiliki tugas dan wewenang jelas. Tim ini akan bertanggung jawab atas koordinasi harian, pemantauan, dan evaluasi.

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
	● Kerja Sama Berkelanjutan: Menjalin kemitraan formal dengan pihak swasta melalui skema Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Kemitraan ini dapat mencakup pendanaan untuk perawatan rutin, pengadaan armada tambahan, atau pelatihan bagi petugas. 3. Penyediaan Infrastruktur ● Pembangunan Depo atau Garasi Khusus: Menyediakan fasilitas parkir dan perawatan yang memadai untuk armada bus. Hal ini penting untuk memastikan kondisi kendaraan selalu prima dan siap beroperasi. ● Pemasangan Teknologi Terintegrasi: Memasang teknologi pelacakan GPS dan sistem informasi digital akan meningkatkan efisiensi operasional. Integrasi dengan sistem manajemen kendaraan akan mempermudah pemantauan jadwal perawatan, riwayat perbaikan, dan efisiensi bahan bakar. 4. Sumber Daya dan Kompetensi ● Alokasi Anggaran Berkelanjutan: Mengalokasikan anggaran khusus yang stabil dari APBD untuk operasional, perawatan, dan gaji petugas. Hal ini akan mencegah program terhenti karena kekurangan dana. ● Peningkatan Kompetensi SDM: Melakukan pelatihan rutin dan bersertifikasi bagi pengemudi dan pendamping bus. Pelatihan ini mencakup cara penanganan siswa berkebutuhan khusus, pertolongan pertama, dan komunikasi efektif dengan orang tua. Pendekatan ini memastikan TRANSIGRAK tidak hanya menjadi proyek sesaat, tetapi fondasi kokoh bagi terciptanya ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan di Kulon Progo.
9. Sumber daya yang digunakan	Inovasi TRANSIGRAK (Transportasi Inklusif Gratis Ramah Anak Sekolah) memerlukan berbagai sumber daya yang terencana untuk memastikan keberhasilan mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi. Sumber Daya yang Diperlukan 1. Pendanaan

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
	● Kebutuhan: Dana dibutuhkan untuk pengadaan armada bus khusus disabilitas, biaya operasional harian (bahan bakar, perawatan), gaji pengemudi dan pendamping, serta pemeliharaan infrastruktur pendukung. ● Sumber Penyediaan: ○ Anggaran Pemerintah Daerah (APBD): Ini adalah sumber utama dan paling stabil. Alokasi dana dari APBD menjamin keberlanjutan program sebagai layanan publik. ○ Hibah atau Dana Khusus: Dana bisa juga berasal dari hibah pemerintah pusat atau lembaga internasional yang fokus pada isu disabilitas dan pendidikan. 2. Sumber Daya Manusia (SDM) ● Kebutuhan: Tenaga ahli untuk perencanaan rute, pengemudi bus yang terlatih, dan pendamping yang memiliki kompetensi dalam menangani anak-anak berkebutuhan khusus. ● Sumber Penyediaan: ○ ASN/Pegawai Pemerintah: Perekrutan dan penempatan pegawai ASN di Dinas Perhubungan sebagai pengemudi dan staf operasional. ○ Tenaga Kontrak Profesional: Menggunakan tenaga kontrak atau outsourcing untuk pendamping yang bersertifikat. Ini memberikan fleksibilitas dan memastikan pendamping memiliki keahlian yang spesifik. 3. Sarana dan Prasarana Sarana ● Bus Sekolah: Ini adalah fasilitas utama yang digunakan untuk mengangkut siswa penyandang disabilitas (inklusi).. Dinas Perhubungan (Dishub) Kulon Progo memiliki beberapa unit bus sekolah, hibahkan dari Kementerian Perhubungan.. Prasarana

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
	● Rute dan Jadwal: Rute bus sekolah telah ditentukan dan melewati sejumlah sekolah di wilayah Kulon Progo. Waktu operasional bus ini umumnya disesuaikan dengan jam masuk dan pulang sekolah, dengan keberangkatan pagi hari dan penjemputan sore hari. ● Titik Penjemputan: Meskipun tidak disebut secara spesifik sebagai halte atau prasarana fisik, bus sekolah beroperasi berdasarkan titik-titik penjemputan yang telah ditetapkan untuk melayani siswa. ● Fasilitas perawatan kendaraan (bengkel), dan sistem teknologi informasi untuk pelacakan dan manajemen operasional ● Dukungan Anggaran: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo telah mengalokasikan anggaran untuk operasional dan pemeliharaan bus-bus tersebut. 4. Kemitraan ● Kebutuhan: Kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung program. ● Sumber Penyediaan:Instansi Pemerintah: Dishub, Dinas Pendidikan, dan sekolah (SLB) menjadi mitra utama.
10. Analisa Risiko	Aspek Operasional dan Logistik ● Keterlambatan dan Gangguan Jadwal: Kepadatan lalu lintas, kondisi jalan yang buruk, atau kerusakan mendadak pada bus bisa menyebabkan keterlambatan. Hal ini dapat memengaruhi jadwal sekolah dan menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua. ● Mitigasi: Menerapkan sistem pemantauan GPS real-time untuk menginformasikan jadwal yang akurat, serta memiliki bus cadangan atau tim perbaikan siaga untuk mengatasi gangguan 2. Aspek Sosial ● Kecemburuan Sosial: Siswa atau orang tua dari sekolah umum yang juga kesulitan transportasi mungkin merasa program ini tidak adil karena hanya diperuntukkan bagi anak-anak SLB. ● Mitigasi: Melakukan sosialisasi yang masif dan terarah tentang filosofi inklusivitas program. Menjelaskan bahwa

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
	program ini adalah langkah awal untuk mengatasi kesenjangan yang paling mendesak, dengan visi jangka panjang untuk mengembangkan layanan yang lebih luas. 3. Aspek Keuangan ● Ketergantungan Anggaran Daerah: Keberlanjutan program sangat bergantung pada alokasi anggaran APBD yang stabil. Jika terjadi perubahan prioritas atau krisis ekonomi, pendanaan bisa terancam. ● Mitigasi: Mencari sumber pendanaan alternatif, seperti kemitraan dengan sektor swasta (CSR) atau pengajuan dana hibah. Menyusun kebijakan daerah yang mengikat untuk menjamin alokasi anggaran program ini dalam jangka panjang. 4. Aspek Keamanan dan Keselamatan ● Risiko Kecelakaan: Meskipun bus didesain aman, risiko kecelakaan di jalan tetap ada. Kerusakan fasilitas khusus (rampa atau lift) juga bisa membahayakan pengguna. ● Mitigasi: Memiliki prosedur operasional standar (SOP) yang ketat untuk keselamatan, melakukan inspeksi rutin pada armada, dan memberikan pelatihan berkala kepada pengemudi dan pendamping tentang penanganan darurat dan pertolongan pertama. Dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko ini secara proaktif, TRANSIGRAK dapat terus berjalan dengan efektif dan berkelanjutan.

3.6 QUICKWIN SMART ENVIRONMENT

Tabel 3. 6 Profil Quickwins Smart Environment

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
1. Nama Singkat Inovasi	Gerakan 1 Kalurahan/Kelurahan, 1 Bank Sampah Induk Nama singkat yang diberikan kepada inovasi untuk keperluan intern maupun ekstern dapat berupa: **1.** Singkatan dari nama program/kegiatan/produk layanan atau bentuk inovasi lain **2.** Nama populer yang menarik dan terkini untuk memudahkan promosi dan memotivasi pengembangan dan implementasi **3.** Dapat berupa penamaan sementara saja sebelum diimplementasikan secara luas. Pada tahap awal bisa belum ditetapkan.
2. Penjelasan singkat	Gerakan 1 Kalurahan/Kelurahan, 1 Bank Sampah Induk, merupakan sebuah gerakan dalam upaya meminimalisir timbulan sampah, menggeser pengelolaan sampah mulai dari Hulu dan Tengah, dengan memberdayakan masyarakat. Saat ini sampah yang masuk TPA (Hilir) berkisar 30-35 ton per hari, sehingga volume sampah yang masuk ke TPA akan overload, maka kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah mengurangi sampah yang masuk ke TPA Banyuroto. Dengan gerakan ini, diharapkan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dikelola oleh masyarakat dan selesai ditingkat Kelurahan/Kalurahan dan sampah yang masuk ke TPA hanya sampah residu saja.
3. Status Saat Ini a. Kode status b. Persentase Selesai c. Penjelasan	Kode Status dalam siklus manajemen inovasi **1.** Volume sampah semakin hari semakin meningkat seiring aktifitas masyarakat yang semakin banyak serta pertumbuhan penduduk yang terus bertambah **2.** 1. Kebutuhan/masalah dalam proses perumusan 2. Ide/konsep inovasi awal dalam proses penulisan/penggambaran 3. Rencana pembangunan/implementasi dalam pembuatan 4. Inovasi dan komponen pendukungnya dalam pembangunan 5. Implementasi Inovasi sedang berlangsung 6. Evaluasi dan rencana pengembangan lebih lanjut sedang berlangsung Persentase Penyelesaian (progres waktu/pekerjaan) 1% sd. 100% dalam kode status dimaksud (bukan keseluruhan inovasi)

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
	Keterangan tambahan status (url)
4. Manfaat dari inovasi	**1.** Mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA melalui kegiatan pemilahan, pengolahan, dan daur ulang. **2.** Mengembangkan sistem sirkular ekonomi (circular economy) di tingkat lokal. **3.** Memudahkan koordinasi dan monitoring karena setiap kalurahan/kelurahan memiliki bank sampah induk. **4.** Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
5. Keunikan / kreativitas	Gerakan 1 Kalurahan, 1 Bank Sampah Induk" hadir sebagai terobosan kreatif dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Keunikannya terletak pada pemerataan kelembagaan: setiap kalurahan memiliki bank sampah induk sebagai pusat gerakan lingkungan, yang tidak hanya menampung sampah, tetapi juga menghubungkan berbagai bank sampah unit di dusun, sekolah, dan komunitas. Dengan pendekatan ekonomi kreatif, sampah diubah menjadi tabungan, produk bernilai tambah, hingga sumber pendapatan baru. Lebih dari sekadar solusi lingkungan, gerakan ini membangun budaya partisipasi warga, transparansi tata kelola, dan ekosistem sirkular ekonomi di tingkat lokal. Inovasi ini menjadikan pengelolaan sampah sebagai gerakan sosial yang inspiratif, mudah direplikasi, dan berkelanjutan."
6. Kemitraan	Kelompok pengelola sampah
7. Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	Mendorong terciptanya eco-product unggulan di tiap kalurahan/kelurahan (misalnya kompos, kerajinan plastik daur ulang, paving block ramah lingkungan).
8. Strategi Menjaga Keberlangsungan	- Membentuk struktur organisasi bank sampah induk yang jelas, lengkap dengan SOP pengelolaan. - Program training of trainers agar setiap bank sampah induk mampu mendampingi unit-unit di bawahnya.
9. Sumber daya yang digunakan	1. SDM - Pengurus Bank Sampah - Masyarakat/warga - Pendamping teknis (DLH, LSM, akademisi) 2. Sumber Daya Finansial 3. Sumber Daya Fisik/ Material

Butir Pengisian Formulir	Penjelasan
	- Sarana transportasi (gerobak motor, mobil *pick-up*, gerobak sampah). - Fasilitas pengolahan (mesin pencacah plastik, mesin pencacah organik/kompos, timbangan, meja sortir). - Lahan atau bangunan untuk sekretariat/rumah bank sampah induk. - Tempat penyimpanan sementara sampah (gudang) 4. Sumber Daya Teknologi & Informasi - Perangkat komputer/laptop dan jaringan internet. - Media komunikasi dan kampanye (spanduk, pamflet, media sosial). 5. Sumber Daya Sosial & Kelembagaan - Dukungan kelembagaan dari pemerintah desa/kelurahan. - Jejaring dengan bank sampah unit di RT/RW, sekolah, dan komunitas - Kemitraan dengan pelaku daur ulang, UMKM, dan pengepul.
10. Analisa Risiko	Resiko : - Rendahnya kesadaran warga untuk memilah sampah dan menabung di bank sampah - Pengurus bank sampah kurang kompeten atau regenerasi kader lemah - Keterbatasan sarana (mesin, gudang, alat angkut) - Hasil sampah anorganik/produk daur ulang tidak terserap pasar Mitigasi : - Edukasi berkelanjutan (sosialisasi, lomba, kampanye kreatif), insentif nyata (tabungan bisa ditukar sembako/layanan publik) - Pelatihan rutin, program kaderisasi (melibatkan pemuda), - Pengadaan bertahap melalui dana desa/CSR, optimalisasi aset lokal, kolaborasi dengan DLH untuk peminjaman fasilitas - Membangun jejaring dengan pengepul, industri daur ulang, marketplace online, dan bazar lokal

BAB IV
MANAJEMEN RESIKO QUICKWINS

Bab keempat pada buku quickwins akan membahas terkait manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu rangkaian sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisa, menangani sekaligus melakukan mitigasi dalam menghadapi risiko yang mungkin muncul dalam aktivitas tertentu. Melalui proses manajemen risiko, diharapkan program unggulan yang akan dijalankan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang optimal dan sesuai dengan harapan pada saat perencanaan.

Proses pertama dalam manajemen risiko adalah identifikasi. Risiko yang teridentifikasi kemudian dituliskan dan diklasifikasi berdasarkan lima pilar sebagaimana Gambar 4.1berikut:

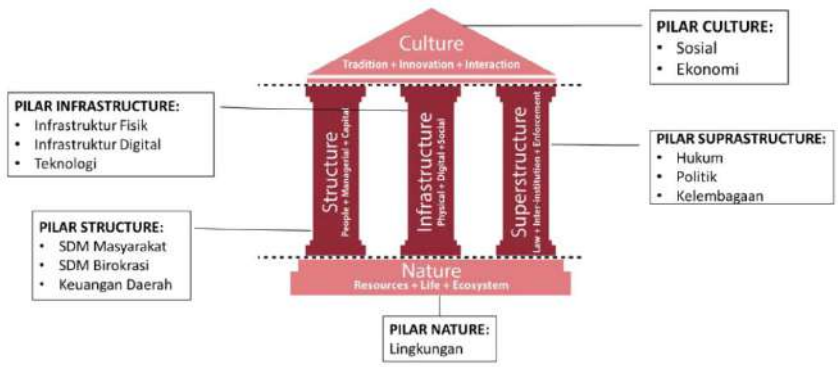

Gambar 4. 1 Pilar Manajemen Risiko
Sumber: Panduan Penyusunan Masterplan Smart City

Identifikasi risiko juga dilengkapi dengan Dampak risiko, kerawanan, kontrol yang ada saat ini, pemilik risiko, dan risiko positif. Setelah risiko yang mungkin muncul diidentifikasi, hal yang dilakukan selanjutnya adalah menganalisa risiko. Analisa risiko pada quickwins smart city dilakukan dengan memberikan nilai pada dampak risiko dan kemungkinan risiko. Kemungkinan dan dampak risiko dinilai sesuai dengan indikator berikut:

Tabel 4. 1 Penjelasan Kemungkinan Risiko

Tingkat	Kemungkinan	Deskripsi
1	Kecil	Kemungkinan terjadi 1-2 kali dalam satu periode
2	Sedang	Kemungkinan terjadi 3-4 kali dalam satu periode

3	Besar	Kemungkinan terjadi >5 kali dalam satu periode

Tabel 4. 2 Penjelasan nilai dampak risiko

Tingkat	Dampak	Deskripsi
1	Kecil	Dampak secara finansial atau non finansial tidak terlalu serius, tidak menyebabkan banyak masalah atau kerusakan
2	Sedang	Dampak secara finansial atau non-finansial besar atau punya pengaruh untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut.
3	Besar	Dampak secara finansial atau non-finansial sangat buruk, serius, atau kerusakan yang tidak dikehendaki

Nilai tersebut kemudian akan menentukan status risiko apakah risiko termasuk berisiko rendah, sedang, atau tinggi. Adapun matriks risiko dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4. 2 Matriks Nilai Risiko
Sumber: Panduan Penyusunan Masterplan Smart City

Setelah risiko, dampak, hingga status diidentifikasi, hal yang dilakukan selanjutnya adalah menyusun perencanaan terkait penanganan risiko dan mitigasi risiko yang juga dilampirkan pada kertas kerja manajemen risiko. Penanganan risiko pada kertas kerja manajemen risiko meliputi penanganan risiko, rencana kontrol, penanggung jawab, target waktu/frekuensi, dan kebutuhan sumber daya. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat menjadi panduan bagi penanggung jawab program dalam menghadapi risiko yang ada, sehingga keberlangsungan program dapat terjaga. Kolom terakhir pada kertas kerja manajemen risiko quick wins smart city berisikan mitigasi risiko yang dibagi menjadi dua: mitigasi struktural, dan mitigasi non-struktural.

Sub-bab berikutnya akan berisikan pembahasan manajemen risiko Quickwins berdasarkan masing-masing dimensi smart city:

4.1 Manajemen Risiko Quickwins Smart Governance

Manajemen risiko Quickwins Smart Governance terdiri atas informasi Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Penanganan Risiko, dan Mitigasi Risiko sebagaimana diuraikan pada program inovasi Quickwins Smart Governance.

4.1.1 Program Eling Pajak Daerah

Elektronifikasi Layanan dan Integrasi Pajak Daerah adalah transformasi digital dalam pengelolaan pajak daerah yang membuat pembayaran dan pelaporan semakin mudah, mendorong peningkatan transaksi non-tunai sesuai capaian ETPD, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan, serta menumbuhkan kesadaran atas kewajiban perpajakan daerah.

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko Smart Governance mengacu pada parameter risiko Smart City seperti dibawah ini.

Tabel 4. 3 Identifikasi Risiko Quick Wins Smart Governance

ID	Kategori	Sub kategori	Risiko
R-1	Nature	N/A	N/A
R-2	Infrastruktur	Infrastruktur digital	Keterbatasan Jaringan Internet
R-3		Keamanan jaringan	Serangan Keamanan Informasi
R-4	Struktur	Update aplikasi	Aplikasi tidak terupdate sesuai kebutuhan masyarakat
R-5		SDM pengelola aplikasi	SDM pengelola layanan Eling Pajak tidak proaktif
R-6		Integrasi aplikasi	Kendala/ gangguan pada layanan terintegrasi (Bank BPD, BPN dan SPLP) akan menyebabkan kendala pada Pajak Daerah
R-7	Superstruktur	N/A	N/A
R-8	Culture	Literasi Digital	Masyarakat tidak mau menggunakan sistem informasi

Focus Group Discussion Smart City Kulonprogo, diolah

2. Analisis Risiko

Analisis risiko Smart Governance mengacu pada parameter risiko Smart City dan Penilaian ini dilakukan dengan menyatakan dua dimensi risiko, yaitu kemungkinan dan dampak, dalam bentuk angka yang dapat diperbandingkan, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4. 4 Analisis Risiko Quick Wins Smart Governance

ID	Kategori	Sub kategori	Risiko	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko
R-1	Nature	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
R-2	Infrastruktur	Infrastruktur digital	Keterbatasan Jaringan Internet	1	1	Rendah
R-3		Keamanan jaringan	Serangan Keamanan Informasi	2	2	Sedang
R-4	Struktur	Update aplikasi	Aplikasi tidak terupdate sesuai kebutuhan masyarakat	1	2	Rendah
R-5		SDM pengelola aplikasi	SDM pengelola layanan Eling Pajak tidak proaktif	1	2	Rendah
R-6		Integrasi aplikasi	Kendala/ gangguan pada layanan terintegrasi (Bank BPD, BPN dan SPLP) akan menyebabkan kendala pada Pajak Daerah	1	3	Sedang
R-7	Superstruktur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
R-8	Culture	Literasi Digital	Masyarakat tidak mau menggunakan sistem informasi	1	2	Rendah

Focus Group Discussion Smart City Kulonprogo, diolah

3. Penentuan Ranking Risiko

Setelah dilakukan analisis risiko, maka dilakukan penetuan ranking risiko yang diurutkan berdasarkan risiko paling besar ke kecil.

Tabel 4. 5 Penentuan Ranking Risiko Quick Wins Smart Governance

ID	Risiko	Tingkat Ranking Risiko (Dari paling besar ke kecil)
R-1	N/A	N/A
R-2	Keterbatasan Jaringan Internet	2
R-3	Serangan Keamanan Informasi	1
R-4	Aplikasi tidak terupdate sesuai kebutuhan masyarakat	4
R-5	SDM pengelola layanan Eling Pajak tidak proaktif	5
R-6	Kendala/ gangguan pada layanan terintegrasi (Bank BPD, BPN dan SPLP) akan menyebabkan kendala pada Pajak Daerah	3
R-7	N/A	N/A
R-8	Masyarakat tidak mau menggunakan sistem informasi	6

Focus Group Discussion Smart City Kulonprogo, diolah

4. Penanganan Risiko

Penanganan risiko dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu, Penanggungjawab, Target waktu/frekuensi, dan kebutuhan sumber daya.

Tabel 4. 6 Penanganan Risiko Quick Wins Smart Governance

ID	Risiko	Penanggungjawab	Target Waktu/Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya
R-1	N/A	N/A	N/A	N/A
R-2	Keterbatasan Jaringan Internet	Dinas Kominfo, Provider	1 bulan	SDM, Hardware, Software
R-3	Serangan Keamanan Informasi	Dinas Kominfo	1 tahun	SDM, Hardware, Software
R-4	Aplikasi tidak terupdate sesuai	BKAD, Kominfo	1 bulan	SDM, Hardware, Software

ID	Risiko	Penanggungjawab	Target Waktu/Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya
	kebutuhan masyarakat			
R-5	SDM pengelola layanan Eling Pajak tidak proaktif	BKAD, Kominfo	7 jam	SDM
R-6	Kendala/ gangguan pada layanan terintegrasi (Bank BPD, BPN dan SPLP) akan menyebabkan kendala pada Pajak Daerah	BKAD, Pengelola layanan BPD, BPN, Dinas Kominfo	3 bulan	Kominfo, BKAD
R-7	N/A	N/A	N/A	N/A
R-8	Masyarakat tidak mau menggunakan sistem informasi	BKAD	7 hari	SDM. Hardware, Anggaran Sosialisasi

Focus Group Discussion Smart City Kulonprogo, diolah

5. Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu, Mitigasi Struktural dan Mitigasi Non-Struktural.

Tabel 4. 7 Mitigasi Risiko Quick Wins Smart Governance

ID	Risiko	Mitigasi Struktural	Mitigasi Non-struktural
R-1	N/A	N/A	N/A
R-2	Keterbatasan Jaringan Internet	Penyediaan jaringan internet secara bertahap di daerah terutama blankspot area Pemeliharaan atau kerusakan perangkat jaringan	N/A
R-3	Serangan Keamanan Informasi	Implementasi standar keamanan sesuai potensi kerentanan	Peningkatan kesadaran atas keamanan digital

ID	Risiko	Mitigasi Struktural	Mitigasi Non-struktural
R-4	Aplikasi tidak terupdate sesuai kebutuhan masyarakat	N/A	Pemantauan aplikasi untuk meningkatkan kualitas layanan
R-5	SDM pengelola layanan Eling Pajak tidak proaktif	Penyusunan SOP layanan dalam jaringan	Penguatan SDM dan Tim Pengelola
R-6	Kendala/ gangguan pada layanan terintegrasi (Bank BPD, BPN dan SPLP) akan menyebabkan kendala pada Pajak Daerah	N/A	Penguatan koordinasi antar stakeholder eksternal intergasi aplikasi
R-7	N/A	N/A	N/A
R-8	Masyarakat tidak mau menggunakan sistem informasi	N/A	Edukasi dan Literasi Digital pada Wajib Pajak maupun masyarakat umumnya Pendampingan dan layanan konsultasi bagi Wajib Pajak

Focus Group Discussion Smart City Kulonprogo, diolah

4.2 Quickwins Smart Branding

Manajemen risiko Quickwins Smart Branding terdiri atas informasi Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Penanganan Risiko, dan Mitigasi Risiko sebagaimana diuraikan berdasarkan masing-masing program inovasi Quickwins Smart Branding.

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko Smart Branding mengacu pada parameter risiko Smart City seperti dibawah ini.

Tabel 4. 8 Identifikasi Risiko Quick Wins Smart Branding

ID	Kategori	Sub kategori	Risiko
R-1	*Nature*	Cuaca Ekstrem	Angin kencang, hujan deras, kabut tebal, atau pohon tumbang
R-2	Infrastruktur	Digital (TIK)	Kendala jaringan internet
R-3		Sarana Kerja	Tidak dapat mengolah data kedalam GIS
R-4	Struktur	SDM	Tim teknis yang mempunyai pemahaman tentang SIMTARUKU terbatas

R-5		Keuangan	Anggaran tidak memadai untuk menunjang kegiatan pemetaan lahan-lahan strategis di Kulon Progo
R-6	Superstruktur	Kebijakan	Terbatasnya lahan untuk investasi
R-7	*Culture*	Sosial	Pemaham masyarakat terkait investasi masih rendah

Focus Group Discussion Smart City Kulonprogo, diolah

2. Analisis Risiko

Analisis risiko Smart Branding mengacu pada parameter risiko Smart City dan Penilaian ini dilakukan dengan menyatakan dua dimensi risiko, yaitu kemungkinan dan dampak, dalam bentuk angka yang dapat diperbandingkan, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4. 9 Analisis Risiko Quick Wins Smart Branding

Focus Group Discussion Smart City Kulonprogo, diolah

3. Penentuan Ranking Risiko

Setelah dilakukan analisis risiko, maka dilakukan penetuan ranking risiko yang diurutkan berdasarkan risiko paling besar ke kecil.

Tabel 4. 10 Penentuan Ranking Risiko Quick Wins Smart Branding

Focus Group Discussion Smart City Kulonprogo, diolah

4. Penanganan Risiko

Penanganan risiko dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu, Penanggungjawab, Target waktu/frekuensi, dan kebutuhan sumber daya.

Tabel 4. 11 Penanganan Risiko Quick Wins Smart Branding

ID	Risiko	Tingkat Ranking Risiko (Dari paling besar ke kecil)
R-1	Angin kencang, hujan deras, kabut tebal, atau pohon tumbang	5
R-2	Kendala jaringan internet	3
R-3	Tidak dapat mengolah data kedalam GIS	4
R-4	Tim teknis yang mempunyai pemahaman tentang SIMTARUKU terbatas	2
R-5	Anggaran tidak memadai untuk menunjang kegiatan pemetaan lahan-lahan strategis di Kulon Progo	1
R-6	Terbatasnya lahan untuk investasi	6
R-7	Pemaham masyarakat terkait investasi masih rendah	7

			SIMTARUKU terbatas			
R-5		Keuangan	Anggaran tidak memadai untuk menunjang kegiatan pemetaan lahan-lahan strategis di Kulon Progo	2	2	4
R-6	Superstr uktur	Kebijakan	Terbatasnya lahan untuk investasi	2	2	4
R-7	Culture	Sosial	Pemaham masyarakat terkait investasi masih rendah	2	2	4

ID	Risiko	Penanggungjawab	Target Waktu/Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya
R-1	Angin kencang, hujan deras, kabut tebal, atau pohon tumbang	DPMPTSPKP	Setiap bulan	DPMPTSPKP
R-2	Kendala jaringan internet	DPMPTSP	Setiap bulan	Dinas Kominfo sebagai pengelola jaringan
R-3	Tidak dapat mengolah data kedalam GIS	DPMPTSP	Setahun sekali	DPMPTSPKP
R-4	Tim teknis yang mempunyai pemahaman tentang	DPMPTSPKP	Per Triwulan	DPTR sebagai pengelola SIM

	SIMTARUKU terbatas			
R-5	Anggaran tidak memadai untuk menunjang kegiatan pemetaan lahan-lahan strategis di Kulon Progo	DPMPTSPKP	Setahun sekali	DPMPTSPKP
R-6	Terbatasnya lahan untuk investasi	DPMPTSPKP	Setahun sekali	DPMPTSPKP
R-7	Pemaham masyarakat terkait investasi masih rendah	DPMPTSPKP	Semester sekali	DPMPTSPKP

Focus Group Discussion Smart City Kulonprogo, diolah

5. Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu, Mitigasi Struktural dan Mitigasi Non-Struktural.

Tabel 4. 12 Mitigasi Risiko Quick Wins Smart Branding

ID	Risiko	Mitigasi Struktural	Mitigasi Non-struktural
R-1	Angin kencang, hujan deras, kabut tebal, atau pohon tumbang	N/A	Berkoordinasi dengan Kapanewon dan Kalurahan setempat
R-2	Kendala jaringan internet	N/A	Berkoodinasi dengan Dinas Kominfo
R-3	Tidak dapat mengolah data kedalam GIS	N/A	Berkoordinasi dengan BAPERIDA dan BKAD
R-4	Tim teknis yang mempunyai pemahaman tentang SIMTARUKU terbatas	N/A	Berkoordinasi dengan Dinas PTR untuk melakukan pembinaan
R-5	Anggaran tidak memadai untuk menunjang kegiatan pemetaan lahan-lahan strategis di Kulon Progo	N/A	Pengusulan anggaran prioritas kepada TAPD melalui Bappeda
R-6	Terbatasnya lahan untuk investasi	N/A	Koodinasi dengan lintas OPD/Kementerian/ Lembaga
R-7	Pemaham masyarakat terkait investasi masih rendah	N/A	Pengusulan anggaran prioritas kepada TAPD melalui Bappeda untuk sosialisasi

Focus Group Discussion Smart City Kulonprogo, diolah

4.2 MANAJEMEN RISIKO QUICKWINS SMART ECONOMY

Manajemen risiko Quickwins Smart Economy terdiri atas informasi Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Penanganan Risiko, dan Mitigasi Risiko sebagaimana diuraikan berdasarkan masing-masing program inovasi Quickwins Smart Economy.

4.2.1 PROGRAM SMART FARMING AGRICULTURE GREEN HOUSE MELON

Smart Farming Agriculture Greenhouse melon merupakan salah satu upaya teknologi berbudidaya tanaman melon, mengacu pada penggunaan teknologi dan data untuk mengoptimalkan lingkungan rumah kaca demi hasil melon yang lebih baik. Teknologi ini meliputi sensor untuk mengontrol suhu, kelembapan, cahaya, dan nutrisi, sistem irigasi otomatis, serta pemantauan kualitas udara untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas melon secara konsisten. adapun metode yang biasa digunakan menggunakan system polybag dengan media tanam yang digunakan cocopeat atau dengan sistem hidroponik. Dengan sistem greenhouse, petani dapat lebih mudah mengatur suhu, kelembaban, serta intensitas cahaya yang diperlukan oleh tanaman, sehingga hasil panen menjadi lebih maksimal dan berkualitas tinggi. Penanaman atau budidaya Melon dengan smart Farming Agriculture Greenhouse bertujuan untuk lebih dapat mengendalikan lingkungan tumbuhnya dan menghindarkan tanaman dari serangan hama dan penyakit sehingga pertumbuhannya akan optimal dan hasil panennya bagus tanpa pengaruh musim atau waktu tanam. Budidaya melon dengan sistem smart farming greenhouse cukup efektif dan efisien karena dapat memanfaatkan lahan yang sempit, atau di sekitar perumahan. Disamping hal tersebut jenis benih melon yang digunakan menggunakan jenis bibit kelas premium sehingga nilai jual di pasaran lebih tinggi dan stabil karena segmen pasar utama yang dituju adalah masyarakat ekonomi menengah keatas dan pasar – pasar modern. Dengan pendekatan ini greenhouse melon tidak hanya meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen, tetapi juga menjadi contoh nyata bagaimana pertanian bisa maju, modern dan berkelanjutan.

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko Smart Economy mengacu pada parameter risiko Smart City seperti dibawah ini.

Tabel 4. 13 Identifikasi Risiko Quick Wins Smart Economy

ID	Kategori	Sub kategori	Risiko
R-1	**Infrastruktur**	**Infrastruktur Fisik**	Gedung tempat budidaya mengalami kebakaran atau bencana alam
R-2		Sarana Kerja	Jaringan listrik dan instalasi penyiraman mati
R-3		SDM	Peralatan penunjang produksi mengalami kerusakan
R-4		Keuangan	Umur Teknis Infrastruktur Fisik 10 tahun

ID	Kategori	Sub kategori	Risiko
R-5		**Infrastruktur Digital (TIK)**	Aplikasi smart greenhouse berbasis internet tidak bisa digunakan di beberapa lokasi
R-6		Sosial	Sistem aplikasi smart farming down atau tidak bisa diakses
R-7	**Struktur**	**SDM (Petugas)**	Petani pengelola greenhouse kurang memahami sistem smart greenhouse dan budidaya melon
R-8		**SDM (Masyarakat)**	Masyarakat sekitar kurang mengerti manfaat smart greenhouse dalam budidaya melon
R-9		**Keuangan Daerah**	Anggaran tidak memadai untuk menunjang kegiatan pengembangan greenhouse
R-10	**Kultur**	**Sosial**	Mindset masyarakat petani tidak mendukung pelaksanaan program (pembangunan greenhouse dan aplikasi smart)
R-11	**Suprastruktur**	**Regulasi Pemerintah Pusat**	Keberlanjutan smart greenhouse terhenti
R-12			Kegiatan Pengembangan smart greenhouse tidak bisa menjadi fokus utama
R-13	**Nature**	**Kesehatan tanaman melon**	tanaman melon terkena penyakit

2. Analisis Risiko

Analisis risiko Smart Branding mengacu pada parameter risiko Smart City dan Penilaian ini dilakukan dengan menyatakan dua dimensi risiko, yaitu kemungkinan dan dampak, dalam bentuk angka yang dapat diperbandingkan, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4. 14 Analisis Risiko Quick Wins Smart Economy

ID	Kategori	Sub kategori	Risiko	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko
R-1	**Infrastruktur**	**Infrastruktur Fisik**	Gedung tempat budidaya mengalami kebakaran atau bencana alam	2	3	3
R-2		Digital (TIK)	Jaringan listrik dan instalasi penyiraman	2	2	2

ID	Kategori	Sub kategori	Risiko	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko
			mati			
R-3		Sarana Kerja	Peralatan penunjang produksi mengalami kerusakan	2	2	4
R-4		SDM	Umur Teknis Infrastruktur Fisik 10 tahun	4	3	12
R-5		**Infrastruktur Digital (TIK)**	Aplikasi smart greenhouse berbasis internet tidak bisa digunakan di beberapa lokasi	2	3	6
R-6	Superstruktur	Kebijakan	Sistem aplikasi smart farming down atau tidak bisa diakses	2	3	6
R-7	**Struktur**	**SDM (Petugas)**	Petani pengelola greenhouse kurang memahami sistem smart greenhouse dan budidaya melon	1	1	1
R-8		**SDM (Masyarakat)**	Masyarakat sekitar kurang mengerti manfaat smart greenhouse dalam budidaya melon	1	3	6
R-9		**Keuangan Daerah**	Anggaran tidak memadai untuk menunjang kegiatan pengembangan greenhouse	2	2	4
R-10	**Kultur**	**Sosial**	Mindset masyarakat petani tidak mendukung pelaksanaan program (pembangunan greenhouse dan aplikasi smart)	2	2	4
R-	**Suprastr**	**Regulasi**	Keberlanjutan smart	2	2	4

ID	Kategori	Sub kategori	Risiko	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko
11	**uktur**	**Pemerintah Pusat**	greenhouse terhenti			
R-12			Kegiatan Pengembangan smart greenhouse tidak bisa menjadi fokus utama	2	3	6
R-13	**Nature**	**Kesehatan tanaman melon**	tanaman melon terkena penyakit	2	3	9

Focus Group Discussion Smart City Kulonprogo, diolah

3. Penentuan Ranking Risiko

Setelah dilakukan analisis risiko, maka dilakukan penentuan ranking risiko yang diurutkan berdasarkan risiko paling besar ke kecil.

Tabel 4. 15 Penentuan Ranking Risiko Quick Wins Smart Economy

Focus Group Discussion Smart City Kulonprogo, diolah

4. Penanganan Risiko

Penanganan risiko dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu, Penanggungjawab, Target waktu/frekuensi, dan kebutuhan sumber daya.

Tabel 4. 16 Penanganan Risiko Quick Wins Smart Economy

ID	Risiko	Penanggungjawab	Target Waktu/Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya
R-1	Gedung tempat budidaya mengalami kebakaran atau bencana alam	Bidang Penyuluhan dan Prasarana DPP KP selaku Bidang Penyuluhan dan Prasarana prasarana produksi tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Setiap musim tanam	Alat Pemadam Api Ringan (APAR), petugas pemadam kebakaran
R-2	Jaringan listrik dan instalasi penyiraman mati	Bidang Penyuluhan dan Prasarana DPP KP selaku Bidang	Setiap musim tanam	Sarana dan prasarana pendukung di

ID	Risiko	Tingkat Ranking Risiko (Dari paling besar ke kecil)
R-1	Gedung tempat budidaya mengalami kebakaran atau bencana alam	3
R-2	Jaringan listrik dan instalasi penyiraman mati	4
R-3	Peralatan penunjang produksi mengalami kerusakan	6
R-4	Umur Teknis Infrastruktur Fisik 10 tahun	11
R-5	Aplikasi smart greenhouse berbasis internet tidak bisa digunakan di beberapa lokasi	8
R-6	Sistem aplikasi smart farming down atau tidak bisa diakses	7
R-7	Petani pengelola greenhouse kurang memahami sistem smart greenhouse dan budidaya melon	5
R-8	Masyarakat sekitar kurang mengerti manfaat smart greenhouse dalam budidaya melon	10
R-9	Anggaran tidak memadai untuk menunjang kegiatan pengembangan greenhouse	1
R-10	Mindset masyarakat petani tidak mendukung pelaksanaan program (pembangunan greenhouse dan aplikasi smart)	2
R-11	Keberlanjutan smart greenhouse terhenti	9
R-12	Kegiatan Pengembangan smart greenhouse tidak bisa menjadi fokus utama	12
R-13	Tanaman melon terkena penyakit	13

ID	Risiko	Penanggungjawab	Target Waktu/Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya
		Penyuluhan dan Prasarana prasarana produksi tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan		gedung
R-3	Peralatan penunjang produksi mengalami kerusakan	Bidang Sarana DPP KP selaku Bidang pelaksana Sarana Produksi dan Pengembangan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Setiap musim tanam	Sarana dan prasarana pendukung pelayanan

ID	Risiko	Penanggungjawab	Target Waktu/Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya
R-4	Umur Teknis Infrastruktur Fisik 10 tahun	Bidang Penyuluhan dan Prasarana DPP KP selaku Bidang Penyuluhan dan Prasarana prasarana produksi tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Setiap musim tanam	Sarana prasarana Greenhouse
R-5	Aplikasi smart greenhouse berbasis internet tidak bisa digunakan di beberapa lokasi	Bidang Penyuluhan dan Prasarana DPP KP selaku Bidang Penyuluhan dan Prasarana prasarana produksi tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Setiap musim tanam	Bidang Prasarana DPP KP selaku Bidang pelaksana prasarana produksi tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan
R-6	Sistem aplikasi smart farming down atau tidak bisa diakses	Bidang Penyuluhan dan Prasarana DPP KP selaku Bidang Penyuluhan dan Prasarana prasarana produksi tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Setiap musim tanam	Pihak ketiga sebagai pengelola aplikasi
R-7	Petani pengelola greenhouse kurang memahami sistem smart greenhouse dan budidaya melon	Bidang Penyuluhan dan Prasarana DPP KP selaku Bidang Penyuluhan dan Prasarana prasarana produksi tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Setiap musim tanam	Bidang Penyuluhan dan Prasarana DPP KP dan Kelompok tani sebagai pengelola kegiatan smart greenhouse
R-8	Masyarakat sekitar kurang mengerti manfaat smart greenhouse dalam budidaya melon	Bidang Penyuluhan dan Prasarana DPP KP selaku Bidang Penyuluhan dan Prasarana prasarana produksi	Setiap musim tanam	Bidang Penyuluhan dan Prasarana DPP KP dan Kelompok tani sebagai pengelola kegiatan smart greenhouse

ID	Risiko	Penanggungjawab	Target Waktu/Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya
		tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan		
R-9	Anggaran tidak memadai untuk menunjang kegiatan pengembangan greenhouse	DPP KP	Setiap musim tanam	DPP KP
R-10	Mindset masyarakat petani tidak mendukung pelaksanaan program (pembangunan greenhouse dan aplikasi smart)	DPP KP	Setiap musim tanam	Dukungan SDM DPP KP untuk pengembangan program
R-11	Keberlanjutan smart greenhouse terhenti	DPP KP	Setahun sekali	Dukungan SDM KPP KP untuk pengembangan program
R-12	Kegiatan Pengembangan smart greenhouse tidak bisa menjadi fokus utama	DPP KP	Setahun sekali	Dukungan SDM DPP KP untuk pengembangan program
R-13	Tanaman melon terkena penyakit	Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan DPP KP selaku Bidang Pelaksana Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Setiap musim tanam	Dukungan SDM DPP KP untuk pengembangan program

Focus Group Discussion Smart City Kulonprogo, diolah

5. Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu, Mitigasi Struktural dan Mitigasi Non-Struktural.

Tabel 4. 17 Mitigasi Risiko Quick Wins Smart Economy

ID	Risiko	Mitigasi Struktural	Mitigasi Non-struktural
R-1	Gedung tempat budidaya mengalami kebakaran atau bencana alam	1. Maintenance gedung yang bagus 2. Menyediakan alat pemadam kebakaran sederhana seperti water sprayer, sensor api, dan APAR di tiap lantai.	1. SOP Mitigasi jika terjadi bencana kebakaran dan bencana alam 2. Pelatihan mitigasi kebakaran (K3).
R-2	Jaringan listrik dan instalasi penyiraman mati	Perlunya penyediaan genset	N/A
R-3	Peralatan penunjang produksi mengalami kerusakan	Perlunya penyediaan peralatan sesuai usia pemakaian	N/A
R-4	Umur Teknis Infrastruktur Fisik 10 tahun	Perlunya perawatan secara periodik	SOP perawatan
R-5	Aplikasi smart greenhouse berbasis internet tidak bisa digunakan di beberapa lokasi	N/A	Menghubungi pihak ketiga untuk melakukan pengembangan aplikasi untuk diakses sementara secara offline dan maintenance secara berkala
R-6	Sistem aplikasi smart farming down atau tidak bisa diakses	N/A	Menghubungi pihak ketiga untuk melakukan maintenance secara berkala
R-7	Petani pengelola greenhouse kurang memahami sistem smart greenhouse dan budidaya melon	Menyampaikan informasi kepada pengelola kegiatan smart greenhouse	N/A
R-8	Masyarakat sekitar kurang mengerti manfaat smart greenhouse dalam budidaya melon	N/A	Sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi kepada PPL dan petani
R-9	Anggaran tidak memadai		Alokasi anggaran dan

ID	Risiko	Mitigasi Struktural	Mitigasi Non-struktural
	untuk menunjang kegiatan pengembangan greenhouse		pengamanan anggaran
R-10	Mindset masyarakat petani tidak mendukung pelaksanaan program (pembangunan greenhouse dan aplikasi smart)	N/A	Sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat petani
R-11	Keberlanjutan smart greenhouse terhenti	N/A	DPP melakukan kegiatan yang menunjang dan mendukung pengembangan smart greenhouse
R-12	Kegiatan Pengembangan smart greenhouse tidak bisa menjadi fokus utama	N/A	DPP melakukan sosialisasi dan publikasi terkait potensi daerah untuk pengembangan smart agrikulture greenhouse yang harus dijaga dan diperhatikan
R-13	Tanaman melon terkena penyakit	Petugas melakukan pemeriksaan regular untuk tanaman yang ada sehingga bisa mencegah terjadinya serangan hama dan penyakit pada tanaman	N/A

Focus Group Discussion Smart City Kulonprogo, diolah

4.3 QUICKWINS SMART LIVING

Manajemen risiko Quickwins Smart Living terdiri atas informasi Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Penanganan Risiko, dan Mitigasi Risiko sebagaimana diuraikan berdasarkan masing- masing program inovasi Quickwins Smart Living.

4.3.1 PROGRAM RANTING KUAT

RANTING KUAT: Rawat Anak Stunting Kulon Progo Agar Sehat merupakan upaya untuk membantu mengedukasi masyarakat secara luas, khususnya orang tua pasien anak stunting, tentang cara mengoptimalkan potensi yang dimiliki anak melalui intervensi gizi yang tepat. Salah satu langkah sederhana yang ditekankan adalah pemenuhan kecukupan protein harian dengan menambahkan makanan sumber protein hewani berupa telur rebus, yang bernilai ekonomis, praktis, dan mudah didapatkan.

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko Smart Living mengacu pada parameter risiko *Smart City* seperti dibawah ini.

Tabel 4. 18 Identifikasi Risiko Quick Wins Smart Living

ID	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak
R-1	***Nature***	N/A	Telur mengandung virus	Pasien terpapar virus flu burung dari unggas penghasil telur
R-2	**Infrastruktur**	N/A	N/A	N/A
R-3	**Struktur**	N/A	N/A	N/A
R-4	**Superstruktur**	N/A	N/A	N/A
R-5	***Culture***	N/A	Alergi pada anak Stunting	Pasien mengalami alergi tingkat sedang ataupun berat

2. Analisis Risiko

Analisis risiko Smart Living mengacu pada parameter risiko Smart City dan Penilaian ini dilakukan dengan menyatakan dua dimensi risiko, yaitu kemungkinan dan dampak, dalam bentuk angka yang dapat diperbandingkan, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 0.17 Analisis Risiko Quick Wins Smart Living

ID	Kategori	Sub kategori	Risiko	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko
R-1	***Nature***	N/A	Telur mengandung virus	1	3	3
R-2	**Infrastruktur**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
R-3	**Struktur**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
R-4	**Superstruktur**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
R-5	***Culture***	N/A	Alergi pada anak Stunting	N/A	N/A	N/A

Focus Group Discussion Smart City Kulonprogo, diolah

3. Penentuan Ranking Risiko

Setelah dilakukan analisis risiko, maka dilakukan penentuan ranking risiko yang diurutkan berdasarkan risiko paling besar ke kecil.

Tabel 4. 19 Penentuan Ranking Risiko Quick Wins Smart Living

ID	Risiko	Tingkat Ranking Risiko (Dari paling besar ke kecil)
R-1	Telur mengandung virus	1
R-2	N/A	
R-3	N/A	
R-4	N/A	
R-5	Alergi pada anak Stunting	2

Focus Group Discussion Smart City Kulonprogo, diolah

4. Penanganan Risiko

Penanganan risiko dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu, Penanggungjawab, Target waktu/frekuensi, dan kebutuhan sumber daya.

Tabel 4. 20 Penanganan Risiko Quick Wins Smart Living

ID	Risiko	Penanggungjawab	Target Waktu/Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya
R-1	Telur mengandung virus	Kepala Instalasi Gizi	1-5 bulan	N/A
R-2	N/A	N/A	N/A	N/A
R-3	N/A	N/A	N/A	N/A
R-4	N/A	N/A	N/A	N/A
R-5	Alergi pada anak Stunting	N/A	N/A	N/A

Focus Group Discussion Smart City Kulonprogo, diolah

5. Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu, Mitigasi Struktural dan Mitigasi Non-Struktural.

Tabel 4. 21 Mitigasi Risiko Quick Wins Smart

Focus Group Discussion Smart City Kulonprogo, diolah

ID	Risiko	Mitigasi Struktural	Mitigasi Non-struktural
R-1	Telur mengandung virus	N/A	N/A
R-2	N/A	N/A	N/A
R-3	N/A	N/A	N/A
R-4	N/A	N/A	N/A
R-5	Alergi pada anak Stunting	N/A	N/A

4.4 QUICKWINS SMART SOCIETY

Manajemen risiko Quickwins Smart Society terdiri atas informasi Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Penanganan Risiko, dan Mitigasi Risiko sebagaimana diuraikan berdasarkan masing-masing program inovasi Quickwins Smart Society.

4.4.1 PROGRAM TRANSIGRAK

TRANSIGRAK atau Transportasi Inklusif Gratis Ramah Anak Sekolah sebuah inovasi krusial yang membawa dampak signifikan bagi pendidikan dan kesejahteraan anak-anak berkebutuhan khusus di Kulon Progo. TRANSIGRAK hadir karena akses adalah kunci menuju kesetaraan. Layanan ini bukan hanya tentang memindahkan siswa dari titik A ke titik B, melainkan sebuah manifestasi dari komitmen pemerintah daerah untuk menghapus hambatan sosial dan fisik yang selama ini membatasi potensi anak-anak berkebutuhan khusus. Secara keseluruhan, TRANSIGRAK adalah lebih dari sekadar moda transportasi. Ini adalah sebuah inovasi yang merefleksikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan inklusivitas. Layanan ini menjadi pondasi penting untuk memastikan bahwa setiap anak di Kulon Progo memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih potensi maksimalnya.

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko Smart Society mengacu pada parameter risiko Smart City seperti dibawah ini.

Tabel 4. 22 Identifikasi Risiko Quick Wins Smart Society

ID	Kategori	Sub kategori	Risiko
R-1	***Nature***	**Banjir dan Tanah Longsor**	Kulon Progo memiliki daerah yang rawan banjir dan longsor
R-2		**Cuaca Ekstrem**	Angin kencang, hujan deras, atau kabut tebal
R-3		**Kondisi Topografi**	Beberapa wilayah Kulon Progo memiliki topografi yang berbukit dan curam
R-4	**Infrastruktur**	**Infrastruktur Fisik**	Memiliki topografi yang beragam,

ID	Kategori	Sub kategori	Risiko
			kondisi jalan di area pedesaan seringkali sempit, bergelombang, atau belum beraspal sempurna
R-5			Tidak semua rumah tinggal siswa berada di pinggir jalan utama, kesulitan menjangkau gang-gang kecil atau jalan buntu
R-6			Ketersediaan bengkel atau teknisi yang terlatih untuk menangani bus dengan fasilitas khusus (seperti rampa hidrolik dan lift) di Kulon Progo mungkin terbatas
R-7		**Infratsruktur Digital**	Orang tua mungkin belum sepenuhnya familiar dengan aplikasi atau sistem digital yang digunakan
R-8			Tidak semua orang tua atau siswa menggunakan smartphone untuk mengakses komunikasi lewat aplikasi
R-9			menggunakan sistem pelacakan GPS atau aplikasi untuk informasi jadwal dan rute, keandalan sistem ini sangat krusial
R-10	**Struktur**	**Struktur Organisasi dan Tata Kelola**	Miskomunikasi dan inefisiensi layanan.
R-11			ketidakpastian dan ketidakpuasan dari pihak pengguna layanan
R-12		**Struktur Sumber Daya Manusia**	Pengemudi dan pendamping bus harus memiliki kompetensi khusus
R-13			jumlah pengemudi, pendamping, atau personel perawatan bus tidak mencukupi
R-14		**Struktur Pendanaan**	Ketergantungan pada anggaran daerah
R-15			hanya mengandalkan satu sumber pendanaan, program menjadi rentan

ID	Kategori	Sub kategori	Risiko
R-16	**Superstruktur**	**Kerangka Hukum dan Kebijakan**	Perbedaan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait standar keselamatan transportasi atau layanan inklusif
R-17			rentan terhadap perubahan politik atau prioritas anggaran
R-18		**Kondisi Sosial dan Politik**	Legislatif (DPRD) dan pemerintah daerah sangat krusial untuk keberlanjutan program
R-19			risiko tuntutan berlebihan dari masyarakat
R-20		**Keterbatasan Anggaran dari Pemerintah Pusat**	Layanan ini bergantung pada bantuan bus dari pemerintah pusat
R-21	***Culture***	**Perilaku dan Kebiasaan Pengguna**	Kebiasaan tidak tepat waktu dapat mengganggu jadwal bus
R-22			kurangnya kesadaran untuk menjaga kebersihan bus
R-23		**Stigma dan Persepsi Sosial**	Masih ada risiko stigma sosial dari sebagian masyarakat atau bahkan dari sesama siswa
R-24			Ada risiko sebagian orang tua atau siswa tidak menghargai fasilitas yang diberikan
R-25		**Keengganan Menggunakan Layanan**	Layanan menjadi kurang efektif

2. Analisis Risiko

Analisis risiko Smart Society mengacu pada parameter risiko *Smart City* dan Penilaian ini dilakukan dengan menyatakan dua dimensi risiko, yaitu kemungkinan dan dampak, dalam bentuk angka yang dapat diperbandingkan, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4. 23 Analisis Risiko Quick Wins Smart Society

ID	Kategori	Sub kategori	Risiko	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko
R-1	***Nature***	**Banjir dan Tanah Longsor**	Kulon Progo memiliki daerah yang rawan banjir dan longsor	2	3	6
R-2		**Cuaca Ekstrem**	Angin kencang, hujan deras, atau	2	3	6

ID	Kategori	Sub kategori	Risiko	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko
			kabut tebal			
R-3		**Kondisi Topografi**	Beberapa wilayah Kulon Progo memiliki topografi yang berbukit dan curam	2	2	4
R-4	**Infrastruktur**	**Infrastruktur Fisik**	Memiliki topografi yang beragam, kondisi jalan di area pedesaan seringkali sempit, bergelombang, atau belum beraspal sempurna	2	3	6
R-5			Tidak semua rumah tinggal siswa berada di pinggir jalan utama, kesulitan menjangkau gang-gang kecil atau jalan buntu	2	3	6
R-6			Ketersediaan bengkel atau teknisi yang terlatih untuk menangani bus dengan fasilitas khusus (seperti rampa hidrolik dan lift) di Kulon Progo mungkin terbatas	3	3	9
R-7		**Infratsrukture Digital**	Orang tua mungkin belum sepenuhnya familiar dengan aplikasi atau sistem digital yang digunakan	1	3	3
R-8			Tidak semua orang tua atau siswa menggunakan smartphone untuk mengakses komunikasi lewat	2	2	4

ID	Kategori	Sub kategori	Risiko	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko
			aplikasi			
R-9			Menggunakan sistem pelacakan GPS atau aplikasi untuk informasi jadwal dan rute, keandalan sistem ini sangat krusial	1	3	3
R-10	**Struktur**	**Struktur Organisasi dan Tata Kelola**	Miskomunikasi dan inefisiensi layanan.	2	2	4
R-11			Ketidakpastian dan ketidakpuasan dari pihak pengguna layanan	2	3	6
R-12		**Struktur Sumber Daya Manusia**	Pengemudi dan pendamping bus harus memiliki kompetensi khusus	2	3	6
R-13			jumlah pengemudi, pendamping, atau personel perawatan bus tidak mencukupi	3	3	9
R-14		**Struktur Pendanaan**	Ketergantungan pada anggaran daerah	3	3	9
R-15			Hanya mengandalkan satu sumber pendanaan, program menjadi rentan	3	3	9
R-16	**Superstruktur**	**Kerangka Hukum dan Kebijakan**	Perbedaan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait standar keselamatan transportasi atau layanan inklusif	1	3	3
R-17			Rentan terhadap perubahan politik atau prioritas anggaran	3	3	9

ID	Kategori	Sub kategori	Risiko	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko
R-18		**Kondisi Sosial dan Politik**	legislatif (DPRD) dan pemerintah daerah sangat krusial untuk keberlanjutan program	3	3	9
R-19			Risiko tuntutan berlebihan dari masyarakat	2	3	6
R-20		**Keterbatasan Anggaran dari Pemerintah Pusat**	Layanan ini bergantung pada bantuan bus dari pemerintah pusat	3	3	9
R-21	***Culture***	**Perilaku dan Kebiasaan Pengguna**	Kebiasaan tidak tepat waktu dapat mengganggu jadwal bus	2	3	6
R-22			kurangnya kesadaran untuk menjaga kebersihan bus	1	2	2
R-23		**Stigma dan Persepsi Sosial**	Masih ada risiko stigma sosial dari sebagian masyarakat atau bahkan dari sesama siswa	1	1	1
R-24			Ada risiko sebagian orang tua atau siswa tidak menghargai fasilitas yang diberikan	1	3	3
R-25		**Keenggganan Mengguna kan Layanan**	Layanan menjadi kurang efektif	1	2	2

Focus Group Discussion Smart City Kulonprogo, diolah

3. Penentuan Ranking Risiko

Setelah dilakukan analisis risiko, maka dilakukan penentuan ranking risiko yang diurutkan berdasarkan risiko paling besar ke kecil.

Tabel 4. 24 Penentuan Ranking Risiko Quick Wins Smart Society

ID	Risiko	Ti115ngkat Ranking Risiko (Dar20i paling besar ke kecil)
R-1	Kulon Progo memiliki daerah yang rawan banjir dan longsor	5
R-2	Angin kencang, hujan deras, atau kabut tebal	7
R-3	Beberapa wilayah Kulon Progo memiliki topografi yang berbukit dan curam	6
R-4	Memiliki topografi yang beragam, kondisi jalan di area pedesaan seringkali sempit, bergelombang, atau belum beraspal sempurna	4
R-5	Tidak semua rumah tinggal siswa berada di pinggir jalan utama, kesulitan menjangkau gang-gang kecil atau jalan buntu	9
R-6	Ketersediaan bengkel atau teknisi yang terlatih untuk menangani bus dengan fasilitas khusus (seperti rampa hidrolik dan lift) di Kulon Progo mungkin terbatas	12
R-7	Orang tua mungkin belum sepenuhnya familiar dengan aplikasi atau sistem digital yang digunakan	17
R-8	Tidak semua orang tua atau siswa menggunakan smartphone untuk mengakses komunikasi lewat aplikasi	16
R-9	Menggunakan sistem pelacakan GPS atau aplikasi untuk informasi jadwal dan rute, keandalan sistem ini sangat krusial	10
R-10	Miskomunikasi dan inefisiensi layanan.	14
R-11	Ketidakpastian dan ketidakpuasan dari pihak pengguna layanan	13
R-12	Pengemudi dan pendamping bus harus memiliki kompetensi khusus	8
R-13	Jumlah pengemudi, pendamping, atau personel perawatan bus tidak mencukupi	3
R-14	Ketergantungan pada anggaran daerah	1
R-15	hanya mengandalkan satu sumber pendanaan, program menjadi rentan	2

ID	Risiko	Ti115ngkat Ranking Risiko (Dar20i paling besar ke kecil)
R-16	Perbedaan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait standar keselamatan transportasi atau layanan inklusif	11
R-17	Rentan terhadap perubahan politik atau prioritas anggaran	18
R-18	Legislatif (DPRD) dan pemerintah daerah sangat krusial untuk keberlanjutan program	15
R-19	Risiko tuntutan berlebihan dari masyarakat	20
R-20	Layanan ini bergantung pada bantuan bus dari pemerintah pusat	19
R-21	Kebiasaan tidak tepat waktu dapat mengganggu jadwal bus	21
R-22	Kurangnya kesadaran untuk menjaga kebersihan bus	23
R-23	Masih ada risiko stigma sosial dari sebagian masyarakat atau bahkan dari sesama siswa	22
R-24	Ada risiko sebagian orang tua atau siswa tidak menghargai fasilitas yang diberikan	24
R-25	Layanan menjadi kurang efektif	25

Focus Group Discussion Smart City Kulonprogo, diolah

4. Penanganan Risiko

Penanganan risiko dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu, Penanggungjawab, Target waktu/frekuensi, dan kebutuhan sumber daya.

Tabel 4. 25 Penanganan Risiko Quick Wins Smart Society

ID	Risiko	Penanggungjawab	Target Waktu/Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya
R-1	Kulon Progo memiliki daerah yang rawan banjir dan longsor	DISHUB	1 Tahun sekali	1) Membuat protokol operasional yang jelas, termasuk prosedur evakuasi, komunikasi, dan koordinasi dengan pihak berwenang (polisi, BPBD). 2) Rute Alternatif: Menyiapkan dan memverifikasi rute alternatif yang aman dan tidak rawan banjir. Rute ini harus

ID	Risiko	Penanggu ngjawab	Target Waktu/Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya
				sudah disosialisasikan kepada pengemudi dan pihak sekolah. 3) Peralatan Keselamatan Darurat: Setiap bus wajib dilengkapi dengan alat pemecah kaca, kotak P3K, rompi keselamatan, senter, selimut, dan air bersih untuk keadaan darurat. Untuk cuaca ekstrem seperti banjir, jaket pelampung sangat penting.
R-2	Angin kencang, hujan deras, atau kabut tebal	DISHUB	1 Tahun sekali	1) Menyusun dan mensosialisasikan Prosedur Operasional Standar (SOP) untuk berbagai skenario cuaca ekstrem, termasuk pembatalan layanan, perubahan rute, dan prosedur evakuasi. 2) Peralatan Keselamatan Darurat: Setiap bus wajib dilengkapi dengan alat pemecah kaca, kotak P3K, rompi keselamatan, senter, selimut, dan air bersih untuk keadaan darurat. Untuk cuaca ekstrem seperti banjir, jaket pelampung sangat penting.
R-3	Beberapa wilayah Kulon Progo memiliki topografi yang berbukit dan curam	DISHUB	6 bulan sekali	1) Sistem Pengereman Ganda: Dilengkapi dengan rem angin (air brake) dan rem mesin yang berfungsi optimal untuk mengendalikan kecepatan saat turunan. 2) Ban Khusus: Menggunakan ban dengan cengkeraman yang kuat (off-road tires) untuk menghindari selip di jalanan yang basah atau berbatu

ID	Risiko	Penanggungjawab	Target Waktu/Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya
R-4	Memiliki topografi yang beragam, kondisi jalan di area pedesaan seringkali sempit, bergelombang, atau belum beraspal sempurna	DISHUB	6 bulan sekali	1) Menggunakan ban dengan lapisan ganda atau ban khusus yang lebih tahan terhadap tusukan dan benturan dari kerikil atau benda tajam lainnya. 2) Peralatan Perbaikan Darurat: Setiap bus harus dilengkapi dengan peralatan dasar seperti kunci ban, dongkrak yang kuat, dan ban cadangan untuk mengatasi kerusakan ringan di jalan.
R-5	Tidak semua rumah tinggal siswa berada di pinggir jalan utama, kesulitan menjangkau gang-gang kecil atau jalan buntu	DISHUB	1 Tahun sekali	1) Koordinator Titik Kumpul: Petugas khusus yang bertugas menentukan dan mengelola titik kumpul atau halte yang strategis dan aman. Mereka harus berkomunikasi langsung dengan orang tua siswa untuk memastikan semua pihak memahami dan mematuhi jadwal. 2) Aplikasi Seluler atau Sistem Komunikasi: Mengembangkan atau menggunakan aplikasi yang memungkinkan orang tua, asisten, dan pengemudi bus untuk berkomunikasi secara *real-time*. Aplikasi ini dapat memberikan notifikasi jika bus mendekati titik kumpul atau terjadi perubahan jadwal.
R-6	Ketersediaan bengkel atau teknisi yang terlatih untuk menangani bus dengan fasilitas khusus (seperti rampa	DISHUB	1 Tahun sekali	1) Teknisi Internal Terlatih: Ini adalah kebutuhan sumber daya yang paling krusial. Layanan bus harus memiliki teknisi sendiri yang dilatih secara khusus untuk menangani perawatan.

ID	Risiko	Penanggu ngjawab	Target Waktu/Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya
	hidrolik dan lift) di Kulon Progo mungkin terbatas			2) Protokol Darurat: Membuat protokol yang sangat jelas mengenai apa yang harus dilakukan jika fasilitas khusus tidak berfungsi saat dioperasikan. Protokol ini harus mencakup cara mengoperasikan rampa secara manual, mengkomunikasikan situasi kepada tim di kantor, dan memastikan keselamatan siswa.
R-7	Orang tua mungkin belum sepenuhnya familiar dengan aplikasi atau sistem digital yang digunakan	DISHUB	1 Tahun sekali	1) Sistem Komunikasi Multisaluran: Jangan hanya mengandalkan satu aplikasi. Layanan harus menyediakan opsi komunikasi lain seperti Pesan Teks (SMS/WhatsApp): Mengirim pembaruan penting secara otomatis melalui pesan teks yang sederhana, seperti "Bus 5 menit lagi sampai.". 2) Materi Pendukung Non-Digital: Sediakan panduan cetak yang mudah dibaca, lengkap dengan gambar dan langkah-langkah sederhana untuk menggunakan aplikasi. Materi ini bisa dibagikan saat pertemuan orang tua atau di hari pertama layanan.
R-8	Tidak semua orang tua atau siswa menggunakan smartphone untuk mengakses komunikasi lewat aplikasi	DISHUB	1 Tahun sekali	1) Protokol Komunikasi Jelas: Buat prosedur standar operasional (SOP) yang mendetail untuk setiap skenario, misalnya, apa yang harus dilakukan jika bus terlambat atau jika siswa tidak ada di titik penjemputan.

ID	Risiko	Penanggu ngjawab	Target Waktu/Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya
				Prosedur ini harus mencakup cara komunikasi melalui SMS atau telepon. 2) Kartu Kontak: Bagikan kartu kecil berisi semua informasi penting, seperti nomor telepon darurat, jadwal bus, dan rute, kepada orang tua dan siswa. Ini membantu mereka mendapatkan informasi tanpa harus menggunakan teknologi digital.
R-9	Menggunakan sistem pelacakan GPS atau aplikasi untuk informasi jadwal dan rute, keandalan sistem ini sangat krusial	DISHUB	1 Tahun sekali	Protokol Komunikasi Darurat: prosedur yang jelas tentang apa yang harus dilakukan jika sistem GPS mengalami kegagalan total. Prosedur ini harus mencakup cara tim komunikasi menginformasikan kepada orang tua dan sekolah, serta cara pengemudi melaporkan lokasi secara manual.
R-10	Miskomunikasi dan inefisiensi layanan.	DISHUB	1 Tahun sekali	Platform Komunikasi Terpadu: Kembangkan atau gunakan platform digital tunggal (seperti grup pesan terenkripsi, *dashboard* daring, atau aplikasi khusus) di mana semua pihak dapat mengakses informasi yang relevan. Platform ini harus memiliki fitur untuk mengunggah pengumuman, melihat jadwal, dan mengirim pesan pribadi.
R-11	Ketidakpastian dan ketidakpuasan dari pihak pengguna layanan	DISHUB	1 Tahun sekali	1) Platform Informasi Terpusat: Sediakan satu sumber informasi resmi dan terpusat, seperti situs web atau aplikasi khusus, di mana

ID	Risiko	Penanggu ngjawab	Target Waktu/Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya
				semua kebijakan, jadwal, rute, dan standar keselamatan bisa diakses dengan mudah oleh semua pihak. Pastikan informasi di platform ini selalu diperbarui. 2) Alat Komunikasi Multisaluran: Gunakan berbagai cara untuk menyebarkan informasi agar tidak ada yang terlewat. Ini bisa termasuk email, pesan WhatsApp, atau bahkan pamflet cetak yang dibagikan kepada orang tua.
R-12	Pengemudi dan pendamping bus harus memiliki kompetensi khusus	DISHUB	1 Tahun sekali	1) Anggaran Pelatihan: Alokasikan dana khusus untuk biaya pelatihan, termasuk honorarium pelatih, materi, dan sertifikasi. 2) Pelatih Tersertifikasi
R-13	Jumlah pengemudi, pendamping, atau personel perawatan bus tidak mencukupi	DISHUB	1 Tahun sekali	1) Jumlah Staf yang Ideal:analisis kebutuhan untuk menentukan rasio ideal pengemudi, pendamping, dan personel perawatan terhadap jumlah siswa dan bus. Hal ini untuk memastikan beban kerja yang merata dan tidak berlebihan. 2) Gaji dan Tunjangan Kompetitif: Tawaran kompensasi dan tunjangan yang menarik untuk menarik dan mempertahankan personel yang berkualitas. Ini termasuk gaji yang adil, asuransi kesehatan, dan insentif kerja.

ID	Risiko	Penanggung jawab	Target Waktu/Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya
R-14	Ketergantungan pada anggaran daerah	DISHUB	1 Tahun sekali	Model Pendanaan Beragam: Kembangkan strategi untuk mencari sumber pendanaan di luar anggaran daerah. Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR): Jalin kemitraan dengan perusahaan swasta. Hibah dan Donasi: Aktif mencari hibah dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) nasional yang berfokus pada pendidikan atau hak anak. Bangun program donasi publik dari individu atau komunitas.
R-15	Hanya mengandalkan satu sumber pendanaan, program menjadi rentan	DISHUB	1 Tahun sekali	Model Pendanaan Beragam: Kembangkan model yang tidak hanya bergantung pada anggaran daerah. Kemitraan Perusahaan: Menawarkan paket kemitraan kepada perusahaan di Kulon Progo atau di luar daerah. Sebagai imbalan, perusahaan bisa mendapatkan promosi (misalnya, logo di badan bus) atau laporan dampak sosial yang dapat mereka gunakan untuk laporan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Program Donasi Publik: Buat kampanye donasi yang mudah diakses oleh individu, baik secara online maupun offline. Jelaskan secara transparan bagaimana setiap donasi akan digunakan.

ID	Risiko	Penanggu ngjawab	Target Waktu/Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya
				Hibah dan Bantuan: Aktif mencari hibah dari yayasan atau lembaga yang fokus pada kesejahteraan anak, pendidikan, atau isu disabilitas. Sistem Pelaporan Keuangan Transparan: sistem keuangan yang dapat diakses dan diaudit. Transparansi ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dengan semua pihak, terutama calon donatur dan mitra.
R-16	Perbedaan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait standar keselamatan transportasi atau layanan inklusif	DISHUB	1 Tahun sekali	Audit Kepatuhan Rutin: Lakukan audit secara berkala untuk memastikan semua operasional, termasuk standar keselamatan bus dan kualifikasi personel, telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Ini adalah langkah preventif untuk mengidentifikasi potensi masalah sebelum menjadi serius. Protokol Standar Ganda: Ketika ada perbedaan regulasi, layanan bus harus mengadopsi standar yang paling ketat dan komprehensif. Sebagai contoh, jika regulasi pusat meminta 10 fitur keselamatan dan regulasi daerah hanya 5, maka layanan harus memenuhi 10 fitur tersebut.

ID	Risiko	Penanggu ngjawab	Target Waktu/Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya
				Strategi Advokasi dan Lobi: Buat strategi untuk mengadvokasi kebijakan yang mendukung layanan inklusif. Libatkan pihak-pihak terkait, seperti perwakilan sekolah, orang tua, dan LSM, untuk bersama-sama mengajukan usulan perbaikan regulasi yang lebih harmonis.
R-17	Rentan terhadap perubahan politik atau prioritas anggaran	DISHUB	1 Tahun sekali	Rencana Strategis Jangka Panjang: rencana kerja yang detail untuk 5-10 tahun ke depan. Rencana ini harus mencakup target yang jelas, alokasi anggaran yang diproyeksikan, dan strategi untuk menghadapi perubahan politik.
R-18	Legislatif (DPRD) dan pemerintah daerah sangat krusial untuk keberlanjutan program	DISHUB	1 Tahun sekali	Strategi Kemitraan Multipihak: Jalin kemitraan formal dan non-formal dengan berbagai pihak di luar pemerintah, seperti: Sektor Swasta: Mengundang perusahaan melalui program CSR untuk menjadi mitra pendanaan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): Bekerja sama dengan LSM yang memiliki visi serupa untuk mendapatkan dukungan dan bantuan advokasi. Asosiasi Orang Tua: Libatkan orang tua dalam advokasi program. Kesaksian mereka adalah kekuatan yang sangat efektif dalam mempengaruhi

ID	Risiko	Penanggu ngjawab	Target Waktu/Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya
				kebijakan. Landasan Hukum yang Kuat: Dorong pengesahan Peraturan Daerah (Perda) yang secara eksplisit mengatur dan menjamin keberlanjutan program, termasuk alokasi anggarannya. Perda akan membuat program lebih tahan terhadap perubahan kebijakan yang tiba-tiba.
R-19	Risiko tuntutan berlebihan dari masyarakat	DISHUB	6 bulan sekali	1) Komunikasi Publik yang Proaktif: Mengedukasi masyarakat secara proaktif tentang keterbatasan layanan, alokasi anggaran, dan kriteria penentuan rute. Ini dapat dilakukan melalui media sosial, situs web, atau pertemuan langsung untuk mengelola ekspektasi publik. 2) Penyusunan Kriteria dan Aturan Layanan: Dishub harus memiliki kebijakan yang jelas dan tertulis mengenai kriteria kelayakan suatu wilayah untuk mendapatkan layanan. Kriteria ini dapat meliputi jumlah minimum siswa disabilitas di suatu area, kondisi prasarana jalan yang memungkinkan bus melintas dengan aman, dan jarak dari titik penjemputan utama.
R-20	Layanan ini bergantung pada bantuan bus dari pemerintah pusat	DISHUB	3 bulan sekali	Perencanaan Jangka Panjang: Membuat rencana strategis untuk program bus sekolah inklusif yang tidak hanya bergantung pada

ID	Risiko	Penanggu ngjawab	Target Waktu/Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya
				bantuan eksternal. Perencanaan ini harus mencakup target armada, estimasi biaya operasional, dan skema pemeliharaan mandiri. Perawatan Mandiri Armada: Menganggarkan dan menyiapkan fasilitas serta tenaga teknis untuk perawatan dan perbaikan rutin bus. Ini penting untuk memperpanjang usia pakai bus yang sudah ada agar tidak bergantung pada pengadaan unit baru. Analisis Kebutuhan Terkini: Terus melakukan evaluasi dan analisis kebutuhan untuk menentukan rute yang paling vital dan mendesak. Hal ini membantu Dishub fokus pada area prioritas jika terjadi keterbatasan armada.
R-21	Kebiasaan tidak tepat waktu dapat mengganggu jadwal bus	DISHUB	3 bulan sekali	Platform Informasi: Membuat platform komunikasi (misalnya, grup WhatsApp, aplikasi pesan, atau media sosial) untuk membagikan informasi terkini mengenai jadwal bus, penjemputan, atau adanya keterlambatan yang tidak terduga. Sistem Pelacakan Bus (GPS): Mengimplementasikan teknologi GPS pada setiap bus untuk memungkinkan Dishub dan orang tua memantau posisi bus secara

ID	Risiko	Penanggu ngjawab	Target Waktu/Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya
				real-time. Ini membantu mengurangi kecemasan dan memberikan transparansi mengenai jadwal. Sosialisasi Budaya Tepat Waktu: Mengadakan kampanye atau program edukasi berkelanjutan yang bekerja sama dengan sekolah untuk menanamkan pentingnya budaya disiplin dan ketepatan waktu pada siswa dan orang tua.
R-22	Kurangnya kesadaran untuk menjaga kebersihan bus	DISHUB	1 Tahun sekali	Penyediaan Tempat Sampah: Memasang tempat sampah yang mudah dijangkau di dalam setiap unit bus. Ini adalah langkah paling mendasar untuk memberikan kemudahan bagi penumpang agar tidak membuang sampah sembarangan. Jadwal Kebersihan Harian: Menetapkan jadwal pembersihan rutin untuk setiap bus. Armada harus dibersihkan setelah setiap shift atau setiap hari, untuk memastikan kondisi yang selalu bersih dan higienis. Media Kampanye: Menggunakan media visual yang menarik, seperti stiker atau poster di dalam bus dengan pesan yang singkat dan jelas, contohnya "Buang Sampah Pada Tempatnya" atau "Jaga Kebersihan Bersama".

ID	Risiko	Penanggu ngjawab	Target Waktu/Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya
R-23	Masih ada risiko stigma sosial dari sebagian masyarakat atau bahkan dari sesama siswa	DISHUB	1 Tahun sekali	Aturan Perilaku yang Jelas: Menetapkan dan mensosialisasikan aturan perilaku yang ketat di dalam bus, yang secara eksplisit melarang segala bentuk perundungan dan diskriminasi. Aturan ini harus disepakati bersama oleh sekolah, orang tua, dan siswa. Program Edukasi Inklusif: Dishub harus bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menyelenggarakan program edukasi atau kampanye anti-perundungan yang spesifik di dalam bus. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai disabilitas dan pentingnya menghargai perbedaan. Mekanisme Pelaporan: Menyediakan jalur komunikasi yang mudah dan aman bagi siswa atau orang tua untuk melaporkan insiden perundungan atau perilaku yang tidak pantas. Jalur ini harus menjamin kerahasiaan pelapor untuk mencegah dampak lebih lanjut.
R-24	Ada risiko sebagian orang tua atau siswa tidak menghargai fasilitas yang diberikan	DISHUB	1 Tahun sekali	Aturan yang Tegas: Menetapkan aturan yang jelas mengenai penggunaan fasilitas bus, termasuk larangan merusak atau mencoret-coret. Aturan ini

ID	Risiko	Penanggu ngjawab	Target Waktu/Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya
				harus disosialisasikan dan ditegakkan secara konsisten. Sosialisasi Berkelanjutan: Secara rutin mengadakan sosialisasi kepada siswa dan orang tua, baik di sekolah maupun melalui media sosial, tentang pentingnya menjaga fasilitas publik Mekanisme Sanksi: Menyusun mekanisme sanksi yang adil bagi pelanggar, misalnya berupa teguran, penangguhan layanan sementara, atau sanksi lain yang bersifat edukatif. Sanksi ini diterapkan setelah berkoordinasi dengan pihak sekolah. Pengawasan Aktif: Menempatkan pendamping bus yang terlatih untuk mengawasi perilaku siswa. Mereka tidak hanya memastikan keamanan, tetapi juga mengingatkan siswa untuk menjaga kebersihan dan ketertiban.
R-25	Layanan menjadi kurang efektif	DISHUB	1 Tahun sekali	Kampanye Edukasi: Melakukan kampanye yang menyoroti keunggulan layanan bus dibandingkan kendaraan pribadi. Pesan utama harus menonjolkan manfaat keamanan, biaya gratis, pengurangan polusi udara, dan kontribusi terhadap pengurangan kemacetan di sekitar sekolah.

ID	Risiko	Penanggu ngjawab	Target Waktu/Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya
				Kerja Sama dengan Sekolah: Menjalin kerja sama yang erat dengan pihak sekolah untuk mendorong siswa menggunakan bus. Pihak sekolah dapat membantu dengan mengeluarkan imbauan resmi, atau bahkan memberlakukan kebijakan yang memprioritaskan siswa pengguna bus. Publikasi Informasi: Memanfaatkan media sosial, situs web pemerintah, dan media lokal untuk mempromosikan layanan. Hal ini termasuk mempublikasikan foto atau video kegiatan di dalam bus yang menunjukkan lingkungan yang aman dan menyenangkan.

Focus Group Discussion Smart City Kulonprogo, diolah

5. Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu, Mitigasi Struktural dan Mitigasi Non-Struktural.

Tabel 4. 26 Mitigasi Risiko Quick Wins Smart Society

ID	Risiko	Mitigasi Struktural	Mitigasi Non-struktural
R-1	Kulon Progo memiliki daerah yang rawan banjir dan longsor	Pembangunan talud, drainase, tanggul, normalisasi sungai, reboisasi lahan kritis	Edukasi kesiapsiagaan bencana, simulasi evakuasi, sosialisasi jalur aman

ID	Risiko	Mitigasi Struktural	Mitigasi Non-struktural
R-2	Angin kencang, hujan deras, atau kabut tebal	Penyediaan rambu lalu lintas, penerangan jalan, peneduh/penahan angin di lokasi rawan	Informasi dini cuaca ekstrem, pelatihan pengemudi menghadapi cuaca buruk
R-3	Beberapa wilayah Kulon Progo memiliki topografi yang berbukit dan curam	Peningkatan kualitas jalan beraspal, guardrail, marka jalan, pelebaran tikungan	Edukasi keselamatan berkendara, penetapan rute alternatif aman
R-4	Memiliki topografi yang beragam, kondisi jalan di area pedesaan seringkali sempit, bergelombang, atau belum beraspal sempurna	Pembangunan/peningkatan jalan desa, perkerasan jalan	Prioritas anggaran perbaikan jalan pedesaan, koordinasi desa dan kabupaten
R-5	Tidak semua rumah tinggal siswa berada di pinggir jalan utama, kesulitan menjangkau gang-gang kecil atau jalan buntu	Penyediaan halte/penjemputan terpusat di titik strategis	Sosialisasi ke orang tua untuk mendampingi siswa ke titik penjemputan
R-6	Ketersediaan bengkel atau teknisi yang terlatih untuk menangani bus dengan fasilitas khusus (seperti rampa hidrolik dan lift) di Kulon Progo mungkin terbatas	Penyediaan bengkel khusus, peralatan hidrolik/lift	Pelatihan teknisi lokal, kerja sama dengan bengkel swasta
R-7	Orang tua mungkin belum sepenuhnya familiar dengan aplikasi atau sistem digital yang digunakan	Pengadaan perangkat sederhana di sekolah/halte	Sosialisasi penggunaan aplikasi, pelatihan singkat bagi orang tua
R-8	Tidak semua orang tua atau siswa menggunakan smartphone untuk mengakses komunikasi lewat aplikasi	Penyediaan papan informasi jadwal di halte/sekolah	Alternatif komunikasi via SMS/telepon, subsidi perangkat bagi keluarga miskin
R-9	Menggunakan sistem pelacakan GPS atau aplikasi untuk informasi jadwal dan rute, keandalan sistem ini sangat krusial	Peningkatan server & perangkat GPS, backup sistem	Monitoring berkala sistem, pelatihan operator aplikasi

ID	Risiko	Mitigasi Struktural	Mitigasi Non-struktural
R-10	Miskomunikasi dan inefisiensi layanan.	Penggunaan *dashboard* kontrol layanan	SOP komunikasi & koordinasi antar petugas, *call center*
R-11	Ketidakpastian dan ketidakpuasan dari pihak pengguna layanan	Kotak saran digital/fisik, sistem survei kepuasan	Forum komunikasi rutin dengan orang tua & siswa
R-12	Pengemudi dan pendamping bus harus memiliki kompetensi khusus	Fasilitas pelatihan berkala, sertifikasi sopir & pendamping	Standar kompetensi & evaluasi berkala
R-13	Jumlah pengemudi, pendamping, atau personel perawatan bus tidak mencukupi	Rekrutmen tambahan SDM, penambahan unit bus	Skema insentif & kesejahteraan pekerja transportasi sekolah
R-14	Ketergantungan pada anggaran daerah	Diversifikasi sumber anggaran (CSR, BUMD, dana pusat)	Advokasi kebijakan ke DPRD, efisiensi anggaran
R-15	Hanya mengandalkan satu sumber pendanaan, program menjadi rentan	Skema pembiayaan campuran (multiyears, kemitraan swasta)	Penggalangan dukungan multi-pihak (pentahelix)
R-16	Perbedaan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait standar keselamatan transportasi atau layanan inklusif	Harmonisasi aturan, sinkronisasi regulasi	Advokasi kebijakan lintas sektor, koordinasi pusat-daerah
R-17	Rentan terhadap perubahan politik atau prioritas anggaran	MOU jangka panjang, integrasi program dengan RPJMD/RPJPD	Advokasi program inklusif ke semua pihak politik
R-18	Legislatif (DPRD) dan pemerintah daerah sangat krusial untuk keberlanjutan program	Penyediaan data & analisis manfaat program	Lobi & komunikasi politik, forum koordinasi pemangku kepentingan
R-19	Risiko tuntutan berlebihan dari masyarakat	Peningkatan kapasitas layanan (penambahan armada, rute)	Sosialisasi batasan layanan & komunikasi ekspektasi masyarakat
R-	Layanan ini bergantung pada	Penyediaan	Advokasi & kerja sama dengan

ID	Risiko	Mitigasi Struktural	Mitigasi Non-struktural
20	bantuan bus dari pemerintah pusat	armada cadangan dari Pemda/CSR	Kemenhub/Pemprov
R-21	Kebiasaan tidak tepat waktu dapat mengganggu jadwal bus	Sistem monitoring kehadiran bus & siswa	Edukasi budaya disiplin waktu
R-22	Kurangnya kesadaran untuk menjaga kebersihan bus	Fasilitas tempat sampah & alat kebersihan di bus	Edukasi perilaku bersih, lomba bus terbersih
R-23	Masih ada risiko stigma sosial dari sebagian masyarakat atau bahkan dari sesama siswa	Desain bus inklusif & ramah anak	Kampanye anti diskriminasi, edukasi kesetaraan
R-24	Ada risiko sebagian orang tua atau siswa tidak menghargai fasilitas yang diberikan	Penyediaan mekanisme sanksi ringan (misal pencabutan hak jika disalahgunakan)	Edukasi etika penggunaan fasilitas, sosialisasi peraturan
R-25	Layanan menjadi kurang efektif	Evaluasi berkala program, sistem *feedback real time*	Optimalisasi manajemen operasional, perbaikan SOP

Focus Group Discussion Smart City Kulonprogo, diolah

4.5 QUICKWINS SMART ENVIRONMENT

Manajemen risiko Quickwins Smart Environment terdiri atas informasi Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Penanganan Risiko, dan Mitigasi Risiko sebagaimana diuraikan berdasarkan masing- masing program inovasi Quickwins Smart Environment.

4.5.1 Gerakan 1 Kalurahan/Kelurahan, 1 Bank Sampah Induk

Gerakan 1 Kalurahan/Kelurahan, 1 Bank Sampah Induk, merupakan sebuah gerakan dalam upaya meminimalisir timbulan sampah, menggeser pengelolaan sampah mulai dari Hulu dan Tengah, dengan memberdayakan masyarakat. Dengan gerakan ini, diharapkan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dikelola oleh masyarakat dan selesai di tingkat Kelurahan/Kalurahan dan sampah yang masuk ke TPA hanya sampah residu saja.

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko Smart Environment mengacu pada parameter risiko *Smart City* seperti di bawah ini.

Tabel 4. 27 Identifikasi Risiko Quick Wins Smart Environment

ID	Kategori	Sub kategori	Risiko
R-1	*Nature*	Alam/ Lingkungan	Bencana alam (banjir, gempa bumi, tanah longsor, puting beliung)
R-2		Topografi	Aksesibilitas pengangkutan sampah menjadi terkendala
R-3	Infrastruktur	Infrastruktur fisik	Sarana dan prasarana kurang lengkap
R-4		Lokasi Lahan yang tersedia	Luasan lahan yang digunakan kurang memadai
R-5	Struktur	SDM	Kapasitas SDM terbatas
R-6	Superstruktur	Kelembagaan	Koordinasi antar lembaga yang lemah
R-7		Jejaring Kelembagaan	Jejaring lembaga pengelola sampah lemah
R-8	*Culture*	Partisipasi masyarakat	Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat

2. Analisis Risiko

Analisis risiko *Smart Environmet* mengacu pada parameter risiko *Smart City* dan Penilaian ini dilakukan dengan menyatakan dua dimensi risiko, yaitu kemungkinan dan dampak, dalam bentuk angka yang dapat diperbandingkan, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4. 28 Analisis Risiko Quick Wins Smart Environment

ID	Kategori	Sub kategori	Risiko	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko
R-1	*Nature*	Alam/ Lingkungan	Bencana alam (banjir, gempa bumi, tanah longsor, puting beliung)	1	2	Rendah
R-2		Topografi	Aksesibilitas pengangkutan sampah menjadi terkendala	2	2	Rendah
R-3	Infrastruktur	Infrastruktur fisik	Sarana dan prasarana kurang lengkap	1	2	Rendah
R-4		Lokasi Lahan yang tersedia	Luasan lahan yang digunakan kurang memadai	2	2	Rendah
R-5	Struktur	SDM	Kapasitas SDM terbatas	1	2	Rendah
R-	Superstru	Kelembaga	Koordinasi antar	1	2	Rendah

6	ktur	an	lembaga yang lemah			
R-7		Jejaring Kelembagaan	Jejaring lembaga pengelola sampah lemah	N/A	N/A	N/A
R-8	*Culture*	Partisipasi masyarakat	Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat	2	2	Rendah

Focus Group Discussion Smart City Kulonprogo, diolah

3. Penentuan Ranking Risiko

Setelah dilakukan analisis risiko, maka dilakukan penentuan ranking risiko yang diurutkan berdasarkan risiko paling besar ke kecil.

Tabel 4. 29 Penentuan Ranking Risiko Quick Wins Smart Environment

ID	Risiko	Tingkat Ranking Risiko (Dari paling besar ke kecil)
R-1	Bencana alam (banjir, gempa bumi, tanah longsor, puting beliung)	1
R-2	Aksesibilitas pengangkutan sampah menjadi terkendala	3
R-3	Sarana dan prasarana kurang lengkap	4
R-4	Luasan lahan yang digunakan kurang memadai	5
R-5	Kapasitas SDM terbatas	6
R-6	Koordinasi antar lembaga yang lemah	7
R-7	Jejaring lembaga pengelola sampah lemah	8
R-8	Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat	2

Focus Group Discussion Smart City Kulonprogo, diolah

4. Penanganan Risiko

Penanganan risiko dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu, Penanggungjawab, Target waktu/frekuensi, dan kebutuhan sumber daya.

Tabel 4. 30 Penanganan Risiko Quick Wins Smart Environment

ID	Risiko	Penanggungjawab	Target Waktu/Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya
R-1	Bencana alam (banjir, gempa bumi, tanah longsor, puting beliung)	N/A	2026 - 2029	N/A
R-2	Aksesibilitas pengangkutan sampah menjadi terkendala	N/A	2026 - 2029	N/A
R-3	Sarana dan prasarana kurang lengkap	N/A	2026 - 2029	N/A
R-4	Luasan lahan yang digunakan kurang memadai	N/A	2026 - 2029	N/A
R-5	Kapasitas SDM terbatas	N/A	2026 - 2029	N/A
R-6	Koordinasi antar lembaga yang lemah	N/A	2026 - 2029	N/A
R-7	Jejaring lembaga pengelola sampah lemah	N/A	N/A	N/A
R-8	Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat	N/A	2026 - 2029	N/A

Focus Group Discussion Smart City Kulonprogo, diolah

5. Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu, Mitigasi Struktural dan Mitigasi Non-Struktural.

Tabel 4. 31 Mitigasi Risiko Quick Wins Smart Environment

ID	Risiko	Mitigasi Struktural	Mitigasi Non-struktural
R-	Bencana alam (banjir, gempa	- Memastikan	- membuat SOP terkait keadaan

ID	Risiko	Mitigasi Struktural	Mitigasi Non-struktural
1	bumi, tanah longsor, puting beliung)	lokasi bank sampah tidak berada di bantaran sungai, di tepi tebing/ lereng curam - Mendesain bangunan bank sampah tahan gempa (fondasi/ struktur kuat)	darurat yang disebabkan oleh bencana alam
R-2	Aksesibilitas pengangkutan sampah menjadi terkendala	Menentukan drop point/ titik kumpul sampah sementara agar memudahkan penjemputan	N/A
R-3	Sarana dan prasarana kurang lengkap	Pengadaan alat pendukung	Pemetaan kebutuhan prioritas
R-4	Luasan lahan yang digunakan kurang memadai	Optimalisasi tata ruang	SOP pengelolaan ruang (membuat aturan detail penempatan sampah, produk olahan dan administrasi agar tidak saling tumpang tindih - Rotasi pengangkutan (jadwal pengangkutan lebih sering agar sampah tidak menumpuk di lahan terbatas)
R-5	Kapasitas SDM terbatas	- Digitalisasi administrasi - Penyediaan sarana kerja yang efisien	Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM (workshop, sosialisasi) -Kemitraan dengan pihak eksternal (universitas, LSM, swasta)
R-6	Koordinasi antar lembaga yang lemah	- Membangun sekretariat/ ruang bersama untuk melakukan koordinasi/ pertemuan rutin - Digitalisasi koordinasi	Membuat jadwal komunikasi teratur (rapat bulanan)

ID	Risiko	Mitigasi Struktural	Mitigasi Non-struktural
		(penggunaan WA untuk koordinasi)	
R-7	Jejaring lembaga pengelola sampah lemah	N/A	N/A
R-8	Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat	Penyediaan sarana edukasi (papan informasi, banner tentang manfaat bank sampah)	- Sosialisasi, kampanye sosial (lomba kebersihan antar RT, - festival bank sampah)

Focus Group Discussion Smart City Kulonprogo, diolah

BAB V
PENUTUP

Masterplan Smart City Buku *Quickwins* adalah dokumen yang memuat program-program pembangunan *smart city* dalam jangka pendek. Program ini dirancang agar bisa dilaksanakan dengan cepat, memberikan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat, serta tidak memerlukan banyak sumber daya. Buku ini diharapkan menjadi panduan bagi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mempercepat terwujudnya kota cerdas sesuai dengan visi *smart city* yang telah ditetapkan.

Masterplan Smart City merupakan dokumen yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam melaksanakan pembangunan. Penyusunan dokumen ini didasarkan pada analisis kondisi geografis, kesenjangan wilayah, serta upaya penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi daerah. Selain itu, masterplan ini juga merangkum berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RPJPD Kabupaten Kulon Progo.

Pada tahap berikutnya, pelaksanaan program Quickwins dan program prioritas dapat dilakukan secara bertahap disertai proses monitoring dan evaluasi. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat sekaligus menyempurnakan keseluruhan Masterplan Smart City agar semakin optimal dan terarah dalam mewujudkan kota cerdas.

Wates, 4 Februari 2026
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN